

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berkenaan dengan jangka waktu penyusunannya, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”.

Mempertimbangkan landasan normatif sebagaimana dijelaskan di atas maka dalam rangka mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah sebagai kesinambungan proses politik daerah yang dilaksanakan secara serentak pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2015 dan pelantikan kepala daerah terpilih pada 17 Februari 2016 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran secara strategik terhadap visi-misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi serta program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa bhakti 2016-2021.

Dalam rangka penelaahan kembali (Review) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, Pelbagai agenda substansial yang mendasar dan melatarbelakangi perubahan RPJMD meliputi:

1. Kondisi makro ekonomi dunia, nasional, dan daerah yang dalam pemulihan setelah masa resesif, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya harga minyak, dan pelbagai entitas ekonomi makro

- yang mempengaruhi perekonomian dalam konstelasi dunia, nasional, maupun daerah.
2. Perubahan organisasi perangkat daerah dengan ditetapkannya Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (melandasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah) yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;
 3. Hasil pengendalian dan evaluasi sistem akuntabilitas instansi pemerintahan (SAKIP) yang merekomendasikan penyempurnaan pengukuran kinerja sesuai dengan hierarkhi kinerja antara kepala daerah, eselon II, eselon III, eselon IV, sampai dengan jabatan fungsional umum. Penjabaran pengukuran kinerja diterjemahkan dalam perumusan cascading kinerja utama daerah dalam arsitektur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tingkatan tujuan, sasaran, dan program, sedangkan sasaran operasional dan kegiatan terletak pada Rencana Strategis (Renstra) OPD.
 4. Kapasitas fiskal daerah yang mengalami peningkatan terbatas sehingga estimasi pendanaan untuk program-program prioritas pembangunan I, II, dan III membutuhkan rasionalisasi didukung *refocusing* kegiatan.
 5. Perubahan Kebijakan Strategis Nasional yang berdampak terhadap pembangunan Kabupaten Gresik seperti penyelenggaraan 100 Kabupaten/Kota Smart City, Pelaksanaan Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang SDG's, Perubahan Kebijakan Fiskal, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; dan sebagainya.
 6. Rekomendasi DPRD Kabupaten Gresik sebagai mitra kerja pemerintah daerah guna mewujudkan perencanaan pembangunan berkualitas untuk pembangunan Gresik yang lebih baik.



Gambar 1.1 Latar Belakang Penelaahan Kembali RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

Adapun substansi utama perubahan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2016-2021 meliputi perumusan dan pengukuran kinerja pada tujuan dan sasaran pembangunan; Penggabungan, penghapusan, dan penambahan nomenklatur program pembangunan; serta Kerangka kebutuhan estimasi pendanaan. Pokok-pokok penelaahan kembali RPJMD dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 1.1. Pokok-Pokok Penelaahan Kembali RPJMD

Bab	Susbtansi Pokok RPJMD	Pokok-Pokok Penelaahan Kembali RPJMD
I	Pendahuluan	-
II	Gambaran Umum Kondisi Daerah	-
III	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan	Perubahan estimasi kapasitas fiskal Daerah memperhatikan asumsi makro ekonomi
IV	Analisis Isu-Isu Strategis	Penajaman SDG'S dan isu-isu strategis lainnya seperti Gresik Smart City, Big Data, Inovasi Pelayanan Publik, Pengarustamaan Hak Anak, Dsb

V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Penlahaan Kembali Tujuan dan Sasaran dengan perubahan indikator kinerja dan estimasi target
VI	Strategi dan Arah Kebijakan	-
VII	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah	-
VIII	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	Penelaahan kembali Program dan Indikator Prgram
IX	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	Menyesuaikan Penyempurnaan Indikator Tujuan dan Sasaran dengan perubahan target

Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan, Perubahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dirumuskan berdasarkan pendekatan *teknokratis* dan *bottom up* dengan mengartikulasikan pelbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis, pelbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun provinsi. Pendekatan awal ini disusun dalam *Rancangan teknokratis* RPJMD 2016-2021 yang kemudian diselaraskan melalui pendekatan politis terhadap visi misi Kepala Daerah terpilih dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan. Proses penyelarasan ini melahirkan *Rancangan Awal* RPJMD yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi bersama satuan kerja perangkat daerah, pembahasan dalam forum konsultasi publik, hingga disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk nota kesepakatan terhadap *Rancangan* RPJMD. Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan RPJMD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara komprehensif dalam *Rancangan Akhir* RPJMD yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan bersama DPRD menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Secara substansial, Perubahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periodisasi ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025. Kesiambungan Visi, Misi, hingga program prioritas pembangunan telah diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan Nasional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, pelbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan pada lingkup lokal, nasional, hingga global.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016 -2021, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Sustainable Development Goal's dan Tindak Lanjutnya
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2032;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Secara substansial, penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 berpedoman kepada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
2. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2005 -2025 Periodesasi ketiga;
4. Keselarasan terhadap Kebijakan Tata Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;

Selain keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, RPJMD Kabupaten Gresik memperhatikan terhadap kebijakan pemerintah, isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, nasional, regional, hingga global antara lain Sustainable Development Goal’s (SDG’s), Masyarakat Ekonomi Asean, Pembangunan Responsif Perubahan Iklim, Pengarustamaan Gender, *Pro Poor* Planning Budgeting and Monitoring, dan pelbagai isu strategis lainnya.

1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Gresik dengan RPJMN 2015-2019

1.3.1.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gresik dengan RPJMN 2015-2019

Visi RPJMD Kabupaten Gresik 2016-2021 “Terwujudnya Gresik yang agamis, adil, sejahtera dan berkehidupan yang berkualitas” didasarkan pada Visi RPJMN 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Keselarasan antara Visi RPJMD Kabupaten Gresik dengan RPJMN disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Gresik dengan RPJMN 2015-2019

RPJMD Kabupaten Gresik 2016-2021	RPJMN 2015-2019

Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas	Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong
Keselarasan Visi	
Agamis	Berdaulat
Adil	Mandiri
Sejahtera	Berkepribadian
Berkehidupan yang Berkualitas	Gotong Royong

Keterangan:

→ = Mendukung/Selaras

Adapun Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Gresik dengan RPJMN 2015-2019 dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 1.2
Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Gresik dengan RPJMN 2015-2019

RPJMD Kabupaten Gresik 2016-2021	RPJMN 2015-2019
Meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dengan landasan nilai-nilai agama sebagai cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri	• Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. • Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Terwujudnya pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, profesionalitas, kejujuran, dan akuntabilitas	• Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. • Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

	penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. • Melakukan revolusi karakter bangsa.
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi daerah, penguatan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan menuju pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada kompetisi global	• Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. • Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. • Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Meningkatnya kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.	• Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

1.3.1.2 Keterkaitan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Gresik dengan Prioritas Program Nasional RPJMN

Keselarasan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Gresik dengan Prioritas Program Nasional RPJMN dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.3
 Keselarasan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Gresik dengan Prioritas Program Nasional RPJMN

1. Prioritas Nasional Peningkatan Iklim Investasi

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab/kota	PD penanggung jawab
1	Pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perijinan pusat dan daerah • Perubahan regulasi pusat dan daerah yang menghambat investasi • Pelaksanaan Harmonisasi, sinkronisasi peraturan perizinan tingkat pusat/Kementerian Lembaga dan Daerah • Penyederhanaan peraturan dan perizinan	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Promosi dan Penyediaan Layanan Informasi Penanaman Modal	PD pelaksana Urusan Penanaman Modal.
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	PD pelaksana Urusan Sekretariat Daerah.
2	Peningkatan Persaingan Usaha yang sehat • Penegakan Hukum terhadap Praktek Anti Persaingan Usaha yang Sehat • Pengawasan Kegiatan Usaha yang sesuai dengan mekanisme Persaingan Usaha	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	PD pelaksana Urusan Perdagangan

	yang Sehat • Pencegahan terhadap praktek persaingan usaha yang tidak sehat		
3	Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu • Pengembangan sistem perizinan nasional • Penyusunan SOP perizinan dan SOP PTSP sesuai standar nasional • Pemantauan PTSP di daerah	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PD Pelaksana Urusan Penunjang Sekretariat Daerah
4	Percepatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Investasi • Penyelesaian pengaduan masalah investasi	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	PD Pelaksana Urusan Penanaman Modal
5	Perencanaan investasi sektor strategis • Perencanaan Investasi Industri prioritas • Perencanaan Investasi pariwisata • Perencanaan investasi sektor maritim dan logistik • Perencanaan investasi di Kawasan Strategis Nasional • Perencanaan investasi Infrastruktur Prioritas	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya; Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; Program Perencanaan Pembangunan Daerah;	PD Pelaksana Urusan Penunjang Perencanaan
6	Peningkatan Kemudahan Berusaha • Perbaikan Kemudahan Memulai Usaha • Perbaikan Kemudahan Mendirikan Bangunan • Perbaikan Kemudahan Pendaftaran Properti • Perbaikan Kemudahan Penyambungan Listrik • Perbaikan Kemudahan Pembayaran Pajak • Perbaikan Kemudahan Peningkatan Akses Perkreditan • Perbaikan Kemudahan Penegakan Kontrak • Perbaikan Kemudahan Penyelesaian Perkara Kepailitan • Perbaikan Kemudahan Terhadap Investor Minoritas • Perbaikan Kemudahan Perdagangan Lintas Negara	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	PD Pelaksana Urusan Penanaman modal

2. **PRIORITAS NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR NON MIGAS**

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab/kota	PD penanggung jawab

1	Peningkatan Realisasi investasi berorientasi ekspor • Fasilitasi permasalahan investasi • Fasilitasi investasi industri berorientasi ekspor • Pemantauan dan pengendalian realisasi investasi berorientasi ekspor • Peningkatan promosi investasi berorientasi ekspor	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	PD pelaksana Urusan Perdagangan
2	Peningkatan ekspor produk KUMKM • Peningkatan kapasitas ekspor • Perluasan fasilitasi ekspor • Peningkatan diversifikasi dan kualitas produk • Peningkatan partisipasi KUMKM dalam jaringan/kemitraan rantai nilai		
3	Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor • Peningkatan sarana pengujian mutu dan standar • Penyediaan sistem informasi terkait standar dan mutu yang berlaku di negara tujuan ekspor • Peningkatan keberterimaan sertifikasi mutu • Pengembangan potensi ekspor daerah		
4	Penguatan market intellegence, promosi, dan asistensi ekspor • Meningkatkan promosi ekspor melalui promosi terpadu (nation branding) • Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas • Identifikasi peluang pasar produk barang dan jasa (termasuk produk kreatif dan produk halal) • Pelaksanaan market intelligence yang berkualitas		
5	Pengembangan fasilitasi ekspor • Kelancaran impor barang modal dan bahan baku untuk produksi ekspor nonmigas • Mengoptimalkan penerapan single window untuk proses ekspor-impor • Fasilitasi pembiayaan ekspor		

6	Peningkatan efektivitas kerja sama perdagangan internasional (MARKET ACCESS) • Perlindungan kepentingan nasional dari praktek-praktek perdagangan internasional yang tidak adil • Optimalisasi peran perwakilan RI di luar negeri • Peningkatan akses pasar barang olahan dan jasa Indonesia di pasar internasional • Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional • Penyelarasan hasil perundingan dengan kebijakan nasional di dalam negeri		

3. PRIORITAS NASIONAL REFORMASI AGRARIA

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Identifikasi dan Penyiapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) • Identifikasi dan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) • Identifikasi HGU yang habis masa berlakunya dan Identifikasi Tanah Terlantar • Identifikasi Tanah Milik untuk Legalisasi Aset	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset dan Barang Daerah	PD pelaksana Urusan Pertanahan PD pelaksana Urusan Penunjang Keuangan
2	Penyerahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) • Legalisasi Aset (PRONA, Lintas Sektor)		
3	Kepastian Hukum Hak Atas Tanah • Peningkatan Cakupan Peta Dasar Pertanahan • Peningkatan Cakupan Bidang Tanah Bersertifikat • Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan • Sosialisasi Peraturan Terkait Tanah Adat/Ulayat		
4	Penerimaan Juru Ukur Pertanahan • Analisis Jabatan • Penerimaan PNS Juru Ukur • Penyediaan Anggaran		
5	Pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan		

	Umum - Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah - Pembentukan Kelembagaan Penyediaan Tanah		

4. **PRIORITAS NASIONAL REFORMASI FISKAL**

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Optimalisasi Penerimaan Negara - Optimalisasi Perpajakan - Optimalisasi PNBP	Program Peningkatan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset dan Barang Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	PD pelaksana Urusan Penunjang Keuangan
2	Peningkatan Kualitas Belanja Negara - Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial yang tepat sasaran - Peningkatan efektivitas transfer ke daerah dan Dana Desa	Belanja tidak langsung: - Bantuan sosial - Bantuan Keuangan Kepada Desa	PD pelaksana Urusan Penunjang Keuangan
3	Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur		

5. **PRIORITAS NASIONAL REVOLUSI MENTAL**

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik - Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum - Penegakan Hukum yang Berkualitas - Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan - Pendidikan Politik dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	PD pelaksana Urusan Sekretariat Daerah
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	PD pelaksana Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
2	Reformasi Birokrasi Pemerintahan - Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi Jumlah Ijin dan Transparan - Promosi Layanan Elektronik menuju E-budgeting, E-reporting dan Complaint Center	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PD pelaksana Urusan Sekretariat Daerah

	• Penerapan Sistem Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan		
3	Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa • Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan • Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri • Internalisasi Nilai – nilai dan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	PD pelaksana Urusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	PD pelaksana Urusan Perdagangan
4	Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa • Pendidikan Berbasis Karakter • Lingkungan Satuan Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan • Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Keragaman dan Toleransi • Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya	Program Pendidikan Anak Usia Dini	PD pelaksana Urusan Pendidikan
		Program Pendidikan Non Formal	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
5	Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan • Toleransi dan Hidup Rukun • Peran Lembaga Agama, Keluarga dan Media Publik Dalam Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti • Gotong Royong, Kesukarelawan dan Solidaritas	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
		Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya	PD pelaksana Urusan Kebudayaan
		Program Pengembangan Nilai Budaya dan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	PD pelaksana Urusan Sekretariat Daerah (sub urusan Kesbangpol)

6. PRIORITAS NASIONAL PELAYANAN PENDIDIKAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas • Kurikulum yang Andal • Sistem Penilaian yang Komprehensif dan Kredibel • Tenaga Pendidik yang Profesional dan Kompeten	Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar	PD pelaksana Urusan Pendidikan

		Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
2	Penyediaan Guru dan Dosen yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata • Revitalisasi LPTK • Peningkatan Profesionalisme Guru dan Dosen • Distribusi dan Pemerataan Guru dan Dosen • Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Dosen • Peningkatan Kapasitas Akademik Dosen	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PD pelaksana Urusan Pendidikan
3	Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan • Sekolah Berbudaya Mutu • Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah • Assessment Mutu Satuan Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	PD pelaksana Urusan Pendidikan
4	Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif • Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus • Bantuan Biaya Operasional Pendidikan • Bantuan Peningkatan Prestasi	Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	PD pelaksana Urusan Pendidikan
5	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas • Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan • Afirmasi Sarpras Khusus, Daerah 3T dan PT Luar jawa • Peningkatan Peran Pemda	Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal	PD pelaksana Urusan Dinas Pendidikan

	• Kebutuhan Infrastruktur Pendukung	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
6	Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter • Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan • Penciptaan lingkungan pendidikan berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan	Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	PD pelaksana Urusan Dinas Pendidikan
7	Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi • Penguatan Otonomi PT • Pengembangan Prodi Inovatif • Akreditasi Perguruan Tinggi/Prodi • Perlindungan Prodi Langka Peminat • Penguatan Kerjasama Antar Perguruan Tinggi		
8	Peningkatan Kapasitas Iptek, Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi • Penyediaan Infrastruktur Iptek di Perguruan Tinggi • Peningkatan Kapasitas Penelitian Dosen dan Mahasiswa • Penerbitan Jurnal Ilmiah, Publikasi dan Sitasi • Perolehan HAKI dan Paten dari Litbang PT • Penerapan Hasil Litbang PT di masyarakat		
9	Peningkatan Relevansi Pendidikan • Pengabdian Masyarakat • Pendidikan Vokasi • Pendidikan kewirausahaan • Penguatan Kemitraan dengan Dunia usaha – Dunia Industri		

7. PRIORITAS NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu	PD pelaksana Urusan

	• Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Pembiayaan Kesehatan • Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan • Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Berkualitas • Penguatan Sistem Informasi, Manajemen dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan • Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan	Melahirkan dan Anak Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Standarisasi pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Kesehatan	Kesehatan
2	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat" • Advokasi Regulasi Gerakan Masyarakat Sehat • Kampanye Hidup Sehat • Aktivitas Fisik dan Konektivitas AntarModa Transportasi • Konsumsi Pangan Sehat • Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini • Lingkungan Sehat • Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat	PD pelaksana Urusan Kesehatan

	• Penurunan Stress dan Keselamatan Berkendara		
3	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat • Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak • Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan • Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini • Manajemen dan pencegahan penyakit • Peningkatan sanitasi dan akses air bersih • Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana • Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan Kampanye	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	PD pelaksana Urusan Kesehatan
4	Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi • Peningkatan pelayanan KB • Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB • Pembinaan Remaja • Pembangunan Keluarga • Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi	Program Keluarga Berencana Program Keluarga Sejahtera Program Pengendalian Penduduk	PD pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

8. PRIORITAS NASIONAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru • Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst) • Penyediaan Perumahan Baru MBR • Fasilitasi Keswadayaan Masyarakat • Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR • Optimalisasi Peran BUMN terkait perumahan	Program Pengembangan Perumahan	PD pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman kumuh • Pembangunan berbasis komunitas (Perbedayaan masyarakat yang berkelanjutan) • Percepatan pendataan (baseline dan nett kumuh) dan perencanaan • Penguatan kelembagaan di daerah dalam upaya penangkalan kumuh • Konsolidasi lahan (land consolidation) untuk penanganan permukiman kumuh	Program Lingkungan Sehat Perumahan	PD pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi • Penyediaan Infrastruktur Air minum dan Sanitasi terintegrasi • Peningkatan Demand Terhadap Hygiene dan Sanitasi (PHBS) • Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PD pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Program Penyediaan dan	PD pelaksana

	• Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air) • Simpan Air (Pengelolaan Air yang Berkelanjutan) • Hemat Air (Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Air Minum)	Pengolahan Air Baku	Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

9. **PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN**

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain • Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain • Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan • Pengendalian Konversi Lahan Padi • Reformasi Agraria • Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit • Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih • Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan	PD pelaksana Urusan Pertanian
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	PD pelaksana Urusan Pekerjaan umum dan tata ruang
2	Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat • Pemantauan dan pengendalian harga pangan • Cadangan Pangan Pemerintah • Pengendalian impor dan tata niaga pangan • Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan • Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pangan	PD pelaksana Urusan Pangan
3	Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat • Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi • Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan) • Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi • Peningkatan kualitas dan keamanan pangan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan	PD pelaksana Urusan Pertanian
4	Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan • Penanganan Dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) • Asuransi Pertanian • Pengembangan Budidaya Adaptif • Bantuan input produksi akibat bencana	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	PD pelaksana Urusan Pertanian

10. **PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN ENERGI**

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Penyediaan Energi Primer • Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi • Perbaikan Tata Kelola Migas • Pengembangan Lapangan Migas Baru • Pengendalian Produksi Batubara	Program Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah	PD Pelaksana urusan energi dan sumberdaya mineral
2	Pengembangan Cadangan Energi • Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi • Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM dan LPG • Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak • Pembentukan Cadangan Penyangga Energi		
3	Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi • Pengembangan PLT Matahari, Mikrohidro, Angin, Arus Laut dan Nuklir • Penyempurnaan Feed In Tariff dan Subsidi EBT • Pembangunan PLTP • Pengembangan industri penunjang EBT • Pembangunan Bioenergi		
4	Peningkatan Aksesibilitas Energi • Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik • Peningkatan Kapasitas Industri dan Komponen Dalam Negeri • Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Rumah Tangga dan Transportasi • Peningkatan Penggunaan Batubara dan Gas Dalam Negeri • Pembangunan Receiving Terminal dan Regasifikasi Unit, serta Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	PD Pelaksana urusan Sekretariat Daerah
5	Efisiensi dan Konservasi Energi • Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO) • Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien • Dukungan Pendanaan Bagi Konservasi Energi		
6	Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Efisien, Transparan, dan Tepat Sasaran • Monitoring dan Evaluasi Kualitas dan Verifikasi Volume BBN untuk Biofuel • Optimalisasi Kebijakan Tarif dan Subsidi Energi dan Listrik		

11. PRIORITAS NASIONAL KELAUTAN DAN KEMARITIMAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	PD PENANGGUNG JAWAB

1	Konektivitas (tol) laut dan industri maritime • Pembangunan/pengembangan pelabuhan umum • Pengembangan Layanan Pelayaran nasional • Insentif Usaha dan Iklim Investasi • Penguatan SDM Perkapalan dan Kepelautan • Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan • Peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	PD Pelaksana urusan Perhubungan
2	Industri Perikanan dan Hasil Laut • Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut • Pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan • Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan • Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan • Penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi iptek • Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta karantina ikan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	PD Pelaksana urusan Kelautan dan Perikanan
3	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari • Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir • Konservasi pesisir dan laut • Rehabilitasi kawasan pesisir dan laut • Pengendalian pencemaran pesisir dan laut • Pengelolaan Wisata Bahari	Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)	PD Pelaksana urusan Kelautan dan Perikanan
4	Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam • Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur sentra nelayan dan pelaku KP lainnya • Peningkatan akses terhadap bantuan/stimulan, akses modal dan bantuan sarana produksi • Peningkatan keterampilan dan perlindungan nelayan • Sistem informasi kelautan dan perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	PD Pelaksana urusan Kelautan dan Perikanan
5	Penanggulangan dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut • Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut • Penguatan lembaga, aparaturnya, dan penegak hukum, serta masyarakat • Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Perijinan Kapal Perikanan, Peningkatan Ketaatan serta Penanganan Pelanggaran	Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)	PD Pelaksana urusan Kelautan dan Perikanan
6	Perundingan Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan	Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan	PD Pelaksana urusan

	Pulau-Pulau Kecil • Pemetaan dan Perundingan penetapan batas laut • Penamaan dan pendaftaran pulau • Pengelolaan pulau-pulau kecil	Pulau-Pulau Kecil (WP3K)	Kelautan dan Perikanan

12. **PRIORITAS NASIONAL ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN**

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya • Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial • Keahlian Pekerja • Layanan Informasi Pasar kerja • Iklim Investasi • Infrastruktur Padat Pekerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	PD Pelaksana urusan Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	PD Pelaksana urusan Penanaman Modal
2	Perkuatan basis perekonomian perdesaan • Lembaga Keuangan berbasis komunitas • Keterampilan teknis • Penyediaan sarana prasaran pendukung kegiatan ekonomi • Pendampingan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	PD Pelaksana urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Transmigrasi
3	Pengembangan kewirausahaan • Peningkatan Produktivitas	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	PD Pelaksana urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

4	Perluasan pelayanan dasar • Penyediaan Layanan Dasar • Peningkatan Tata Kelola • Pendampingan Masyarakat	Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	PD Pelaksana urusan Pendidikan
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Standarisasi pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Kesehatan Kesehatan	PD Pelaksana urusan Kesehatan
5	Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bantuan Sosial) • Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) • Subsidi pangan masyarakat berpenghasilan rendah (RASKIN/RASTRA) • Bantuan iuran jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) • Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu	Belanja tidak langsung: • Bantuan Sosial	

	Indonesia Pintar (KIP) Bantuan sosial di luar sistem keluarga		
6	Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil - Keterampilan Usaha - Akses Pembiayaan - Kualitas Produk dan Akses Pemasaran - Koperasi dan Kemitraan Usaha - Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	PD pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

13. **PRIORITAS NASIONAL DAERAH PERBATASAN**

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Pengembangan 10 PKSN sebagai Pusat Pengembangan Perbatasan Negara - Pembangunan sarana dan prasarana di kota pusat pertumbuhan - Pembangunan sarpras kemaritiman penunjang pengelolaan sumber daya laut - Pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi perdagangan di kota pusat pertumbuhan - Regulasi perdagangan ekspor dan impor melalui perbatasan negara - Pembangunan industri hilir dan sarana science park dan techno park penunjang kawasan industri - Pembangunan industri hilir dan Industri Kecil Menengah - Peningkatan potensi komoditas unggulan perbatasan - Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan	Program Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	PD pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan tata ruang
2	Membuka Isolasi Lokpri, peningkatan Sarpras, SDM dan Ekonomi Perbatasan - Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka isolasi - Pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan, TIK, dan penyiaran - Pembangunan Sarana dan Prasana Pemasaran - Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan pelatihan SDM - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan - Pembangunan perumahan, kawasan permukiman layak huni dan penyediaan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	PD pelaksana Urusan Perhubungan
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	PD pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika

	air baku Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan		
3	Pengembangan PLBN Terpadu - Pembangunan Infrastruktur/ Gedung CIQS Terpadu - Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan <i>Custom, Imigrasi, Quarantine and Security</i> - Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Pegawai PLBN - Penyediaan Jalan Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PD pelaksana Urusan Pekerjaan umum dan tata ruang
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	PD pelaksana Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Pengamanan Sumber Daya dan Batas Wilayah Darat, laut dan udara - Kerjasama internasional pengamanan kawasan perbatasan - Pembangunan Pos TNI dengan fasilitas pengamanan penunjang - Patroli pengamanan batas wilayah - Pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara		
5	Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Sosial – Ekonomi - Penataan kelembagaan diplomasi perundingan - Penguatan koordinasi materi dan instrumen perundingan antar K/L - Penyelesaian segmen batas negara - Pembuatan peta kawasan perbatasan, database regulasi, dan dokumen teknis pengelolaan perbatasan	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum	PD pelaksana Urusan Sekretariat Daerah

14. **PRIORITAS NASIONAL DAERAH TERTINGGAL**

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Pengembangan Ekonomi Lokal - Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan - Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry - Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM - Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran dan Kerjasama Antar Daerah - Perizinan Usaha dan Penguatan Kelembagaan Usaha - Peningkatan Kapasitas Petani/Nelayan/Pelaku Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Program Peningkatan Produksi Perternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan	PD pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2	Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik - Pembangunan Ketenagalistrikan - Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan - Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan - Pemenuhan perumahan dan Permukiman layak huni - Penyediaan air bersih dan sanitasi - Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	PD pelaksana Urusan Pendidikan
		Program Standarisasi pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Kesehatan	PD pelaksana Urusan Kesehatan
		Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PD pelaksana Urusan Pekerjaan umum dan tata ruang
		Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan	PD pelaksana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3	Peningkatan SDM dan Iptek - Penyediaan dan Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidikan dan Kesehatan - Pembangunan SMK dan Politeknik - Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja - Inovasi Daerah, Pengembangan Inkubator Bisnis dan Technopark berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PD pelaksana Urusan Pendidikan
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	PD pelaksana Urusan Tenaga Kerja
		Program Penelitian dan Pengkajian Masalah-masalah Strategis Pembangunan Daerah	PD pelaksana Urusan penelitian dan pengembangan
4	Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas - Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Pembangunan Dermaga - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bandara - Pengadaan Moda Transportasi Darat, Udara, Laut dan ASDP	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi	PD pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

	• Pelayanan Angkutan Perintis • Pembangunan Perkeretaapian • Penyediaan Akses Telekomunikasi	Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Kelurahan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	

15. **PRIORITAS NASIONAL DESA DAN KAWASAN PERDESAAN**

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi • Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih) • Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan • Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi • Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah • Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan	PD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum dan tata Ruang
2	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk Permukiman Transmigrasi • Penataan BUMDesa dan Penguatan Kelembagaan BUMDesa • Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM • Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan & pengembangan Teknologi Tepat Guna • Penguatan Permodalan dan Akses Pasar	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	PD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	PD Pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
3	Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota • Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata • Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah • Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa • Pengembangan lembaga keuangan di daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha • Pembangunan dan/atau Pemeliharaan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan • Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi • Pembangunan Suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri • Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing • Peningkatan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah • Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan inovasi dan reatiftas lokal	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan	PD Pelaksana Urusan Pertanian
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	PD Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Transmigrasi • Distribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan • Penataan ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi • Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim • Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan	PD Pelaksana urusan pertanian

	dan teknologi tepat guna • Penguatan hak desa dalam pengelolaan hutan dan kerjasama pengelolaan/ shareholding	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	
		Program Pencegahan Dini, Penanggulangan Korban Bencana Alam, dan Rehabilitasi Pasca Bencana	PD Pelaksana urusan Ketentraman, Ketertiban Umum,& Perlindungan Masyarakat
5	Penguatan Pemerintahan Desa • Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam tata kelola pemerintahan desa • Penataan wilayah, penataan kewenangan dan administrasi pemerintahan desa • Pembinaan kelembagaan pemerintahan desa • Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan aset pemerintahan desa • Peningkatan kapasitas desa dalam penyediaan informasi desa dan evaluasi perkembangan desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	PD Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi • Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa • Pendidikan di desa berbasis ketrampilan dan kewirausahaan • Peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kader kesehatan • Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas • Penyiapan teknologi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	PD Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Pengawasan Implementasi UU Desa Secara Sistematis, Konsisten dan Berkelanjutan • Konsolidasi Lintas Kementerian/ Lembaga dalam perencanaan, pengendalian dan pembangunan desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	PD Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Transmigrasi

	- Sosialisasi dan penyusunan revisi berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa - Distribusi, supervisi, pemantauan DD dan ADD agar berjalan secara efektif dan efisien		
		Program Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.	PD Pelaksana Urusan Kecamatan

16. **PRIORITAS NASIONAL PERKOTAAN**

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan Sistem Perkotaan - Pengaturan KSN Perkotaan - Peningkatan Konektivitas	Program Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	PD Pelaksana Urusan Pekerjaan umum dan Tata ruang
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;	PD Pelaksana Urusan penunjang perencanaan
2	Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman, dan Layak Huni, serta Tertata Baik - Tersedianya sarana permukiman - Tersedianya sarana dan prasarana dasar perkotaan - Tersedianya sistem transportasi publik - Penanggulangan kemiskinan perkotaan - Pendidikan - Kesehatan	Program Pengembangan Perumahan	PD Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	PD Pelaksana Urusan Perhubungan
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	PD Pelaksana Urusan Pendidikan
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	PD Pelaksana Urusan Kesehatan
3	Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana - Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan - Green transportation - Green waste - Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Perkotaan - Membangun ketahanan kota (urban resilience)	Program Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	PD Pelaksana Urusan umum dan tata ruang
4	Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK - City Branding - Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) - Pembangunan kapasitas masyarakat yang	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	PD Pelaksana Urusan Komunikasi dan Informatika
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	

	inovatif, kreatif dan produktif	Program Penelitian dan Pengkajian Masalah-masalah Strategis Pembangunan Daerah	PD Pelaksana Urusan Penelitian dan Pengembangan
5	Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota - Sistem, peraturan dan prosedur Kota Berkelanjutan - Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota - Membentuk dan Memperkuat status Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan - Basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;	PD Pelaksana Urusan penunjang perencanaan

17. **PRIORITAS NASIONAL STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN**

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Pelayanan Prima Kepolisian - Optimalisasi Pelayanan Kepolisian - Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian - Penguatan Sistem Kepolisian - Profesionalisme SDM		
2	Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman - Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF - Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan - Pembangunan Sarpras Alutsista TNI - Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI - Penguatan Industri Pertahanan		
3	Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security) - Teknologi Persandian dan Siber - Operasional Pengamanan Persandian dan Siber - Peningkatan Kapasitas SDM Sandi	Program Pembangunan Persandian Daerah	PD pelaksana urusan Persandian
4	Keamanan dan Keselamatan Laut yang Terkendali - Sarpras Pendukung Keamanan Laut - Sistem Informasi Kamla yang Terpadu - Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum - Pengembangan SDM Keamanan Laut		
5	Lingkungan Bersih Penyalahgunaan Narkoba - Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba - Pencegahan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba - Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba - Litbang Penanganan Narkoba		
6	Deteksi Dini dan Bebas Ancaman	Program Kemitraan	PD Pelaksana

	Terorisme • Deteksi Dini dan Penanggulangan Terorisme • Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi • Teknologi Intelijen	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Urusan Sekretariat Daerah

18. **PRIORITAS NASIONAL KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM**

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Terkait HAM • Penegakan HAM • Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu • Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat • Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Pendidikan HAM bagi Apgakum	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	PD Pelaksana urusan penunjang sekretariat daerah
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	PD Pelaksana urusan Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Penegakan Hukum yang Berkualitas • Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang • Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan • Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum • Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif • Sistem Peradilan Perdata yang Mudah & Cepat • Budaya Hukum	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	PD Pelaksana urusan penunjang sekretariat daerah
3	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Anti Korupsi • Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi • Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi • Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	PD Pelaksana urusan penunjang sekretariat daerah

19. **PRIORITAS NASIONAL KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS DIPLOMASI**

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan • Pelaksanaan Roadmap Perundingan Perbatasan		

	• Penanganan Transnational Organized Crime Melalui Kerjasama Maritim • Pengelolaan Konflik Laut Tiongkok Selatan		
2	Pemantapan Peran di ASEAN • Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan Keamanan • Penguatan Peran dalam Pilar Sosial dan Budaya • Penguatan Peran dalam Pilar Ekonomi		
3	Penguatan Lembaga Demokrasi • Penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu • Peningkatan peran parpol melalui bantuan keuangan parpol • Revisi UU Kepemiluan	Belanja tidak langsung: • Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	PD Pelaksana urusan Keuangan
4	Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik • Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal • Pengawasan partisipatif masyarakat terhadap pemilu • Pusat Pendidikan Pemilih • Peningkatan Peran Forum-Forum Dialog Masyarakat	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	PD Pelaksana urusan Ketentrama ,Ketertiban Umum,& Perlindungan Masyarakat
5	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik • Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik • Peningkatan Kualitas Konten Informasi Publik • Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Program Fasilitasi Kehumasan Pemerintahan Daerah	PD Pelaksana urusan penunjang Sekretariat Daerah
		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	PD Pelaksana urusan Komunikasi dan Informatika
6	Pencegahan Konflik Sosial dan Penanggulangan Terorisme • Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di kalangan aparatur negara melalui pelaksanaan renaksi • Peningkatan peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) • Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik • Peningkatan upaya deradikalisasi dan kontra radikal terorisme • Peningkatan penegakan hukum pada organisasi terorisme	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	PD Pelaksana urusan Ketentrama ,Ketertiban Umum,& Perlindungan Masyarakat
7	Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan • Peningkatan Kapasitas Diplomasi • Peningkatan Peran dalam Forum Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan di Tingkat Internasional • Pemanfaatan rezim internasional bidang energy dan food security • Peningkatan Peran dalam Kerja Sama Teknik • Peningkatan Diplomasi Ekonomi di		

	Tingkat Bilateral		
8	Penguatan Diplomasi Soft Power • Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran diplomasi publik • Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang informasi dan pelayanan media • Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di luar Negeri		
9	Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri • Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri		

20. **PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI**

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	PD PENANGGUN G JAWAB
1	Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan • Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi • Pengawasan yang Independen dan Profesional • Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pendidikan Kedinasan	PD Pelaksana Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Penguatan Pengawasan Daerah	PD Pelaksana Urusan Inspektorat
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	PD Pelaksana urusan penunjang Keuangan

2	Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, fasilitasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB • Penguatan pengelolaan RB Nasional • Penguatan sistem pengadaan barang dan jasa • Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional • Penerapan Manajemen ASN • Penataan tata kelola birokrasi • Penataan kelembagaan birokrasi	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Barang Daerah	PD Pelaksana urusan Sekretariat Daerah
3	Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan • Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik • Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PD Pelaksana urusan Penunjang Sekretariat Daerah

21. **PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN KAWASAN EKONOMI (KEK)**

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan Populasi • Fasilitasi Tumbuhnya industri baru • Promosi Investasi • Tax Holiday/Tax Allowance • Kemudahan memulai usaha • Pembangunan Science dan Technopark • Pertumbuhan IKM • Penumbuhan Industri Kreatif	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	PD Pelaksana Urusan Perindustrian
		Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	
		Program Promosi dan Penyediaan Layanan Informasi Penanaman Modal	PD Pelaksana Urusan Penanaman modal
2	Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengembangan Industri Hijau Fasilitasi dan Insentif Pengembangan Infrastruktur Mutu Perbaruan Permesinan Industri Peningkatan Kemampuan Desain Produk SDM yang Kompetitif	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	PD Pelaksana Urusan Perindustrian
3	Pengembangan Kawasan Industri/KEK Penyediaan Lahan Kawasan Industri Konektivitas / Aksesibilitas Insentif Fiskal dan Non Fiskal Iklim Investasi PTSP (Penghapusan Perda Bermasalah) Penyediaan Tenaga Terampil dan Ahli (BLK, SMK, Akademi Komunitas, Politeknik)	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	PD Pelaksana Urusan Penanaman Modal
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	PD Pelaksana Urusan Pekerjaan

	Mensosialisasikan mental Kewirausahaan Ketersediaan Infrastruktur Dasar		Umum dan tata ruang
4	Pembiayaan dengan akses dan biaya kompetitif Pembiayaan Pembangunan Program Infrastruktur dan Industri Bantuan Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Tanpa Agunan Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Sentral Mengenai Suku Bunga Kredit		
5	SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin • Penyusunan NSPK SDM Industri • Peningkatan Kualitas SMK Industri • Pembangunan Akademi Komunitas dan Politeknik Industri • Pelatihan dan Sertifikasi SDM Industri		
6	Hubungan Industrial yang Bersahabat • Implementasi Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	PD Pelaksana urusan Tenaga Kerja
7	Pemberian Insentif Fiskal yang Harmonis • Inisiasi Perjanjian Kerjasama Industri Luar Negeri Bilateral dan Multilateral • Insentif bagi Industri Bernilai Tambah Tinggi		
8	Ketersediaan Energi dan Infrastruktur • Peningkatan Aksesibilitas / Konektivitas • Peningkatan Kapasitas Ketenagalistrikan dan BBM • Ketersediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PD Pelaksana urusan Pekerjaan umum dan tata ruang
		Program Pengembangan Perumahan	PD Pelaksana urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Pertanian Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Kelautan Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Petrokimia Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Migas		
10	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif • Kebijakan Pembangunan Ekraf • Perlindungan HKI • Akses ke sumber modal • Akses ke pasar		

22. **PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN PARIWISATA**

No		PROGRAM RPJMD	PD

	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KAB/KOTA	PENANGGUN G JAWAB
1	Promosi Wisata Indonesia - Promosi produk wisata - Peningkatan Citra Pariwisata Nasional - Promosi melalui Media Sosial, Elektronik dan Cetak	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan	PD pelaksana Urusan Pariwisata
2	Pengembangan Destinasi Wisata Penyiapan daya tarik wisata Pembangunan sarana dan prasarana transportasi Pembangunan fasilitas umum dalam kawasan Penyediaan BBM dan Listrik Kelembagaan Pengembangan destinasi Koordinasi pembangunan destinasi	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
3	SDM dan Kelembagaan Pariwisata Penyusunan NSPK SDM dan Kelembagaan Peningkatan kualitas SMK pariwisata Peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Pariwisata Peningkatan kualitas pendidikan pariwisata di Luar Sekolah Pariwisata Pelatihan dan sertifikasi SDM Pariwisata		
4	Penciptaan Ekonomi Lokal dan Sikap Masyarakat Sosialisasi perilaku masyarakat yang ramah dan bersahabat Penumbuhan industri dan usaha kecil pariwisata		
5	Layanan Kemudahan Wisatawan Mancanegara Masuk Kemudahan pintu masuk udara Kemudahan pintuk masuk laut		
6	Jaminan Keselamatan, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Destinasi Wisata Penciptaan destinasi wisata yang aman dan tertib Penciptaan destinasi wisata sehat		

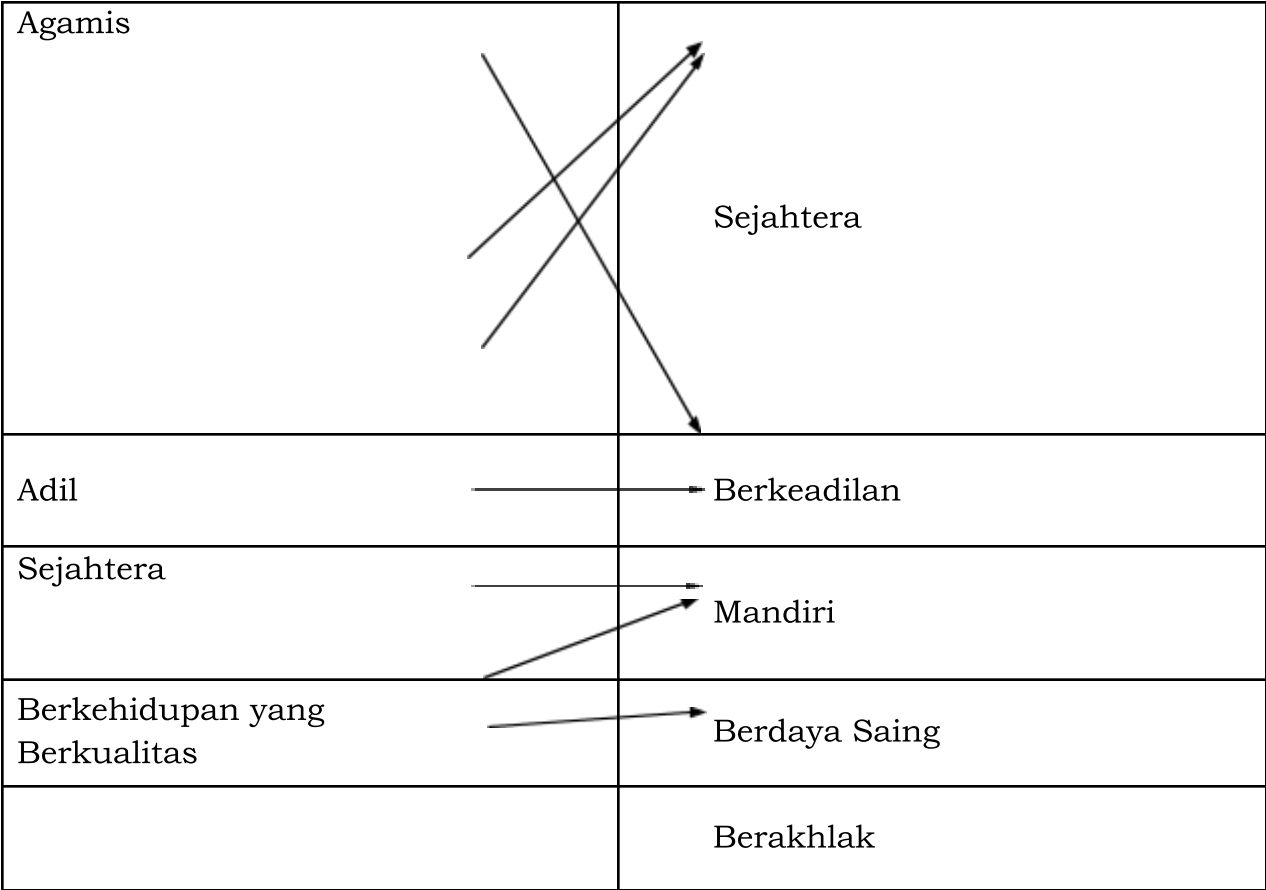
1.3.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Gresik dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Gresik dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.3

Keterkaitan Visi Kabupaten Gresik dengan RPJMD Provinsi jawa Timur

RPJMD 2016-2021	RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019
Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas	Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak



Keterangan:

→ Mendukung/Selaras

Adapun Keterkaitan Misi Kabupaten Gresik dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Keterkaitan Misi Kabupaten Gresik dengan RPJMD Provinsi jawa Timur

RPJMD 2016-2021	RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019
MISI KE-1 Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;	MISI 5: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial
MISI KE-2 Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha	MISI 3: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang MISI 4: Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik

melalui tata kelola pemerintahan yang baik	
MISI KE-3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;	MISI 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi
MISI KE-4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.	MISI 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

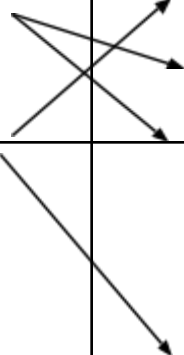
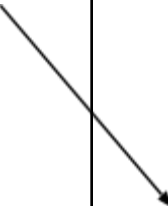
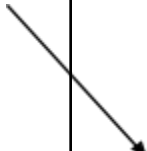
1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Gresik

1.3.3.1 Keterkaitan Visi Misi RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Gresik

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 selaras dengan dokumen RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.5
Keterkaitan Visi RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Gresik

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016 - 2021	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005 – 2025
VISI “TERWUJUDNYA GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, SEJAHTERA, DAN BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS”	VISI “GRESIK YANG AGAMIS, DINAMIS, DEMOKRATIS, ADIL, AMAN, DAN SEJAHTERA”
Agamis	Agamis

Adil	
Sejahtera	
Berkehidupan yang Berkualitas	
	Aman
	Sejahtera

Keterangan:

—————> = Mendukung/Selaras

Tabel 1.6
 Keterkaitan Misi RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Gresik

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016 – 2021		RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)TAHUN 2005 – 2025	
Keselarasan Misi			
MISI 1	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;	MISI 1	Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berilmu, dan Berakhlmaq Mulia Menuju Kehidupan Masyarakat yang Harmonis serta meningkatkan kualitas moral aparatur.
		MISI 6	Menegakkan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Perundangan Daerah yang Akomodatif dan Aspiratif serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara merata dan proporsional.
MISI 2	Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola	MISI 2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, Profesional, Produktif, Kreatif, Responsif dan Mandiri.

	kepengelolaan yang baik;	MISI 5	Memantapkan Demokrasi Konstitusional dan Etika Politik dalam Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta meningkatkan peran serta masyarakat.
MISI 3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;	MISI 3	Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Daerah untuk Tumbuh dan Berkembang secara Berkelanjutan.
		MISI 7	Meningkatkan Kemampuan Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Mewujudkan Kondisi Lingkungan Daerah yang Tertib, Tenang dan Damai.
		MISI 8	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dan Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi.
MISI 4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.	MISI 4	Mengembangkan Sumber Daya Alam dan Buatan yang Didukung Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
		MISI 9	Meningkatkan Kesadaran dan Perilaku Konstruktif Masyarakat dalam Pendayagunaan Sumber Daya Alam secara optimal dan berkelanjutan serta Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

1.3.3.2 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Gresik

Keterkaitan antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Gresik juga dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan sasaran RPJPD yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.7

Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Gresik

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021	Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025
1. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat 2. Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran 3. Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan 4. Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global	Tewujudnya Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berilmu, dan Berakhlaq Mulia Menuju Kehidupan Masyarakat yang Harmonis serta meningkatnya kualitas moral aparaturnya Tegaknya Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Perundangan Daerah yang Akomodatif dan Aspiratif serta meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara merata dan proporsional
5. Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik 6. Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi 7. Menciptakan ketersediaan data pembangunan secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan pencapaian sasaran pembangunan sektoral daerah maupun nasional 8. Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah 9. Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah 10. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah 11. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah	Mantapnya Demokrasi Konstitusional dan Etika Politik dalam Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta meningkatnya peran serta masyarakat
12. Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah 13. Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif 14. Meningkatkan keberdayaan Ekonomi Nelayan 15. Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung	Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Daerah untuk Tumbuh dan Berkembang secara Berkelanjutan Meningkatnya Kemampuan Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Mewujudkan Kondisi

intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah 16. Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang. 17. Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu 18. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan 19. Menurunnya tingkat pengangguran 20. Memperkuat daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif 21. Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan 22. Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan 23. Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni. 24. Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa 25. Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian	Lingkungan Daerah yang Tertib, Tenteram dan Damai Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat dan Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku Konstruktif Masyarakat dalam Pendayagunaan Sumber Daya Alam secara optimal dan berkelanjutan Berkembangnya Sumber Daya Alam dan Buatan yang Didukung Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
26. Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif 27. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan 28. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, Profesional, Produktif, Kreatif, Responsif dan Mandiri

didukung optimalisasi program Keluarga Berencana 29. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender 30. Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak nak	

1.3.4 Keterkaitan Kebijakan, Strategi dan Program RPJMD Kabupaten Gresik dengan RTRW Kabupaten Gresik

Keterkaitan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Gresik dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara Kebijakan RTRW dengan Kebijakan RPJMD yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.7
 Keterkaitan Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik dengan RTRW Kabupaten Gresik

No	Kebijakan RTRW	Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik
1	kebijakan sistem perkotaan	
1.1	pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dengan membentuk hierarki kota-perkotaan dan wilayah	Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan harmonis berlandaskan Rencana Tata Ruang guna mendukung daya saing daerah, menguatkan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali didukung keselarasan dan pemerataan pembangunan.
1.2	pemerataan pembangunan dan pendorong pertumbuhan wilayah di seluruh wilayah perkotaan	Peningkatan kualitas layanan dasar infrastruktur melalui perbaikan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan, sarana prasarana penunjang, dan peningkatan keberdayaan masyarakat. Penguatan peran lintas sektor dalam meletakkan pembangunan sesuai dengan tata ruang ditunjang komprehensifitas regulasi dan validitas data. Penguatan pembangunan kawasan permukiman melalui percepatan pengentasan lingkungan kumuh, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan kemudahan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat miskin.
2	kebijakan sistem perdesaan	
2.1	pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarki	Pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh hingga pelosok desa melalui penguatan intermediary kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan

2.2	peningkatan skala pelayanan pusat permukiman perdesaan	koordinator kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.
2.3	pemantapan hubungan desa melalui integrasi fungsi kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan perkebunan	Membangun Desa, Desa Membangun
3	Kebijakan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten	
3.1	pengembangan sistem jaringan prasarana utama	Peningkatan kualitas layanan dasar infrastruktur melalui perbaikan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan, sarana prasarana penunjang, dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
3.2	pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya	

Keterkaitan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Gresik juga dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara strategi RTRW dengan strategi RPJMD yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.8
 Keterkaitan Strategi RPJMD Kabupaten Gresik
 dengan RTRW Kabupaten Gresik

No	Strategi RTRW	Strategi RPJMD Kabupaten Gresik
1	Kebijakan sistem perkotaan	
1.1	Mengembangkan sistem pusat permukiman perkotaan pada pusat regional dan sub-regional	Mewujudkan kawasan permukinan yang kondusif, inklusif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
1.2	Mengembangkan pusat regional pada PKN	
1.3	Mengembangkan pusat sub-regional pada PPK di IKK masing-masing kecamatan	
1.4	Mendorong dan mempersiapkan PKN sebagai pusat pemerintahan, fasilitas pelayanan umum, industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan	
1.5	Membentuk hierarki perkotaan mulai dari perkotaan yang berfungsi PKN dengan skala pelayanan nasional hingga perkotaan yang berfungsi sebagai PPK	
1.6	Mendorong fungsi dan peran dari perkotaan yang berfungsi sebagai PKN dan PPK melalui penyediaan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang memadai serta	Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya perencanaan melalui pengembangan kapasitas didukung intensifikasi koordinasi dalam perumusan kebijakan;

	pemantapan sistem hirarki perencanaan sarana dan prasarana wilayah	
1.7	Menata kawasan perkotaan yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing kawasan perkotaan	Penguatan basis data pembangunan infrastruktur
1.8	Memenuhi fasilitas perkotaan sesuai skala pelayanan serta peningkatan interaksi melalui pengembangan aksesibilitas antara kawasan	Peningkatan kualitas pembangunan infrastuktur diiringi <i>maintenance</i> yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur pendukung dalam pengembangan kawasan strategis meliputi Gelora Joko Samudro, WEP, dan infrastuktur lain serta penguatan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali dengan penataan kawasan religi, Islamic Centre, pusat kegiatan dan budaya Islam.
2	kebijakan dan strategi sistem perdesaan	
2.1	Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan	Reformasi pelayanan publik di perdesaan melalui pemerataan jaringan internet dan ketersediaan piranti Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2.2	Membentuk pusat pelayanan desa mulai dari pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, sampai pada pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dukungan finansial secara stimulan dan kemudahan akses terhadap lembaga keuangan formal guna pengembangan usaha atau kewirausahaan, bantuan modal, pemanfaatan teknologi, dan akses pemasaran didukung penguatan BUMDesa dan BUMaDes.
2.3	Membentuk sistem pusat permukiman perdesaan melalui penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Pembangunan kawasan perdesaan melalui penataan desa secara terpadu, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
2.4	Melengkapi pusat permukiman perdesaan dengan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi	
2.5	Mengembangkan kawasan perdesaan berbasis industri pada kawasan yang potensial	
2.6	Menyediakan infrastruktur penunjang pada kawasan perdesaan berbasis pertanian dan perkebunan sebagai pengembangan kawasan agropolitan	Peningkatan mutu dan daya saing agribisnis melalui pengembangan standardisasi hasil pertanian dengan perbaikan teknologi produksi, penerapan standar mutu komoditas, pembinaan dan pengawasan mutu produk pertanian, peningkatan kuantitas dan peran lembaga sertifikasi.
2.7	Menyediakan infrastruktur penunjang pada kawasan perdesaan berbasis perikanan sebagai pengembangan kawasan minapolitan	Peningkatan aksesibilitas petani di kawasan perdesaan terhadap inovasi teknologi pertanian, sumber-sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan

		formal, desiminasi informasi pasar dan akses pasar. Pembangunan infrstruktur pertanian secara berkelanjutan dan kolaboratif melalui penguatan peran lintas sektor.
3	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten	
3.1	Pengembangan jaringan transportasi darat	Pembangunan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan Kecamatan dan menjangkau arus perekonomian perdesaan; Penguatan sistem transpotasi intermoda maupun multimoda dalam rangka mendukung kelancaran sistem logistik daerah dan regional, dan mendukung kerja sama antar daerah; Pembangunan sarana prasarana transportasi yang ramah lingkungan; Peningkatan sumber daya perhubungan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi dan penerapan manajemen transportasi berbasis IT guna mewujudkan keselamatan hingga menuju zero accident;
3.2	Pengembangan jaringan transportasi laut	
3.3	Pengembangan jaringan transportasi udara	
3.4	Pengembangan sistem jaringan energi	Pengawasan kolaboratif dan partisipatif secara berkesinambungan terhadap pemanfaatan energi dan sumber daya mineral daerah
3.5	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi	Pemerataan jaringan internet di kawasan perdesaan guna menunjang pertumbuhan ekonomi, percepatan pelayanan publik, dan mendukung kemajuan penyelenggaraan pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan informasi; Menguatkan ketersediaan informasi data pembangunan Gresik yang <i>up to date</i> dalam layanan <i>official website</i> pemerintah Daerah. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah pada jenjang pemerintah desa, <i>intermediary</i> kecamatan hingga satuan kerja perangkat daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung kinerja birokrasi dan pelayanan publik; Penguatan media, ruang, atau wahana <i>idea sharing</i> antara publik, pemerintahan daerah, dan swasta dalam mengungkapkan aspirasi, kritik

		dan saran terhadap kebijakan, kebutuhan akan informasi pembangunan serta media untuk menampilkan inovasi atau karya tertentu melalui ruang konservatif maupun melalui <i>internet network</i> .
3.6	Pengembangan sistem jaringan sumber daya air	Penguatan institusional dan kerjasama antar sektor dalam pelayanan air minum, air baku, dan sanitasi untuk meningkatkan atribusi pelayanan kepada masyarakat. Air minum dan sanitasi eksisting melalui penurunan <i>Non-Revenue Water</i> dan pemanfaatan <i>idle capacity</i>; Peningkatan kualitas rencana dan implementasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK); Optimalisasi Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3.7	Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	Penguatan basis data terpadu dan ketersediaan informasi yang mendukung pengukuran kualitas lingkungan hidup daerah Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara terpadu didukung kebijakan yang ramah lingkungan. Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan lingkungan abiotik didukung optimalisasi fungsi Laboratorium Lingkungan Hidup. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan pengendalian polusi udara secara bertahap.
3.8	Pengembangan sistem prasarana lainnya	Penguatan kualitas lingkungan melalui Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengolahan limbah/persampahan secara terpadu melalui reuse, reduce, recycle. Pengurangan kandungan karbon pada atmosfir dengan Penghijauan lahan kritis dan pembangunan hutan kota.

Selain Keterkaitan Kebijakan dan Strategi, Keterkaitan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Gresik juga dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara program RTRW dengan program RPJMD. Pelaksanaan Program RTRW secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, namun terdapat

beberapa program RTRW pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Swasta/BUMN/BUMD.

Adapun keterkaitan antara program RTRW dengan program RPJMD dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.9
Keterkaitan Program RPJMD Kabupaten Gresik dengan
RTRW Kabupaten Gresik

N O	Program RTRW Kabupaten Gresik	Program RPJMD 2016-2021	Keterangan
1	Pemeliharaan jalan kolektor dan lokal	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	
2	Peningkatan dan pelebaran jalan kolektor dan lokal primer		
3	Peningkatan kondisi jalan lokal dan pengembangannya		
4	Pembangunan terminal tipe c	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
5	Pembangunan terminal barang		
6	Pengembangan double track pada jalur utama GKS		Dilaksanakan oleh BUMN
7	Penambahan pelayanan KA jalu Petr, Arif Rahman Hakim, Status Indro-surabaya dengan beberapa shelther di titik intermodal		
8	Pengembangan pelabuhan penyeberangan Gresik-Pulau bawean	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	
9	Angkutan Water Bus yang menghubungkan wilayah sidoarjo-Gresik-Surabaya (2 Shelter)		Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
10	Pembangunan Pelabuhan		Dilaksanakan Oleh Swasta/BUMN
11	Pengaturan Rambu lalu lintas	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	

12	Pengembangan bandara domestic regional di pulau bawean	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Sharing dengan Pemerintahn Pusat
13	Pemenuhan Sumber Energi Baru		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
14	Jaringan transmisi tenaga listrik		
15	Peningkatan pelayanan listrik		
16	Pengembangan jaringan listrik		
17	Pengaturan rambu pipa minyak dan gas bumi bawah laut		Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
18	Pembangunan jaringan telekomunikasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sebagian besar dilaksanakan Swasta/ BUMN
19	Penataan sistem jaringan telekomunikasi	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
20	Pengaturan rambu kabel bawah laut		Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
21	Pembangunan tower telekomunikasi bersama		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
22	Pembangunan bendung gerak sembayat	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Sharing dengan Pemerintah Pusat
23	Pembangunan water treatment plant (WTP)		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMD
24	Penataan sempadan sungai bengawan solo	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	
25	Penataan Sempadan anak Sungai		
26	Pembangunan Waduk dan Daerah Irigasi (DI)	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	
27	Pembangunan Jaringan Irigasi		
28	Pembangunan Prasarana dan Sarana TPA	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
29	Pembangunan TPS		
30	Penanganan Daerah-Daerah Rawan Tergenang/banjir	Program Penanggulangan Banjir	
31	Pembangunan Drainase	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	

		Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	
32	Pengembangan Fasilitas SD	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
33	Pengembangan Fasilitas SMP		
34	Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas SLTA dan SMK		Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
35	Pengembangan dan pembangunan fasilitas akademi dan Perguruan Tinggi		Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
36	Pembangunan Fasilitas Puskesmas	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana \ Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	
37	Pembangunan Rumah Sakit Tipe C	Program Standarisasi pelayanan Kesehatan	
38	Penataan dan Pengendalian Tumpang-Tindih kawasan pemanfaatan umum WP3K Kabupaten Gresik	Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K	
39	Rehabilitasi kawasan resapan air	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
40	Penertiban kegiatan budidaya dikawasan sempadan sungai yang juga merupakan kawasan rawan banjir	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	
41	Penghijauan kawasan sempadan sungai	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
42	Pembangunan infrastruktur pencegahan banjir	Program Penanggulangan Banjir	
43	Penertiban kagiatan budidaya di kawasan sempadan sungai	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	
44	Penghijauan kawasan danau, embung dan rawa	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	

45	Pengendalian DAS dan dampaknya terhadap kelautan	Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)	
46	Penyusunan rencana zonasi rinci kawasan konservasi	Program Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	
47	Pengendalian kawasan konservasi WP3K	Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
48	Pengendalian kawasan hutan bakau		
49	Infrastruktur pendukung pengembangan hutan bakau		
50	Penertiban penangkapan ikan pada kawasan terumbu karang		Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
51	Pengendaliam Kebakaran Hutan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
52	Rehabilitasi kawasan hutan yang gundul		
53	Penyediaan Jaringan irigasi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	
54	Penyediaan Infrastruktur pendukung pada kawasan pertanian	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan	
55	Pengembangan Industri pengolahan hasil perikanan	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	
56	Pengembangan kawasan budidaya Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
57	Infrastruktur pendukung budidaya perikanan(jalan,pekerjaan umum, air bersih, persampahan, sanitasi, tempat pelelangan ikan)	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
58	Infrastruktur pendukung perikanan tangkap(jalan, pekerjaan umum, air bersih, persampahan, sanitasi, tempat pelelngan ikan, permukiman pengelola)	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	
59	Pengembangan Kawasan Pertambangan	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;	

60	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan Peruntukan Industri	Program Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	
61	Pembangunan Pelabuhan Industri		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
62	Permukiman pekerja pada kawasan industri		Dilaksanakan oleh Swasta
63	Perencanaan jalur wisata alam	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
64	Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari	Program Pengembangan Kemitraan	
65	Penyediaan Infrastruktur pendukung Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
66	Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman terhadap luas total sebesar 40%	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
67	Program perbaikan kawasan permukiman dengan pemenuhan persyaratan kualitas fisik Rumah	Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan	
68	Pengembangan Kawasan Industri Manyar (penelusuran potensi industri berbasis komoditas, Penyediaan Infrastruktur Pendukung, Pemantapan kelembagaan)		Dilaksanakan Oleh Swasta
69	Pengembangan Kawasan Agroindustri (penelusuran potensi industri berbasis komoditas, Penyediaan Infrastruktur Pendukung, Pemantapan kelembagaan)	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 terdiri dari 10 (Sepuluh) Bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan RPJMD terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan antar Dokumen, Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum Kondisi Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir, yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka

Pendanaan

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, dan Kerangka Pendanaan 5 (lima) tahun.

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, regional, nasional, daerah sekitar dan kearifan lokal.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam perumusan strategi berdasarkan misi yang ditetapkan disertai urusan konkuren pemerintah Daerah yang mendukung serta perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan lintas sektoral untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana ditentukan.

Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan dan strategi selanjutnya penterjemahan kebijakan umum ke dalam program pembangunan daerah.

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

Bab ini menguraikan Program prioritas disertai estimasi kebutuhan pendanaan berdasarkan urusan pemerintahan konkuren Pemerintah Daerah. Pada bab ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja secara tahunan dari kondisi awal hingga pencapaian kondisi akhir.

Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab ini menguraikan indikator kinerja daerah yang digunakan untuk mengukur capaian atau keberhasilan pembangunan berdasarkan program yang ditetapkan.

Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bab ini menguraikan tentang RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPJMD dijadikan pedoman bagi setiap kepala SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD. Serta mengatur pelaksanaan penerapan RPJMD oleh seluruh pemangku kepentingan.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik untuk menjabarkan dan mengakomodasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, nasional, regional hingga global serta menjadi landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan penganggaran. Sedangkan tujuan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis;
2. Memberikan pedoman dalam perumusan rencana pembangunan tahunan yang diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;
3. Menjadi landasan perencanaan jangka menengah dan tolak ukur keberhasilan pembangunan selama periode 2016-2021;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Gresik dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5. Menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antara kebijakan pusat dan daerah.

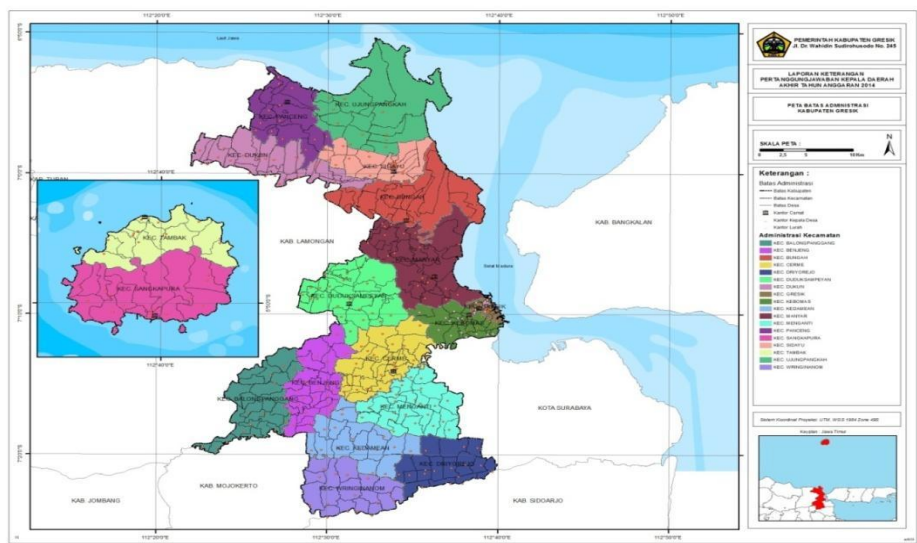
Bab II
Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
2.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km². Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang berada di Pulau Bawean.

Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Peta administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut

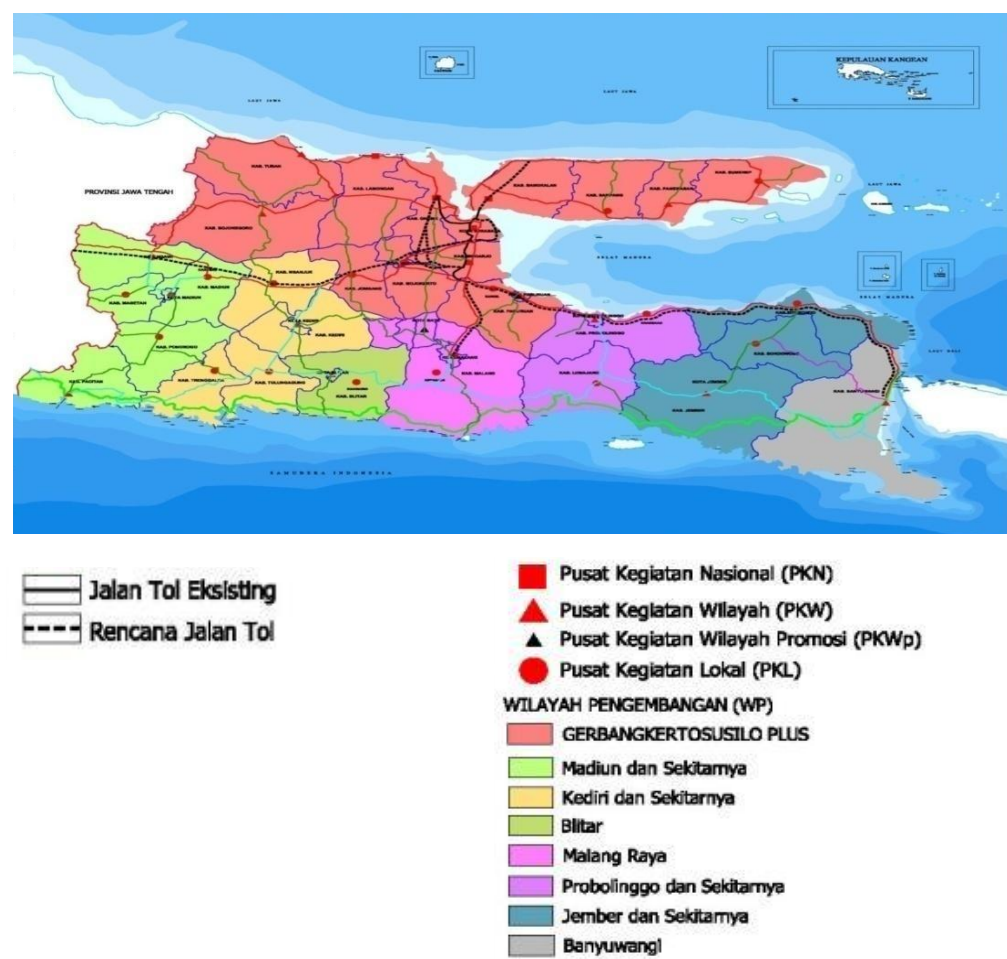


Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelansi Surabaya Metropolitan Area. Posisi Strategis Kabupaten Gresik terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana Kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan).

Berikut ini gambar yang menunjukkan posisi strategis Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur:



Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

Gambar 2.2
Peta Kabupaten Gresik terhadap Provinsi Jawa Timur

Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Gresik berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena terletak di selat Madura dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. Hal ini menjadikan Kabupaten Gresik tergabung dalam Kawasan Andalan

GERBANGKERTOSUSILA

(Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah disekitarnya.

2.1.1.2 Topografi dan Fisiografi

Pada umumnya Ketinggian tempat di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong.

Tabel 2.1
Luas Daerah Berdasarkan Ketinggian (Ha) Kabupaten Gresik

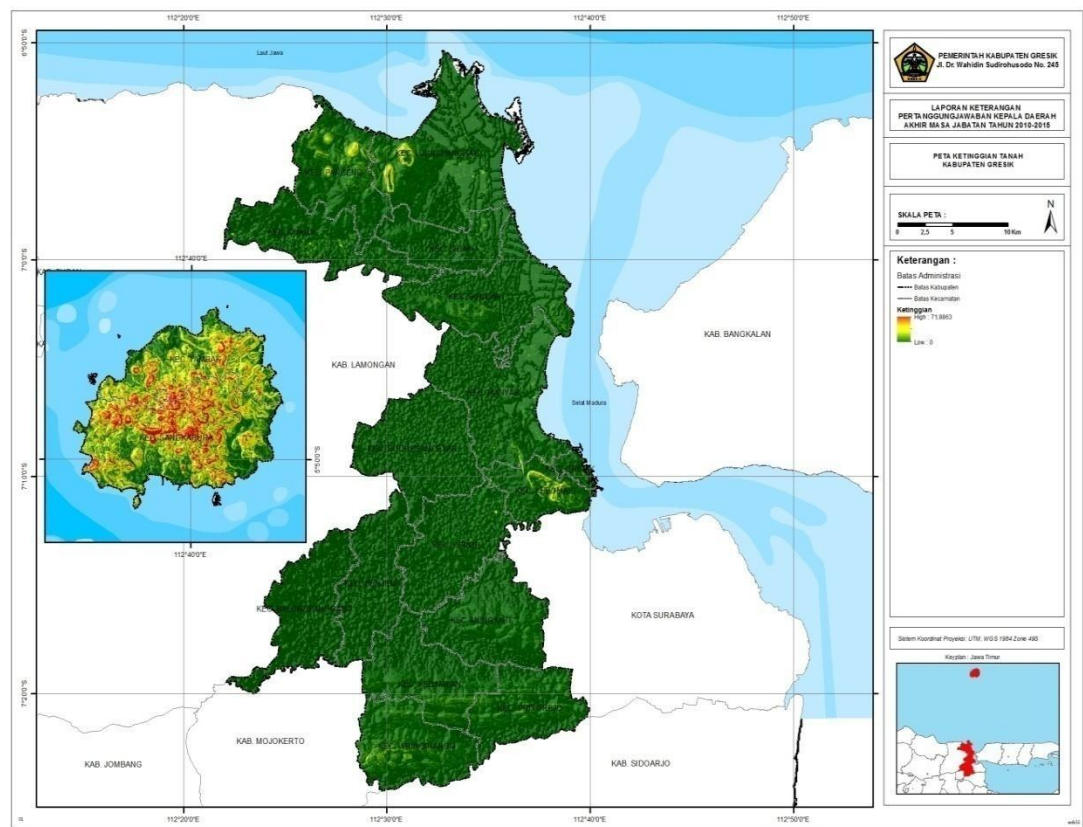
No	Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
		0 – 10	10 – 20	> 20	
		Meter dpl	Meter dpl	Meter dpl	
1	Wringinanom	0,00	6.254,00	0,00	6.262,00
2	Driyorejo	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
3	Kedamean	6.588,00	0,00	0,00	6.596,00
4	Menganti	6.196,00	0,00	0,00	6.367,00
5	Cerme	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
6	Benjeng	0,00	6.862,00	0,00	6.871,00
7	Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00
8	Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	7.449,00
9	Kebomas	2.966,00	0,00	0,00	3.433,00
10	Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
11	Manyar	8.287,00	0,00	0,00	8.671,00
12	Bungah	8.022,00	0,00	0,00	7.936,00
13	Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00
14	Dukun	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
15	Panceng	0,00	0,00	6.318,00	6.259,00
16	Ujungpangkah	9.470,00	0,00	0,00	10.406,00
17	Sangkapura	11.872,00	0,00	0,00	11.872,00
18	Tambak	7.755,00	0,00	0,00	7.739,00
	Jumlah	92.843,00	18.246,00	6.318,00	119.513,00
	Prosentase	79,08	15,54	5,38	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Wilayah dengan ketinggian 0 –10 mdpl seluas 92.843,00 ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.
- b. Wilayah dengan ketinggian 10 – 20 mdpl mempunyai luas 18.246,00 ha atau sekitar 15,54 % .
- c. Ketinggian diatas 20 mdpl mempunyai luas 6.318,00 ha atau sekitar 5,38%.

Adapundistribusi ketinggian wilayah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Gresik Tahun 2014

Gambar 2.3

Peta Ketinggian Tanah Kabupaten Gresik

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40 %. Sebagian besar mempunyai kemiringan 0 - 2% mempunyai luas 94.613,00 ha atau sekitar 80,59 %, sedangkan wilayah yang mempunyai kemiringan lebih dari 40 % lebih sedikit 1.072,23 ha atau sekitar 0,91 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Luas Daerah Berdasarkan Kelerengan (Ha) Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Lereng				Jumlah
		0 - 2 %	3 - 15 %	16 - 40 %	>40 %	
1	Wringinanom	3.968,00	2.286,00	0,00	0,00	6.262,00
2	Driyorejo	4.680,00	450,00	0,00	0,00	5.130,00
3	Kedamean	5.684,00	904,00	0,00	0,00	6.596,00
4	Menganti	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00
5	Cerme	6.126,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
6	Benjeng	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00
7	Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00
8	Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
9	Kebomas	2.409,00	518,00	39,00	0,00	3.433,00
10	Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00

11	Manyar	8.197,00	90,00	0,00	0,00	8.671,00
12	Bungah	8.022,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
13	Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
14	Dukun	5.909,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00
15	Panceng	3.897,00	2.324,00	72,00	25,00	6.259,00
16	Ujungpangkah	8.063,00	972,00	243,00	192,00	10.406,00
17	Sangkapura	4.805,00	2.050,34	4.216,68	799,98	11.872,00
18	Tambak	143,00	2.656,94	4.899,81	55,25	7.739,00
	Jumlah	94.613,0	12.251,28	9.470,49	1072,23	119.513,00
	Prosentase	80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Gresik 2010-2030

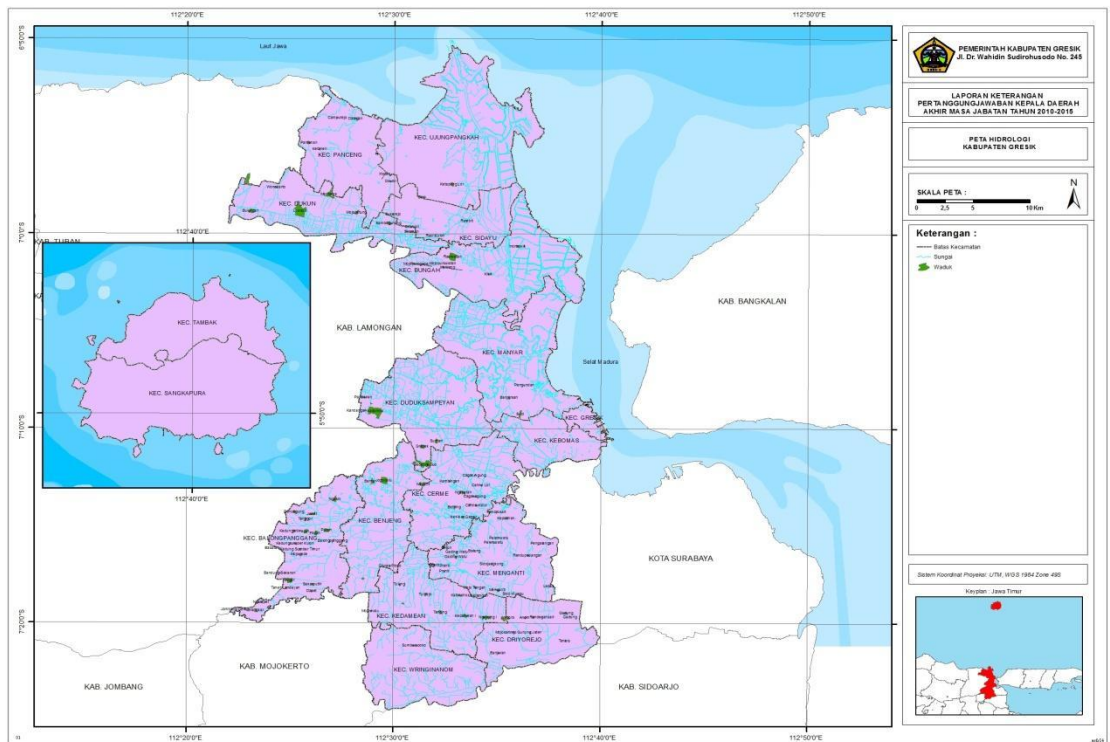
Berdasarkan data di atas, dijelaskan bahwa mayoritas daratan Gresik berada pada kelerengan 0-2% dengan luas wilayah sebesar 94.613 Ha (80.59%) sedangkan presentase terkecil berada pada kelerengan lebih dari 40% dengan luas 1072 Ha yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2(dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura.

2.1.1.3 Hidrologi

Keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal.

Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan.

Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.



Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Gresik Tahun 2015

Gambar 2.4

Peta Sungai dan Waduk Kabupaten Gresik

2.1.1.4 Klimatologi

Seperti halnya kondisi Jawa Timur lainnya, di wilayah Kabupaten Gresik mempunyai kondisi iklim yang hampir sama. Iklim Kabupaten Gresik termasuk tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembaban udara rata-rata 2.245 mm per tahun.

Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84 % terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan. Iklim daerah Kabupaten Gresik dibedakan menjadi :

- musim kering terjadi pada bulan Juni sampai dengan Bulan September;
- musim penghujan basah terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret;
- musim peralihan dari musim kemarau sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November; dan
- musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarauterjadi pada bulan April dan Mei.

2.1.1.5 Penggunaan Lahan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

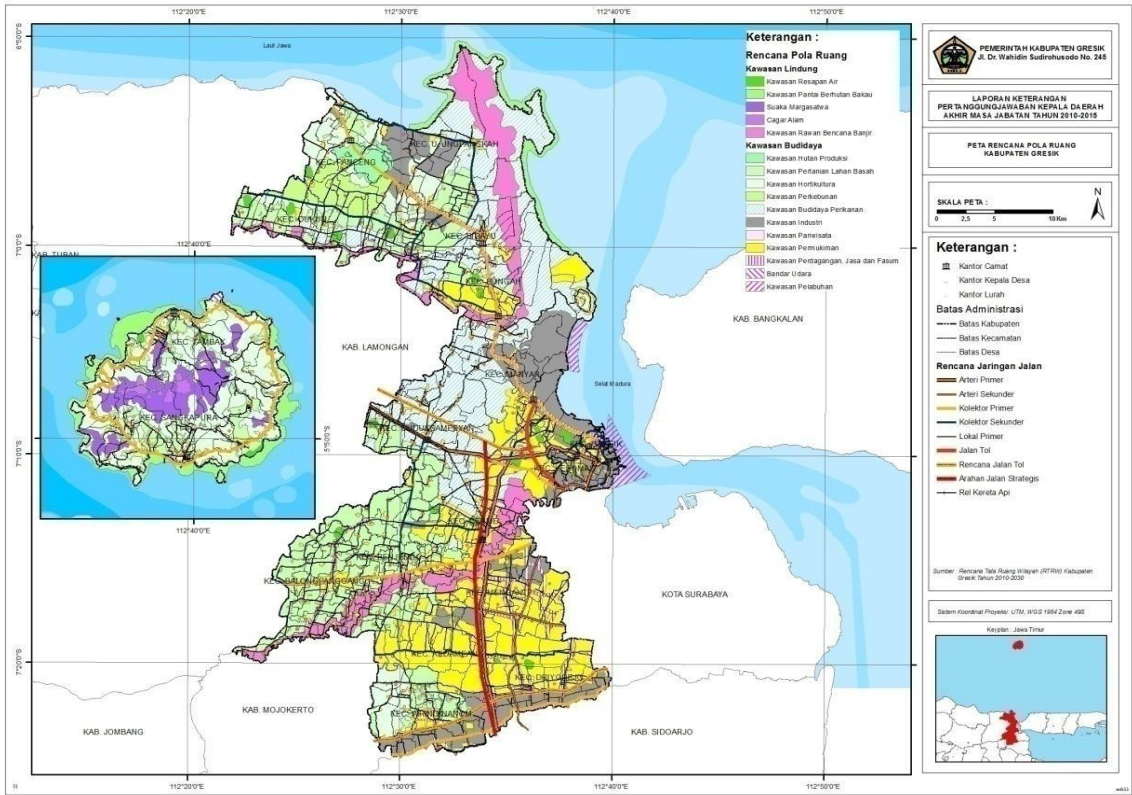
A. Kawasan Lindung

- Kawasan Rawan Bencana Banjir 9,426.12 hektar;
- Kawasan Pantai Berhutan Bakau 5,828.62 hektar;
- Kawasan Terumbu Karang 5,387.00 hektar;
- Blok Rimba Suaka Marga Satwa 3,831.60 hektar;
- Kawasan Resapan Air 1,252.58 hektar;
- Kawasan Cagar Alam 725.00 hektar;

B. Kawasan Budidaya

- Kawasan Permukiman 26,063.55hektar;
- Kawasan Pertanian Lahan Basah 23,372.70hektar;
- Kawasan Perikanan Budidaya 21,678.36 hektar;
- Kawasan Hortikultura 16,885.48 hektar;
- Kawasan Industri 12,448.03 hektar;
- Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum 6,644.01 hektar;
- Kawasan Perkebunan 2,573.67 hektar;
- Kawasan Hutan Produksi 1,017.00 hektar;
- Kawasan Pertambangan 817.25 hektar;
- Kawasan Pariwisata 82.85 hektar;
- Kawasan Bandar Udara 68.44 hektar;
- Kawasan Pelabuhan 1,257.69 hektar;

Peta rencana pola ruang Kabupaten Gresik sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber data: RTRW Kab. Gresik Tahun 2010- 2030

Gambar 2.5
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Gresik

Dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2015, kondisi eksisting penggunaan lahan berdasarkan jenis peruntukan dalam RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Eksisting Penggunaan Lahan
Berdasarkan Jenis Peruntukan dalam RTRWTahun 2015

KAWASAN LINDUNG			
No.	Jenis Peruntukan Ruang	Perda RTRW Kab. Gresik (ha)	Eksisting Penggunaan Lahan(ha)
1	Kawasan Rawan Bencana Banjir	9,426.12	-
2	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	5,828.62	1,804.18
3	Kawasan Terumbu Karang	5,387.00	-
4	Blok Rimba Suaka Marga Satwa	3,831.60	3,831.60
5	Kawasan Resapan Air	1,252.58	1,040.61
6	Kawasan Cagar Alam	725.00	725.00
Jumlah		26,450.92	7,401.39
KAWASAN BUDIDAYA			
1	Kawasan Permukiman	26,063.55	15,331.14
2	Kawasan Pertanian Lahan Basah	23,372.70	39,572.98
3	Kawasan Perikanan Budidaya	21,678.36	31,092.21
4	Kawasan Hortikultura	16,885.48	191.79
5	Kawasan Industri	12,448.03	10,108.57
6	Kawasan Perdagangan, Jasa, dan Fasum	6,644.01	2,797.65

7	Kawasan Perkebunan	2,573.67	10,761.86
8	Kawasan Hutan Produksi	1,017.00	6,544.01
9	Kawasan Pertambangan	817.25	952.34
10	Kawasan Pariwisata	82.85	7.92
11	Kawasan Bandar Udara	68.44	72.82
12	Kawasan Pelabuhan	1,257.69	366.89
Jumlah		112,909.02	117,792.25
		139,359.94	125,193.64

Sumber: Study Peninjauan kembali Perda RTRW Tahun 2015

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa eksisting penggunaan lahan berdasarkan perencanaan (Peninjauan kembali RTRW Tahun 2015) telah mencapai 89,8%. Adapun penggunaan lahan yang melebihi luas perencanaan meliputi kawasan pertanian lahan budaya, kawasan perikanan budidaya, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, dan kawasan bandar udara sedangkan eksisting seluruh kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya belum sebesar luas lahan yang direncanakan.

2.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Perkembangan potensi unggulan Kabupaten Gresik pada tahun 2014-2015 antara lain:

- 1) Dalam Bidang Perindustrian Dilihat dari jumlahnya, terjadi lonjakan yang sangat signifikan atas pertumbuhan industri kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Tahun 2015, kenaikan pertumbuhan sampai pada angka 373%. Seiring dengan kenaikan tersebut, dari sisi investasi dapat dilihat bahwa nilai investasi industri kecil tersebut sejumlah Rp12.835.000.000 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Komponen investasi yang lain adalah investasi masyarakat dimana juga terdiri dari berbagai komponen. Terkait dengan tugas dan fungsi instansi, investasi masyarakat yang dapat dijadikan dasar sebagai perhitungan investasi bangunan selain sektor industri di Tahun 2016 sebesar Rp. 29.076.367.625.000,- (dua puluh sembilan trilyun tujuh puluh enam milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4.
Jumlah Industri dan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI)
di Kabupaten GresikTahun 2011-2016

No.	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Industri	Industri	6.293	6.369	6.451	6.525	6.653	6495
2	Tanda Daftar Industri (TDI)	Unit	61	45	25	30	41	194

Sumber data: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten GresikTahun 2017

2) Dalam Bidang Penanaman Modal, Meski terjadi penurunan rencana investasi asing dan domestik namun realisasi investasi berkata sebaliknya. Terjadi kenaikan yang signifikan dengan tren positif atas realisasi penanaman modal asing maupun dalam negeri. Di sektor PMA, terjadi pertumbuhan realisasi investasi sebesar dari US ribu \$ 152,925.40 ribu menjadi US ribu \$ 348.001 atau setara dengan 127%. Realisasi rencana investasi Penanaman Modal Dalam Negeri juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 3.982.980,6 (dalam juta rupiah) dari angka 671.413,6 (dalam juta rupiah) di Tahun 2015. Hal ini mencerminkan masih tingginya minat investor yang menanamkan modal di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.5.
Jumlah Investasi di Kabupaten Gresik
Tahun 2015-2016

No.	Uraian	Satuan	2015	2016
1	Rencana Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	Juta Rupiah	24.639.278,4	13.952.621,8
2	Rencana Investasi Penanaman Modal Asing	US\$ ribu	398.273,6	212.764,9
3	Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri	Juta Rupiah	671.413,6	3.982.980,6
4	Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Asing	US\$ ribu	152.925,40	348.001

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik Tahun 2017

3) Dalam bidang pertanian, total produksi pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2016 mencapai 660.964 ton meingkat dibandingkan Tahun 2015 sebanyak 653.557 ton, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6.
Produksi Pertanian di Kabupaten Gresik Tahun 2015-2016

Jumlah produksi tan. pangan (ton)	549,765	555,034
a. Padi	403,906	422,343
b. Jagung	127,218	111,684
c. Kedelai	1,326	1,195
d. Kacang tanah	2,925	2,161
e. Kacang hijau	3,026	4,329
f. Ubi kayu	10,426	11,287
e. Ubi jalar	938	2,035
Jumlah produksi hortikultura (ton)	103,792	105,930
a. Sayur (Ton)	17,952	30,044

a.1 Sawi	226	392
a.2 Kacangpanjang	583	321
a.3 Cabe	4,654	7,838
a.4 Tomat	798	610
a.5 Terong	9,110	278
a.6 Ketimun	920	6
a.7 Labu Siam	294	10
a.8 Kangkung	920	20,032
a.9 Bayam	447	556
b. Buah (Kw)	857,532	733,056
b.1 Jambu biji	2,793	5,026
b.2 Jeruk	8,135	9,972
b.3 Mangga	620,485	398,445
b.4 Pepaya	11,743	9,968
b.5 Pisang	208,874	302,656
b.6 Belimbing	2,553	4,601
b.7 Sawo	2,606	1,852
b.8 Sirsak	238	311
b.9 Buah Naga	105	225
c. Obat (Kw)	867	25,811
c.1 Kunyit	792	25,751
c.2 Jahe	75	60

Sumber Data : Dinas Pertanian Tahun 2017

4) Di bidang peternakan, jumlah Produksi ternak di Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 sebanyak 11.046.82 Kg dengan populasi ternak sebanyak 3.680.264 ekor. Adapun produksi hasil ternak secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Produksi hasil Ternak
di Kabupaten Gresik Tahun 2016

Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Peternakan	14,727,066
1. Produksi ternak	11,046,802
a. Daging	7,984,771
b. Telur	2,186,740
c. Susu	875,291
2. Populasi ternak	3,680,264
a. Sapi	52,858
b. Sapi perah	449

c. Kerbau	224
d. Kuda	232
e. Kambing	70,029
f. Domba	33,017
g. Ayam ras petelur	152,300
h. Ayam buras	703,370
i. Ayam ras pedaging	2,606,300
j. Itik	30,170
k. Entok	31,315

Sumber Data : Dinas Pertanian Tahun 2017

5) Di bidang kelautan perikanan, produksi bidang perikanan di Kabupaten Gresik Tahun 2016 sebanyak 24.410,8 meningkat dibandingkan Tahun 2015 sebesar 24.227,74 ton sedangkan angka konsumsi ikan mencapai 33,89 kg/kapita/tahun Adapun potensi kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8

Produksi Perikanan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2016

Potensi Kelautan dan Perikanan	Tahun 2015	Tahun 2016
Produktivitas perikanan budidaya (ton)		
a. Air Payau	286.76	290.33
b. Air Tawar	332.52	392.09
c. Produktivitas Garam	5,000	4,500
Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton)		
a. Penangkapan di laut (ton)	18,122.28	18,786.01
b. Penangkapan di perairan umum (ton)	486.18	442.55
Angka Konsumsi Ikan; Konsumsi Hasil Olahan Perikanan oleh Penduduk (kg/kapita/th)	32,11 Kg/Kapita/Tahun	33,89 kg.kapita/tahun

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

6) Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik meningkat secara dramatis pada Tahun 2016 mencapai 31,95 Trilyun dengan realisasi investasi mencapai Rp8.506.993.600.000 atau 8,5 Trilyun. Realisasi investasi tersebut memiliki komposisi 3.982.980,6 (juta rupiah) atau 46,82% berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri sedangkan 348.001 (US\$ ribu) dengan kurs tengah rupiah Rp13.000 mencapai 4.524.013 (juta rupiah) atau 53,18% berasal dari Penanaman Modal Asing. Adapun rasio realisasi mencapai 50,9% dari total rencana investasi baik Penanaman

Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing sebesar 16.718.565,5 (juta rupiah)

Capaian positif investasi Gresik diluar trend siklus bisnis nasional yang melemah sebagaimana ditunjukkan pelemahan nilai rupiah hingga penurunan kapitalisasi indeks harga saham gabungan. Rincian investasi Kabupaten Gresik selama tahun 2016 meliputi Rencana Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rupiah) sebesar 13.952.621,8, Rencana Investasi Penanaman Modal Asing (US\$ ribu) sebesar 212.764,9, Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rupiah) sebesar 3.982.980,6, dan Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Asing (US\$ ribu) sebesar 348.001. Adapun jumlah investasi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9.

Realisasi Investasi di Kabupaten Gresik Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
		2016	
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	17,06% (Rp.27,45 T)	36% (31.95 T)

Sumber data : Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Tahun 2016

7) Potensi Kepelabuhanan

Kabupaten Gresik memiliki wilayah pesisir pantai yang potensial untuk kegiatan kepelabuhanan. Keberadaan pelabuhan di Kabupaten Gresik cukup penting untuk mendukung akses penyediaan bahan baku dan pemasaran produk industri yang telah berkembang di Kabupaten Gresik. Di sepanjang pesisir pantai Kecamatan Kebomas, Gresik, dan Manyar terdapat 1 (satu) pelabuhan umum yang dikelola oleh PT. Pelindo III Cabang Gresik dan 8 (delapan) terminal khusus yang dikelola oleh Perusahaan Swasta/BUMN untuk kepentingan sendiri dan melayani umum dalam kondisi tertentu. Adapun 8 (delapan) terminal khusus tersebut yaitu:

- 1. Terminal Khusus PT. Sumbermas Indah Playwood
- 2. Terminal Khusus PT. Wilmar Nabati
- 3. Terminal Khusus PT. Semen Gresik
- 4. Terminal Khusus PT. PLN PJB 2 Gresik
- 5. Terminal Khusus PT. Pertamina
- 6. Terminal Khusus PT. Petrokimia Gresik
- 7. Terminal Khusus PT. Smelthing
- 8. Terminal Khusus PT. Maspion

Pemerintah Kabupaten Gresik juga menggagas pembangunan Pelabuhan Internasional Kalimireng di Kecamatan Manyar yang pembangunannya sudah dilaksanakan mulai tahun 2014 oleh PT. BJTI (Berlian Jasa Terminal Indonesia) dan PT. AKR (Aneka Kimia Raya).

8) Potensi Wisata

Di bidang pariwisata, destinasi pariwisata Kabupaten Gresik didominasi oleh situs atau peninggalan sejarah yang berciri khas religius yang menunjukkan Gresik sebagai Kota Santri dan Kota Wali. Wisata budaya religi Kabupaten Gresik antara lain:

- a. Makam Maulana Malik Ibrahim (Kec. Gresik);
- b. Makam Sunan Giri (Kec. Kebomas);
- c. Makam Puspongoro (Kec. Gresik);
- d. Makam Raden Santri (Kec. Gresik);
- e. Makam Nyai Ageng Pinatih (Kec. Gresik);
- f. Makam Sunan Prapen (Kec. Kebomas)
- g. Makam Siti Fatimah Binti Maimun (Kec. Manyar)
- h. Makam Kanjeng Sepuh (Kec. Sidayu)

Selain wisata budaya atau religius terdapat obyek wisata alam yang sangat potensial untuk dikembangkan antara lain:

- a. Danau Kastoba (Kec. Tambak)
- b. Air Panas Kebondaya (Kec. Sangkapura)
- c. Telaga Ngipik/ Giri Wana Tirta (Kec. Kebomas)
- d. Bukit Surowiti (Kec. Panceng)
- e. Penangkaran Rusa Bawean (Kec. Sangkapura)
- f. Pantai Pulau Cina (Kec. Sangkapura)
- g. Air Terjun Patar Selamat (Kec. Sangkapura)
- h. Air Terjun Udhuk-udhuk (Kec. Tambak)
- i. Pantai Labuhan (Kec. Tambak)
- j. Pantai Nyimas (Kec. Sangkapura)
- k. Pantai Hutan Lindung (Kec. Sangkapura)
- l. Pantai Tinggen (Kec. Sangkapura)
- m. Pantai Dalegan (Kec. Panceng)
- n. Pulau Noko dan Pulau Gili (Kec. Sangkapura)
- o. Kawasan Pantai Selayar (Kec. Sangkapura)
- p. Air Terjun Laccar (Kec. Tambak)

Selain itu terdapat wisata minat khusus antara lain: Kampung Kemasan (Kec. Gresik), Kampung Adenium (Kec. Kedamean), Sentra Industri

Songkok dan Rebana, Benteng Lodewijk (Kec. Bungah), dan Sentra Makanan Khas Gresik.

2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang terjadi di Kabupaten Gresik merupakan bencana dalam skala kecil atau lokal yang meliputi bencana banjir, kekeringan, kebakaran, angin puting beliung dan tanah longsor.

a. Bencana Banjir

Bencana banjir merupakan bencana yang terjadi hamper setiap tahun di Kabupaten Gresik yang disebabkan luapan sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Data banjir yang terjadi di Kabupaten Gresik Tahun 2011 s/d 2015 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Bencana Banjir Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

Tahun 1	Lokasi Banjir 2	Dampak 3
2011	Balongpanggang, Cerme, Benjeng, Kedamean, Lundo Kec. Benjeng	Rumah dan Lahan Persawahan
2012	Ds.Lundo dan Delik Sumber Kec. Benjeng, Desa Tirem Kec. Dukun	Sawah = 115 Ha, Jalan Desa = 1500 m, 100 Rumah
2013	Desa Wotansari, Desa Kedungpring, Desa Pucung, Desa Sekarputih, Desa Wahas, Desa Dapet, Desa Bl.Panggang, Desa Jombang Delik, Desa Banjaragung, Desa Brangkal, Desa Karangsemanding, Desa Ngasin, Kec. Bl. Panggang Desa Lundo, Desa Balungtungjung, Desa Balungmojo Desa Sedapurklagen, Desa Deliksumber , Desa Kedungrukem, Desa Munggugianti, Desa Bengkelor, Desa Gluranploso, Desa Bulurejo, Desa Dermo, Desa Kedungsekar, Desa Klampok, Desa Sirnobojo, Desa Kalipadang, Desa Karangan Kidul, Desa munggugebang, Desa Banter, Kec. Benjeng, Desa Gadingwatu, Desa Pranti, Desa Boteng, Desa Boboh, Desa Beton, Desa Hendrosari, Desa Sidowungu, Desa Kepatihan, Desa Setro, Desa Laban, Desa Mojotengah, Desa Menganti, Desa Bringkang, Desa Putatlor, Kec. Menganti, Desa Cermen, Desa Glindah. Kedamean, Desa Morowudi, Desa Sukoanyar, Desa Ngembung, Desa Guranganyar Desa Dadapkuning, Desa Dampaan, Desa Lengkong, Desa Dooro, Desa Dungus, Desa Iker-Iker Geger, Desa Betiting, Desa Cerme Kidul, Desa Cerme Lor, Desa Tambak Beras Kec. Cerme Desa Morobakung, Desa Pejangganan, Desa Ngampel, Kec. Manyar, Desa Randuboto Kec. Sidayu, Desa Ngawen, Desa Srowo, Desa Sedagaran, Desa Mriyunan, Desa Mojoasem, Desa Racikulon, Kec. Manyar, Desa Bungah, Desa Sukorejo Desa Sukowati, Desa Melirang, Desa Mojopurogede, Desa Mojopurowetan Desa Bedaten, Desa Indrodelik, Desa Masangan, Desa Sidorejo, Desa Sungonlegowo, Desa Sidomukti Kec. Bungah, Desa Teremenggal, Desa Madumulyorejo, Desa Jrebeg, Desa Sekargadung, Desa Dukuanyar,	Rumah = 13.618 Jalan Desa = 76.787 m Jalan Raya = 20.420 m Sawah = 5.196 Ha Tambak = 1.871 Ha Kerugian Rp. 1.477.300.000,-

	Desa Gedong, Desa Kalirejo, Desa Karangcangkring, Desa Bangeran, Desa Bulangan	
2014	Banjaragung; Wotansari; Sekarputih; Kedungpring; Pucung; Karangsemanding; Balongpanggang (balongpanggang)	6064 Rumah; Sawah = 2172 Ha; Jalan Desa = 34.850 m; Jalan Raya = 10.660 m
	Lundo; Balongmojo; Bulangkulon; Munggugianti; Kedungrukem; Deliksumber; Sedapurklagen; Gluranploso; Bengkelolor; Bulurejo; Dermo; Klampok; Kedungsekar;	
	Kalipadang; Karangankidul; Munggugebang; Banter (Benjeng)	
	Boboh; (Menganti)	
	Dadapkuning; Ngembung; Sukoanyar; Dampaan; Dooroo; Guranganyar; Morowudi;Iker-iker Geger; Dungus; Lengkong; Pandu; Cerme Kidul (Cerme)	
2015	Kecamatan balongpanggang Desa Wotansari, Dapet,Kedungpring, Brangkal, Balongpanggang, Karangsemanding, dan Banjaragung	Rumah = 6.335 Jumlah Jiwa = 18.600 Sawah(Ha) = 3.361 Tambak (Ha) = 850
	Kecamatan Benjeng pada desa Lundo, Bulangkulon , Munggugianti, Kedungrukem, Deliksumber, Sedapurklagen, Gluranploso, Bulurejo, Dermo, Klampok, Sirnobooyo, Kalipadang, Balungtungjung, Balungmojo, dan Munggugebang	
	Kec. Kedamean pada desa Cermen, Glindah, Tulung, Lampah, dan Turirejo	
	Kec. Menganti pada Desa Boboh, Gadingwatu, Putatlor, Pranti, Beton, Beringkang, Kepatihan, dan Hendrosari	
	Kecamatan Cerme pada desa Dadapkuning, Ngembung, Sukoanyar, Dampaan, Dooroo, Guranganyar, Morowudi, Iker-iker Geger, Dungus, Lengkong, Pandu, Cerme Kidul, Kandangan, Betiting , Gedang Kulud, Tambakberas, Padeg,dan Jono	

Sumber : LKPJ Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

- Upaya Penanganan Bencana Banjir di Kab Gresik antara lain:
1. Pendirian Posko Siaga Bencana;
 2. Penyelamatan korban bencana melalui operasi tanggap darurat bencana banjir.
 3. Koordinasi dengan Dinas dan Instansi Terkait (Dinas PU. DLH, PLN dan Telkom);
 4. Survey lokasi saat terjadi Pasca Bencana;
 5. Menindaklanjuti Proposal ganti rugi rumah yang tertimpa;
 6. Pemberian paket sembako;
 7. Memberikan paket kebutuhan pokok.

b. Bencana Kekeringan

Bencana kekeringan di Kabupaten Gresik terjadi pada musim kemarau. Dalam rangka mengantisipasi dan menangani bencana kekeringan Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan lokasi darurat

kekeringan. Adapun desa yang ditetapkan dalam status keadaan darurat bencana kekeringan kategori kering kritis di Kabupaten Gresik tahun 2012 s/d tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.11.
Daftar Desa Yang Ditetapkan Dalam StatusKeadaan Darurat Bencana
Kekeringan Kategori Kering Kritis di Wilayah Kabupaten Gresik
Tahun 2012-2016

Tahun	Kecamatan	Desa
1	2	
2012	Driyorejo	Wedoroanom,Mojosarirejo
	Wringinanom	Kesamben Kulon,Sembungan, Cermen,Katimoho
	Kedamean	Tulung, Glindah,Lampah,Turirejo
	Menganti	Pranti Beton
	Benjeng	Lundo, Balongtanjung, Balongmojo, Bulangkulon, Bengkelolor, Gluranploso, Munggugianti, Bulurejo, Kedungrukem, Sedapurklagen, Sirnobojo,Kalipadang, Karangankidul, Deliksumber, Dermo, Klampok, Kedungsekar, Metatu, Banter, Jogodalu, Jatirambe, Munggugebang, Pundutrate
	Balongganggang	Brangkal, Dampet, Wotansari, Karangsemanding, Sekarputih ,Banjaragung, Pucung, Balongpanggang, Kedungpring
	Cerme	Dooro, Worowudi, Dampaan, Dadapkuning, Pandu, Lengkonng, Jono,Kandangan, Dungus, Gedangkulut, Kambingan, SukoAnyar
	Kebomas	Kedanyang, Kembangan, Gulomantung
	Duduk Sqmpeyan	Pandanan, Glanggang, Kemudi, Sumari, Kandangan, Tambakrejo, Kawisto Windu,Setrohadi, Wadak Lor, Kramat, Panjunan,W adak Kidul,GredeK
	Bungah	Pegundan, Kemangi, Gumeng,
	Sidayu	Ngawen, Mojoasem,Randuboto, Sidumulyo, Mriyun, Bunderan, Racikulon, Purwodadi, Asempapak, Srowo, Racitengah, Sedagaran
	Dukun	Karancangkring, Bangeran, Gedonggedo'an,Tebuwung,Baron, Babaksari, Padang Bandung, Kalirejo, Jrebeng, Sekargadung, Madumulyorejo, Babakbawo, Dukuhkembar, Tiremenggal, Bulangan
2014	Benjeng	Gluranploso, Munggugianti, Bulurejo, Kedungrukem, Deliksumber, Kalipadang, Karangankidul, Dermo, Klampok, Sirnobojo, Metatu, Banter, Jogodalu, Jatirembe, Pundutrate, Munggugebang
	Cerme	Dooro, Dampaan, Pandu, Lengkong, Jono, Kandangan, Dungus, Gedangkulud, Wedani
	Duduksampeyan	Petis benem, Sumari, Tambakrejo, Setrohadi, Kramat
	Kedamean	Cermen, Tulung, Lampah, Turirejo
	Balongpanggang	Kedungpring, Balongpanggang, Pacuh, Pucung
	Sidayu	Pengulu, Mojoasem, Randuboto, Racikulon, Srowo
	Bungah	Pegundan, Gumeng
2015	Benjeng	Gluranploso, Munggugianti,

		Bulurejo, Kedungrukem, Deliksumber, Kalipadang, Klampok, Sironoboyo, Metatu, Banter, Jogodalu, Jatirembe, Pundutrate
	Cerme	Dampaan, Pandu, Lengkong, Jono, Kandangan, Dungus, Gedangkulud, Wedani
	Duduksampeyan	Betis Benen, Sumari, Tambakrejo, Setrohadi, Kramat Wadak Kidul
	Kedamean	Tulung, Lampah, Turirejo
	Balongpanggang	Kedungpring, Balongpanggang Pucung
	Sidayu	Pengulu, Mojoasem, Randuboto
	Bungah	Penggun dan Gumeng

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016

Upaya penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten Gresik dilakukan dengan tindakan pembuatan sumur bor, pipanisani, dan pendistribusian bantuan air bersih.

c. Kebakaran

Bencana Kebakaran di Kabupaten Gresik merupakan bencana lokal. Data terjadinya kebakaran di Kabupaten Gresik tahun 2011 s/d tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 2.12
 Bencana Kebakaran Kabupaten GresikTahun 2011-2016

Tahun	Lokasi kebakaran	Kecamatan	Kerusakan/ Kerugian
1	2	3	4
2011	Ds. Wedani	Crème	1.100.500.000
	Tlogopatut	Gresik	
	Dsn Bandung sekaran sidokumpul	Gresik	
2012	Kel. Indro	Kebomas	1 (150.000.000)
	Tebuwung	Dukun	1 (75.000.000)
	Ds Klotok	Balongpanggang	1 (75.000.000)
	Mariyunan	Sidayu	1 (50.000.000)
	Roomo	Manyar	1 (250.000.000)
	Tebalo	Manyar	1 (650.000.000)
	Kel. Sidomoro	Kebomas	1 (100.000.000)
	Bulanga	Dukun	1 (100.000.000)
	Ds. Tebaloan	Duduksampean	1 (50.000.000)
	Balongpanggang	Balongpanggang	1 (700.000.000)
	Karangpoo	Gresik	1 (150.000.000)
	Dsn. Bidoyo Ds Beton	Menganti	1 (65.000.000)
	Ds Ketanen	Panceng	1 (300.000.000)
	Dsn sawaan Ds. Gedang kulud	Cerme	1 (200.000.000)

	Kel Indro	Kebomas	1 (150.000.000)
	Dsn sawaan Ds. Gedang kulud	Cerme	1 (200.000.000)
2013	Kel. Indro	Kebomas	3
	Ds Gedangkulud	Cerme	1
	ds Kalipadang	Benjeng	1
	Ds Kesamben kulon	Benjeng	1
	Ds Wonokerto	Dukun	1
	Ds Diponggo	Tambak	1
	Cerme kidul	Cerme	1
	Ds Dadapkuning	Cerme	1
	Ds lowayu	dukun	1
	Ds Pulo pancian	Gresik	1
	Ds Turirejo	Kedamean	1
	Ds Kalirejo	Dukun	1
	Ds Klotok	Balongpanggang	1
	Ds Klotok	Balongpanggang	1
	Randuagung	Kebomas	1
	Ds Tumapel	Duduksampeyan	1
	Kel Pekelingan	Gresik	2
	Ds Turirejo	Kedamean	1
	Ds Menganti	Menganti	1
	Ds Delik sumber	Benjeng	1
2014	Ds Gadung	driyorejo	1 (150.000.000)
	Ds Sembung	Wringinanom	3 (1.014.500.000)
	Ds Sekarkurung	Kebomas	3 (150.000.000)
	Ds Watuagung	Bunga	1 (100.000.000)
	Kel Kroman	Gresik	6 (733.000.000)
	Ds Sumput	Driyorejo	2 (150.000.000)
	Ds Bulurejo	Benjeng	2 (1000.000.000)
	ds Serah	Panceng	1 (60.000.000)
	Ds Sekarputih	Balongpanggang	1 (31.518.000)
	Ds Bangeran	Dukun	1 (155.000.000)
	Ds Panggakakulon	Ujungpangkah	1 (10.000.000)
	Ds Sidorukun	Gresik	1 (52.500.500)
2015	Pacuh	Balongpanggang	150000000
	sidogedung batu	Sangkapura	200000000
	Watestanjung	Wringinanom	50000000
	Jombang Delik	Balongpanggang	70200000
	Kalipadang	Benjeng	150000000
	Kedungpring	Balongpanggang	55000000
	Tlogobedah	Menganti	50000000
	Karangandong	Driyorejo	200000000
	Setro	Menganti	215000000
	Bedanten	Bungah	750000000
	Tanjungan	Driyorejo	40000000
	Radegansari	Driyorejo	250000000
	Mojopuro Gede	Bungah	300000000
	Pangkah wetan	Ujung Pangkah	200000000

	Menganti	Menganti	50000000
	Mojowuku	Kedamean	175000000
	Lampah	Kedamean	10500000
	Wringinanom	Wringinanom	-
	Gunung Teguh	Sangkapura	50000000
	Krikilan	Driyorejo	-
2016	Ds.Sekarputih	Balongpanggang	
	Kel. Bedilan	Gresik	
	Ds.Kisik	Bungah	
	Ds.Tlogobendung	Gresik	
	Ds.Mojowuku	Kedamean	
	Ds.Cangkir	Driyorejo	
	Ds.Sekarputih	Balongpanggang	
	Wringinanom	Wringinanom	

Sumber : BPBD Tahun 2011-2016

Upaya Penanganan Bencana Kebakaran di Kab Gresik antara lain:

1. Penanganan bencana kebakaran melalui UPT. PEmadam Kebakaran
2. Koordinasi dengan Dinas dan Instansi Terkait (Dinas PU. DLH, PEmadam Kebakaran PLN dan Telkom);
3. Survey lokasi saat terjadi Pasca Bencana;
4. Menindaklanjuti Proposal ganti rugi rumah yang tertimpa;

d. Angin Puting Beliung

Bencana puting beliung di Kabupaten Gresik dengan status bencana lokal kabupaten selama tahun 2011 s/d 2015 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.13
 Bencana Angin Puting Beliung Kabupaten Gresik
 Tahun 2011-2015

Tahun	Tempat Kejadian	Kecamatan	Kerusakan / Kerugian
1	2	3	4
2011	Desa Campurejo	Panceng	40 rumah, 1 Kantor Kec sidayu, 1 sekolah sidayu
	Ds. Lengkong	Cerme	
	Ds. Dungus	Cerme	
	Ds. Jombangdelik	Balongpanggang	
	Ds. Kramat	Bunga	
	Ds. Ngabetan	Cerme Lor	
	Ds Raci tengah	Sidayu	
	Ds. Lundo	Benjeng	
2012	Brangkal	Balongpa nggang	20 Rmh (50.000.000)
	Dsn. Dukuh	Balongpa nggang	
	Tanjung	Balongpa nggang	
	Ds Padeng	Crème	1(15.000.000)
2013	Desa Tanjungori	Tambak	1
	Desa Kedungrukem	Benjeng	16
	Desa Pacuh	Balongpa nggang	56
	Desa Mriyunan	Sidayu	1 Gedung Sekolah

	Desa Sukalela	Tambak	1
	Desa Lebaniwaras	Wringinanom	68
	Desa Wringinanom	Wringinanom	69
	Desa Mulyorejo	Dukun	1
	Dusun Sukoanyar	Cerme	1
	Dusun Pendem	Kedamean	71
	Desa Turirejo	Kedamean	11
	Desa Karangrejo	Ujungpang kah	10
	Desa Turirejo	Kedamean	1
	Desa Cerme Kidul	Cerme	1
	Desa Sumberwaru	Wringinanom	1
	Desa Turirejo	Kedamean	1
	Desa Kramat	Bungah	43
	Desa Dapet	Balongpa nggang	1
	Desa Kandangan	Duduksam peyan	2
	Desa tambakrejo	Duduksam peyan	3
	Desa Sumengko	Duduksam eyan	1
2014	Dsn Dapet	Balongpa nggang	1 (75.000.000)
	Dsn Jambu	Cerme	1 (30.000.000)
	Dsn Kemendung	Cerme	1 (30.000.000)
	Kelurahan Lumpur	Gresik	1 (40.000.000)
	Desa Pangkahkulon	Ujungpang kah	1 (25.000.000)
	Desa Dahanrejo	Kebomas	1 (10.000.000)
	Desa Dooro	Cerme	47 (186.400.000)
	Desa Sedapurklagen	Benjeng	1 (17.000.000)
	Desa Kalipadang	Benjeng	1 (50.000.000)
2015	Wedoroanom	Driyorejo	35.000.000,00
	Banyuurip	Kedamean	51.450.000,00
	Kesamben wetan	Driyorejo	50.000.000,00
	Kelurahan Sidomoro	Kebomas	60.000.000,00
	SMAN 1 Balongpanggang	Balongpanggang	30.000.000,00
	Mojowuku	Kedamean	22.500.000,00
	Tambak rejo	Duduk sampeyan	50.000.000,00
2016	Ds.Pangkah Wetan	Ujungpangkah	
	Ds.Cangkir	Driyorejo	
	Ds.Daun	Sangkapura	
	Ds.Sungonlegowo	Bungah	
	Ds.Bululajang	Sangkapura	
	Ds.Kertosono	Sidayu	
	Ds.Bedilan	Gresik	
	Ds.Manyar Sidorukun	Manyar	
	Ds.Abar-abir	Bungah	
	Ds.Raci Tengah	Sidayu	
	Ds.Kesamben	Wringinanom	

Sumber : BPBD Tahun 2011-2015

Penanganan Bencana Angin puting Beliung di Kab Gresik antara lain:

- 1. Pendirian Posko Siaga Bencana;
- 2. Menyiapkan peralatan pemotongan untuk pohon tumbang;

3. Koordinasi dengan Dinas dan Instansi Terkait (Dinas PU, DLH, PLN dan Telkom);
4. Survey lokasi saat terjadi Pasca Bencana;
5. Menindaklanjuti Proposal ganti rugi rumah yang tertimpa;
6. Pemberian paket sembako;
7. Memberikan paket kebutuhan pokok.

e. Tanah Longsor

Bencana Tanah longsor di Kabupaten Gresik dengan status bencana lokal kabupaten selama tahun 2011 s/d 2015 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.14
 Bencana Tanah Longsor Kabupaten GresikTahun 2011-2015

Tahun	Tempat Kejadian	Kerusakan / Kerugian
1	2	3
2011	Tidak ada laporan kejadian	
2012	Desa Jono Desa Pandu, Kec. Cerme, Desa Tirem Enggal, Kec. Dukun.	Rp82.000.000
2013	Tidak ada laporan kejadian	
2014	Teluk Jati Dawang Kotakusuma; (Tambak) Sawahmulya; Gunungteguh; Daun; Balikterus ; Lebak (Sangkapura)	572 Rumah; Jalan Desa = 259 m; Jalan Raya = 600 m; Tanggul Jebol = 44; Jembatan = 4
2015	Kecamatan Kedamean	1 rumah
2016	Kecamatan Tambak yaitu Desa Kepuhlegundi dan Kepuh Teluk	

Sumber : BPBD Tahun 2011-2016

Penanganan Bencana Tanah Longsor di Kab Gresik antara lain:

1. Pendirian Posko Siaga Bencana;
2. Pelaksanaan evakuasi korban tanah longsor;
3. Koordinasi dengan Dinas dan Instansi Terkait (Dinas PU. DLH, PLN, PEmadam Kebakaran dan Telkom);
4. Survey lokasi saat terjadi Pasca Bencana;
5. Menindaklanjuti Proposal ganti rugi rumah yang tertimpa;
6. Pemberian paket sembako;
7. Memberikan paket kebutuhan pokok.

Di Kabupaten Gresik, Terdapat 66 Desa yang teridentifikasi mengalami Rawan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik sampai dengan tahun 2016 berhasil membentuk 34 desa tangguh bencana dari total Desa yang teridentifikasi Desa Rawan Bencana atau sebesar 51,51%. Desa Tangguh merupakan program Nasional/dari BNPB dalam rangka mewujudkan Indonesia Tangguh. Program ini merupakan wujud tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam hal

Penanggulangan Bencana. Karena masyarakat yang merupakan penerima dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku pertama dan langsung yang akan merespon bencana disekitarnya. Masyarakat yang tangguh bencana ialah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Dan jika terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dapat dengan cepat memulihkan diri secara mandiri.

2.1.1.8 Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2016 sebanyak 1.310.439 jiwa yang terdiri dari 659,578 laki-laki dan 650.861 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2016 sebesar 1.100 jiwa/Km2. Sedangkan angka rasio jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan pada tahun 2015 sebesar 1:1,013. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik
Tahun 2015-2016

N O	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Per Desember 2016						Luas Wilaya h
		2015			2016			
		L	P	Total	L	P	Total	
1	DUKUN	33,826	33,317	67,143	34,181	33,563	67,744	59,03
2	BALONGPANGG ANG	29,22	29,366	58,586	29,050	29,193	58,243	63,88
3	PANCENG	26,213	25,823	52,036	26,495	26,024	52,519	62,59
4	BENJENG	33,105	33,048	66,153	33,207	33,059	66,266	61,26
5	DUDUKSAMPEY AN	25,459	25,51	50,969	25,440	25,419	50,859	74,29
6	WRINGINANOM	36,382	35,968	72,35	36,674	36,170	72,844	62,62
7	UJUNGPANGKA H	25,538	25,378	50,916	25,771	25,465	51,236	94,82
8	KEDAMEAN	31,578	31,297	62,875	31,698	31,332	63,030	65,96
9	SIDAYU	21,946	21,622	43,568	22,074	21,773	43,847	47,13
10	MANYAR	56,475	54,73	111,205	57,314	55,548	112,862	95,42
11	CERME	39,232	39,251	78,483	39,263	39,070	78,333	71,73
12	BUNGAH	33,688	33,372	67,06	33,877	33,299	67,176	79,49
13	MENGANTI	61,035	59,898	120,933	61,749	60,499	122,248	68,71
14	KEBOMAS	52,371	51,321	103,692	53,316	52,340	105,656	30,06
15	DRIYOREJO	51,948	51,161	103,109	52,403	51,492	103,895	51,3
16	GRESIK	43,305	43,629	86,934	43,068	43,349	86,417	5,54
17	SANGKAPURA	34,855	34,796	69,651	34,817	34,464	69,281	118,72
18	TAMBAK	19,284	18,826	38,11	19,181	18,802	37,983	78,7

JUMLAH	655,46	648,31	1,303,77	659,57	650,86	1,310,43	1.191,2
		3	3	8	1	9	5

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2017

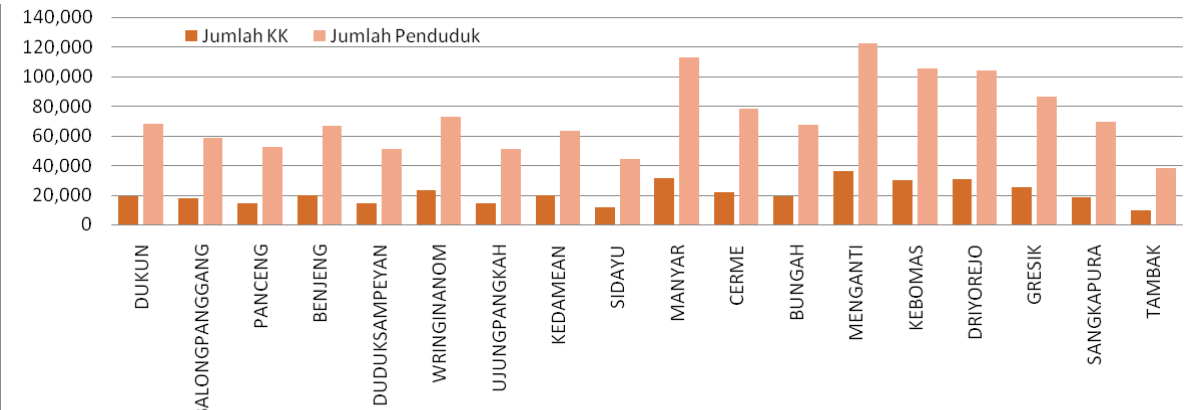
Jumlah penduduk Gresik tahun 2016 mengalami kenaikan 0,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Laju kenaikan penduduk ini kecil selain dipengaruhi fluktuaktif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 sebanyak 376.023 keluarga. Dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebanyak 366,554 keluarga maka terjadi kenaikan jumlah keluarga sebanyak 2.180 Keluarga atau 0,02%. Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.16
Jumlah Keluarga di Kabupaten Gresik Tahun 2015-2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH KK	
			2015	2016
1	DUKUN	26	18,632	19,209
2	BALONGPANGGANG	25	17,403	17,667
3	PANCENG	14	14,124	14,583
4	BENJENG	23	19,32	19,681
5	DUDUKSAMPEYAN	23	14,02	14,306
6	WRINGINANOM	16	22,485	22,944
7	UJUNGPAKKAH	13	14,103	14,526
8	KEDAMEAN	15	19,159	19,493
9	SIDAYU	21	11,52	11,816
10	MANYAR	23	30,237	31,374
11	CERME	25	21,488	21,882
12	BUNGAH	22	18,346	18,819
13	MENGANTI	22	34,775	35,891
14	KEBOMAS	21	28,839	30,020
15	DRIYOREJO	16	29,787	30,583
16	GRESIK	21	24,478	25,006
17	SANGKAPURA	17	18,147	18,408
18	TAMBAK	13	9,691	9,815
JUMLAH		356	366,554	376,023

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten GresikTahun 2017

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya, berikut digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan kepemilikan kartu keluarga sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.6

Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Gresik Tahun 2016

Sumber : Dispendukcapil Kabupaten GresikTahun 2017

Berdasarkan diagram di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2016, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 35.891KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 122,248 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 9.815 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 37.983 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur produktif (15-64 tahun) mendominasi piramida penduduk dengan persentase 70,7%. Kelompok usia 0-14 tahun mencapai 23,4% sedangkan kelompok usia 65 tahun ke atas mencapai 6,04%. Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2016

KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PROSENTASE
0-4	53,123	49,680	102,803	7.84%
5-9	51,849	48,369	100,218	7.65%
10-14	53,416	50,268	103,684	7.91%
15-19	52,938	50,287	103,225	7.88%
20-24	50,836	49,069	99,905	7.62%
25-29	47,731	46,708	94,439	7.21%
30-34	57,191	57,051	114,242	8.72%
35-39	57,770	57,247	115,017	8.78%
40-44	55,100	54,136	109,236	8.34%
45-49	48,311	47,794	96,105	7.33%
50-54	40,117	40,161	80,278	6.13%
55-59	33,324	33,549	66,873	5.10%
60-64	24,077	21,083	45,160	3.45%
65-69	13,447	15,458	28,905	2.21%
70-74	8,939	11,428	20,367	1.55%
75 th ke atas	11,409	18,573	29,982	2.29%
JUMLAH	659,578	650,861	1,310,439	100%

Sumber data: Dispendukcapil Kabupaten GresikTahun 2017

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas penduduk Gresik telah menamatkan Sarjana S1 sebagai sebagai pendidikan terakhirnya diikuti

sekolah menengah atas dan sederajat, serta diploma sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Jenis Data	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Tidak TAmat SD	93	59	82	27	30
2	Tamat SD	135	94	71	47	19
3	Tamat SMP	188	195	150	119	23
4	Tamat SMA	14.015	11.977	12.898	13.633	13.907
5	Diploma		186.671	186.671		11.251
6	Sarjana S1		17.546	17.546		63.814
7	Sarjana S2		21.414	21.414		2.804
8	Sarjana S3		1.008	1.008		67

Sumber Data : Sistem Informasi Pembangunan Daerah

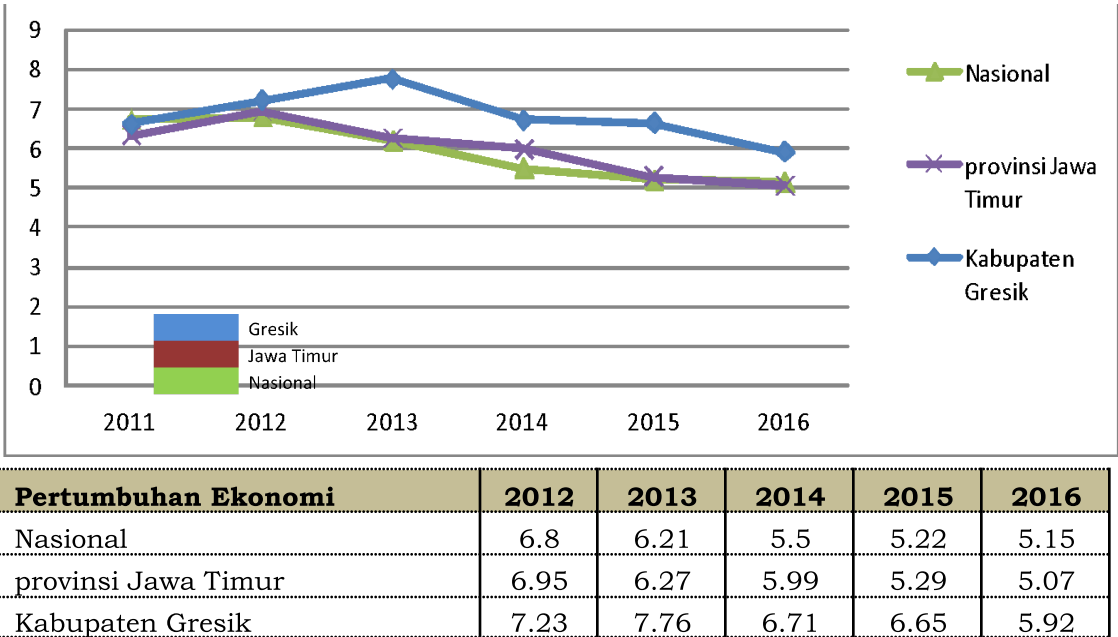
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Gresik dapat dielaborasi kedalam tiga fokus utama, yaitu Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Masyarakat, dan Fokus Seni Budaya dan Olah Raga. Identifikasi terhadap ke tiga fokus utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Perkembangan ekonomi makro dalam kerangka ekonomi daerah ditunjukkan pada pertumbuhan ekonomi, Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka hingga capaian pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik.

Ekonomi Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan sebesar 6,65% pada tahun 2015. Kondisi ini melambat 0,6 poin dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 6.71%. Ditinjau berdasarkan posisi relatif Gresik terhadap Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Gresik di atas ekonomi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan 5,44% pada tahun 2015 atau melambat 0,42 poin dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,86%. Kondisi ini selaras bila ditinjau dari posisi relatif Gresik terhadap nasional pada tahun tahun 2015 yang tumbuh 4,79 persen atau melambat bila dibanding tahun 2014 yang mencapai 5,02 persen. Posisi relatif perbandingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dengan daerah sekitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

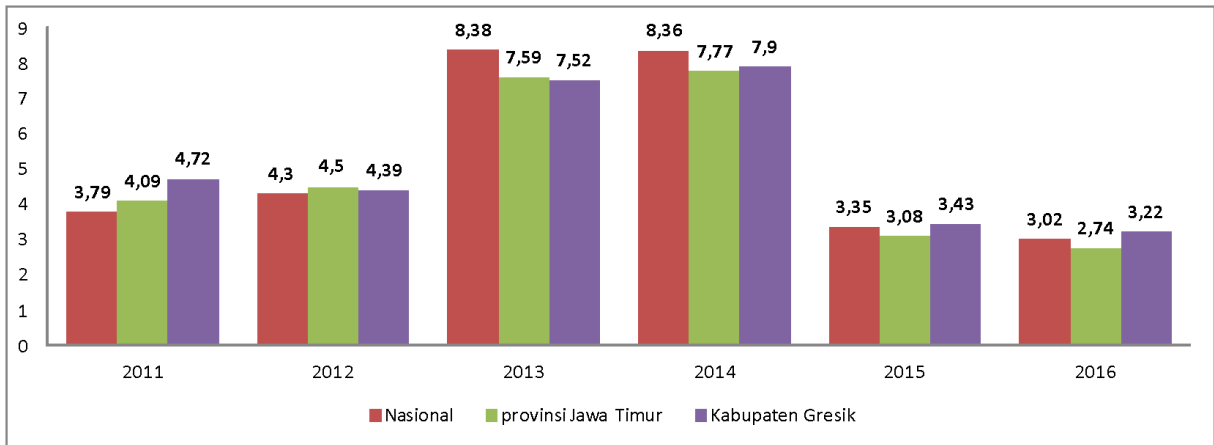


Gambar 2.8
Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Gresik dengan
Provinsi Jawa Timur, dan Nasional
Sumber : BPS Tahun 2017

Selama tahun 2011-2016, tingkat inflasi Kabupaten Gresik menunjukkan fluktuasi yang tinggi yang disebabkan oleh pelbagai faktor baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional seperti kenaikan tarif dasar listrik, tarif angkutan, kenaikan harga BBM, kerusakan infrastuktur yang menghambat distribusi, hingga terjadinya force major seperti bencana alam. Pengendalian tingkat inflasi merupakan upaya dalam menciptakan ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah pengembangan ekonomi serta daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sedangkan laju inflasi Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 3,01%. Data inflasi Kabupaten Gresik Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2.9

Laju Inflasi Kab. Gresik Tahun 2012-2016



Sumber data: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2017

Ditinjau dari kerangka ekonomi makro berdasarkan data termutakhir, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kabupaten Gresik mencapai 85,8 juta per kapita dengan perhitungan migas dan gini ratio 0,31 atau ketimpangan rendah. Penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik adalah industri pengolahan dengan kontribusi mencapai 47-54%. Adapun sektor pertambangan dan penggalian dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi kontributar terbesar kedua dan ketiga dengan dengan valuasi yang berimbang yaitu 10,6 -11,4 Milyar Rupiah. Sedangkan sektor dengan kontribusi terkecil adalah Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan rata-rata nilai 48 Juta Rupiah.

Adapun secara rinci PDRB Kabupaten Gresik dapat dilihat sebagaimana tabel beriku:

Tabel 2.19
Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Gresik (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.535.009,4	6.304.242,1	7.252.042,5	8.274.300,5	9.038.999,0
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.674.936,9	2.907.101,9	3.215.871,1	3.537.647,4	3.736.322,6
	a. Tanaman Pangan	1.410.373,2	1.527.114,4	1.693.284,0	1.856.673,9	1.926.006,2
	b. Tanaman Hortikultura	101.448,3	105.652,5	119.395,0	130.606,7	142.759,9
	c. Perkebunan	218.665,6	235.528,1	262.285,4	291.344,3	308.156,0
	f. Peternakan	908.453,8	998.316,9	1.094.517,7	1.205.849,6	1.300.869,5
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	35.996,0	40.489,9	46.388,9	53.172,9	58.531,1
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	2.141,2	2.370,2	2.662,0	2.980,0	2.902,2
	3 Perikanan	2.857.931,3	3.394.770,0	4.033.509,4	4.733.673,2	5.299.774,2
B	Pertambangan dan Penggalian	9.827.424,3	10.245.762,8	11.463.102,3	8.771.931,6	7.574.492,2
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	8.628.033,9	8.982.072,3	10.033.865,3	7.185.668,1	5.874.775,6
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.199.390,4	1.263.690,5	1.429.237,0	1.586.263,5	1.699.716,6
C	Industri Pengolahan	36.088.595,4	39.960.124,3	45.217.878,8	49.572.708,3	52.567.458,8
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	418.110,1	492.499,3	501.597,4	489.534,4	483.062,6
	a. Industri Batu Bara	10.726,5	8.517,5	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	407.383,6	483.981,8	501.597,4	489.534,4	483.062,6
	2 Industri Makanan dan Minuman	6.523.063,8	7.089.644,6	7.992.391,8	9.651.566,1	11.442.043,5
	3 Pengolahan Tembakau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	959.865,1	1.061.793,1	1.189.930,7	1.263.247,5	1.375.465,5
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	500.198,5	577.890,8	655.168,7	720.475,7	791.033,0
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	5.909.180,2	6.538.161,0	7.407.903,4	7.617.702,7	7.655.884,7

7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2.135.191,2	2.199.997,0	2.355.636,2	2.575.180,6	2.790.002,2
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	9.316.487,4	10.910.904,0	12.870.693,0	14.171.659,7	14.410.733,3
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1.444.399,0	1.472.002,8	1.582.239,3	1.656.060,0	1.660.105,2
10 Industri Barang Galian bukan Logam	2.058.130,7	2.225.122,5	2.412.305,2	2.653.051,3	2.691.211,8
11 Industri Logam Dasar	2.414.364,6	2.599.763,7	3.051.536,2	3.039.948,6	3.240.991,6
12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	2.223.641,2	2.450.121,7	2.615.266,9	2.881.936,1	2.988.289,8
13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	93.947,0	96.510,7	107.312,1	119.207,0	127.512,1
14 Industri Alat Angkutan	717.907,6	783.381,3	840.908,9	919.630,2	970.702,4
15 Industri Furnitur	1.132.750,9	1.217.583,5	1.367.627,6	1.524.127,9	1.635.776,0
16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	241.358,1	244.748,3	267.361,3	289.380,3	304.645,1
Pengadaan Listrik dan Gas	360.991,5	363.811,1	412.948,0	464.121,5	510.547,0
1 Ketenagalistrikan	356.458,4	358.969,3	407.510,7	457.989,9	504.115,2
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	4.533,1	4.841,8	5.437,4	6.131,6	6.431,7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46.488,6	52.878,8	56.577,8	62.525,5	69.039,1
Konstruksi	5.765.918,0	6.623.078,6	7.746.726,3	8.876.471,5	10.212.251,4
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.340.282,9	9.564.482,2	10.617.743,2	12.183.312,8	13.873.126,6
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2.666.403,2	3.178.781,6	3.444.321,2	3.684.212,1	4.052.007,0
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	5.673.879,7	6.385.700,6	7.173.422,0	8.499.100,7	9.821.119,6
Transportasi dan Pergudangan	1.589.251,3	1.794.461,8	2.062.787,5	2.319.528,1	2.544.864,7
1 Angkutan Rel	4.551,2	5.363,8	6.896,4	8.547,7	10.036,5
2 Angkutan Darat	378.097,0	416.267,1	473.902,5	538.754,2	608.107,3
3 Angkutan Laut	322.617,5	362.239,9	419.803,0	481.386,0	527.480,7
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	3.926,3	4.376,3	4.787,7	5.257,1	5.737,7
5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	5.804,5
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	880.059,4	1.006.214,8	1.157.398,0	1.285.583,1	1.387.698,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	789.221,9	892.743,7	1.053.473,6	1.227.220,9	1.427.925,7
1 Penyediaan Akomodasi	25.689,4	30.812,8	38.898,7	41.470,8	45.155,4
2 Penyediaan Makan Minum	763.532,6	861.930,9	1.014.574,9	1.185.750,0	1.382.770,3
Informasi dan Komunikasi	2.687.928,8	3.019.245,0	3.221.708,5	3.654.736,9	4.116.188,2

K	Jasa Keuangan dan Asuransi	763.654,3	888.457,4	997.535,5	1.139.195,6	1.285.909,8
	1 Jasa Perantara Keuangan	482.185,8	577.300,0	646.317,3	744.463,0	838.533,1
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	65.218,0	73.022,7	83.208,3	94.392,8	107.314,5
	3 Jasa Keuangan Lainnya	214.532,5	236.109,4	265.747,3	297.851,2	337.275,2
	4 Jasa Penunjang Keuangan	1.718,0	2.025,3	2.262,5	2.488,5	2.787,0
L	Real Estate	875.947,7	968.157,8	1.037.164,5	1.191.245,7	1.336.191,6
M,N	Jasa Perusahaan	194.965,5	221.696,0	245.394,8	272.918,8	302.834,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.005.892,8	1.063.516,3	1.078.834,3	1.215.931,9	1.365.981,8
P	Jasa Pendidikan	611.016,6	679.522,5	751.311,5	837.051,1	922.896,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	262.153,5	292.050,9	332.793,2	373.451,5	407.580,9
R,S,T,U	Jasa lainnya	201.541,6	218.772,8	249.683,3	287.135,2	325.686,3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		74.946.284,2	83.153.004,3	93.797.705,6	100.723.787,3	107.881.973,0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		65.910.866,8	73.686.950,2	83.262.242,9	93.048.584,8	101.524.134,9

Sumber :Badan Pusat Statistik Tahun 2017

Tabel 2.20

Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Gresik (Juta Rupiah)

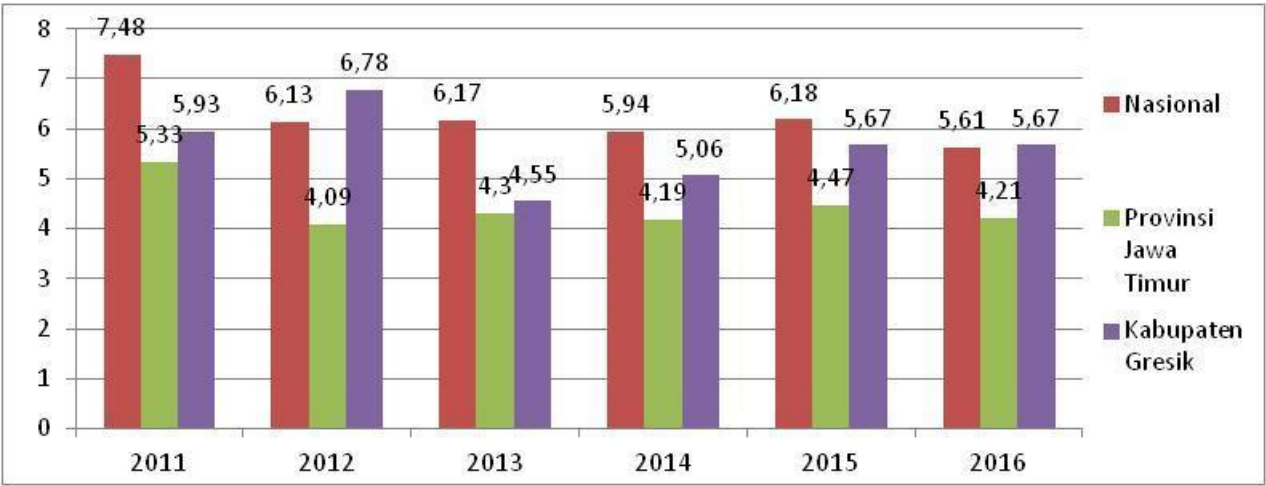
Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.730.239,2	4.986.429,5	5.244.731,7	5.563.337,9	5.910.982,6
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.286.885,7	2.273.514,8	2.305.759,3	2.363.140,9	2.430.496,0
	a. Tanaman Pangan	1.209.129,7	1.193.887,9	1.216.692,3	1.256.356,5	1.292.037,0
	b. Tanaman Hortikultura	95.468,2	94.750,6	95.747,8	97.626,2	100.836,8
	c. Perkebunan	183.928,1	183.224,7	186.383,2	189.719,4	190.780,3
	f. Peternakan	767.138,1	769.398,9	773.363,7	785.556,0	812.674,6
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	31.221,5	32.252,7	33.572,3	33.882,7	34.167,3
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.821,2	1.983,7	1.949,7	2.005,8	1.814,0
	3 Perikanan	2.441.532,4	2.710.931,1	2.937.022,7	3.198.191,3	3.478.672,6
B	Pertambangan dan Penggalian	8.348.891,1	7.797.528,9	8.531.409,3	9.038.143,9	9.234.194,0
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	7.233.054,6	6.669.000,1	7.378.425,9	7.845.267,4	8.003.741,8
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.115.836,5	1.128.528,8	1.152.983,4	1.192.876,6	1.230.452,2
C	Industri Pengolahan	32.380.789,3	34.834.077,5	37.267.132,5	39.359.843,1	41.016.851,0
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	525.303,1	535.262,8	538.394,1	543.006,1	538.282,0
	a. Industri Batu Bara	10.637,7	8.942,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	514.665,4	526.320,8	538.394,1	543.006,1	538.282,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	5.647.702,4	5.945.901,1	6.319.303,7	7.216.653,0	8.149.044,5
	3 Pengolahan Tembakau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	830.654,4	889.464,8	950.624,4	990.455,5	1.057.686,9
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	430.876,3	461.352,2	503.073,9	516.931,7	551.721,2
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	5.492.318,3	5.846.572,8	6.182.283,0	6.140.862,5	6.098.839,3
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1.944.144,6	1.954.370,8	1.962.923,2	2.050.121,6	2.178.330,4

	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	8.017.834,2	9.096.633,7	10.113.855,7	10.798.552,2	10.951.081,7
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1.347.011,8	1.364.811,2	1.447.136,6	1.507.482,2	1.537.207,8
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	1.868.726,0	1.998.041,8	2.008.271,8	2.133.387,1	2.131.467,1
	11 Industri Logam Dasar	2.138.969,3	2.319.363,5	2.639.528,5	2.657.480,6	2.842.707,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	2.077.413,4	2.240.822,7	2.298.098,1	2.405.649,1	2.487.200,6
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	85.872,3	86.249,2	87.756,6	89.731,1	92.663,0
	14 Industri Alat Angkutan	664.121,8	716.274,0	767.201,1	796.738,3	815.461,7
	15 Industri Furnitur	1.073.920,2	1.140.997,2	1.197.682,0	1.254.332,3	1.316.421,8
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	235.921,3	237.959,6	250.999,8	258.459,8	268.736,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	389.814,3	417.222,3	448.249,8	445.800,8	467.482,5
	1 Ketenagalistrikan	385.956,7	413.176,9	443.996,9	441.327,4	462.864,2
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	3.857,5	4.045,4	4.252,9	4.473,4	4.618,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43.074,1	46.400,2	47.060,0	49.394,2	51.789,8
F	Konstruksi	5.397.869,1	5.842.464,5	6.315.840,3	6.939.213,7	7.617.068,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.652.725,2	8.377.567,7	8.935.823,0	9.757.223,8	10.546.822,7
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2.426.712,1	2.665.012,8	2.839.784,3	2.910.641,1	3.115.531,9
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	5.226.013,1	5.712.554,9	6.096.038,7	6.846.582,7	7.431.290,8
H	Transportasi dan Pergudangan	1.433.700,4	1.528.906,4	1.619.184,7	1.721.756,2	1.819.887,3
	1 Angkutan Rel	3.598,3	3.603,0	3.882,0	4.226,0	4.597,4
	2 Angkutan Darat	372.934,4	394.363,2	416.171,5	441.016,9	476.033,6
	3 Angkutan Laut	309.537,4	332.056,2	353.307,8	371.821,2	386.991,5
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	3.647,1	3.751,8	3.858,0	3.980,7	4.063,1
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	2.905,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	743.983,3	795.132,2	841.965,4	900.711,5	945.296,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	712.587,7	765.685,8	835.346,0	908.408,6	995.088,1
	1 Penyediaan Akomodasi	21.635,5	23.658,4	26.308,4	27.858,0	30.356,9
	2 Penyediaan Makan Minum	690.952,1	742.027,3	809.037,6	880.550,6	964.731,2
J	Informasi dan Komunikasi	2.619.147,4	2.938.569,2	3.131.927,1	3.345.974,1	3.638.412,3

	2 Penyediaan Makan Minum	690.952,1	742.027,3	809.037,6	880.550,6	964.731,2
J	Informasi dan Komunikasi	2.619.147,4	2.938.569,2	3.131.927,1	3.345.974,1	3.638.412,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	687.098,1	771.520,6	811.255,1	870.799,5	935.510,9
	1 Jasa Perantara Keuangan	430.916,2	492.416,5	521.794,1	567.920,7	611.025,9
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	58.582,1	66.939,7	68.016,4	71.675,7	75.159,1
	3 Jasa Keuangan Lainnya	196.094,9	210.496,1	219.694,7	229.397,4	247.405,1
	4 Jasa Penunjang Keuangan	1.504,9	1.668,3	1.749,9	1.805,7	1.920,7
L	Real Estate	836.475,4	891.850,1	948.999,9	1.006.176,3	1.095.625,3
M,N	Jasa Perusahaan	172.811,1	183.423,4	199.106,1	213.826,1	229.307,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	867.898,1	883.884,8	885.648,7	942.574,0	999.330,5
P	Jasa Pendidikan	539.815,9	576.431,6	616.608,9	665.223,4	713.053,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	242.115,1	267.740,4	282.845,0	305.289,5	324.461,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	193.740,0	204.476,0	214.879,7	227.458,7	239.241,1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		67.248.791,5	71.314.178,9	76.336.048,0	81.360.443,9	85.835.107,8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		59.501.071,5	64.118.858,0	68.419.227,9	72.972.170,4	77.293.084,0

Sumber :Badan Pusat Statistik Tahun 2017

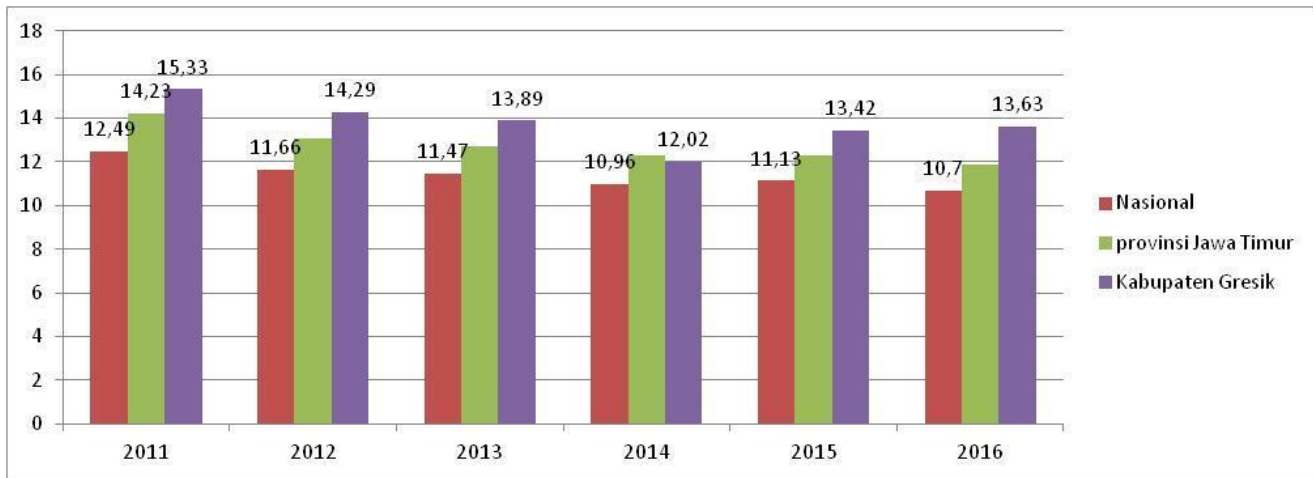
Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gresik pada tahun 2015 pada level 5,67% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 5.06%. secara *trendline* Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik selama Tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik menekan angka pengangguran pada tahun 2013 hingga mencapai 4.51% dari 6.72% pada tahun 2012 ternyata tidak diiringi pada tahun berikutnya. Pengangguran meningkat tipis 0.15% atau mencapai 5,06% pada tahun 2014 dan kembali meningkat mencapai 5,67% pada tahun 2016.. Gejolak tingkat pengangguran ini disebabkan oleh pelbagai hal persaingan pencari kerja yang kompetitif antara masyarakat lokal dan masyarakat di luar Gresik, kultur budaya pencari kerja, persyaratan kompetensi yang dibutuhkan, hingga bentuk investasi.



Sumber data: LKPJ Bupati Gresik Tahun 2016

Gambar 2.10
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kab. Gresik Tahun 2011-2016

Pada sektor pengentasan kemiskinan, Kabupaten Gresik telah meraih progress yang positif. Hal. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik lebih tinggi dari Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Tingkat Kemiskinan Nasional. Pada Tahun 2016, Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 12,05 % sedang Tingkat Kemiskinan Nasional adalah 11.47%. Pada perkembangan antar waktu, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 4 Tahun, yaitu Tahun 2011 – 2016, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik telah berkurang sebanyak 1,70 poin persen Selain Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Gresik juga mengindikasikan perubahan yang cukup baik.



Sumber data: BPS Tahun 2017

Gambar 2.11

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kab. Gresik Tahun 2011-2016

Perlambatan ini biasa terjadi setelah tingkat kemiskinan turun hingga level tertentu. Pada fase ini, penurunan kemiskinan membutuhkan upaya yang lebih keras, karena kemiskinan yang tersisa adalah kemiskinan kronis, atau sering disebut sebagai kerak kemiskinan. Fase ini membutuhkan upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih spesifik dan bersasaran.

Perhitungan jumlah masyarakat miskin dan rentan mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) Program Perlindungan Sosial. Data yang dikumpulkan oleh BPS dan dikelola oleh TNP2K ini menyediakan nama dan alamat setiap orang pada tingkat kesejahteraan 40% terendah pada rerata nasional. Pendataan BDT pertama kali dilakukan pada Tahun 2011 dan telah diperbaharui pada Tahun 2015. Selain digunakan sebagai basis data sasaran program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, data ini dapat memberikan informasi seberapa besar jumlah individu dan rumah tangga di Kabupaten Gresik yang berstatus kesejahteraan miskin dan rentan. Sementara data P0-P1-P2 merupakan data hasil survey dan tidak dapat dipetakan hingga level kecamatan atau desa, BDT memberikan informasi yang lebih detail dan dapat dipetakan hingga level kecamatan maupun desa. Di Kabupaten Gresik, data yang digunakan adalah 30% terendah rerata nasional, atau dikenal dengan desil 1,2 dan 3. Jumlah dan sebaran penduduk Kabupaten Gresik yang tercakup dalam desil 1,2 dan 3 BDT Tahun 2011 serta perbandingannya dengan Tahun 2015 terdapat pada Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.21
Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Kabupaten Gresik
(Penduduk Desil 1-3 Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial)

No	Kecamatan	Tahun 2011		Tahun 2015	
		Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Individu	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Individu
1	WRINGINANOM	8.087	27.907	6,081	19,030
2	DRIYOREJO	7.511	29.509	4,639	16,207
3	KEDAMEAN	6.942	24.710	5,690	18,895
4	MENGANTI	7.466	27.808	5,924	21,120
5	CERME	6.181	24.182	5,428	21,166
6	BENJENG	6.823	26.065	6,018	21,710
7	BALONGPANGGANG	4.759	17.279	4,479	16,431
8	DUDUKSAMPEAN	4.973	20.019	4,506	17,440
9	KEBOMAS	2.643	10.859	2,193	8,194
10	GRESIK	2.075	7.615	2,532	9,386
11	MANYAR	5.232	22.500	4,183	16,217
12	BUNGAH	5.532	23.619	5,155	19,939
13	SIDAYU	4.536	18.698	4,172	16,628
14	DUKUN	6.240	25.606	5,995	23,139
15	PANCENG	5.167	18.908	4,628	16,945
16	UJUNG PANGKAH	5.297	22.071	5,143	20,193
17	SANGKAPURA	5.135	20.364	5,013	19,041
18	TAMBAK	2.837	11.094	2,989	10,357
Jumlah		97.426	378.813	84,768	312,038

Sumber Data: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (BDT / PPLS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), diolah.

Jumlah penduduk Desil 1-3 bervariasi pada tiap kecamatan. Yang terendah adalah Kecamatan Kebomas, dengan jumlah 8,194 jiwa, sedang yang tertinggi adalah kecamatan Dukun dengan jumlah 23,139 jiwa. Adapun sebaran jumlah Desil 1-3 per kecamatan se Kabupaten Gresik sebagaimana pada Gambar berikut.

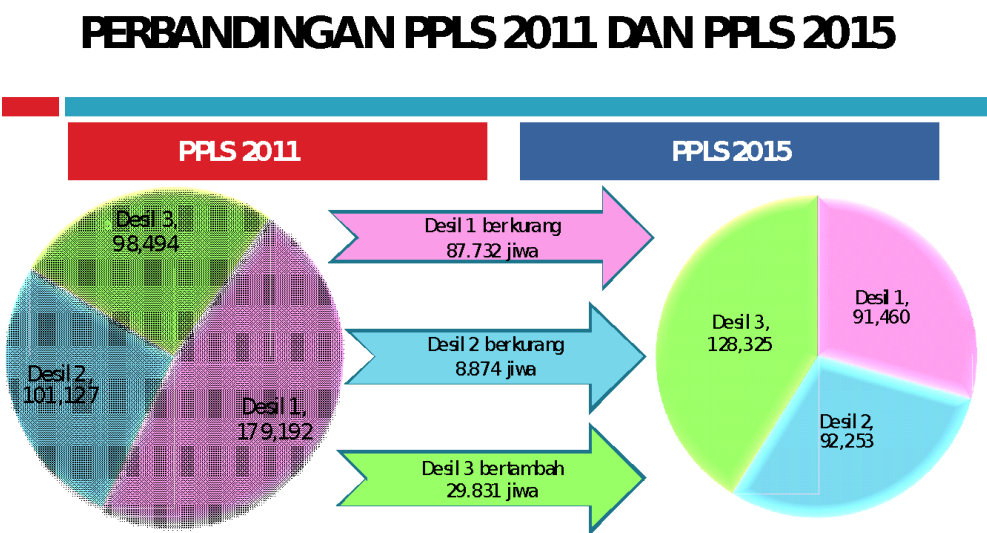


Gambar 2.12

Sebaran Penduduk Miskin dan Rentan Kabupaten Gresik
(Penduduk Desil 1-3 Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial)

Sumber Data: Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (BDT / PPLS),
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),
diolah.

Jumlah penduduk Kabupaten Gresik yang tercatat dalam Desil 1-3 BDT 2011 adalah sebesar 378.813 individu yang terdiri dari 97.426 rumah tangga. Pada BDT 2015, jumlah ini menurun menjadi 312.028, yang terdiri dari 84.768 rumah tangga. Indikasi naiknya tingkat kesejahteraan ini didukung dengan pergeseran desil yang mendominasi BDT. Pada BDT 2015 Kabupaten Gresik didominasi oleh Desil 3 (...%), sementara BDT 2011 didominasi oleh Desil 1. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan pada kelompok masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Gresik.



Gambar 2.13

Perbandingan Desil pada BDT 2011 dan BDT 2015 Kabupaten Gresik
(Penduduk Desil 1-3 Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial)

Jumlah alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2011 s.d. 2015 terus menunjukkan peningkatan hingga Tahun 2014. Pada Tahun 2015, jumlah alokasi anggaran ini menurun dikarenakan berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, sehingga PAPBD tidak lagi mengalokasikan anggaran Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) kegiatan dimaksud.

Tabel 2.22

Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan 2011-2015
di Kabupaten Gresik

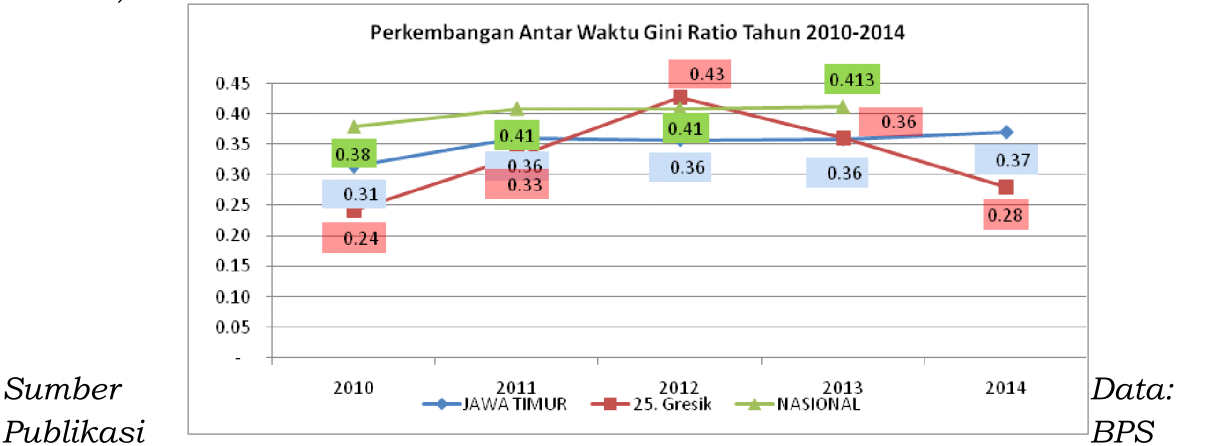
Tahun	Gresik	Jawa Timur	Nasional
(a)	(b)	(c)	(d)
2011	36,325,491,245	4,858,830,000	65,647,850,562

2012	55,982,716,000	4,074,530,000	93,817,009,000
2013	73,559,146,300	4,415,915,164	136,783,221,447
2014	80,983,773,068	2,460,650,322	170,844,802,363
2015	53,580,035,532	5,709,149,150	149,511,080,602

Sumber data: APBD Kabupaten Gresik

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Pada kurun waktu lima tahun, yaitu Tahun 2010 hingga Tahun 2014, perkembangan antar waktu Indeks Gini Kabupaten Gresik menunjukkan pergerakan yang berbeda dengan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Sementara angka provinsi dan nasional menunjukkan kurva landai dan cenderung stagnan, Indeks Gini Kabupaten Gresik justru terlihat meningkat dan menurun dengan tajam. Pada Tahun 2012, Indeks Gini Kabupaten Gresik mencapai nilai tertinggi dalam lima tahun, yaitu 0,43 lalu mulai menurun. Pada Tahun 2014, Indeks Gini Kabupaten Gresik sebesar 0.28 dan masih lebih tinggi dari Indeks Gini Tahun 2010, yaitu 0.22. Meskipun demikian, nilai ini telah berhasil menjadi lebih rendah daripada Indeks Gini Provinsi Jawa Timur di tahun yang sama sebagaimana digambarkan sebagai berikut;



Gambar 2.14
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat antara lain dapat diketahui melalui indikator sebagai berikut :

2.2.2.1 Pendidikan

a. Angka Melek Huruf Umur 15 Tahun Keatas

Melek huruf pernah digunakan sebagai variabel dalam formulasi Pengukuran Human Development Index (HDI). Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, sebagaimana pada Tabel 2.20 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, Kabupaten Gresik telah bebas dari buta huruf. Selama lima tahun, Angka Melek Huruf berhasil dipertahankan 100%. Hal ini menandakan kesuksesan program pendidikan dasar di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.23

Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten GresikTahun 2011 – 2015

NO.	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek Huruf (tidak buta aksara)						
	Angka Melek Huruf	%	100	100	100	100	100
	Penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis	Orang	661,927	846,674	976,448	1,014,458	1.019.552
	Penduduk usia 15 tahun ke atas	Orang	661,927	846,674	976,448	1,014,458	1.019.552

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 – 2015

b. Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah (mean years school/MYS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan. MYS bersama dengan angka melek huruf, merupakan salah satu variabel komposit indeks pembangunan manusia (IPM/HDI).

Tabel 2.24

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Gresik Tahun 2011-2014

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Angka rata-rata lama sekolah	8,84	8,98	9,00	9,02

Sumber data : Susenas 2011-2014

Tabel 2.21 menunjukkan bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) di Kabupaten Gresik terus meningkat. Pada Tahun 2011, MYS adalah 8.84 tahun, yang berarti rata-rata penduduk Kabupaten Gresik tidak menyelesaikan jenjang SMP. Sedangkan di Tahun 2014, MYS menunjukkan angka 9.02, yang menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Gresik menyelesaikan SMP. Meskipun kondisi ini merupakan perkembangan yang baik, namun juga merupakan pekerjaan rumah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada Gambar 2.9 Piramida Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2015, struktur usia penduduk Kabupaten Gresik didominasi oleh usia produktif, dengan proporsi beban muda lebih tinggi daripada beban usia tua. Kondisi ini merupakan kesempatan langka yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas daerah yang tinggi melalui pemanfaatan SDM yang produktif. Untuk itu, peningkatan pendidikan, terutama untuk menyiapkan angkatan kerja yang berkualitas adalah sangat mendesak. Kabupaten Gresik mempunyai struktur ekonomi yang didominasi oleh industry manufaktur. Dengan rata-rata lama sekolah hanya tingkat SMP, angkatan kerja di Kabupaten Gresik akan didominasi oleh tenaga kerja tidak berpendidikan dan tidak berketerampilan, sehingga rentan untuk tersisih dari persaingan dunia kerja, terutama dengan masuknya tenaga kerja asing pasca MEA 2015.

c. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasiMurini (APM) merupakan salah satu indikatordalam melihat keberhasilan program-program pendidikan yang telah dilakukan Kabupaten Gresik. APM untuk setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel2.25

APM SD, SMP, SMA di Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.3.	APM SD/MI	97,90	98,02	98,55	98,68	98,86
2	SMP/MTs					
2.3.	APM SMP/MTs	80,06	85,59	85,60	85,63	85,64
3	SMA/MA/SMK					
3.3.	APM SMA/MA/SMK	56,40	65,03	65,06	74,01	74,24

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Gresik Tahun 2016

APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket

A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Indikator ini menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Partisipasi murni menunjukkan peningkatan pada semua jenjang pendidikan pada kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2011 – 2015. Kenaikan tertinggi dicapai oleh APM SMA/MA/SMK, yaitu dari 56.40% pada Tahun 2011 menjadi 74.24% pada Tahun 2015. APM SD/MI dan APM SMP/MTS juga menunjukkan kenaikan meski tidak setajam tingkat SMA/MA/SMK.

d. Angka Kelulusan

Tabel 2.26

Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015

N O	AL	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD	100	100	100	100	100
2.	SMP	100	100	100	100	100
3.	SMA	100	100	100	100	100

Sumber data : Buku LKPJ Kab. Gresik Tahun 2011-2015

Angka Kelulusan dapat menjadi indikator kualitas atau kemampuan siswa / peserta didik di tiap jenjang pendidikan. Tabel 2.23 Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa dalam kurun 5 (lima) tahun ini, Angka Kelulusan tingkat SD, SMP maupun SMA di Kabupaten Gresik berhasil dipertahankan tetap 100%. Kondisi ini menunjukkan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang baik di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.27

Capaian Sasaran Urusan Pendidikan Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD);	83.00%	70.66%	85,13	Tinggi
2	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat	98.88%	98.62%	99,82	Sangat Tinggi
3	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat;	86.75%	86.04%	99,18	Sangat Tinggi
4	Angka Rata rata lama sekolah	9.02-9.10	9.2	101,10	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2017

Berdasarkan capaian Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD) dijelaskan bahwa dari kelompok usia 4-6 tahun sejumlah 58.178 anak sebesar 70,66% atau sebanyak 41.109 anak menempuh jalur

pendidikan PAUD. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat djielaskan bahwa dari kelompok usia 7-12 tahun sejumlah122.825 anak, sebesar 98,62% atau sebanyak 121.125 anak berada pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A. Pada Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat djielaskan bahwa dari kelompok usia 13-15 tahun sejumlah 58.386 anak sebesar 86.04% atau sebanyak 50.233 anak berada pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B. sedangkan pada pengukuran Angka Rata rata lama sekolah diketahui bahwa Angka Rata rata lama sekolah maysarakat Gresik meningkat menjadi 9,2 tahun lebih tinggi dibandingkan provinsi sebesar 8,7 tahun.

2.2.2.2 Kesehatan
h. Persentase Balita Gizi Buruk

Tabel 2.28
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan
Kabupaten Gresik Tahun 2011 - 2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu		261	214	194	137
2	Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk yg ditemukan disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama		261	214	194	137
3	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan =(1)/(2)x100	100	100	100	100	100

Sumber data : Buku LKPJ Kab. Gresik Tahun 2011-2015

Status Gizi Balita merupakan indikator penting untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat. Jumlah balita gizi buruk yang meningkat, selain merupakan indikator menurunnya kondisi social ekonomi masyarakat, juga akan diikuti dengan menurunnya kualitas SDM pada generasi selanjutnya. Ketercukupan gizi pada balita mutlak perlu untuk mewujudkan generasi muda yang berkualitas. Tabel 2.24 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan di Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa jumlah balita gizi buruk yang ditemukan di Kabupaten Gresik terus turun dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2012, tercatat 261 balita mengalami gizi buruk. Pada Tahun 2015, angka ini telah turun hampir setengahnya, hingga mencapai 137 balita. Adapun seluruh balita ini telah mendapatkan perawatan.

Tabel 2.29
 Capaian Sasaran Urusan Kesehatan Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup;	115.00	82,46	128,3	Sangat Tinggi
2	Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup;	4.15	3.44	117,1	Sangat Tinggi
3	Angka Usia Harapan Hidup	71.67-71.75 Tahun	72 Tahun	120,64	Sangat Tinggi
4	Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD	0.75	0.78	104.17	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2017

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 82,46 per 100.000 menunjukkan bahwa selama tahun 2016 terdapat 17 kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain dalam 20.617 kelahiran hidup dibanding per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Kondisi ini membaik dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 93.65 per 100.000 kelahiran hidup. Pada Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup juga menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2015 sebesar 3.59 menjadi 3,44 per 1000 kelahiran hidup. Angka menunjukan terdapat kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup sebanyak 71 jiwa pada Tahun 2016 atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun dibandingkan jumlah kelahiran sebanyak .617 kelahiran hidup.

Pada Angka Usia Harapan Hidup menunjukkan harapan peningkatan usia yang dramtis pada tahun sebelumnya sebesar 0,33 basis poin menjadi 72 tahun. Sedangkan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh rumah sakit memperoleh nilai survey Kepuasan Masyarakat 78,13% atau kategori baik. Kepuasan ini didukung oleh raihan RSUD Ibnu Sina terhadap Sertifikasi Akreditasi RS Versi 2012 dengan predikat lulus paripurna. Selain itu, peningkatan pelayanan dasar kesehatan diudukung fasilitas pelayanan kesehatan yang telah semakin banyak berstandar dan terakreditasi serta terjangkau baik akses maupun biaya. Dari 32 Puskesmas sebanyak 34,38 % telah terakreditasi serta bersertifikat ISO.

2.2.2.3 Ketenagakerjaan

Tabel 2.28

Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik Tahun 2011 - 2015

NO.	Uraian	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	%	66,04	58,03	64,24	62,59	65,76
	Jumlah penduduk Angkatan Kerja	orang	612.073	557.623	612.321	592.569	596.841
	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn)	orang	874.446	960.900	953.169	946.774	930.286
2	Penempatan para pencari kerja	%	30,52	33,47	28,76	83,16	92,61
	jumlah pencari kerja yang ditempatkan	orang	887	1.105	2.152	2.297	2.317
	jumlah pencari kerja yang mendaftar	orang	2.906	3.301	7.482	2.762	2.502
3	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	4,36	6,72	4,51	5,06	5,67
4	Kepatuhan terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja	%	58,71	70,47	60,05	68,67	90,52
	jumlah perusahaan yang memenuhi norma K3	Buah	593	747	681	846	1.184
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.010	1.060	1.134	1.232	1.308
5	Kepatuhan terhadap norma kerja	%	57,92	87,55	74,87	96,83	61,54
	Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan Norma Kerja	Buah	585	928	849	1.193	805
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.010	1.060	1.134	1.232	1.308
6	Kepatuhan terhadap norma jaminan social tenaga kerja	%	99,50	95,28	93,92	97,81	123,17
	Jumlah perusahaan yang memenuhi norma jamsostek	Buah	1.005	1.010	1.065	1.205	1.611(*)
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.010	1.060	1.134	1.232	1.308
7	Angka nihil kecelakaan kerja	%	0,89	2,83	3,44	5,19	5,96
	Jumlah perusahaan yang tidak mengalami kecelakaan kerja	Buah	9	30	39	64	78
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.010	1.060	1.134	1.232	1.308
	Penuntasan / penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	87,50	86,81	83,16	88,30	88,04

	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan secara tripartit oleh Disnakertrans dengan Persetujuan Bersama maupun yang diteruskan ke lembaga P4D dan P4P	Kasus	70	79	79	83	81
	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Disnakertrans	Kasus	80	91	95	94	92
9	Pemberlakuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	%	8,61	11,04	8,11	8.04	8,41
	Jumlah perusahaan yang sudah memberlakukan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Buah	87	117	92	99	110
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.010	1.060	1.134	1.232	1.308
10	Kepatuhan atas ketentuan mengenai pembentukan lembaga kerjasama Bipartit	%	2,11	33,79	20,82	23,56	21,13
	Jumlah perusahaan yang sudah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit	Buah			101	119	149
	Jumlah perusahaan yang wajib membentuk lembaga kerjasama Bipartit	Buah			485	505	705

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 – 2015 dan BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Keterangan *) = Data termasuk anak perusahaan yang tidak wajib lapor

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari kondisi capaian indikator ketenagakerjaan, diantaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.Dalam kurun waktu 2011-2015, TPAK Kabupaten Gresik menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Setelah turun tajam 8.01 poin pada Tahun 2012, diikuti dengan kenaikan sebesar 6,21 poin pada Tahun 2013, TPAK Kabupaten Gresik kembali menunjukkan kenaikan yang juga diikuti dengan penurunan pada tahun selanjutnya. Pada Tahun 2015, TPAK Kabupaten Gresik sebesar 66.04% masih lebih rendah 0.28 poin dari daripada TPAK Kabupaten Gresik Tahun 2011 yang mencapai 66.04%. Fluktuasi ini juga terlihat pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Termasuk Angkatan Kerja. Indikator lain juga berfluktuasi, namun capaian akhir Tahun 2015 menunjukkan hasil yang lebih baik daripada Tahun 2011.

Tabel 2.29
Capaian Sasaran Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2016			
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67.88%	67.88%	100%	Sangat Tinggi
2	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	88,54%	88,54%	100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Sosial Kab. Gresik Tahun 2017

Tingkat partisipasi Kerja Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 mencapai 67,88 %, mengalami peningkatan sebesar 0,06 % dibandingkan tahun 2015 yang mencapai angka 67,84%. Dari 750.255 penduduk usia kerja pada kelompok umur 20-69 tahun berdasarkan capaian ini dinyatakan 508.973 jiwa berhasil diidentifikasi berpartisipasi pada dunia kerja. Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal dan informal melalui Pengembangan dan perluasan informasi pasar kerja melalui “Gresik Job Fair” yang dilaksanakan rutin tiap Tahun. Pada Gresik Job Fair yang diadakan tahun 2016, jumlah perusahaan yang berpartisipasi sebanyak 35 perusahaan baik yang termasuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan menawarkan 1500 peluang kerja; Pelatihan Berbasis Kompetensi disertai sertifikasi kompetensi tenaga kerja di UPT Pelatihan Kerja (BLK), didukung dengan implementasi Pola 3 in1 (pelatihan-sertifikasi-penempatan); Revitalisasi UPT Pelatihan Kerja (BLK) melalui upgrading Instruktur, penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan, dan modernisasi peralatan pelatihan; Pembinaan di sektor informal melalui pelatihan/pembinaan dan pendampingan usaha mandiri (wirausaha); dan memperbanyak program magang di perusahaan bagi peserta pelatihan di UPT Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Sedangkan **Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** selama tahun 2016 mencapai 88,54%. Dari 103 jumlah perselisihan hubungan industrial yang terjadi, dapat diselesaikan sebanyak 91 kasus.

2.2.2.4Kepedulian HAM

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang peduli akan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HaK Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuaia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusaia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia berikut capaian kriteria Peduli hak asasi manusia Kabupaten Gresik berdasarkan data yang termutakhir.

Tabel 2.30
Rekapitulasi Capaian Kriteria Gresik Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2015

No	Kriteria	Capaian	Nilai
1	Hak Hidup		
1.1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	111.47	8
1.2	Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran Hidup	4,41	10
1.3	Tutupan Vegetasi pada Kawasan Lindung	Tidak ada perubahan	10
2	Hak Mengembangkan Diri		
2.1	Persentase anak usia 7-12 Tahun yang belum memperoleh pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SD)	0.047%	10
2.2	Persentase anak usia 13-15 Tahun yang belum memperoleh pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0,1%	10
2.3	Persentase anak berkebutuhan khusus yang memperoleh pendidikan	96,35%	10
2.4	Persentase penyandang buta aksara	0%	10
3	Hak atas Kesejahteraan		
3.1	Penyediaan air bersih untuk kebutuhan penduduk	43,314 liter/detik	6
3.2	Persentase Keluarga berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah	11,9%	0
3.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	9.18%	0
3.4	Angka Pengangguran	5,06%	10
3.5	Persentase penurunan anak ajalanan dari tahun 2013 ke Tahun 2014	Tidak ada perubahan	0
3.6	Prevelansi Balita Kurang Gizi	3,65%	4
3.7	Persentase rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap jaringan listrik	0,09%	10
4	Hak atas Rasa Aman		
4.1	Jumlah Demosntrasi Anarkis	0	10
5	Hak Perempuan		
5.1	Persentase Keterwakilan Perempuan dalam jabatan pemerintahan daerah	35%	10
5.2	Persentase kekerasan terhadap perempuan	0.02%	10

Sumber Diolah

Berdasarkan data di atas, komposit nilai peduli HAM Kabupaten Gresik pada tahun 2015 mencapai 75,29 atau 0,29 lebih tinggi di atas standar kepedulian HAM yaitu 75.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Tabel 2.31
Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Kabupaten Gresik
Tahun 2011 - 2015

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	5	12	9	18	18
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	5	5	6	6	6

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 – 2015 dan Data SIPD

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Gresik selama kurun waktu Tahun 2011-2015 menunjukkan perkembangan yang baik. Pada Tahun 2011, terselenggara festival seni dan budaya sebanyak 5 (lima) kali. Pada Tahun 2014 dan 2015, angka ini telah meningkat menjadi 18 kali. Adapun jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya bertambah dari 5 unit, pada Tahun 2011-2012, menjadi 6 unit pada Tahun 2013-2015.

Tabel 2.32
Capaian Sasaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
			2016		
1	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	40-50%	90,5 % (695 Pemuda Berprestasi)	>100	Sangat tinggi

Sumber Data: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Gresik Tahun2017

Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi mencapai 90,5% diukur dari 768 pemuda yang dibina pada tahun 2016 sebanyak695 pemuda berhasil meraih prestasi akademik dan non akademik. Prestasi yang diraih meliputi prestasi di bidang pengembangan kepribadian dan potensi diri sebanyak 693 pemuda dengan raihan 919 prestasi di tingkat Nasional, Jawa Timur, maupun Kejuaaran Daerah serta 2 Pemuda peserta Paskibraka.

2.2.3.1 Kebudayaan

Tabel 2.33
Persentase Peninggalan/cagar budaya (situs) yang dilestarikan

Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Total peninggalan / cagar budaya (situs) yang dimiliki daerah	Buah	38	38	38	38	46

Sumber: Data LKPJ Kabupaten Gresik

Tabel 2.27 menunjukkan bahwa seluruh cagar budaya / situs itu telah dilestarikan.

Tabel 2.34
Capaian Sasaran Urusan Kebudayaan Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Persentase Kelestarian Budaya	100%	100% 18 Cagar Budaya yang dilestarikan	100	Sangat tinggi

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Gresik Tahun 2017

Persentase Kelestarian Cagar Budaya mencapai 100% dengan melestarikan 18 cagar budaya.

2.2.3.2 Pemuda dan Olah Raga

a. Jumlah Organisasi Pemuda

Tabel 2.35
Jumlah organisasi pemuda yang aktif
Kabupaten Gresik Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Buah	-	26	30	26	26

Sumber data : SIPD Kab. Gresik

Jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Gresik sempat meningkat pada Tahun 2013, namun kembali pada jumlah 26 pada Tahun 2015. Jumlah ini sama dengan organisasi pemuda yang aktif pada Tahun 2012.

b. Jumlah Gelanggang / Balai Remaja dan Lapangan Olahraga

Tabel 2.36
Jumlah Gelanggang / Balai Remaja dan Lapangan Olahraga
Kabupaten Gresik Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	Satuan	Tahun

			2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten	Unit	1	2	3	4	6
2	Jumlah Lapangan olahraga	Unit	24	24	24	24	24
3	Jumlah Cabang olahraga yang aktif	Unit	-	38	30	31	31

Sumber data : SIPD Kab. Gresik

Jumlah gelanggang / balai remaja yang terdapat di Kabupaten Gresik telah bertambah, dari semula hanya 1 (satu) unit di Tahun 2011, menjadi 6 unit pada Tahun 2015. Adapun jumlah lapangan olahraga tetap dipertahankan sebanyak 24 unit. Penurunan terlihat pada jumlah cabang olahraga yang aktif. Pada Tahun 2012, Kabupaten Gresik memiliki 38 cabang olahraga yang aktif. Pada Tahun 2015, jumlah ini berkurang menjadi 31 cabang olahraga.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a) Pendidikan;

Tabel 2.37
Capaian Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	55,00	63,07	69,38	85,42	106,77
	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	Siswa	21.209	39.212	39.220	40.398	41.488
	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Siswa	38.563	62.170	56.531	47.291	38.856
2	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek Huruf (tidak buta aksara)	%	100	100	100	100	100
	Penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis	Orang	661.927	846.674	976.448	1.014.458	1.019.552
	Penduduk usia 15 tahun ke atas	Orang	661.927	846.674	976.448	1.014.458	1.019.552

3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,90	98,02	98,55	98,68	98,86
	Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A	Siswa	114.980	115.801	116.224	116.585	116.288
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Siswa	117.444	118.138	117.938	118.146	117.628
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80,06	85,59	85,60	85,63	85,64
	Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B	Siswa	50.461	50.458	48.859	50.164	51.365
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Siswa	63.027	58.954	57.081	58.858	59.980
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	56,40	65,03	65,06	74,01	74,24
	Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C	Siswa	34.031	35.708	36.380	39.452	39.585
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	Siswa	60.335	54.914	55.914	53.309	53.321
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,07	0,05	0,06	0,02	0,024
	Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI	Siswa	93	59	82	27	30
	Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI	Siswa	126.615	127.990	127.292	127.637	127.206
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,38	0,17	0,13	0,08	0,034
	Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs	Siswa	135	94	71	47	19
	Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs	Siswa	35.071	54.247	56.217	58.580	56.602

8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0,44	0,43	0,32	0,25	0,05
	Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	188	195	150	119	23
	Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	42.992	45.360	46.429	47.332	45.423
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100
	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Siswa	19.307	18.950	20.819	20.356	20.743
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	19.307	18.950	20.819	20.356	20.743
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Siswa	16.587	17.531	17.548	16.007	16.403
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	16.587	17.531	17.548	16.007	16.403
11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100	100
	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	14.015	11.997	12.898	13.633	13.907
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	14.015	11.997	12.898	13.633	13.907
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	93,39	94,17	95,37	96,81	96,95
	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Siswa	17.791	17.940	19.855	19.707	20.111
	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun	Siswa	19.050	19.050	20.819	20.356	20.743

	ajaran sebelumnya						
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	%	87,00	90,70	89,68	99,49	101,05
	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	15.031	15.687	15.509	15.925	16.188
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya	Siswa	17.278	17.295	17.293	16.007	16.019
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	81,32	83,65	88,62	97,86	97,90
	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV	Guru	15.922	18.779	17.472	19.351	19.364
	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Guru	19.580	22.392	19.877	19.774	19.780

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Seluruh indikator layanan umum wajib bidang pendidikan menunjukkan perkembangan maupun capaian yang baik pada kurun waktu Tahun 2011-2015. Partisipasi pendidikan, yang diukur dengan APM PAUD, APM SD/MI, APM SMP/MTS dan APM SMA, seluruhnya menunjukkan trend meningkat, sementara angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan menunjukkan trend menurun. Kualitas pelayanan pendidikan, dilihat dari tingkat kelulusan dan proporsi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV juga menunjukkan capaian yang baik. Pada Tahun 2011, proporsi guru yang memenuhi kualifikas S1/D-IV sebesar 81.32%. Pada Tahun 2015, telah tercapai peningkatan sebesar 16.58 poin hingga mencapai 97.90%. Adapun angka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga menunjukkan peningkatan, menjadi indikasi makin meningkatnya akses masyarakat pada fasilitas pendidikan.

Tabel 2.38
Capaian Sasaran Urusan Pendidikan Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD);	83.00%	70.66%	85,13	Tinggi
2	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat	98.88%	98.62%	99,82	Sangat Tinggi
3	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat;	86.75%	86.04%	99,18	Sangat Tinggi
4	Angka Rata rata lama sekolah	9.02-9.10	9.2	101,10	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2017

Berdasarkan capaian **Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini** (PAUD) djielaskan bahwa dari kelompok usia 4-6 tahun sejumlah 58.178 anak sebesar 70,66% atau sebanyak 41.109 anak menempuh jalur pendidikan PAUD. Persentase **Angka Partisipasi Murni (APM) SD** dan Sederajat djielaskan bahwa dari kelompok usia 7-12 tahun sejumlah122.825 anak, sebesar 98,62% atau sebanyak 121.125 anak berada pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A. Pada Persentase **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP** sederajat djielaskan bahwa dari kelompok usia 13-15 tahun sejumlah 58.386 anak sebesar 86.04% atau sebanyak 50.233 anak berada pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B. sedangkan pada pengukuran **Angka Rata rata lama sekolah** diketahui bahwa Angka Rata rata lama sekolah maysarakat Gresik meningkat menjadi 9,2 tahun lebih tinggi dibandingkan provinsi sebesar 8,7 tahun.

b) Kesehatan;

Tabel 2.39
Capaian Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2011 - 2015

NO	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	%	87,58	82,52	82,56	85,31	87,75
	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 sesuai standar oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Ibu Hamil	-	18.911	18.803	19.305	20.036
	Jumlah sasaran ibu hamil di satu	Ibu Hamil	-	22.918	22.774	22.630	22.834

	wilayah kerja pada kurun waktu yang sama						
2.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	68,16	125,61	98,07	101,02	96,45
	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Komplikasi	-	5.758	4.467	4.572	4.405
	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Komplikasi	-	4.584	4.555	4.526	4.567
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	98,45	88,97	89,39	89,86	92,35
	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	-	19.462	19.432	19.411	20.128
	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	-	21.876	21.739	21.601	21.796
4	Cakupan pelayanan nifas	%	97,13	87,33	87,74	89,31	90,64
	Jumlah ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	-	19.104	19.074	19.291	19.756
	Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	-	21.876	21.739	21.601	21.796

5	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	33,10	58,60	60,53	57,74	81,47
	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Neonatus	-	1.795	1.845	1.754	2.537
	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Neonatus	-	3.063	3.048	3.038	3.114
6	Cakupan pelayanan anak balita	%	59,52	65,54	68,66	74,14	81,13
	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Bayi	-	56.756	58.571	61.848	67.894
	Jumlah seluruh sasaran bayi di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Bayi	-	86.595	85.300	83.415	83.690
7	Cakupan kunjungan bayi	%	94,10	94,13	95,52	98,07	99,55
	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Bayi	-	19.218	19.409	19.862	20.173
	Jumlah seluruh sasaran bayi di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Bayi	-	20.417	20.320	20.252	20.264
8	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	71,91	92,42	84,83	92,70	81,46
	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	Desa		329	302	330	290
	Jumlah seluruh Desa / Kelurahan	Desa		356	356	356	356

9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (BTA+)	%	56,68	63,89	56,04	55,13	59,30
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun	Orang	-	775	738	736	797
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	Orang	-	1.213	1.317	1.335	1.344
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	%	100	100	100	100	100,00
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun	Orang	-	357	618	262	574
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	Orang	-	357	618	262	574
11	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	%	56,84	56,47	54,96	54,13	65,41
	Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1	Orang	-	153.096	242.840	239.184	289.010
	Jumlah seluruh maskin di Kabupaten	Orang	-	271.108	441.851	441.851	441.851
12	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100,00
	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Balita	-	261	214	194	137

	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	Balita	-	261	214	194	137
13	Cakupan balita yang mendapat vitamin A	%	92,56	85,52	92,00	94,67	95,00
	Jumlah balita 6-59 bulan yang mendapat vitamin A di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Balita	-	81.694	97.174	98.140	98.756
	Jumlah seluruh balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Balita	-	95.521	105.620	103.668	103.958
14	Persentase Rumah Sehat	%	67,85	70,47	78,58	83,43	85,53
	Rumah yang memenuhi syarat kesehatan	Buah	-	158.407	209.286	226.952	232.928
	Jumlah rumah yang ada	Buah	-	224.787	266.337	272.024	272.348
15	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	96,95	96,28	97,73	92,91	86,45
	Jumlah item obat yang ketersediaannya >=100%	Buah	-	259	258	275	268
	Jumlah total item obat yang ada	Buah	-	269	264	296	310
16	Pengadaan obat esensial	%	97,17	96,00	97,65	93,06	91,13
	Jumlah item obat esensial yang dapat disediakan	Buah	-	240	249	268	257
	Jumlah item obat esensial yang dibutuhkan	Buah	-	250	255	288	282
17	Pengadaan obat generik	%	97,75	99,54	97,95	94,12	90,32
	Jumlah item obat generik yang dapat disediakan	Buah	-	218	191	208	196
	Jumlah item obat generik yang dibutuhkan	Buah	-	219	195	221	217
18	Cakupan rawat jalan	%	95,77	71,99	73,57	68,93	67,90
	Jumlah kunjungan pasien baru dan	Orang	1.216.621	941.595	974.612	909.455	885.302

	lama dilayani kesehatan						
	Jumlah penduduk Kabupaten	Orang	1.270.351	1.307.995	1.324.777	1.319.314	1.303.773
19	Cakupan rawat inap	%	0,08	0,43	0,74	0,42	0,87
	Jumlah pasien rawat inap	Orang	1.006	5.603	9.861	5.494	11.324
	Jumlah penduduk Kabupaten	Orang	1.270.351	1.307.995	1.324.777	1.319.314	1.303.773
20	Cakupan Rumah Tangga Sehat	%	58,95	54,88	66,54	67,80	70,40
	Jumlah rumah tangga sehat	RT	-	42.544	37.197	31.793	40.724
	Jumlah rumah tangga yang dikaji	RT	-	77.517	55.900	46.893	57.846
21	Posyandu Purnama	%	73,24	77,80	75,34	86,09	89,37
	Jumlah Posyandu Purnama	Unit	-	1.132	1.106	1.269	1.329
	Jumlah Posyandu yang ada	Unit	-	1.455	1.468	1.474	1.487
22	Pelayanan pasien Jamkesmas dan Jamkesmasda	%	18,20	16,35	13,28	7,86	6,90
	Jumlah Pasien yang dilayani melalui Jamkesmas dan Jamkesda	Orang	49.350	44.327	58.691	34.724	30.467
	Jumlah seluruh peserta Jamkesmas dan Jamkesda	Orang	271.108	271.108	441.851	441.851	441.851
23	Bed Occupancy Rate	%	73,08	73,41	80,51	71,58	75,84
	Jumlah hari perawatan	Hari	56.019	62.330	69.350	62.441	66.162
	Jumlah TT x hari perawatan	Hari	76.650	84.912	86.140	87.235	87.235
24	Average Length Of Stay	%	3,95	3,87	3,98	3,98	4,02
	Jumlah lama dirawat	Hari	57.395	62.593	69.944	63.211	65.446
	Jumlah pasien keluar hidup + mati	Hari	14.532	16.160	17.567	15.900	16.290
25	Turn Over Internal	%	1,42	1,40	0,96	1,56	1,34
	(Jumlah TT x 365) - hari perawatan	Hari	20.631	22.582	16.790	24.794	21.789
	Jumlah seluruh pasien keluar hidup + mati	Hari	14.532	16.160	17.567	15.900	16.290
26	Bed Turn Over	%	69,20	69,66	74,44	66,53	65,69

Jumlah pasien keluar hidup + mati	Kali	14.532	16.160	17.567	15.900	16.290
Tempat tidur	Kali	210	232	236	239	248

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa mayoritas indikator urusan kesehatan menunjukkan perkembangan yang positif sesuai dengan target yang diharapkan.

Table 2.40
Capaian Sasaran Urusan Kesehatan Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup;	115.00	82,46	128,3	Sangat Tinggi
2	Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup;	4.15	3.44	117,1	Sangat Tinggi
3	Angka Usia Harapan Hidup	71.67-71.75 Tahun	72 Tahun	120,64	Sangat Tinggi
4	Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD	0.75	0.78	104.17	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2017

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 82,46 per 100.000 menunjukkan bahwa selama tahun 2016 terdapat 17 kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain dalam 20.617 kelahiran hidup dibanding per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Kondisi ini membaik dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 93.65 per 100.000 kelahiran hidup. Pada **Angka Kematian bayi** per 1.000 kelahiran hidup juga menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2015 sebesar 3.59 menjadi 3,44 per 1000 kelahiran hidup. Angka menunjukan terdapat kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup sebanyak 71 jiwa pada Tahun 2016 atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun dibandingkan jumlah kelahiran sebanyak 617 kelahiran hidup.

c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;

Tabel 2.41

Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2011 - 2015

NO .	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	71,06	71,06	74,40	78,39	81,81
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	m	363,94	363,94	381,06	401,46	419
	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut	m	512,16	512,16	512,16	512,16	512,16
2.	Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	%	89,59	97,74	93,54	91,44	94,88
	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Buah	198	216	277,8	267	278
	Jumlah jembatan kabupaten di daerah tersebut	Buah	221	221	297	292	293
3.	Luas Irigasi Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	51,00	52,25	53,29	54,03	55,41
	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	m²	8.305,86	8.509,40	8.678,24	8.799,36	7.699,49
	Luas irigasi kabupaten	m²	16.286	16.286	16.286	16.286	13.895
4.	Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik	%	56,91	58,41	61,41	62,98	63,49
	Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik	m	79.640	81.738	85.938	88.138	88.850
	Jumlah panjang saluran drainase perkotaan seluruhnya	m	139.939	140	139.939	139.939	139.939
5.	Panjang jalan Poros Desa yang Terbangun	%	67,25	74,55	88,04	99,47	100

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Seluruh indikator bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menunjukkan capaian yang baik dan peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun, yaitu Tahun 2011 – 2015. Bidang pekerjaan umum diukur dengan persentase panjang jalan, jembatan, irigasi, saluran drainase yang berada dalam kondisi baik, serta jalan poros desa yang terbangun. Indikator yang menunjukkan peningkatan paling tajam adalah panjang jalan

poros desa yang terbangun. Pada Tahun 2011, panjang jalan poros desa yang terbangun baru mencapai 67.25%. Pada Tahun 2015, capaian ini telah mencapai 100%, yang berarti bahwa Kabupaten Gresik telah tuntas membangun jalan poros desa. Dengan terbangunnya seluruh jalan poros desa, akses masyarakat desa terhadap sumber daya ekonomi maupun fasilitas-fasilitas kesehatan dan pendidikan makin terbuka luas dan dengan demikian diharapkan akan membawa dampak meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari status ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Tabel 2.42
Capaian Indikator Urusan Tata Ruang Tahun 2011 - 2015

NO	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Keberadaan Perda RTRW	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 – 2015

Pada urusan tata ruang, Tabel 2.34 menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik telah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, dalam kurun waktu Tahun 2011 – 2015 kesesuaian pemanfaatan ruang mencapai 100% atau tidak mengalami perubahan. Sebagai upaya dalam pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, Kabupaten Gresik membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Table 2.43
Capaian Sasaran Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	83,31 % Jalan	83,31 %	100	Sangat Tinggi
2	Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir	25%	24,50 %	98	Sangat Tinggi
3	Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi	15,23%	15,23 %	100	Sangat Tinggi
4	Persentase Akses Air Bersih/Minum	65.95%	61,95%	94	Sangat Tinggi
5	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%	100	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengolahan data capaian indikator persentase **Kemantapan Infrastruktur Jalan** diperoleh analisa bahwa pada tahun 2016 dari 512,16 km jalan kabupaten, 426,68 km dalam kondisi mantap (83,31%), pencapaian kinerja tahun 2016 ini mengalami kenaikan sebesar 1,8 % dibandingkan dengan Tahun 2015, dimana pada tahun 2015 persentase kondisi jalan mantap hanya sebesar 81,81%, keberhasilan tersebut ditunjang dengan adanya Tim URC (Unit Reaksi Cepat) Bina Marga, sehingga kerusakan jalan yang terjadi dapat diperbaiki secepat mungkin. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelayanan jalan Kabupaten antara lain terjadinya bencana alam (banjir dan tanah longsor) di beberapa wilayah di Kabupaten Gresik, Terjadinya anomali cuaca serta adanya pembebanan berlebih pada beberapa ruas jalan Kabupaten sehingga mengakibatkan kerusakan dini.

Pada **Pengendalian Banjir**, Pada tahun 2016 dari 350 km saluran pengendalian banjir di Kabupaten Gresik, baru 86,75 km dalam kondisi baik (24,50%). Faktor yang mempengaruhi disebabkan belum berfungsinya saluran drainase secara optimal sebagai pematas air hujan yang disebabkan karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase serta rendahnya penegakan hukum khususnya dalam perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan.

Dalam peningkatan **Kemantapan Jaringan Irigasi**, pada tahun 2016 dari 147.356 m² saluran jaringan irigasi di Kabupaten Gresik, baru 22.442,32 m² dalam kondisi baik (15,23%). Dari target yang ditetapkan sebesar 15,23%, capaian indikator ini memang tercapai 100 %, namun masih terdapat kendala terhadap belum optimalnya fungsi jaringan irigasi di Kabupaten Gresik yang disebabkan oleh pembebasan tanah dan masalah sosial untuk pembangunan tampungan air skala kecil/embung geomembran, dikarenakan status tanah milik perorangan bukan Tanah Kas Desa (TKD). Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat yang tanahnya akan digunakan sebagai tempat pembangunan tampungan air.

Di sisi pemenuhan **Akses Air Bersih/Minum** mengalami peningkatan 79.486 jiwa pengakses air bersih atau meningkat 61,85% dibandingkan tahun 2015 sebesar 55,95%. Pemenuhan air bersih dilaksanakan melalui jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Sedangkan **Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW** mencapai 100%, pada tahun 2016 dari 165 ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan di Kabupaten Gresik, seluruhnya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 -2030

d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

Tabel 2.44
Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Tahun 2011 - 2015

NO.	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rumah Tangga pengguna air bersih	%	66,86	70,16	74,03	75,02	85,39
	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	RT	174.465	183.077	193.177	195.750	232.568
	Jumlah seluruh rumah tangga	RT	260.945	260.945	260.945	260.945	272.348
2.	Lingkungan permukiman kumuh	%	17,11	17,08	17,03	13,90	13,78
	Luas lingkungan permukiman kumuh	m ²	1.029,12	1.026,92	1.023,92	836,04	829,33
	Luas wilayah	m ²	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014
3	Rumah Layak Huni	%	87,01	88,14	88,52	90,82	90,94
	Jumlah rumah layak huni	Buah	227.049	230.000	231.000	237.000	237.312
	Jumlah seluruh rumah di wilayah pmda ybs.	Buah	260.945	260.945	260.945	260.945	260.945

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015
85.53% (232.928 rumah layak huni dari 272.348 rumah)

Indikator urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menunjukkan kondisi yang cukup baik, Hal ini dilihat dari meningkatnya persentase rumah tangga pengguna air bersih dan rumah layak huni serta

berkurangnya proporsi lingkungan permukiman kumuh pada kurun waktu Tahun 2011-2015.

Tabel 2.45
Capaian Sasaran Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	10 ha	12,15 ha	121,5	Sangat Tinggi
2	Persentase Rumah Layak Huni	85,64%	85,94	100,36	Sangat Tinggi

Sumber Data: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Gresik Tahun 2017

Dalam rangka **Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh** hanya berhasil dientaskan sebesar 12,15% dari 181,92 luas kawasan kumuh yang ditetapkan dengan penganagan terhadap jalan lingkungan dan saluran drainase lingkungan. Sedangkan **Persentase Rumah Layak Huni** meningkat menjadi 85,94% dari tahun 2015 sebesar 85.53% (232.928 rumah layak huni dari 272.348 rumah) atau telah berhasil dilaksanakan rehabilitasi terhadap 1.128 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

e) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat;

Tabel 2.46
Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat;Tahun 2011 - 2015

NO	URUSAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Parpol yang dibina	%	11	11	11	11	8
2	Jumlah LSM / Ormas /OKP/ yang dibina	LSM/OKP	171	177	164	167	192
3	Konflik yang dapat diselesaikan	%	100	96	100	100	100
	Jumlah konflik yang diselesaikan	Perkara	-	48	51	142	8
	Jumlah konflik yang ada	Perkara	-	50	51	142	8

4	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab. Gresik	%	68,00	75,00	100	100	99,19
5	Demo / protes terhadap Perda/Perbup	%	98	98	100	100	100
	Jumlah demo yang tertib	kali	-	-	12	8	12
	Jumlah demo	kali	-	-	12	8	12
6	Keberadaan Perda tentang penyelenggaraan Trantibum	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Keberadaan Perda tentang PSK dan Miras	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Rasio Satpol PP Terhadap Jumlah Penduduk	%	0,01	0,02	0,012	0,05	0,05
	Jumlah personil Satpol PP	Orang	-	-	154	692	614
	Jumlah penduduk	Orang	-	-	1.324.777	1.319.314	1.303.773

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat Tahun 2011 – 2015 cukup baik. Hal ini ditandai dengan penanganan konflik yang sudah mencapai 100%, penyelesaian pelanggaran K3 mencapai lebih dari 99% serta demo yang sudah 100% berjalan dengan tertib. Jumlah konflik yang terjadi menunjukkan penurunan drastis. Pada Tahun 2014 terjadi 142 konflik, sementara pada Tahun 2015 hanya terjadi 8 konflik. Indikator lain adalah meningkatnya rasio Satpol PP terhadap jumlah penduduk, yang semula 0.01 di Tahun 2011, menjadi 0.05 di Tahun 2015.

Table 4.47
Capaian Sasaran Ketenteraman, ketertiban umum,
dan perlindungan Masyarakat Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai

		2016			
1	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100%	100% 874 dari 874 Konflik Sosial	100%	Sangat tinggi
2	Persentase Desa Tangguh Bencana	56,06 %	51,51%	91,88%	Sangat tinggi

Sumber Data: Kantor Kesbangpolinmas Kab.Gresik Tahun 2017

Persentase Penanganan Konflik Sosial mencapai 100% meliputi konflik yang bernuansa SARA serta Pelanggaran Keamanan, Ketertiban dan Keindahan (K3).Jumlah Konflik sosial yang terjadi pada Tahun 2016 sebanyak 874 konflik dengan rincian sebagai berikut Konflik bernuansa SARA sebanyak 2 konflik dan Pelanggaran K3 sebanyak 872 pelanggaran.

Adapun dalam mewujudkan **Desa Tangguh Bencana**,Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik sampai dengan tahun 2016 berhasil membentuk 34 desa tangguh bencana dari 66 Desa yang teridentifikasi Desa Rawan Bencana atau sebesar 51,51%. Desa Tangguh merupakan program Nasional/dari BNPB dalam rangka mewujudkan Indonesia Tangguh. Program ini merupakan wujud tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam hal Penanggulangan Bencana. Karena masyarakat yang merupakan penerima dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku pertama dan langsung yang akan merespon bencana disekitarnya. Masyarakat yang tangguh bencana ialah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Dan jika terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dapat dengan cepat memulihkan diri secara mandiri.

f) **Sosial.**

Tabel 2.48
Capaian Indikator Urusan Sosial Tahun 2011 - 2015

NO .	URUSAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	Unit	17	17	17	17	18
2.	Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial	PMKS	415	421	1.258	1.281	6.064
4	Jumlah hari besar agama yang dirayakan	kali	5	5	5	5	5

5	Bantuan sarana ibadah	%	90	100	86	100	100
6	Bantuan Santunan Kematian	%	100	100	100	100	100
7	Penyaluran Raskin	%	100	100	100	100	100

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 – 2015

Capaian indikator Urusan Sosial Tahun 2011-2015 menunjukkan capaian yang cukup stabil dalam kondisi baik. Jumlah sarana social, seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi bertambah 1 (satu) unit di Tahun 2015, sehingga berjumlah 18 unit. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Pada Tahun 2011, pelayanan PMKS baru mencakup 415 orang. Pada Tahun 2015, pelayanan PMKS telah mencapai 6.064 orang PMKS. Adapun pelaksanaan pemberian bantuan sarana Ibadah, santunan kematian dan penyaluran bantuan beras bagi masyarakat miskin (Raskin) telah berjalan dengan baik.

Table 2.49
Capaian Sasaran Urusan Sosial Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2016			
1	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	4.3-4.8%	5.44%	126.51%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Sosial Kab. Gresik Tahun 2017

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitasmencapai 5.44% dicapai melalui penangan PMKS sebanyak 7.349 orang total keseluruhan PMKS yang teridentifikasi mencapai 135.142 orang. Penanganan PMKS terus meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapa 6.604 jiwa.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

a) **Tenaga kerja:**

Tabel 2.50
Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Tahun 2011 - 2015

NO	URUSAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	%	66,04	63,49	67,91	63,66	67,84
	Jumlah penduduk Angkatan Kerja	orang	612.073	557.623	612.321	592.569	596.841
	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn)	orang	874.446	878.218	901.602	930.851	879.777
2	Penempatan para pencari kerja	%	30,52	33,47	28,76	83,16	92,61
	jumlah pencari kerja yang ditempatkan	orang	887	1.105	2.152	2.297	2.317
	jumlah pencari kerja yang mendaftar	orang	2.906	3.301	7.482	2.762	2.502
3	Jumlah pengangguran terbuka	%	4,36	6,72	4,51	5,06	4,41
	Jumlah pengangguran usia (15-64) tahun keatas	orang	26.664	37.473	27.599	28.466	26.346
	Jumlah penduduk usia kerja 15-64 tahun	orang	612.073	557.623	612.321	562.569	596.841
4	Kepatuhan terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja	%	58,71	70,47	60,05	68,67	90,52
	jumlah perusahaan yang memenuhi norma K3	Buah	593	747	681	846	1.184
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.010	1.060	1.134	1.232	1.308
5	Kepatuhan terhadap norma kerja	%	57,92	87,55	74,87	96,83	61,54
	Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan Norma Kerja	Buah	585	928	849	1.193	805
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.010	1.060	1.134	1.232	1.308

6	Kepatuhan terhadap norma jaminan sosial tenaga kerja	%	99,50	95,28	93,92	97,81	123,17
	Jumlah perusahaan yang memenuhi norma jamsostek	Buah	1.005	1.010	1.065	1.205	1.611
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.010	1.060	1.134	1.232	1.308
7	Angka nihil kecelakaan kerja	%	0,89	2,83	3,44	5,19	5,96
	Jumlah perusahaan yang tidak mengalami kecelakaan kerja	Buah	9	30	39	64	78
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.010	1.060	1.134	1.232	1.308
8	Penuntasan / penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	87,50	86,81	83,16	88,30	88,04
	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan secara tripartit oleh Disnakertrans dengan Persetujuan Bersama maupun yang diteruskan ke lembaga P4D dan P4P	Kasus	70	79	79	83	81
	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Disnakertrans	Kasus	80	91	95	94	92
9	Pemberlakuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	%	8,61	11,04	8,11	8,04	8,41
	Jumlah perusahaan yang sudah memberlakukan Peraturan Perusahaan dan	Buah	87	117	92	99	110

	Perjanjian Kerja Bersama						
	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Buah	1.010	1.060	1.134	1.232	1.308
	Kepatuhan atas ketentuan mengenai pembentukan lembaga kerjasama Bipartit	%	2,11	33,79	20,82	23,56	21,13
10	Jumlah perusahaan yang sudah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit	Buah	-	-	101	119	149
	Jumlah perusahaan yang wajib membentuk lembaga kerjasama Bipartit	Buah	-	-	485	505	705

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 – 2015

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari kondisi capaian indikator ketenagakerjaan, diantaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Dalam kurun waktu 2011-2015, TPAK Kabupaten Gresik menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Setelah turun tajam 8.01 poin pada Tahun 2012, diikuti dengan kenaikan sebesar 6,21 poin pada Tahun 2013, TPAK Kabupaten Gresik kembali menunjukkan kenaikan yang juga diikuti dengan penurunan pada tahun selanjutnya. Pada Tahun 2015, TPAK Kabupaten Gresik sebesar 66.04% masih lebih rendah 0.28 poin dari daripada TPAK Kabupaten Gresik Tahun 2011 yang mencapai 66.04%. Fluktuasi ini juga terlihat pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Termasuk Angkatan Kerja. Indikator lain juga berfluktuasi, namun capaian akhir Tahun 2015 menunjukkan hasil yang lebih baik daripada Tahun 2011.

Table 2.51
 Capaian Sasaran Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2016			

1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67.88%	67.88%	100%	Sangat Tinggi
2	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	88,54%	88,54%	100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Sosial Kab. Gresik Tahun 2017

Tingkat partisipasi Kerja Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 mencapai 67,88 %, mengalami peningkatan sebesar 0,06 % dibandingkan tahun 2015 yang mencapai angka 67,84%. Dari 750.255 penduduk usia kerja pada kelompok umur 20-69 tahun berdaarkan capaian ini dinyatakan 508.973 jiwa berhasil diidentifikasi berpartisipasi pada dunia kerja. Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal dan informal melalui Pengembangan dan perluasan informasi pasar kerja melalui “Gresik Job Fair” yang dilaksanakan rutin tiap Tahun. Pada Gresik Job Fair yang diadakan tahun 2016, jumlah perusahaan yang berpartisipasi sebanyak 35 perusahaan baik yang termasuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan menawarkan 1500 peluang kerja; Pelatihan Berbasis Kompetensi disertai sertifikasi kompetensi tenaga kerja di UPT Pelatihan Kerja (BLK), didukung dengan implementasi Pola 3 in1 (pelatihan-sertifikasi-penempatan); Revitalisasi UPT Pelatihan Kerja (BLK) melalui upgrading Instruktur, penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan, dan modernisasi peralatan pelatihan; Pembinaan di sektor informal melalui pelatihan/pembinaan dan pendampingan usaha mandiri (wirausaha); dan memperbanyak program magang di perusahaan bagi peserta pelatihan di UPT Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Sedangkan **Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** selama tahun 2016 mencapai 88,54%. Dari 103 jumlah perselisihan hubungan industrial yang terjadi, dapat diselesaikan sebanyak 91 kasus

b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Tabel 2.52

Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 20112 – 2014

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun			
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan P2T-P2A			100%	100%	100%
	Jml pengaduan/laporan yg ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	kasus		224	208	158
	Jml laporan/pengaduan yg masuk ke unit pelayanan terpadu	kasus		224	208	158
	Cakupan anak korban kekerasan yang tuntas mendapatkan penanganan pengaduan			100%	100%	100%
	Jumlah penanganan anak korban kekerasan	Orang		224	137	84
	Jumlah anak korban kekerasan	Orang		224	137	89
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum			100%	100%	100%
	Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum	Orang		148	159	98
	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Orang		148	159	98
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas yang mampu terlaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit					100%
	Jumlah Korban yang mendapat pelayanan kesehatan	Orang				60
	Jumlah korban yang membutuhkan layanan kesehatan	Orang				60
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas yang mampu terlaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit					100%
	Jumlah Korban yang mendapat pelayanan kesehatan	Orang				60
	Jumlah Korban	Orang				60
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi			100%	100%	100%
	Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan rehabilitasi	Orang		7	5	4
	Jumlah korban yang membutuhkan layanan rehabilitasi	Orang		7	5	4
5	Cakupan lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi			100%	100%	100%

	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi	Unit		2	4	4
	Jumlah lembaga perempuan dan anak	Unit		7	7	7

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Tabel 2.39 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2011 – 2015 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hal ini dilihat dari cakupan pelayanan yang hampir semua telah mencapai 100%. Cakupan lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi pada Tahun 2015 baru mencapai 57.4% dan perlu ditingkatkan. Namun kondisi ini telah jauh lebih baik daripada Tahun 2011, dimana baru 28.57% lembaga yang terfasilitasi.

Prioritas dalam perlindungan anak adalah cakupan anak korban kekerasan yang tuntas mendapatkan penanganan pengaduan. Pada Tahun 2015, cakupan anak korban kekerasan yang tuntas mendapatkan penanganan pengaduan mencapai 93.20%, lebih tinggi dari capaian Tahun 2011 yaitu 89.50%. Meski demikian, indikator ini pernah mencapai 100% pada Tahun 2012 dan Tahun 2013, dan menunjukkan penurunan dalam dua tahun terakhir, yaitu Tahun 2014 dan Tahun 2015.

Table 2.53
Capaian Sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62.50-63.00	62,79	100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Keluarga Berencanaan dan Pemberdayaan Perempuan Sipil Kab. Gresik Tahun 2017

Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berhasil menyelesaikan penanganan pengaduan selama tahun 2016 sebanyak 300 kasus kekerasan terhadap perempuan dan/ata anak. Sedangkan dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan Gender, **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** Kabupaten Gresik termutakhir mencapai 62,79. IDG merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran

aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

c) Pangan;

Tabel 2.54

Capaian Indikator Urusan Pangan Tahun 2011 - 2015

NO.	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regulasi Ketahanan Pangan	ada/tidak	tidak ada	ada	ada	ada	ada
2	Rata-rata konsumsi bahan pangan utama	Kg/Kapita/Tahun	94,35	95,40	94,80	91,32	91,26
3	Ketersediaan pangan utama	Kg/Kapita/Tahun	193,93	201,30	191	176,36	193,44

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Indikator Urusan Pangan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 menunjukkan kondisi yang baik. Regulasi Ketahanan Pangan yang pada Tahun 2011 belum tersedia, telah dicukupi pada Tahun 2012. Rata-rata konsumsi bahan pangan utama menunjukkan penurunan, sedangkan ketersediaan pangan utama yang sempat menurun pada Tahun 2014, telah kembali meningkat pada Tahun 2015. Meskipun demikian, indikator ini harus diperhatikan karena pergerakannya yang cukup fluktuatif, menandakan kondisi yang masih rentan.

Table 2.55

Capaian Sasaran Urusan Ketahanan Pangan

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	194 Kg/Kpt/Thn	202.21 Kg/Kpt/Thn	104,12	Sangat tinggi

Sumber Data: Dinas Pertanian Kab.Gresik Tahun 2017

Rasio ketersediaan pangan utama dihitung dari Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun dibagi Jumlah penduduk. Pada tahun 2016 Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun Kabupaten Gresik sebesar 264.977998g. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.310.440 jiwa, maka Rasio ketersediaan pangan utama

penduduk 202.21 Kg/Kpt/Thn meningkat dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 194 Kg/Kpt/Thn.

d) Pertanahan;

Tabel 2.54

Capaian Indikator Urusan Pertanahan Tahun 2011 – 2015

NO.	URUSAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100	100	100	100	100
	Jumlah Kasus Yang Diselesaikan	Perkara	-	-	2	0	1
	Jumlah Kasus Yang Terdaftar	Perkara	-	-	2	0	1

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 – 2015

Indikator pelayanan urusan pertanahan menunjukkan capaian yang cukup baik, yaitu terselesaikannya 100% kasus yang terdaftar.

Tabel 2.55

Capaian Sasaran Urusan Pertanahan Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan	100%	100%	100	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Pertanahan Kab. Gresik Tahun2017

Penyelesaian Penanganan konflik pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih penguasaan dan tumpang tindih pemilikan tanah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan. Penanganan konflik pertanahan dilaksanakan secara komprehensif melalui kajian akar permasalahan, pencegahan dampak konflik, dan penyelesaian konflik. Dari 23 Kasus sengketa tanah negara/daerah pada tahun 2016 yang terjadi di Kabupaten Gresik, seluruhnya bisa diselesaikan dengan baik.

Faktor keberhasilan ini disebabkan antara lain dengan dilakukannya penyelesaian konflik pertanahan yang dilakukan dengan cara negosiasi, musyawarah mufakat dan mediasi. Negosiasi dilakukan dengan jalan dimana para pihak yang berkonflik duduk bersama untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian konflik dengan prinsip bahwa penyelesaian itu tidak ada pihak yang dirugikan (win-win solution), kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Musyawarah mufakat adalah langkah lebih lanjut dari negosiasi. Jika dalam negosiasi tidak terdapat kesepakatan yang saling menguntungkan, maka langkah lebih lanjut adalah melakukan musyawarah mufakat dengan melibatkan pihak lain selaku penengah. Hasil musyawarah tersebut selanjutnya dibuatkan surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh para pihak dan para saksi.

e) Lingkungan hidup;

Tabel 2.56
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2011 - 2015

NO.	URUSAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Luas Lahan Kritis	Ha	24.691	16.691	10.961	7.643	3.384
2	Rasio Luas kawasan lindung	%	18,19	18,19	18,19	18.19	18,19
	luas kawasan yang dilindungi (ha)	m²	21.670	21.670	21,670	21,670	21.670
	luas seluruh wilayah (ha)	m²	119.125	119.125	119,125	119,125	119.125
3	Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	Unit	49	55	58	60	65
4	Jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	Unit	78	104	153	199	256
5	Luas RTH Perkotaan	Ha	712,36	715,35	716,35	717,75	719,19
6	Penanganan sampah	%	93,12	93,21	92,89	94,12	93,15

	Volume sampah yang ditangani (m3)	m ³	650	727	740	752	764
	Volume produksi sampah (m3)	m ³	698	780	797	799	817
7	Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,043	0,044	0,502	0,056	0,056
	Jumlah daya tampung TPS (m3)	m3	523	578	664	745	756
	Jumlah penduduk	Penduduk	1.207.882	1.307.995	132.271	1.319.314	1.344.649
8	Jumlah tempat Pengolahan sampah (TPS)	Unit	63	68	84	103	106

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Indikator lingkungan hidup Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Luas lahan kritis yang semula 24.691 Ha pada Tahun 2011 telah turun menjadi 3.384 Ha pada Tahun 2015. Adapun jumlah usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan admistrasi dan teknis pencegahan pencemaran air telah meningkat, dari 49 usaha / kegiatan pada Tahun 2011, menjadi 65 usaha / kegiatan pada Tahun 2015. Jumlah usaha / kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara juga meningkat, dari 78 unit pada Tahun 2011, menjadi 256 unit pada Tahun 2015. Jumlah tempat pengelolaan sampah dan daya tampung sampah juga telah berhasil ditingkatkan secara signifikan.

Indikator penting untuk mengukur kualitas lingkungan hidup adalah **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**. Dalam rangka pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi oleh KLH adalah yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS dengan menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan sebagai indikator. Karena keterbatasan data, kualitas lingkungan di wilayah pesisir dan laut serta kondisi keanekaragaman hayati tidak dimasukkan dalam perhitungan IKLH.

Ditingkat nasional, Agenda Pembangunan Bidang Pengelolaan Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup memiliki Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian Kehati Sesuai

dengan Arahkan Dalam *Indonesia Biodiversity Strategy And Action Plan/IBSAP* 2003-2020 H 63,0-64,0 66,5-68,5 yaitu;

Komoditi	Baseline 2014	Sasaran 2019
IKLH	63,0-64,0	66,5-68,5

Kondisi eksisting IKLH Kabupaten Gresik pada tahun 2015 mencapai 56,47 atau masih dibawah baseline nasional pada tahun 2014 sebesar 63.0-64.0. Meskipun tidak memasukkan semua indikator kualitas lingkungan dalam perhitungan, IKLH cukup memadai untuk menggambarkan kualitas lingkungan hidup secara makro.

Ditinjau dari faktor yang mempengaruhi diketahui bahwa IKLH tidak mempunyai korelasi dengan produk domestik regional bruto (PDRB) namun IKLH mempunyai korelasi negatif dengan kontribusi pertambangan dan industri pengolahan dalam PDRB. Selain itu, IKLH mempunyai korelasi negatif dengan kepadatan penduduk di suatu wilayah sedangkan Pencemaran air sungai adalah masalah lingkungan yang paling utama di setiap provinsi.

Tabel 2.57

Capaian Sasaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Indeks Kualitas Air Sungai	47.3-51.5	49.01	100%	Sangat Tinggi
2	Indeks Kualitas Udara	72.25-75	68	93,47%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik
Tahun 2017

Peningkatan kualitas lingkungan hidup ditunjukkan pada **Indeks Kualitas Air Sungai** Kabupaten Gresik mencapai 49,01 dengan konsentrasi TSS, DO, BOD, COD Fecal Coli, dan Total Coliform dengan capaian 91% memenuhi pada 20 (dua puluh) titik uji. Kualitas air sungai meningkat signifikan sebesar 1,72 basis poin dibandingkan tahun 2015 sebesar 47,29. Sedangkan **indeks kualitas udara** mencapai 68 atau mengalami sedikit penurunan dibanding Tahun 2015 sebesar 72,23 dengan rerata S02 mencapai 23,08 dan NO2 mencapai 35,27.

f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Tabel 2.58
Capaian Indikator Urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2011 - 2015

NO.	URUSAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepemilikan KTP	%	85,90	86,90	96,17	97,48	96,81
2.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	1,12	306,50	120,91	168,86	98,71
	Jumlah Penduduk lahir dan memperoleh Akta Kelahiran di Tahun Bersangkutan	Orang	141.321	15.235	15.235	21.276	24.678
	Jumlah Penduduk wajib KTP	Orang	12.600	12.600	12.600	12.600	25.000
3	Pengurusan KTP						
	Lama pengurusan KTP dalam PERDA	Hari	1	1	1	1	1

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Capaian indikator urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 menunjukkan peningkatan cakupan pelayanan yang signifikan. Pada Tahun 2011, cakupan kepemilikan KTP sebesar 85.90%. Pada Tahun 2015, cakupan kepemilikan KTP telah mencapai 96.81%. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk pengurusan KTP adalah 1 (satu) hari.

Tabel 2.59
Capaian Sasaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Persentase Ketunggalan Identitas Berbasis e-KTP	69,72%	77.95%	111,80	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gresik Tahun 2017

Sebagai hak dasar masyarakat, pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil (admindukcapil) diharapkan dapat mewujudkan ketunggalan identitas dengan memulihkan, memutakhirkan, maupun meregistrasi biodata penduduk baik secara individu maupun keluarga.Registrasi data dilaksanakan secara

berjenjang dan akurat terhadap seluruh faktor yang mempengaruhi dinamika perubahan penduduk baik mobilitas migrasi keluar/masuk, kematian, maupun kelahiran. Pada Tahun 2011, Kementerian Dalam Negeri melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) untuk membangun tertib administrasi kependudukan melalui penerbitan 1 (satu) Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk 1 (satu) orang penduduk. Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional didukung dengan membangun database kependudukan yang akurat di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat yang terkoneksi secara online melalui peralihan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIMDUK) ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) pada tahun 2010.

Pada perkembangannya, sejak ketunggalan identitas berbasis NIK dicanangkan pada tahun 2011 diketahui bahwa pada pertengahan 2016 sekitar 12% dari wajib KTP-el secara nasional sebanyak 183 juta penduduk belum melakukan perekaman. Dengan demikian terdapat 22 Juta penduduk Indonesia yang tidak tercatat pada Data Center (Pusat Data Kependudukan di Kemendagri). Dalam kontelasi Gresik, **Ketunggalan Identitas Berbasis e-KTP** mengalami peningkatan dramatis dengan percepatan perekaman KTP-el mencapai 748.343 orang dari 960.082 wajib KTP atau sebesar 77.95% jauh di atas capaian tahun lalu sebesar 66,38%. Peningkatan ini didukung oleh pelbagai inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selama tahun 2016 meliputi;

1. Pengembangan Dashboard *Kakekkudatang 2.0*;
2. Layanan admindukcapil digital *dr.Kepo*, singkatan dari dokter Kependudukan Online. Kepo juga dapat dimaknai *Knowing Every Particular Object* yang menempatkan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai stelsel aktif yang selalu ingin tahu “penyakit” registrasi kependudukan yang dihadapi oleh masyarakatnya.
3. *Laperde* atau Laporan petugas Register Desa dalam perburuan penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el

g) Pemberdayaan masyarakat dan desa;

Tabel 2.60
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2011 - 2015							
NO.	URUSAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PKK aktif	%	100	100	100	100	100
	Jumlah PKK aktif	Unit	375	375	375	375	375
	Jumlah PKK	Unit	375	375	375	375	375
2.	Posyandu	%	100	100	100	100	100
	Jumlah Posyandu Aktif	Unit	1.457	1.463	1.466	1.474	1.444
	Total Posyandu	Unit	1.457	1.463	1.466	1.474	1.444
3.	Persentase Penduduk Miskin	%	15,33	14,30	13,89	13,41	
	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	181.700	173.800	170.900	166.950	Hasil Susenas untuk 2015 Belum Keluar

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Capaian indikator urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Tahun 2011-2015 cukup baik. Jumlah dan presentasi PKK dan Posyandu Aktif telah mencapai 100% dan berhasil dipertahankan tetap aktif seluruhnya pada kurun waktu Tahun 2011-2015. Adapun persentase tingkat dan jumlah penduduk miskin telah menunjukkan penurunan. Pada Tahun 2011, terdapat 181.700 jiwa. Pada Tahun 2015, jumlah penduduk miskin sebesar 166.950, atau berkurang 14.750 jiwa.

Tabel 2.61

Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Indeks Pembangunan Desa Indek Desa Membangun	66.45 Rasionalisasi Target 0,6645	0,6208	93,4%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Gresik Tahun 2017

Dalam pengukuran pembangunan desa melalui **Indeks Pembangunan Desa** secara komposit terdapat 5 (lima) dimensi indeks pembangunan desa (IPD) yaitu pertama Pelayanan dasar, kedua Kondisi infrastruktur, ketiga Aksesibilitas/ transportasi, keempat Pelayanan publik, dan kelima Penyelenggaraan pemerintahan. IPD mengklasifikasi-kan Desa menjadi Desa Tertinggal, Desa Berkembang,

dan Desa Mandiri. Dalam perkembangannya, penilaian IPD dilaksanakan secara berjangka dalam waktu 3 (tiga) tahun sehingga dalam pengukuran tahunan ditransformasikan melalui **Indeks Membangun Desa**. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Dalam potret nasional, rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 pada 73.709 Desa berdasar data Podes menghasilkan data sebagai berikut: Desa Sangat Tertinggal : 13.453 Desa atau 18,25 %; Desa Tertinggal : 33.592 Desa atau 45,57 %; Desa Berkembang : 22.882 Desa atau 31,04 %; Desa Maju : 3.608 Desa atau 4,89 %; dan Desa Mandiri : 174 Desa atau 0,24%. Sedangkan klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri : > 0,815

h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Tabel 2.62
Capaian Indikator Urusan Pengendalian dan Keluarga Berencana
Tahun 2011 - 2015

NO	URUSAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prevalensi peserta KB Aktif	%	78,69	78,00	78,68	78,77	86,45
	Jumlah peserta program KB aktif	Orang	-	180.279	183.152	185.122	185.122
	Jumlah pasangan usia subur	Orang	-	231.583	232.768	235.028	214.145
2	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0,64	1,20	0,90	0,98	1,07
	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	Orang	-	2.752	2.250	2.294	2.294
	Jumlah Pasangan Usia Subur	Orang	-	228.831	232.768	235.028	214.145

3	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)	%	12,07	12,07	18,50	12,14	9,12
	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Orang	-	27,624	43.040	28.534	19.525
	Jumlah PUS	Orang	-	228.831	232.768	235.028	214.145
4	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%	39,9	81,50	34,00	93,48	93,48
	Anggota BKB ber KB		-	12.693	5.458	11.743	11.743
	Seluruh PUS Anggota BKB		-	15.568	16.045	12.562	12.562
5	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100
	Rekap Data Mikro Keluarga Desa/Kelurahan		-	356	356	356	356
	Jumlah Desa Kelurahan		-	356	356	356	356

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 – 2015

Indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 cukup baik. Prevalensi peserta KB Aktif, Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 Tahun dan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita meningkat, sementara Unmet Need turun. Adapun penyediaan data mikro, yaitu melalui pendataan keluarga sejahtera, telah dilaksanakan setiap tahunnya.

Tabel 2.63
Capaian Sasaran Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Angka laju pertumbuhan penduduk	0.6-1.4	1.18	100	Sangat Tinggi
2	Persentase Prevalensi peserta KB Aktif;	87%	81,34%	93,46	Sangat tinggi

Sumber Data: Dinas Keluarga Berencanaan dan
Pemberdayaan Perempuan Sipil Kab. Gresik Tahun 2017

Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Gresik selama tahun 2016 dalam kondisi yang stabil pada nilai 1,18 dalam range rerata laju pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu 0,6-1,4. Jumlah penduduk Gresik per Desember 2016 mencapai 1,310,439 jiwa meningkat tipis dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.303.773 jiwa. Sedangkan dalam pelayanan Keluarga berencana diukur dari **Persentase Prevalensi peserta KB Aktif** mencapai 81,34% dengan artian bahwa dari 237.315 pasangan usia subur, sebanyak 193.336 telah menjadi peserta KB aktif.

i) **Perhubungan;**

Tabel 2.64
Capaian Indikator Urusan Perhubungan
Tahun 2011 - 2015

NO.	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase ketersediaan angkutan darat	%	100	100	100	100	100
	Jumlah angkutan darat	Buah	-	-	-	-	-
	Jumlah penumpang angkutan darat	Buah	-	-			
2.	Presentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	34,00	37,80	41,60	52,08	56,60
	Jumlah rambu lalu lintas	Buah	850	945	1.040	1.302	1.415
	Jumlah rambu lalu lintas yang dibutuhkan	Buah	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Persentase angkutan umum darat dalam kondisi layak jalan	%	85,71	79,99	74,26	72,49	70,72
	Jumlah angkutan umum dalam kondisi layak jalan	Buah	1.212	1.131	1.050	1.025	1.000
	Jumlah angkutan umum	Buah	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414
4.	Ketersediaan angkutan laut (penyeberangan)	%	115,38	125,95	118,66	195,11	181,08
	Jumlah daya tampung kapal	Orang	109.440	109.440	127.870	211.496	217.668
	Jumlah penumpang	Orang	94.851	86.890	107.762	108.401	120.205

	angkutan laut (penyeberangan)						
5	Pembangunan Bandara Domestik di Pulau Bawean	%	50	95	95	100	100
6	Persentase Permasalahan Bidang Perhubungan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	83,33

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Capaian indikator urusan perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 secara umum cukup baik. Yang perlu diperhatikan adalah Persentase Angkutan Umum Darat Dalam Kondisi Layak Jalan. Indikator ini menunjukkan penurunan dari 85.71% pada Tahun 2011, menjadi 70.72% pada Tahun 2015. Pada Tahun 2011, angkutan umum darat berjumlah 1.414 buah, sedangkan yang berada dalam kondisi layak jalan sejumlah 1.212 buah. Pada Tahun 2015, jumlah angkutan umum tidak bertambah, namun jumlah angkutan umum yang layak jalan berkurang hingga tinggal 1.000 buah.

Kondisi yang berbeda terjadi pada ketersediaan angkutan laut (penyeberangan). Pada Tahun 2011, jumlah daya tampung kapal (penyeberangan) sebesar 109.440 orang, sementara jumlah penumpang sebesar 94.851 orang. Pada Tahun 2015, jumlah daya tampung sebesar 217.668 orang, sementara jumlah penumpang sebesar 120.205.

Tabel 2.65

Capaian Sasaran Urusan Perhubungan Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2016			
1	Rasio Konektivitas Transportasi	0.26	0.26	100.00	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kab. Gresik Tahun 2017

Konektivitas daerah diukur melalui **Rasio Konektivitas Transportasi** guna menggambarkan ketersediaan angkutan jalan dan kemantapan jalan dibanding per 100.000 penduduk. Pada tahun 2016 jumlah angkutan umum di Kabupaten Gresik sebanyak 1414 unit dengan rincian :

- a. Angkutan Kota 206 unit
- b. Angkutan pedesaan 321 Unit
- c. Angkutan taksi 100 unit
- d. Angkutan perbatasan 787 unit.

Dengan Panjang jalan kondisi mantap di Tahun 2016 sepanjang 426,68 km serta jumlah penduduk pada tahun 2016 berjumlah 1.310.439 jiwa, maka rasio konektivitas transportasi pada tahun 2016 adalah 0,26 dengan artian semakin besar maka pemenuhan akan fasilitas transportasi guna mengakomodasi mobilitas penduduk semakin terpenuhi.

j) Komunikasi dan informatika;

Tabel 2.66
Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2011 - 2015

NO.	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Keberadaa n Website Pemerintah Daerah	ada/Tida k	ada	ada	ada	ada	ada
2	Pengunjung Website setiap tahun	Netter	419.8 95	665.11 3	716.9 07	725.21 3	761.4 74
	Jumlah kunjungan ke website selama 1 tahun (netter)						
3	Sistim informasi yang tersedia	Buah	24	27	30	32	25
	Jumlah sistem informasi yang tersedia selama 1 tahun						
4	Jumlah pemberitaan di media massa	Kali	365	300	692	692	710
	Jumlah pemberitaan di media selama 1 tahun						
5	Persuratan secara elektronik	Ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Capaian indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 menunjukkan kondisi yang baik. Pengunjung Website Kabupaten Gresik meningkat, dari 419.895 netter pada Tahun 2011 menjadi 761.474 netter pada Tahun 2015. Adapun pemberitaan di media

massa telah meningkat dari 365 kali pada Tahun 2011, menjadi 710 pada Tahun 2015.

Tabel 2.67
Capaian Sasaran Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Persentase Pertumbuhan kumulatif pengakses Website Resmi Pemda	2,5-3,5% 728 -753 Informasi	13,3 % 805 Informasi dalam 1 Tahun	100	Sangat tinggi

Sumber Data: Diskominfo Kab.Gresik Tahun 2017

Persentase Pertumbuhan kumulatif pengakses Website Resmi Pemda mencapai 805 informasi dalam 1 tahun meningkat 13,35 dibandingkan tahun sebelumnya 710 informasi dalam setahun sedangkan kunjungan website mencapai 320.592 hits. Keterbukaan informasi didukung Telah dibangunnya jaringan fiber optic antar SKPD sepanjang 8 km, Kecepatan akses internet untuk kantor pemerintahan yang cepat (150 Mbps), mengalokasikan kebutuhan internet untuk 330 desa di Kabupaten Gresik melalui dana Desa, dan pembangunan hotspot diruang publik.

k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;

Tabel 2.68
Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun 2011 - 2015

NO.	URUSAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koperasi aktif	%	82	91	91	91	95
	Jumlah Koperasi aktif		856	965	974	991	1.143
	Jumlah seluruh koperasi		1.050	1.059	1.070	1.088	1.209
2	Usaha mikro dan kecil	%	72	96	99	97	99
	Jumlah usaha mikro dan kecil		26.16 2	35.01 0	36.36 1	165.61 6	187.05 2
	Jumlah seluruh UKM		36.52 5	36.65 0	36.77 4	171.31 6	188.53 4
3	Koperasi yang mendapatkan penilaian baik	%	75,54	77,16	79,34	82,08	83,12
	Jumlah koperasi yang mendapat penilaian baik tahun ini		139	152	192	229	261
	Jumlah seluruh koperasi		184	197	242	279	314

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2015 menunjukkan capaian yang baik. Jumlah koperasi aktif meningkat, dari 1.050 koperasi pada Tahun 2011 menjadi 1.209 koperasi pada Tahun 2015. Jumlah Usaha Kecil Menengah juga bertambah dengan pesat. Pada Tahun 2011, jumlah seluruh UKM adalah 36.525 unit. Pada Tahun 2015, jumlah itu telah bertambah sejumlah 152.009 UKM menjadi 188.534. Dari jumlah itu, 99% nya adalah usaha mikro dan kecil, yaitu sejumlah 187,052 unit.

Tabel 2.69

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Angka Pertumbuhan Komulatif usaha mikro dan kecil	0,33% (189.156)	1,89% (192.091)	101,55	Sangat tinggi
2	Angka Pertumbuhan Koperasi sehat	310	298	96,12	Sangat tinggi

Angka Pertumbuhan Komulatif usaha mikro dan kecil selama tahun 2016 mencapai 1,89% dengan jumlah UKM mencapai 192.091 meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 188.534 atau melonjak signifikan sebanyak 3.557 usaha. **Angka Pertumbuhan Koperasi sehat** pada tahun 2016 sedikit menurun dibandingkan tahun 2015, dari 305 koperasi sehat (komulatif koperasi aktif dan sehat) pada tahun sebelumnya tercatat 298 koperasi sehat pada tahun 2016.

1) Penanaman modal;

Tabel 2.70

Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal
Tahun 2011 - 2015

NO.	URUSAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rp.	876,80	898,95	942,53	7.606,33	4.601,53
2.	Ijin Lokasi	%	94,44	90,00	64,52	103,33	93,22
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	34	54	40	62	55
	Jumlah permohonan ijin	Buah	36	60	62	60	59

3.	Ijin Pertambangan Daerah (SIPD)	%	66,67	100	75	78,26	78,26
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	12	13	15	18	18
	Jumlah permohonan ijin	Buah	18	13	20	23	23
4.	Ijin Gangguan (HO)	%	78,92	77,00	75,93	69,17	107,42
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	146	170	123	83	275
	Jumlah permohonan ijin	Buah	185	218	162	120	256
5.	Ijin Mendirikan Bangunan	%	90,31	75,00	105,57	66,83	88,24
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	494	404	739	421	495
	Jumlah permohonan ijin	Buah	547	536	700	630	561
6.	Ijin Prinsip	%	83,33	90,00	78,33	79,40	105,70
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	100	190	206	212	278
	Jumlah permohonan ijin	Buah	120	210	263	267	263
7.	Ijin Usaha	%	95,00	96,00	93,55	100	90,12
	Jumlah ijin yang diselesaikan	Buah	34	244	58	52	73
	Jumlah permohonan ijin	Buah	36	253	62	52	81

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Nilai Realisasi permodalan dalam negeri mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 42,8% dibandingkan tahun 2014 dengan valuasi sebesar 4.601,53 Milyar Rupiah. Sedangkan pelayanan perizinan memuaskan dengan rata-rata penyelesaian perizinan mencapai 87,4%.

Tabel 2.71
Urusan Penanaman Modal Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	17,06% (Rp.27,45 T)	36% (31.95 T)	213	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik Tahun 2017

Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik meningkat secara dramatis pada Tahun 2016 mencapai 31,95 Trilyun dengan realisasi investasi mencapai Rp8.506.993.600.000 atau 8,5 Trilyun. Realisasi investasi tersebut memiliki komposisi 3.982.980,6 (juta rupiah) atau 46,82% berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri sedangkan 348.001 (US\$ ribu) dengan kurs tengah rupiah Rp13.000 mencapai 4.524.013 (juta rupiah) atau 53,18% berasal dari Penanaman Modal Asing. Adapun rasio realisasi mencapai 50,9% dari total rencana investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing sebesar 16.718.565,5 (juta rupiah)

Capaian positif investasi Gresik diluar trend siklus bisnis nasional yang melemah sebagaimana ditunjukkan pelemahan nilai rupiah hingga penurunan kapitalisasi indeks harga saham gabungan. Rincian investasi Kabupaten Gresik selama tahun 2016 meliputi Rencana Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rupiah) sebesar 13.952.621,8, Rencana Investasi Penanaman Modal Asing (US\$ ribu) sebesar 212.764,9, Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rupiah) sebesar 3.982.980,6, dan Realisasi Persetujuan Penanaman Modal Asing (US\$ ribu) sebesar 348.001.

m) Kepemudaan dan olah raga;

Tabel 2.72
Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2011 - 2015

NO .	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	100	100	75	100	100
	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Orang	-	26	30	26	26
	Jumlah seluruh organisasi kepemudaan	Orang	-	26	40	26	26
2	Gelanggan/balai remaja (selain milik swasta)	unit	1	2	3	4	6
	Jumlah pelanggan/balai remaja di kabupaten						
3	Lapangan Olahraga	unit	24	24	24	24	24
	Jumlah lapangan olahraga di kabupaten						
4	Persentase Cabang olahraga yang aktif	%	79,18	100	63,83	100	100
	Jumlah cabang olahraga yang aktif	Buah	-	38	30	31	31
	Jumlah seluruh cabang olahraga	Buah	-	38	47	31	31

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Jumlah gelanggang / balai remaja yang terdapat di Kabupaten Gresik telah bertambah, dari semula hanya 1 (satu) unit di Tahun 2011, menjadi 6 unit pada Tahun 2015. Adapun jumlah lapangan olahraga tetap dipertahankan sebanyak 24 unit. Penurunan terlihat pada jumlah cabang olahraga yang aktif. Pada Tahun 2012, Kabupaten Gresik memiliki 38 cabang olahraga yang aktif. Pada Tahun 2015, jumlah ini berkurang menjadi 31 cabang olahraga.

Tabel 2.73
Capaian Sasaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
			2016		
1	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	40-50%	90,5 % (695 Pemuda Berprestasi)	>100	Sangat tinggi

Sumber Data: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kab.Gresik Tahun 2017

Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi mencapai 90,5% diukur dari 768 pemuda yang dibina pada tahun 2016 sebanyak695 pemuda berhasil meraih prestasi akademik dan non akademik. Prestasi yang diraih meliputi prestasi di bidang pengembangan kepribadian dan potensi diri sebanyak 693 pemuda dengan raihan 919 prestasi di tingkat Nasional, Jawa Timur, maupun Kejuaraan Daerah serta 2 Pemuda peserta Paskibraka.

n) Statistik;

Tabel 2.74
Capaian Indikator Urusan Statistik Tahun 2011 - 2015

NO	URUSAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Keberadaan Dokumen "Gresik Dalam Angka"	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Keberadaan Dokumen PDRB	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

3.	Keberadaan Dokumen IPM	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 – 2015

Ketersediaan dokumen Gresik Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Dokumen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan kebutuhan penting bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Gresik. Ketersediaan dokumen-dokumen ini setiap tahunnya menjadi indikator tersedianya data statistic yang dibutuhkan.

Tabel 2.75
Capaian Sasaran Urusan Statistik

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online)	100%	85.53%	85,53	Tinggi

Sumber Data: Dinas Kominfo Kab.Gresik Tahun 2017

Capaian Ketersediaan Data Report Based (Online) sbesar 85,53% dinilai dari 1.348 data pelaporan sebagai hasil pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan maupun pelayanan publik telah dilaksanakan publikasi secara meluas sebesar 1.153 data.

o) Kebudayaan;

Tabel 2.76
Capaian Indikator Urusan KebudayaanTahun 2011 - 2015

NO .	URUSAN	SATUA N	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	5	12	9	18	18
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya						
2.	Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya	unit	5	5	6	6	6
	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya						
3.	Peninggalan/cagar budaya (situs) yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100

	Jumlah peninggalan / cagar budaya (situs) yang dilestarikan	Buah	38	38	38	38	46
	Total peninggalan / cagar budaya (situs) yang dimiliki daerah	Buah	38	38	38	38	46

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 – 2015

Kabupaten Gresik mempunyai cukup banyak peninggalan cagar budaya / situs yang harus dilestarikan, antara lain Makam Maulana Malik Ibrahim, Makam Sunan Giri, kawasan heritage Kota Lama, dan pelbagai cagar lainnya yang didominasi unsur religius. Adapun pelestarian terhadap seluruh cagar budaya / situs telah dilaksanakan dengan optimal.

Tabel 2.77
Capaian Sasaran Urusan Kebudayaan Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
			2016		
1	Persentase Kelestarian Budaya	100%	100% 18 Cagar Budaya yang dilestarikan	100	Sangat tinggi

Sumber Data: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kab.Gresik Tahun 2017

Persentase Kelestarian Cagar Budayamencapai 100% dengan melestarikan 18 cagar budaya

p) Perpustakaan;

Tabel 2.78
Capaian Indikator Urusan perpustakaan Tahun 2011 - 2015

NO .	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	buku	98.312	105.712	124.355	139.555	140.256
2	Pengunjung Perpustakaan	Orang	1.125.000	1.307.995	1.371.507	1.074.695	1.267.193
3	Jumlah Anggota Perpustakaan	Orang	21.466	22.592	23.287	24.266	25.430

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 – 2015

Urusan Perpustakaan di Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 menunjukkan perkembangan yang baik. Jumlah koleksi judul buku yang tersedia terus meningkat, dari semula 98.312 judul di Tahun 2011, menjadi 140.256 judul di Tahun 2015. Jumlah kunjungan dan jumlah anggota perpustakaan juga memperlihatkan peningkatan. Pada Tahun 2011, jumlah

kunjungan ke perpustakaan sebesar 1.125.000 kali dalam setahun, sedangkan pada Tahun 2015 bertambah menjadi 1.267.193 kali dalam setahun. Adapun Jumlah Anggota Perpustakaan yang pada Tahun 2011 berjumlah 21.466 orang, telah bertambah 3.964 orang menjadi 25.430 orang.

Tabel 2.79
Capaian Sasaran Urusan Perpustakaan

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Indeks Minat Baca Daerah	1 : 6,7	1 : 6,8	101 %	Sangat tinggi

Sumber Data: Diskominfo Kab.Gresik Tahun 2017

Indeks Minat Baca Daerah diukur melalui rsio pemustaka daerah dengan jumlah penduduk Kabupaten Gresik selama satuu tahun. Berdasarkan komposisi tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk mencapai 1.310.439 dengan rasio 1 :6,8 maka pemustaka daerah mencapai 192.711 pengunjung. Dalam rangka peningkatan minat baca telah dilaksanakan pelbagai insentif seperti taman baca di halte bus serta mendorong Kartu Identitas anak sebagai elemen untuk mengembangkan layanan perpustakaan bagi peserta didik.

q) Kearsipan

Tabel 2.80
Capaian Indikator Urusan Kearsipan Tahun 2011 - 2015

NO.	URUSAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penerapan Pengelolaan Arsip Secara baku	%	22,52	40,68	80,87	99,76	100,00
	jumlah instansi yang telah menerapkan arsip secara baku	Unit	93	168	334	412	413
	jumlah SKPD dan Desa	Unit	413	413	413	413	413

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Jumlah instansi yang telah menerapkan arsip secara baku telah mencapai 100% pada Tahun 2015. Hal ini merupakan perkembangan yang pesat dalam jangka waktu lima tahun. Pada Tahun 2011 baru terdapat 93 SKPD dan Desa, atau 22.52% yang menerapkan arsip secara baku. Secara bertahap, jumlah ini terus bertambah hingga mencapai 413 atau 100% pada Tahun 2015.

Tabel 2.81
Capaian Sasaran Urusan Kearsipan

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2016			
1	Persentase Capaian Alih Media Arsip	75%	52% (25 dari 48 OPD)	69%	Sedang

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Gresik Tahun 2017

Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik (baca:kertas) menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Dalam konteks kearsipan, alih media digunakan untuk menyelamatkan arsip statis yang berdasarkan rentang waktu tertentu. **Persentase Capaian Alih Media Arsip**selama tahun 2016 dilaksanakan terhadap dokumen penting yang dhimpung dari perangkat daerah, dari total 48 perangkat daerah berhasil dialihmedia arsipkan sebanyak 25 perangkat daerah. Capaian alih media kearsipan dipengaruhi tenaga kearsipan yang masih minim dengan fasilitas kearsipan yang tidak optimal mendukung, akan tetapi optimalisasi pelayanan kearsipan telah dilaksanakan melalui program pendampingan dan pelatihan arsip dan penyelamatan arsip statis.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (1) meliputi:

a) Kelautan dan perikanan;

Tabel 2.82
Capaian Indikator Urusan kelautan dan Perikanan Tahun 2011 - 2015

NO .	URUSAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Perikanan :						
a	Budi Daya :						
a.1	- Udang Windu (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton)	ton	2.093,34	3.027,66	4.005,80	3.375,70	3.346,85
a.2	- Udang Vannamae (Jumlah produksi	ton	4.585,89	7.428,71	7.160,62	6.237,08	6.181,54

	selama 1 tahun (ton)						
a.3	- Bandeng (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton)	ton	28.428,06	47.700,30	68.811,44	65.975,68	67.998,24
a.4	- Kerapu (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton)	ton	15,41	9,9	12,00	66,71	125,89
a.5	- Nila (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton)	ton	1.526,70	1.737,18	3.424,59	2.354,89	2.106,89
b	Penangkapan (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton)	ton	19.492,84	16.965,00	18.380,99	17.379,23	18.122,28
c	Perairan Umum (Jumlah produksi selama 1 tahun (ton)	ton	350,43	420,00	862,27	916,75	496,00
2	Produktivitas Lahan Tambak :						
a	Payau	ton/Ha	135,75	222,94	258,82	277,96	286,76
b	Tawar	ton/Ha	55,27	233,10	301,22	321,60	332,52

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Produktifitas lahan tambak payau dan tawar di Kabupaten Gresik terus meningkat pada kurun waktu 2011-2015. Yang menarik adalah peningkatan produktifitas lahan tambak tawar yang begitu pesat. Pada Tahun 2011, produktivitas lahan tambak tawar sebesar 55.27 ton/ha, jauh lebih rendah daripada produktivitas lahan tambak payau yang mencapai 135.75 ton/ha. Namun pada akhir Tahun 2015, produktifitas lahan tambak tawar mencapai 332.52 ton/ha, lebih tinggi daripada produktifitas lahan tambak payau yang berkisar pada 286.76 ton/ha.

Produksi budi daya ikan di Kabupaten Gresik didominasi oleh Ikan Bandeng, yaitu sebesar 67.998 ton pada Tahun 2015, diikuti oleh Udang Vannamae sebesar 6.181,54 ton. Adapun produksi ikan dari hasil penangkapan pada Tahun 2015 sebesar 18.122,28 ton.

Tabel 2.83
Capaian Sasaran Urusan Kelautandan Perikanan

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2016			
1	Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	4,2-42,4%	4.78%	113,81	Sangat tinggi

Realisasi persentase PDRB sektor perikanan Kabupaten Gresik pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 10,04%, dari 4,30%

pada tahun 2015, pada tahun 2016 menjadi 4,78% di tahun 2016. Kenaikan Realisasi persentase PDRB sektor perikanan Kabupaten Gresik ini disebabkan Harga Produk Perikanan (Ikan, Udang dan Kekerangan) di pasar Domestik dan Internasional kecenderungannya Naik pada tahun 2016. Peningkatan produksi Hasil Perikanan di Kabupaten Gresik pada Produksi Perikanan Budidaya mengalami kenaikan sebesar 10,61 %. Pada Tahun 2015 Produksi Perikanan Budidaya sebesar 79.759 ton, sedangkan Tahun 2016 sebesar 89.233 ton serta Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 6,05%. Apabila pada tahun 2015 Produksi Perikanan Tangkap sebesar 18.122 ton, maka pada Tahun 2016 naik menjadi 19.228,56 ton.

b) Pariwisata;

Tabel 2.84
Capaian Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2011 - 2015

NO .	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah kunjungan wisata Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun		1.250.000	1.500.000	3.714.635	3.620.974	3.107.278

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Jumlah wisatawan di Kabupaten Gresik meningkat pesat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada Tahun 2011, jumlah wisatawan adalah 1.250.000 orang. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 3.107.278 orang pada Tahun 2015.

Tabel 2.85
Capaian Sasaran Urusan Parwisata

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
		2016			
1	Persentase Apresiasi Wisata	0,16%	5,01%	100	Sangat tinggi

Sumber Data: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab.Gresik
Tahun 2017

Persentase Apresiasi Wisata tahun 2016 meningkat isgnifikan sebanyak 5,01 % dibandingkan tahun 2015 sebesar 3.107.278 wisatawan.

Komposisi peningkatan wisatawan meliputi 4.974 Wisatawan Mancanegara dan 3.258.126 Wisatawan Dalam Negeri.

c) Pertanian

Tabel 2.86
Capaian Indikator Urusan Pertanian Tahun 2011 – 2015

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Pertanian						
	a. Target	ton	516.785	531.695	542.043	549.485	554.979
	b. Realisasi	ton	402.414	564.249	537.730	553.633	548.166
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	77,87	106,12	99,20	100,75	98,77
a	- Padi (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	371.798	382.952	390.611	396.470	400.434
	b. Realisasi	ton	302.230	386.800	376.535	395.594	403.906
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	123,02	99,01	103,74	100,22	99,14
b	- Jagung (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	101.973	105.032	107.133	108.204	109.286
	b. Realisasi	ton	76.864	152.274	135.287	131.767	127.218
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	132,67	68,98	79,19	82,12	85,90
c	- Kedelai (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	3.279	3.345	3.395	3.429	3.463
	b. Realisasi	ton	1.394	2.132	1.368	1.952	1.326
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	42,51	63,74	40,30	56,93	38,29
d	- Kacang Tanah (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	4.868	4.965	5.040	5.090	5.141
	b. Realisasi	ton	2.615	3.756	5.029	3.451	1.326
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	53,72	75,65	99,79	67,80	25,79
e	- Kacang Hijau (Jumlah produksi selama 1 tahun)						

	a. Target	ton	2.098	2.140	2.172	2.194	2.216
	b. Realisasi	ton	2.589	1.537	2.792	2.911	3.026
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	123,41	71,83	128,55	132,68	136,58
f	- Ubi Kayu (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	27.117	27.524	27.882	28.216	28.499
	b. Realisasi	ton	12.830	14.953	13.526	14.854	10.426
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	47,31	54,33	48,51	52,64	36,58
g	- Ubi Jalar (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	5.652	5.737	5.812	5.882	5.940
	b. Realisasi	ton	3.892	2.797	3.193	3.104	938
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	68,85	48,75	54,94	52,77	15,79
2	Produksi Sayur :						
	a. Target	ton	17.165	17.499	17.765	17.972	18.121
	b. Realisasi	ton	28.799	7.569	13.812	11.957	4.708
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	167,77	43,25	77,75	66,53	25,98
a	- Bawang Merah (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	3.235	3.332	3.399	3.450	3.484
	b. Realisasi	ton	169	21	35	188	38
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	5,22	0,63	1,03	5,45	1,09
b	- Sawi (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	583	592	600	606	610
	b. Realisasi	ton	1.092	752	395	408	154
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	187,17	126,99	65,85	67,34	25,24
c	- Kacang Panjang (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	499	506	513	518	522
	b. Realisasi	ton	447	961	977	882	583

	c. Capaian (b : a) X 100%	%	89,62	189,82	190,51	170,28	111,77
d	- Cabe (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	747	769	784	796	804
	b. Realisasi	ton	1.078	1.259	8.100	973	847
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	144,40	163,73	1.032,7 ₃	122,22	105,34
e	- Tomat (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	347	357	364	369	373
	b. Realisasi	ton	291	604	597	431	799
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	83,98	169,24	164,00	116,65	214,10
f	- Terong (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	8.696	8.826	8.941	9.030	9.093
	b. Realisasi	ton	1.090	852	993	4.400	911
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	12,54	9,65	11,11	48,73	10,02
g	- Ketimun (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	771	783	793	801	806
	b. Realisasi	ton	192	130	163	540	9
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	24,90	16,61	20,56	67,43	1,12
h	- Labu Siam (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	583	592	600	606	610
	b. Realisasi	ton	319	194	222	2.940	209
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	54,68	32,76	37,01	485,24	34,25
i	- Kangkung (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	1.105	1.133	1.155	1.173	1.190
	b. Realisasi	ton	10.949	1.633	1.219	779	711
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	990,69	144,15	105,50	66,42	59,73

j	- Bayam (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	ton	600	609	617	623	627
	b. Realisasi	ton	13.172	1.163	1.111	416	447
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	2.196,21	191,05	180,16	66,79	71,27
3	Produksi Buah :						
	a. Target	kuintal	508.316	513.786	519.540	524.205	528.073
	b. Realisasi	kuintal	576.424	941.301	752.843	657.771	857.427
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	113,40	183,21	144,91	125,48	162,37
a	- Jambu Biji (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	kuintal	5.390	5.423	5.450	5.472	5.494
	b. Realisasi	kuintal	5.660	17.240	11.514	4.356	2.793
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	105,00	317,92	211,27	79,61	50,84
b	- Jeruk (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	kuintal	1.821	1.852	1.879	1.902	1.921
	b. Realisasi	kuintal	6.595	5.343	3.166	979	8.135
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	362,22	288,55	168,46	51,47	423,48
c	- Mangga (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	kuintal	311.353	316.646	321.396	325.252	328.505
	b. Realisasi	kuintal	331.277	634.417	530.578	423.225	620.485
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	106,40	200,36	165,09	130,12	188,88
d	- Pepaya (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	kuintal	8.622	8.628	8.671	8.705	8.732
	b. Realisasi	kuintal	5.284	6.924	8.484	9.418	11.743
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	61,28	80,25	97,85	108,19	134,49
e	- Pisang (Jumlah produksi selama 1 tahun)						

	a. Target	kuintal	176.668	176.774	177.658	178.369	178.904
	b. Realisasi	kuintal	220.289	268.381	189.523	213.214	208.874
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	124,69	151,82	106,68	119,54	116,75
f	- Blimbing (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	kuintal	2.366	2.367	2.379	2.389	2.396
	b. Realisasi	kuintal	4.336	5.633	7.426	3.866	2.553
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	183,28	237,96	312,14	161,86	106,57
g	- Sawo (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	kuintal	1.130	1.131	1.136	1.141	1.144
	b. Realisasi	kuintal	1.725	2.531	1.855	2.213	2.606
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	152,66	223,85	163,25	193,98	227,74
h	- Sirsak (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
	a. Target	kuintal	966	966	971	975	978
	b. Realisasi	kuintal	1.258	832	297	500	238
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	130,3	86,1	30,6	51,3	24,3
4	Produksi Perkebunan						
	a. Target	ton	13.249	13.388	13.999	14.018	13.254
	b. Realisasi	ton	13.499	12.514	30.683	17.302	142.274
	c. Capaian (b : a) X 100%	%	101,88	93,47	219,18	123,43	1.073,44
5	Produksi Peternakan :	ton	10.335,12	10.401,72	10.460,11	10.510,16	10.586,24
	Daging (Jumlah produksi selama 1 tahun)						
6	Telur (Jumlah produksi selama 1 tahun)	ton	2.646,38	2.691,73	2.725,26	2.754,96	2.798,52
7	Susu (Jumlah produksi selama 1 tahun)	ton	299,67	304,8	306,14	307,44	366
8	Populasi Ternak :	ekor	53.526	58.683	44.703	47.697	50.514
	Populasi Sapi :						
9	Kerbau (populasi binatang selama 1 tahun)	ekor	176	297	198	198	189
10	Kambing (populasi	ekor	57.511	65.210	65.270	66.357	67.602

	binatang selama 1 tahun)						
11	- Domba (populasi binatang selama 1 tahun)	ekor	30.134	30.396	30.396	30.898	32.533
12	- Kuda (populasi binatang selama 1 tahun)	ekor	236	236	236	215	248
13	- Ayam Buras (populasi binatang selama 1 tahun)	ekor	640.840	645.838	647.762	663.830	680.930
14	- Ayam Ras Petelur (populasi binatang selama 1 tahun)	ekor	133.045	133.045	134.700	140.000	152.300
15	- Ayam Ras Pedaging	ekor	2.600.000	2.600.000	2.603.500	6.532.000	13.560.000
16	- Itik (populasi binatang selama 1 tahun)	ekor	26.450	27.990	28.120	27.920	29.145
17	- Entok (populasi binatang selama 1 tahun)	ekor	13.260	13.260	13.385	29.478	30.882

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Produksi Pertanian, Produksi Buah dan Produksi Perkebunan di Kabupaten Gresik meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan paling pesat terlihat pada produksi perkebunan. Pada Tahun 2011, produksi perkebunan di Kabupaten Gresik sebesar 13.499 ton. Pada Tahun 2015, jumlah ini meningkat menjadi 142.274 ton, atau terjadi kenaikan sebesar 128.825 ton dalam lima tahun.

Di sisi lain, produksi sayur justru menurun. Pada Tahun 2011, produksi sayur Kabupaten Gresik sebesar 28.799 ton. Pada Tahun 2015, produksi sayur hanya tinggal 4.708 ton, atau terjadi penurunan sebesar 24.091 ton dalam lima tahun.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian pada Tahun 2016 terintegrasi dengan sasaran pada Urusan Pangan yaitu sasaran ”Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan”diukur indikator ketersediaan pangan utama.

d) Kehutanan;

Tabel 2.87
Capaian Indikator Urusan Kehutanan Tahun 2011 - 2015

NO.	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	0,2452	0,0311	0,0131	0,0136	0,0125

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Rata rata total luas hutan dan lahan kritis yang telah di rehabilitasi di Kabupaten Gresik adalah 0.063% Per Tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 14 bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya Kabupaten/Kota. Pada tahun 2016, Kabupaten Gresik belum memiliki Taman Hutan Raya sehingga sasaran urusan kehutanan terintegrasi pada Urusan lingkungan Hidup.

e) **Energi dan sumber daya mineral;**

Tabel 2.88
Capaian Indikator Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Tahun 2011 - 2015

NO.	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Presentase ABT berijin yang membayar pajak	%	72,40	75,12	62,84	72,22	75,86
	Jumlah sumur yang berijin	Buah	139	160	164	195	220
	Jumlah sumur seluruhnya	Buah	192	213	261	270	290

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Persentase ABT berijin yang membayar pajak telah meningkat sebesar 81 buah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada Tahun 2011, jumlah sumur ABT yang berijin adalah 139 buah, atau 72,40% dari seluruh jumlah sumur. Pada Tahun 2015, jumlah sumur berijin adalah 220 buah atau 75.86 dari seluruh jumlah sumur. Baik jumlah maupun persentase telah menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 14 bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi Kabupaten/Kota. Pada tahun 2016, Kabupaten Gresik belum diidentifikasi sebagai daerah potensi panas bumi

sehingga sasaran urusan energi dan sumber daya mineral terintegrasi pada Urusan lingkungan Hidup.

f) **Perdagangan;**

Tabel 2.89
Capaian Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2011 - 2015

NO .	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pertumbuhan Penerbitan SIUP	%	9,80	6,99	12,01	15,61	19,58
	Jumlah penerbitan SIUP pada th. ini – jmlh Penerbitan SIUP th. Lalu	Buah	-	68	125	182	264
	Jumlah Penerbitan SIUP s.d. th. lalu	Buah	-	973	1.041	1.166	1.348
2.	Pertumbuhan penerbitan TDP	%	-	24,80	49,40	40,80	13,20
	Jumlah Ijin Tahun ini	Buah	1.054	1.315	1.704	1.750	1.981
	Jumlah penerbitan TDP pada th. ini – jmlh Penerbitan TDP th. Lalu	Buah		261	650	696	231
	Jumlah Penerbitan TDP s.d. th. lalu	Buah		1.054	1.315	1.704	1.750
3.	Pertumbuhan penerbitan Tanda Daftar Gudang TDG	%	14.60	62,07	4,26	18,37	110,34
	Jumlah penerbitan TDG pada th. ini – jmlh Penerbitan TDG th. Lalu	Buah	29	47	49	58	122
	Jumlah Penerbitan TDG s.d. th. lalu	Buah	-	18	2	9	64

	Pertumbuhan nilai investasi perdagangan	%	1,10	1,47	1,55	1,99	1,85
4.	Jumlah nilai Investasi pd Th ini - Jumlah investasi pd tahun lalu	Rp.	367.421.000	907.559.000	2.318.129.600	6.936.522.000	19.766.408.000
	Jumlah nilai investasi pd tahun lalu	Rp.	-	540.138.000	1.410.570.600	4.618.392.400	12.829.886.000
	Jumlah nilai Investasi pd tahun lalu	Rp.	-	367.421.000	907.559.000	2.318.129.600	6.936.522.000
5.	Jumlah Pameran /Ekspo Per Tahun	kali	4	4	30	40	20
	Jumlah pameran/ event yang diikuti pada tahun ini						

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 – 2015

Pertumbuhan penerbitan SIUP, Pertumbuhan penerbitan Tanda Daftar Gudang TDG, Pertumbuhan Nilai Investasi Perdagangan dan Pertumbuhan Nilai investasi Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 menunjukkan perkembangan yang baik dan meningkat. Adapun Pertumbuhan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan menurun, dari 24.80 persen di Tahun 2012, menjadi 13.20% di Tahun 2015.

g) Perindustrian;

Tabel 2.90
Capaian Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2011 - 2015

NO.	URUSAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pertumbuha n industri	%	1,09	1,21	1,29	1,15	1,96
1.	Jumlah Industri tahun ini- Jumlah Industri tahun lalu	Buah	68	76	82	74	128
	Jumlah Industri s.d. tahun lalu	Buah	6.225	6.293	6.369	6.451	6.525

	Pertumbuha n nilai produksi	%	2	2,50	3	3,50	4,00
2.	Jumlah Nilai produksi th ini - jumlah nilai produksi th lalu	Buah	435	554	682	819	969
	jumlah nilai produsi th lalu	Buah	21.752	22.187	22.741	23.423	24.242

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 – 2015

Pertumbuhan Industri di Kabupaten Gresik telah meningkat sebesar 0.87 poin. Pada Tahun 2011, Pertumbuhan Industri Kabupaten Gresik sebesar 1,09 sedangkan pada Tahun 2015 sebesar 1.96%. Jumlah industry di Kabupaten Gresik juga mengalami peningkatan, dari 6.225 buah, pada Tahun 2011 menjadi 6.528 buah pada Tahun 2015. Adapun pertumbuhan nilai produksi mengalami peningkatan sebesar 2 poin persen, dari semula 2% di Tahun 2011, menjadi 4% pada Tahun 2015.

Tabel 2.91
Capaian Sasaran Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan

N o	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2016			
1	Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	1-5% (1.317.863,55)	12,97% 170.910.371 (US \$)	100%	Sangat Tinggi
2	Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM)	0.71% (7086)	7086 IKM (0.71%)	100%	Sangat Tinggi

Sumber Data: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Gresik Tahun 2017

Angka pertumbuhan nilai ekspor Barang/Komoditi Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 sebesar 12,97% 170.910.371 (US \$). Pertumbuhan ini diperoleh dari sebesar selisih nilai ekspor Barang/Komoditi Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 yang mencapai 1.488.711.070 US \$ dibandingkan nilai ekspor Barang/Komoditi

Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 sebesar 1.317.800.699 US \$.. Keberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan oleh Meningkatnya jumlah eksportir di Kabupaten Gresik; meningkatnya permintaan importir untuk komoditi tertentu; meluasnya segmen pasar luar negeri eksportir di kabupaten gresik; dan adanya regulasi dari pemerintah yang memudahkan para eksportir dalam mengekspor komoditinya (bebas terbatas)

Angka Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Gresik sebesar 0,71%. Angka ini diperoleh dari kenaikan jumlah IKM di Kabupaten Gresik pada Tahun 2016 sebanyak 7086 IKM dari tahun sebelumnya sebanyak 7036 IKM. **2.3.3. Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan**

Tabel 2.92
Capaian Indikator Urusan Penunjang Pemerintahan Tahun 2011 - 2015

NO.	URUSAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perda yang ditetapkan Jumlah Perda yang yg ditetapkan dalam 1 tahun	% Perda	32	70	89	92	15
2	Jumlah Perda Yang dibatalkan	%	0	0	0	0	0
	Jumlah Perda yang dibatalkan dalam 1 tahun	Perda					
3	Keputusan Bupati	%	100	127	100	100	100
	Jumlah Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Keputusan	-	38	1.299	969	1.324
	Jumlah Keputusan Bupati dalam tahun n	Keputusan	-	30	1.299	969	1.324
4	Kasus hukum yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
	Jumlah kasus hukum dalam 1 tahun	Kasus	6	5	20	5	2
	kasusus Hukum yang diselesaikan	Kasus	6	5	20	5	2
5	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
	Jumlah Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Keputusan	-	38	57	38	49

	Jumlah Keputusan Bupati dalam tahun n	Keputusan	-	38	57	38	49
6	Persentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	114
	Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti	Kasus	408	417	435	435	495
	Jumlah temuan	Kasus	408	417	435	435	435
7	Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi	%	100	100	100	100	100
	Jumlah LAKIP SKPD yang di evaluasi	buah	53	56	56	56	-
	jumlah LAKIP keseluruhan	buah	53	56	56	56	-
8	Persentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti	%	88	158	100	98	98
	Jumlah informasi masyarakat yang ditindaklanjuti	Buah	44	79	77	80	90
	Jumlah informasi masyarakat yang masuk	Buah	50	50	77	82	88
9	Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku wakil Pemerintah	Kali	34	34	34	34	40
10	Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Baik / Cukup / Kurang	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik
11	Opini laporan keuangan	WTP/WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
12	Laporan keuangan tersusun tepat waktu	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
13	APBD ditetapkan tepat waktu	tepat/tidak	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT	TEPAT
14	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada/tidak	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
15	Peningkatan PAD		63,34	56,07	17,58	39,35	14,19
	PAD Tahun ini (Rp Jt)		273.975,99	427.580,87	502.767,01	700.587,79	800.031,26

	PAD Tahun n- PAD (Tahun n-1) (Rp Jt)	(Rp Jt)	-	153.604,87	75.186,16	197.820,76	99.443,47
	PAD Tahun n – 1(Rp Jt)	(Rp Jt)	-	273.975,99	427.580,87	502.767,03	700.587,79
16	Keberadaan kemandirian daerah	%	20,51	25,90	27,32	31,76	32,84
	Jumlah PAD (Rp Jt)	Rp	273.975,99	427.580,87	502.796,03	700.587,79	800.031,26
	Jumlah APBD (Rp Jt)	Rp	1,266,261,710,603.81	1,451,130,800,756.38	1.840.585,22	2.206.385,84	2.436.320,00
17	Asset (Bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan)	%	90	90	98,60	98,60	100
	Aset bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan	Buah	-	-	1.305	1.305	3.529
	Jumlah seluruh aset bangunan	Buah	-	-	1.323	1.323	3.529
18	Perusahaan daerah dalam kondisi sehat	Buah	3	3	3	3	3
19	Jumlah MOU Kerjasama dengan daerah lain dengan pihak ketiga	Buah	0	16	18	22	25
20	Voting yang dilakukan dalam sidang Paripurna	%	0	50	5,88	0	0
	Jumlah pengambilan keputusan melalui voting	Kali	-	2	1	0	0
	Jumlah sidang paripurna dalam tahun ini	Kali	-	4	17	35	45
21	Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan Ranperda	%	33,33	100	100	100	100
	Jumlah Ranperda yang melibatkan masyarakat	Perda	5	10	9	6	12
	Total Ranperda	Perda	15	10	9	6	12
22	Perda inisiatif DPRD	Perda	10	20	28	33	5
23	Rasio Pejabat struktural yang telah mengikuti diklat PIM sesuai jenjangnya	%	63,78	73,60	84,40	79,70	71,21
	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti	Orang	516	636	748	744	673

	diklatpim sesuai jenjangnya						
	Jumlah pejabat struktural yang ada	Orang	809	864	886	934	945
24	Rasio Jabatan yang terisi	%	91	92,8	85,4	88.95	89,82
	Jabatan yang terisi	Orang	809	864	886	936	945
	Jumlah jabatan	Orang	893	931	1.038	1.050	1.052
25	Rasio pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal	%	100	100	100	100	100
	Jumlah pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formalnya	Orang	809	864	886	934	945
	Jumlah pejabat struktural yang ada	Orang	809	864	886	934	945
26	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100	100	100	100	100
	Jumlah pejabat struktural yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Orang	809	864	886	934	945
	Jumlah pejabat struktural yang ada	Orang	809	864	886	934	945
27	Kesesu-aian STOK SKPD dengan Pedoman / Peraturan tentang STOK	%	100	100	100	100	100
28	Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan	%	0	40	100	100	100
29	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
30	Keberadaan Unit pelayanan pengadaan	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
31	Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah	Orang	-	78	94	44	44

32.	Keberadaan Perda RTRW	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
33	Perubahan Pemanfaatan Fungsi Kawasan RTRW	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : LKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 - 2015

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum meliputi urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, urusan pilihan, maupun urusan penunjang didukung dengan penyelenggaraan **Reformasi Birokrasi** dan evaluasi kualitas layanan publik yang diukur dengan **Survey Kepuasan Masyarakat**.

Penilaian terhadap pelaksanaan reformasi briokrasi dilaksanakan meliputi area Kelambagaan, Budaya Organisasi, Ketatalaksanaa, Regulasi Deregulasi Birokrasi, dan Sumber Daya Manusia. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintahan menuju pemerintahan berkelas dunia. Dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi dilaksanakan pada aparaturnya pemerintah melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi. Program-program reformasi birokrasi tersebut ada yang berhubungan secara langsung dan ada yang tidak secara langsung dengan pencapaian keberhasilan reformasi birokrasi. Peningkatan jumlah opini audit BPK Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara langsung dapat meningkatkan pencapaian target jumlah opini audit BPK berpredikat WTP. Selain itu, peningkatan kualitas SAKIP dan LAKIP akan berpengaruh langsung pada pencapaian target jumlah instansi pemerintah yang akuntabel. Adapun penilaian reformasi birokrasi pada tahun 2015 masih belum dilaksanakan dan direncanakan untuk dinilai mulai dengan tahun 2016.

Adapun evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang dilakukan oleh unit layanan akan dinilai pada konteks kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diakses. Pada tahun 2011-2015 telah diinventarisasi unit layanan yang telah melakukan survey kepuasan masyarakat namun dilaksanakan dengan metode tertentu tanpa adanya standar penilaian yang baku sehingga belum dapat diperoleh rata-rata nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh unit layanan pemerintah daerah secara keseluruhan. Berlandaskan hal ini, dibutuhkan penilaian kualitas

layanan publik yang diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat dengan metode interaktif dan standar penilaian yang baku.

Tabel 2.93
Capaian Sasaran ke-1 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016
Urusan UU 23/2014 : Sekretariat Daerah

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2016			
1	Persentase standardisasi pelayanan publik	50%	78,2%	156%	Sangat tinggi
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)	CC (50-60)	B (60.09)	120%	Sangat tinggi

Sumber Data: Sekretariat Daerah Kab.Gresik Tahun 2017

Persentase standardisasi pelayanan publik dinilai terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh unit pelayanan perangkat daerah seperti pelayanan registrasi kependudukan dan catatan sipil, layanan perizinan, dan unit layanannya lainnya. Dari total 48 perangkat daerah pada perangkat daerah, layanan yang telah terstandarisasi mencapai 36 unit layanan. Sedangkan **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)** mengalami peningkatan secara dramatis dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada kategori C melonjak 2(dua) tingkat ke B (baik) dengan nilai komulatif 60,08 atau meningkat signifikan 20 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sasaran “**Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif**” dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 2.94
Capaian Sasaran ke-2 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016
Urusan UU 23/2014 : Sekretariat Dewan

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2016			
1	Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD	10% 11 Perda	30% 13 Perda	300%	Sangat tinggi

Sumber Data: SekretariatDPRD Kab.Gresik Tahun 2017

Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD diukur peningkatan produktifitas perda yang dihasilkan pada tahun 2016 dibanding tahun 2015. Pada Tahun 2016, perda inisiatif yang diusulkan oleh DPRD sebanyak 13 Perda meningkat 30% dibandingkan tahun 2015 sebanyak 10 Perda,. Adapun perda inisiatif yang diusulkan meliputi;

1. Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
2. Peraturan Daerah Tentang Penghapusan Aset Daerah Kabupaten Gresik
3. Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Daerah Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang / Lokasi Bagi Pemenang Penyedia Barang Dan Jasa
5. Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
6. Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Desa
7. Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
8. Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh
9. Peraturan Daerah Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan
10. Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
11. Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum
12. Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah
13. Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah

Tabel 2.95
Capaian Sasaran ke-3 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016
Urusan UU 23/2014 : Inspektorat

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2016			
1	Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat	audit internal 100%	100 %,	100%	Sangat tinggi
		audit eksternal 60%,	71,98%	119%	

		Aduan Masyarakat 100%	100%	100%	

Sumber Data: Inspektorat Kab.Gresik Tahun 2017

Pengukuran Persentase **Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat** diukur pada Tindak lanjut terhadap audit internal, audit eksternal dan Aduan Masyarakat. Pada Tahun 2016 temuan audit internal Inspektorat Kabupaten Gresik sebanyak 439 temuan. Dari temuan tersebut seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Jumlah temuan hasil audit yang dilakukan oleh BPK mulai Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 571 temuan dan berhasil ditindaklanjuti oleh Pemerintah kabupaten Gresik sebanyak 410 temuan atau sebesar 71,8%, sedangkan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui Inspektorat Kabupaten Gresik sebanyak 98 aduan seluruhnya dapat diselesaikan.

Sasaran **"Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual"** dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 2.96
Capaian Sasaran ke-4 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016
Urusan UU 23/2014 : Keuangan

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2016			
1	Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah;	1-13% (800-900 Milyar)	Rp.715,480,938,191	89.44%	Tinggi

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Gresik Tahun 2017

Pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 sebesar Rp. 715.480.938.191, mencapai 89.44% dari target kinerja sedangkan berdasarkan estimasi pendapatan Tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp836.440.666.433,28 dapat direalisasikan sebesar Rp 715.501.281.841,16 atau mencapai 85,54%. Realisasi dan Kontribusi komposisi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana berikut:

- a. Realisasi Pajak Daerah mencapai Rp412.112.744.756,71 atau 88,52% dengan kontribusi terbesar mencapai 57,6%
- b. Realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp77.108.139.440,65 atau 56,43% dengan kontribusi mencapai 10,78%

- c. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai Rp15.393.353.604,09 atau 61,17% dengan kontribusi terendah mencapai 2,15%
- d. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melebihi target dengan capaian Rp210.887.044.039,71 atau 100,86% dengan kontribusi mencapai 29,47%

Tabel 2.97 Capaian Sasaran ke-5 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016 Urusan UU 23/2014 : Kepegawian Serta Pendidikan dan Pelatihan					
No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2016			
1	Indeks Profesionalitas ASN	71	75,8	106,76%	Sangat tinggi

Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah Kab.Gresik Tahun 2017

Komponen penghitungan **Indeks Profesionalitas ASN** meliputi hasil penilaian obyektif potensi pegawai berdasarkan pendidikan, pengalaman, pelatihan teknis dan pelatihan kepemimpinan, serta sasaran kinerja pegawai. Berdasarkan komposisi tersebut indeks profesionalitas ASN Kabupaten Gresik mencapai 75,8. Berdasarkan nilai tersebut dapat dijabarkan bahwa dalam skala 0-100 semakin tinggi nilai keprofesionalitasnya maka Seorang PNS dianggap semakin profesional dengan Semakin tinggi tingkat kompetensinya, Semakin tinggi kinerjanya, Semakin dekat kompensasi yang diterima seseorang baik secara internal maupun eksternal dengan pegawai lainnya pada kompleksitas pekerjaan dan resiko yang setara, dan Semakin rendah tingkat pelanggaran disiplin.

Tabel 2.98 Capaian Sasaran ke-6 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2016 Urusan UU 23/2014 : Kecamatan					
No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Nilai
		2016			
1	Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	60-70%	71%	100%	Sangat tinggi

Sumber Data: Sekretariat Daerah Kab.Gresik Tahun 2017

Pengukuran **Survey Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan** dilakukan Berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini disebabkan oleh Fasilitas dan Asistensi peningkatan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan secara berkala. Berdasarkan survey yang dilaksanakan selama tahun 2016, rata-rata kepuasan pelayanan di 18 kecamatan mencapai 71% atau berkategori baik.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Gresik dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

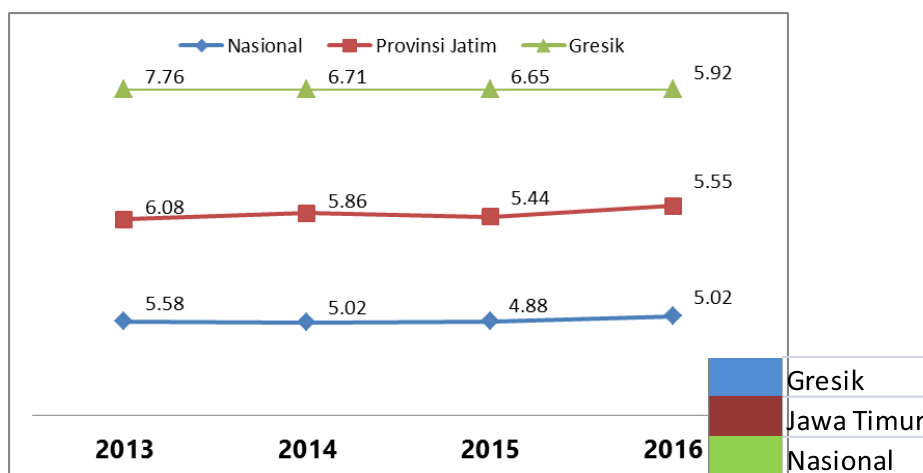
Kabupaten Gresik adalah salah satu dari wilayah penyangga kota Surabaya (*Surabaya Metropolitan Area*). Dimana Kota Surabaya adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur.

Di samping Kabupaten Gresik, daerah lain yang juga dapat dikatakan sebagai kawasan penyangga Kota Surabaya adalah Kabupaten Sidoarjo, Bangkalan, Mojokerto dan Lamongan. Keenam wilayah ini dikenal dengan istilah kawasan Gerbangkertosusila. Fungsi wilayah penyangga bagi Kabupaten Gresik dapat bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten Gresik dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman Kota Surabaya, yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman yang representatif, kondusif, dan strategis.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pada kurun waktu 2011-2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami fluktuatif namun lebih tinggi atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional seperti terlihat pada gambar berikut :

Gambar 2.15



Sumber data: BPS Kab. Gresik Tahun 2016

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Terhadap Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-2015

Perekonomian Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan sebesar 6,15% pada tahun 2015. Kondisi ini melambat 0,88 poin dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 7,03%. Ditinjau berdasarkan posisi relatif Gresik terhadap Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Gresik di atas ekonomi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan 5,44% pada tahun 2015 atau melambat 0,42 poin dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,86%. Kondisi ini selaras bila ditinjau dari posisi relatif Gresik terhadap nasional pada tahun tahun 2015 yang tumbuh 4,79 persen atau melambat bila dibanding tahun 2014 yang mencapai 5,02 persen. Kondisi ini ditunjang infrastruktur yang ada di Kabupaten Gresikantara lain:

- Jalan Tol Surabaya – Gresik .
- Jalan Nasional sebagai jalan Arteri primer (Surabaya – Gresik – Lamongan)
- Jalan Nasional sebagai jalan Kolektor Primer (Gresik – Sadang lewat Pantura / Jl. Daendels).
- Jalan Propinsi sebagai jalan Kolektor Primer (Legundi – Bunder, Lakarsantri – Bringkang, Wringinanom – Driyorejo – Surabaya).
- Kawasan Industri;
- Pelabuhan Umum dan 7 Pelabuhan khusus.

Ditinjau dari sisi pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perbaikan manajemen secara komprehensif menghadapi sistem akuntansi berbasis akrual. Selama tahun 2011s.d. 2014, **Opini Laporan Keuangan** Kabupaten Gresik mendapatkan predikat Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan dengan meraih predikat Wajar tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa Pernyataan professional pemeriksa terhadap informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara fair atau wajar.

Perbaikan secara fundamental terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah menunjukkan birokrasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntable. Kondisi ini mendukung kemampuan daerah dalam meningkatkan penggalan potensi-potensi daerah dan secara simultan meningkatkan pendapatan asli daerah.

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Realisasi investasi penanaman modal Kabupaten Gresik mengalami peningkatan secara konsisten terutama di sektor penanaman modal dalam negeri sedangkan di sektor penanaman modal asing mengalami fluktuaktif dengan nilai investasi terbesar terjadi pada Tahun 2013 sedangkan investasi terendah terjadi pada tahun 2015.

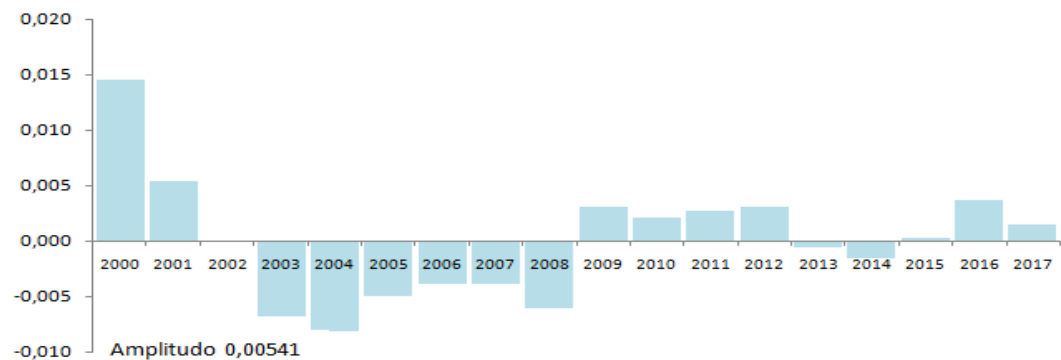
Keberhasilan dalam peningkatan realisasi penanaman modal tersebut didukung oleh kemudahan dalam pelayanan perizinan di daerah serta kesiapan regulasi yang mendukung penanaman modal di daerah; ketersediaan infrastruktur dan penataan perwilayah untuk mendukung realisasi penanaman modal; peningkatan kegiatan promosi akan potensi daerah; dan dukungan Pemerintah Pusat untuk Pengembangan Penanaman Modal yang progresif di wilayah Kabupaten Gresik antara lain pengembangan pelabuhan laut, prasarana transportasi dan kawasan industri, dll. Realisasi investasi dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.99
Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Gresik
Tahun 2012 s.d. 2014

No .	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015
1.	Realisasi Investasi PMDN	Rp. Juta	3.292.566	4.794.719	8.998.738,4	671.413,6
2.	Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing	US \$ (000)	715.790,7	842.750,3	171.921,6	152.925.400

Sumber : LKPJ AMJ Kabupaten Gresik 2011-2015

Berdasarkan kajian ekonomi makro regional, siklus bisnis Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang cukup pada tahun 2013 s.d 2015. Amplitude siklus bisnis sebesar 0.001821 atau lebih kecil dibandingkan periode 2000-2008 yang mencapai 0.007305. Semakin kecil amplitudo yang ditunjukkan maka siklus bisnis sebagai fluktuasi dari aggregate economic activity mengalami stabilitas sebagaimana disajikan sebagai berikut;



Gambar 2.16

Amplitudo Siklus Kabupaten Gresik

Sumber : Kajian Analisis Ekonomi Makro Regional Tahun 2014

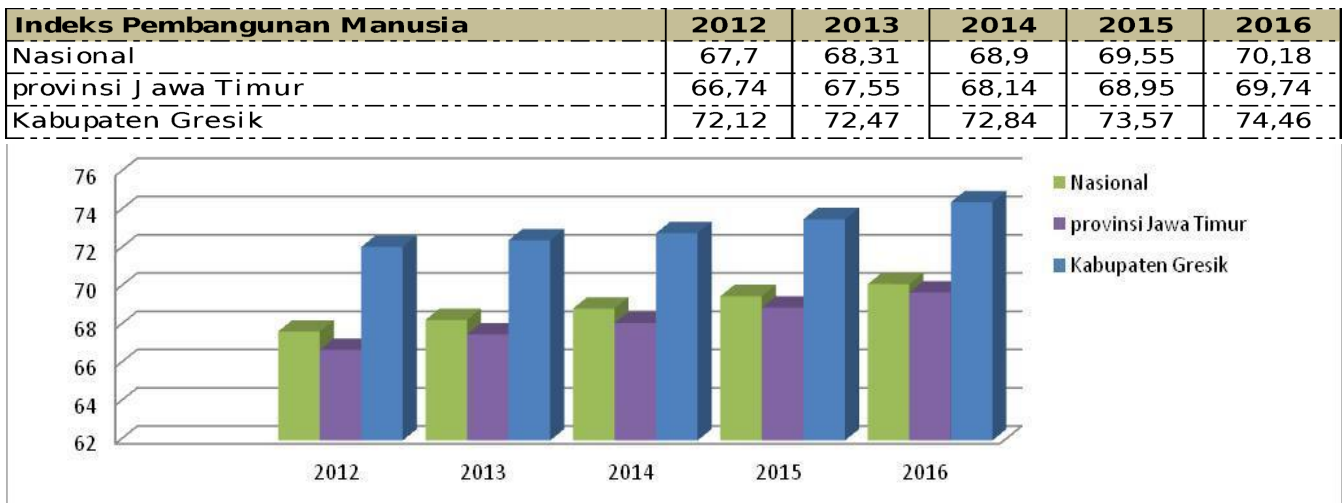
Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik meningkat secara dramatis pada Tahun 2016 mencapai 31,95 Trilyun dengan realisasi investasi mencapai Rp8.506.993.600.000 atau 8,5 Trilyun. Realisasi investasi tersebut memiliki komposisi 3.982.980,6 (juta rupiah) atau 46,82% berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri sedangkan 348.001 (US\$ ribu) dengan kurs tengah rupiah Rp13.000 mencapai 4.524.013 (juta rupiah) atau 53,18% berasal dari Penanaman Modal Asing. Adapun rasio realisasi mencapai 50,9% dari total rencana investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing sebesar 16.718.565,5 (juta rupiah)

2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Ditinjau dari **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, Kabupaten Gresik dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami peningkatan diiringi dengan komponen penyusun IPM meliputi Angka Harapan Hidup, rata-rata lama sekolah, hingga pengeluaran per kapita. Pada tahun 2010, AHH penduduk Kabupaten Gresik telah mencapai 70,98 tahun dan selalu mengalami kenaikan setiap tahun, untuk tahun 2014 sudah mencapai 71,67 tahun. AHH Kabupaten Gresik tahun 2010 sampai 2014 meningkat sebesar 0,69 tahun. Angka Melek Huruf tahun 2014 mengalami kenaikan dibanding

tahun sebelumnya sebesar 0,20 poin. Sementara Angka Rata-rata Lamanya Sekolah (MYS) dari tahun 2013 ke 2014 naik 0,02 poin yaitu dari 9,00 menjadi 9,02 angka ini berarti program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Gresik sudah tercapai. Pengeluaran per-kapita dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar Rp 13.860,-.

Tabel 2.100
Besarnya Nilai IPM Kabupaten Gresik dan Komponen
Komponennya Selama tahun 2016-2021



Sumber : BPS Tahun 2017

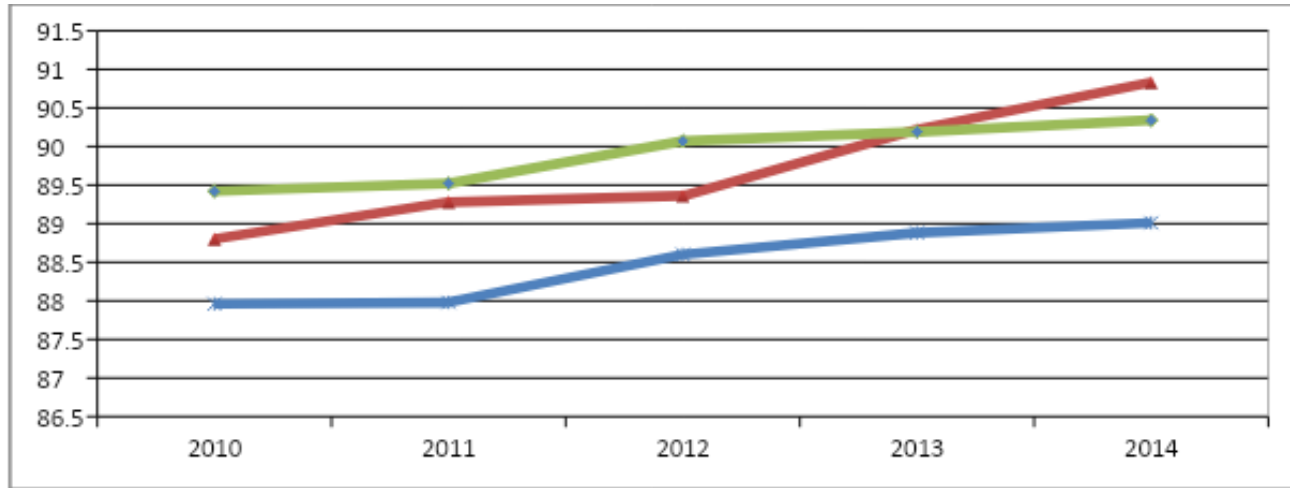
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk 15 tahun ke atas (dengan bobot 2/3) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot 1/3) serta tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan Purchasing Power Parity (PPP rupiah).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur Angka Harapan Lama Sekolah serta tingkat kehidupan

yang layak, diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Perubahan metode pengukuran IPM secara fundamental adalah Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik terus mengalami peningkatan secara konsisten baik melalui metodologi lama maupun metodologi baru yaitu **sebesar 74,46** meningkat 0,89 basis poin dibandingkan tahun sebelumnya (73,57) serta berada di atas rerata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 69,74

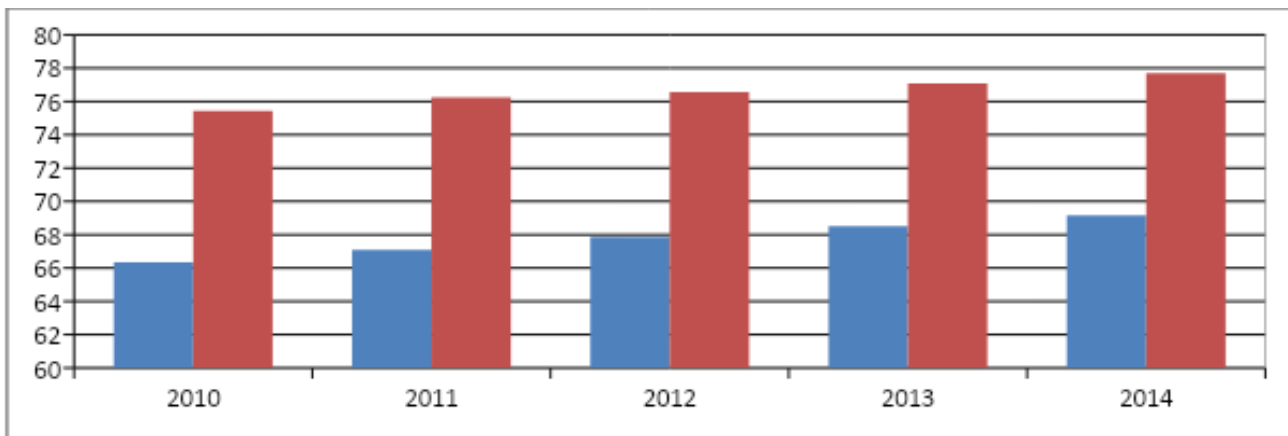
Sedangkan dari sisi pengarusutamaan Gender sebagaimana diukur melalui **Indeks Pembangunan Gender** dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks komposit yang dibangun dari beberapa variable untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhitungkan disparitas gender. Sebelum Tahun 2010, perhitungan IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Pada metode ini, interpretasi IPG tidak bisa dipisahkan dari IPM. IPG Tahun 2010 - 2014, yang dihitung pada Tahun 2014, dilakukan dengan metode yang baru. Perubahan Metode ini merupakan penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada IPM. Selain itu, metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki.



Gambar 2.17
Perbandingan Antar Waktu IPG Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Sumber : Badan PPKB Prov Jatim / BPS Prov Jatim, Buku “Pembangunan Manusia Berbasis Gender Jawa Timur Tahun 2015”, diolah.

Gambar 2.19 Perbandingan Antar Waktu IPG Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional menunjukkan kondisi capaian IPG Kabupaten Gresik meningkat dengan konsisten dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun masih berada dibawah capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Sebagaimana disebutkan diatas, IPG merupakan perbandingan antara IPM Laki-Laki dan IPM Perempuan. Capaian Kabupaten Gresik yang lebih rendah daripada Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, menunjukkan bahwa ketimpangan antara capaian IPM Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Gresik lebih tinggi daripada rata-rata ketimpangan di tingkat provinsi maupun nasional.



Gambar 2.18

IPM Laki-Laki dan IPM Perempuan di Kabupaten Gresik

Sumber : Badan PPKB Prov Jatim / BPS Prov Jatim, Buku “Pembangunan Manusia Berbasis Gender Jawa Timur Tahun 2015”, diolah.

Gambar ... diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu Tahun 2010-2015, kendati terus menunjukkan peningkatan, IPM Perempuan di Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun selalu lebih rendah daripada IPM Laki-laki. Selisih IPM Perempuan dan Laki-Laki berkisar antara 8-9 poin, dengan kecenderungan terus mengecil setiap tahunnya seperti yang terlihat pada perkembangan IPG Kabupaten Gresik.

Dalam perhitungan metode baru, komponen IPG, seperti juga IPM, meliputi Angka Harapan Hidup, Expected Years of Schooling / Angka Harapan Lama Sekolah, Mean Years of Schooling / Angka Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun ke atas dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan. Perkembangan IPG serta IPM Perempuan dan Laki-laki Kabupaten Gresik

mengindikasikan dibutuhkannya kerja keras untuk mencapai kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak, yang dalam hal ini diukur dengan pengeluaran per kapita. Untuk mempercepat peningkatan IPG, komponen-komponen tersebut harus ditingkatkan dengan memperhatikan unsur gender dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya, serta memastikan perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara.

Sedangkan dalam perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) disusun berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga professional, manager, administrasi dan teknisi, dan sumbangan pendapatan. IDG merupakan ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, digunakan untuk mengukur persamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi dan sosial.



Gambar 2.19

Perkembangan Antar Waktu Capaian IDG Kabupaten Gresik

Sumber : Badan PPKB Prov Jatim / BPS Prov Jatim, Buku “Pembangunan Manusia Berbasis Gender Jawa Timur Tahun 2015”, diolah.

IDG Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dalam kurun waktu Tahun 2010-2014. Seperti terlihat pada Gambar 2.21 Perkembangan Antar Waktu Capaian IDG Kabupaten Gresik,

capaian IDG Kabupaten Gresik pada Tahun 2010 sebesar 62.56, dan pada Tahun 2014 sebesar 62.26 atau turun 0.3 poin. Melihat perkembangan antar waktunya, angka ini pernah meningkat dalam tiga tahun, yaitu Tahun 2011, 2012 dan 2013, dengan kenaikan tajam pada Tahun 2013, namun turun tajam pada Tahun 2014. Kondisi itu terjadi baik pada tingkat kabupaten maupun provinsi. Pada tingkat provinsi, kondisi ini terutama dipengaruhi oleh turunnya keterwakilan perempuan di dalam parlemen, dari semula 19, menjadi 15 di Tahun 2014. Di Kabupaten Gresik, keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 10% pada Tahun 2014, atau turun dua poin dari periode sebelumnya yang mencapai 12%. Angka ini juga lebih rendah daripada provinsi Jawa Timur.

Indeks Pembangunan Gender dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks komposit yang dibangun dari beberapa variable untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhitungkan disparitas gender. Sebelum Tahun 2010, perhitungan IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Pada metode ini, interpretasi IPG tidak bisa dipisahkan dari IPM.

Perubahan Metode ini merupakan penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada IPM. Selain itu, metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Capaian **Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik** terus mengalami peningkatan secara konsisten baik melalui metodologi lama maupun metodologi baru yaitu **sebesar 89,31** meningkat 0,30 basis poin dibandingkan tahun sebelumnya. (89,01).

Bab III

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 13 tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan.

Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1 Pendapatan Daerah

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam rangka mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mampu memberikan kepuasan. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi dari Pemerintah Pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat selanjutnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah.

Mengingat pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pusat maka penerimaan daerah yang dapat dipacu dan dapat dikendalikan (*Controllable*) adalah Pendapatan Asli Daerah. Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

kepada daerah guna melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. tuntutan peningkatan PAD semakin besar mengingat pelayanan kepada masyarakat selayaknya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
2. Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat. diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.
3. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencalup jumlah dan potensi terhadap data obyek pajak dan retribusi.
4. Meminimalkan kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan. sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi. serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan.
5. Mencari obyek bagi sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan. Dalam pemungutan obyek baru tersebut diupayakan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru tersebut. Pemerintah Kabupaten Gresik akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap perekonomian masyarakat maupun nasional.

b. Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan *revenue sharing* harus transparan, demokratis dan adil. Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Gresik tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2011-2016

TAHUN	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	1.329.150.833.376,13	1.650.595.497.662,55	1.840.556.214.829,17	2.206.389.315.225,47	2.436.173.613.495,03	2.522.076.193.169,16
Pendapatan Asli Daerah	273.975.992.140,13	427.580.866.657,55	502.767.029.904,17	700.587.792.877,47	799.884.870.103,03	715.480.938.191,16
Pajak Daerah	135.091.751.487,11	252.405.752.927,50	287.204.002.798,08	386.741.657.665,39	450.326.075.139,76	412.112.744.756,71
Retribusi Daerah	37.969.820.988,92	63.099.218.949,16	68.748.761.969,35	111.030.586.229,39	117.641.024.546,20	77.108.109.540,65
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.330.282.422,80	8.965.887.804,33	19.586.929.857,01	21.557.353.346,85	25.234.376.050,50	15.393.353.604,09
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	98.584.137.241,30	103.110.006.976,56	127.227.335.279,73	181.258.195.635,84	206.683.394.366,57	210.866.730.289,71
Dana Perimbangan	772.487.164.476,00	947.619.650.810,00	996.197.113.935,00	1.065.300.023.150,00	1.103.936.339.654,00	1.336.689.003.743,00
Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	165.066.565.476,00	153.246.269.810,00	142.187.422.935,00	129.851.244.150,00	119.825.600.654,00	149.468.790.396,00
Dana Alokasi Umum	561.081.899.000,00	711.868.321.000,00	804.903.511.000,00	863.397.519.000,00	873.265.959.000,00	923.469.024.000,00
Dana Alokasi Khusus	46.338.700.000,00	82.505.060.000,00	49.106.180.000,00	72.051.260.000,00	110.844.780.000,00	263.751.189.347,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	282.687.676.760,00	275.394.980.195,00	341.592.070.990,00	440.501.499.198,00	532.352.403.738,00	469.906.251.235,00
H i b a h	-	-	-	0,00	780.671.260,00	21.439.914.873,00
Dana Darurat	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dr Propinsi	105.787.559.676,00	104.040.169.195,00	124.619.733.990,00	185.113.366.954,00	169.826.577.478,00	181.169.348.862,00

dan Pemerintah Daerah Lainnya						
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	144.728.582.084,00	132.383.521.000,00	199.836.702.000,00	234.108.077.000,00	343.523.352.000,00	241.940.391.000,00
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	32.171.535.000,00	38.971.290.000,00	17.135.635.000,00	21.276.577.000,00	18.221.653.000,00	25.354.766.500,00
Pendapatan Lain-Lain				3.478.244,00	150.000,00	1.830.000,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2017

Berdasarkan data sebagaimana disajikan dalam tabel pendapatan Daerah selama Periode 2011-2016 diketahui bahwa pendapatan daerah meningkat sebesar 183% dengan rata-rata pertumbuhan 16.50%. Pertumbuhan pendapatan daerah tidak menjadi suatu ukuran keberhasilan dalam mencapai kemandirian daerah karena di dalam pendapatan Daerah terdiri dari 3(tiga) komponen utama yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan komponen ini, diketahui bahwa Dana Perimbangan tidak menjadi komponen yang dapat diintervensi secara langsung oleh Pemerintah Daerah karena menjadi kebijakan dan kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, komponen utama yang menjadi ukuran keberhasilan dalam mencapai kemandirian daerah adalah pencapaian PAD. Pada komponen ini, Kabupaten Gresik telah berhasil meningkatkan kemandirian daerah sebesar 477% berdasarkan perbandingan PAD pada tahun 2015 dengan PAD pada tahun 2011. Capaian selama 5 (lima) tahun menunjukkan rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 37.93%.

3.1.2 Belanja Daerah

Sejak tahun 2007 seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Sistem tersebut berakibat pada perencanaan penganggaran terutama pada sisi belanja daerah yang harus terukur baik kinerja maupun jumlah kebutuhannya.

Perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Gresik tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gresik
Tahun Anggaran 2011-2016

TAHUN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BELANJA DAERAH	1.266.261.710.603,8 1	1.451.130.800.756,4 8	1.897.270.106.456,3 2	2.172.823.818.644,31	2.529.213.281.777,17	2.552.245.208.369,15
Belanja Tidak Langsung	838.208.701.520,03	931.485.282.708,38	992.715.498.549,11	1.124.397.814.197,25	1.345.295.160.949,00	1.466.012.473.504,8 7
Belanja Pegawai	586.914.334.219,00	692.857.652.655,95	706.915.344.010,00	800.412.594.479,00	833.852.461.490,00	846.627.176.219,00
Belanja Bunga	876.990.183,03	600.892.650,43	329.156.539,11	67.000.868,25	0,00	0,00
Belanja Subsidi	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	56.779.203.000,00	112.124.659.700,00	107.818.513.200,00	103.401.483.000,00	143.469.355.300,00	162.942.989.793,87
Belanja Bantuan Sosial	101.130.470.048,00	17.618.925.345,00	16.870.050.000,00	27.024.005.000,00	21.310.480.000,00	24.661.099.009,00
Belanja Bagi Hasil Kpd Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	242.590.500,00	-	-	638.334.900,00	40.088.838.578,00	35.365.145.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Propinsi/Kab/Kota/Pem. Desa/ Partai Politik	90.082.754.550,00	107.062.942.300,00	160.020.833.800,00	192.277.210.950,00	306.232.981.581,00	396.152.916.527,00
Belanja Tidak Terduga	2.182.359.020,00	1.220.210.057,00	761.601.000,00	577.185.000,00	341.044.000,00	263.146.956,00
Belanja Langsung	428.053.009.083,00	527.038.521.748,00	904.554.607.907,21	1.048.426.004.447,06	1.183.918.120.828,17	1.086.232.734.864,2 8

Sumber : DPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2017

Berdasarkan data sebagaimana disajikan dalam tabel belanja Daerah selama Periode 2011-2015, kisaran komposisi belanja langsung mencapai 43-46% dan belanja tidak langsung mencapai 54-57% dengan realisasi belanja Daerah selama tahun 2011-2015 telah mencapai 90-95% setiap tahun dengan. Meskipun penyerapan Anggaran Belanja Daerah kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 cukup baik dengan indikator penyerapan rata-rata per tahun diatas 90% namun dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan antara lain terhambatnya pelaksanaan kegiatan terutama dalam pelaksanaan dana alokasi khusus yang disebabkan keterlambatan petunjuk pelaksanaan. Pelaksanaan Program dan Kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Hal ini menyebabkan penyerapan anggaran dilakukan pada triwulan IV atau menjelang berakhirnya Tahun Anggaran.

Solusi atas permasalahan tersebut adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang internal dengan Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait agar pelaksanaan kegiatan dana Alokasi Khusus tepat waktu. selanjutnya menguatkan peran monitoring dan evaluasi dalam penyerapan anggaran setiap trimester.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu adalah kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Gresik di tahun 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapat daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
2. Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat. diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.
3. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencalup jumlah dan potensi terhadap data obyek pajak dan retribusi.
4. Meminimalkan kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan. sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi. serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan.
5. Mencari obyek bagi sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan. Dalam pemungutan obyek baru tersebut diupayakan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru tersebut. Pemerintah Kabupaten Gresik akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap perekonomian masyarakat maupun nasional.

Sedangkan kebijakan peningkatan pendapatan dari dana perimbangan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai

akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015 diarahkan untuk :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar Satuan Kerja Perangkat Daerah agar dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya;
2. Pemantapan tata kelola birokrasi.
3. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan publik (public interest);
4. Mengakomodir aspirasi dan kepentingan publik dalam skala mikro (bottom up);
5. Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja;
6. Menjamin terlaksananya program dan kegiatan skala besar serta prioritas (dedicated program).

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan

Secara umum, kebijakan pembiayaan diarahkan untuk memanfaatkan *surplus* APBD dan mengatasi apabila terjadi *defisit* anggaran.

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah.

Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Gresik bersumber dari objek-objek pendapatan yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah yang menuntut ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang.

Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bagi hasil dari Pemerintah Daerah lainnya dan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan akurasi data dasar dalam rangka perolehan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi;
3. Meningkatkan kinerja BUMD secara efektif dan efisien

3.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Karena sifatnya mengurangi aset, maka Belanja Daerah antara lain harus mampu meningkatkan nilai tambah (*added value*) dari setiap pembelanjaan yang dilakukan, sehingga

dapat menjadi lebih berdaya guna dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Gresik diarahkan untuk:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar Satuan Kerja Perangkat Daerah agar dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya;
2. Pemantapan tata kelola birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan belanja;
3. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang prioritas yang langsung menyentuh kepentingan publik (*public interest*);
4. Mengakomodir aspirasi dan kepentingan publik dalam skala mikro (*bottom up*);
5. Meningkatkan tambahan penghasilan dan mengefektifkan belanja pegawai;
6. Mengalokasikan hibah dan bantuan sosial kepada organisasi, kelompok masyarakat, keluarga dan individu yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Peningkatan Alokasi Dana Desa, pembangunan infrastruktur desa dan tunjangan aparat desa.

3.3.3 Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal terjadi *surplus* anggaran, maka kebijakan pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal/investasi dan pemberian pinjaman. Penyertaan modal kepada BUMD dilaksanakan setelah mempertimbangkan hasil kajian serta ditindaklanjuti dengan upaya revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Sedangkan, jika terjadi *defisit* anggaran, maka kebijakan pembiayaan diarahkan untuk melakukan rasionalisasi belanja dan melakukan pinjaman daerah. Rasionalisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan program prioritas, tingkat urgensi dan keberlanjutannya.

Berikut ini proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah untuk lima tahun ke depan.

Tabel 3.3

Proyeksi awal APBD Tahun 2016 – 2021

URAIAN		TAHUN						Rata-Rata Pertumbuhan %
		2016 Rp	2017 Rp	2018 Rp	2019 Rp	2020 Rp	2021 Rp	
PENDAPATAN DAERAH		2,785,788,500,000	3,299,367,276,000	3,827,499,669,000	4,453,483,132,000	5,197,598,359,000	6,091,026,929,000	14%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	862,387,744,000.00	1,003,928,646,000.00	1,184,544,210,000.00	1,401,229,666,000.00	1,661,807,637,000.00	1,982,278,945,000.00	15%
1.1	Pajak Daerah	463,868,769,000.00	544,879,145,000.00	641,483,048,000.00	755,910,496,000.00	891,520,725,000.00	1,064,839,236,000.00	15%
1.2	Retribusi Daerah	133,439,127,000.00	164,093,159,000.00	202,075,117,000.00	248,701,343,000.00	306,974,938,000.00	379,245,334,000.00	19%
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15,767,192,000.00	11,547,532,000.00	12,385,159,000.00	13,284,350,000.00	14,249,707,000.00	15,286,185,000.00	2%
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	249,312,656,000.00	283,408,810,000.00	328,600,886,000.00	383,333,477,000.00	449,062,267,000.00	522,908,190,000.00	14%
2	DANA PERIMBANGAN	1,480,677,958,000	1,703,651,091,000	1,966,780,271,000	2,278,372,267,000	2,648,602,610,000	3,089,955,053,000	14%
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	173,520,059,000.00	208,224,071,000.00	249,868,886,000.00	299,842,663,000.00	359,811,195,000.00	431,773,434,000.00	17%
2.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	923,469,024,000.00	1,015,815,926,000.00	1,117,397,519,000.00	1,229,137,271,000.00	1,352,050,998,000.00	1,487,256,098,000.00	9%
2.4	Dana Alokasi Khusus	383,688,875,000.00	479,611,093,000.00	599,513,866,000.00	749,392,333,000.00	936,740,416,000.00	1,170,925,520,000.00	20%

3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	442,722,798,000.00	591,787,539,000.00	676,175,187,000.00	773,881,199,000.00	887,188,112,000.00	1,018,792,931,000.00	15%
3.1	Pendapatan Hibah	919,422,000.00	1,071,126,000.00	1,247,862,000.00	1,453,759,000.00	1,693,630,000.00	1,973,079,000.00	14%
3.2	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	178,807,173,000.00	214,568,608,000.00	257,482,330,000.00	308,978,796,000.00	370,774,555,000.00	444,929,466,000.00	17%
3.3	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	241,535,798,000.00	351,146,433,000.00	388,318,398,000.00	429,516,158,000.00	475,188,581,000.00	525,836,369,000.00	14%
3.4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya	21,460,228,000.00	25,001,166,000.00	29,126,358,000.00	33,932,207,000.00	39,531,021,000.00	46,053,640,000.00	14%
3.5	Pendapatan Lainnya	177,000.00	206,000.00	240,000.00	279,000.00	325,000.00	379,000.00	14%
BELANJA DAERAH		3,043,257,620,000.00	3,499,784,244,000.00	4,056,522,310,000.00	4,757,393,424,000.00	5,571,913,921,000.00	6,614,146,504,000.00	14%
1	BELANJA LANGSUNG	1,374,333,385,000.00	1,580,370,814,000.00	1,831,417,285,000.00	2,147,150,899,000.00	2,514,270,761,000.00	2,983,919,629,000.00	14%
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,668,924,235,000.00	1,919,413,430,000.00	2,225,105,025,000.00	2,610,242,525,000.00	3,057,643,160,000.00	3,630,226,875,000.00	14%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2016

Tabel 3.4
Perubahan Kerangka Pendanaan Perubahan RPJMD 2018-2021

No.	Uraian	Estimasi Realisasi 2017	Proyeksi Pendapatan				% Per Tahun
			2018	2019	2020	2021	
			RPJMD Review	RPJMD Review	RPJMD Review	RPJMD Review	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.845.485.386.000,00	3.028.380.629.522,00	3.321.520.324.963,20	3.662.905.955.438,78	4.044.990.150.731,44	8,68%
		-					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	909.919.149.000,00	932.962.469.142,00	1.040.873.751.963,20	1.174.934.430.438,78	1.316.551.358.731,44	16,80%
4.1.1	HASIL PAJAK DAERAH	485.993.098.000,00	484.050.000.000,00	535.861.031.000,00	591.143.552.000,00	653.332.541.000,00	17,13%
4.1.1.01	Pajak Hotel	2.000.000.000,00	2.450.000.000,00	3.300.000.000,00	3.800.000.000,00	4.300.000.000,00	21,56%
4.1.1.02	Pajak Restoran	14.915.598.000,00	17.000.000.000,00	19.459.854.000,00	22.275.642.000,00	25.498.867.000,00	14,47%
4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1.319.998.000,00	1.583.995.000,00	1.900.791.000,00	20,00%
4.1.1.04	Pajak Reklame	3.190.000.000,00	4.500.000.000,00	6.200.000.000,00	7.100.000.000,00	8.100.000.000,00	17,86%
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	184.000.000.000,00	184.000.000.000,00	211.600.000.000,00	243.340.000.000,00	279.841.000.000,00	15,00%
4.1.1.07	Pajak Parkir	2.500.000.000,00	5.500.000.000,00	7.400.000.000,00	8.500.000.000,00	9.800.000.000,00	42,42%
4.1.1.10	Pajak Air Tanah	1.200.000.000,00	1.400.000.000,00	2.000.000.000,00	2.400.000.000,00	2.900.000.000,00	24,32%
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.500.000.000,00	8.100.000.000,00	8.900.000.000,00	9.600.000.000,00	10.300.000.000,00	1,31%
4.1.1.12	PBB Pedesaan dan Perkotaan	82.687.500.000,00	95.000.000.000,00	104.500.000.000,00	114.950.000.000,00	126.445.000.000,00	10,58%
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	190.000.000.000,00	165.000.000.000,00	171.181.179.000,00	177.593.915.000,00	184.246.883.000,00	3,75%

		-		-	-	-	
4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	130.871.225.000,00	139.105.160.000,00	163.715.180.000,00	208.355.482.000,00	235.458.337.000,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	13.226.030.000,00	20.100.000.000,00				7,25%
	Retribusi Pelayanan Kesehatan			10.497.759.553,66	13.695.293.645,35	15.526.511.709,60	
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan			839.818.315,06	1.095.620.296,37	1.242.117.314,27	
	Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan umum			5.248.869.252,76	6.847.633.093,06	7.763.240.289,38	
	Retribusi Pelayanan Pasar			1.049.773.085,17	1.369.525.620,09	1.552.646.925,84	
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor(KIR)			2.204.524.320,77	2.876.004.900,57	3.260.559.789,51	
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi			1.259.727.472,58	1.643.430.444,56	1.863.175.971,40	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	7.636.167.000,00	7.500.000.000,00		10.000.000.000,00		-0,48%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			2.883.035.040,69	3.313.833.380,11	3.678.355.051,92	
	Retribusi Tempat Pelelangan			15.787.559,36	18.146.619,95	20.142.748,15	
	Retribusi Terminal			157.036.433,73	180.501.647,96	200.356.829,24	
	Retribusi Tempat Khusus Parkir			1.538.121.802,63	1.767.956.094,97	1.962.431.265,42	
	Retribusi Rumah Potong Hewan			144.735.752,90	166.362.934,37	184.662.857,15	
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga			3.634.121.748,67	4.177.151.435,25	4.636.638.093,13	
	Retribusi Penyebrangan Di Air			327.161.662,02	376.047.887,38	417.413.154,99	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	110.009.028.000,00	111.505.160.000,00	133.914.708.000,00	160.827.974.000,00	193.150.085.000,00	20,10%
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10.641.392.000,00	14.441.393.142,00	15.072.367.963,20	14.422.670.438,78	16.015.449.731,44	0,00%

4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	1.014.253.000,00	3.914.040.142,00	4.107.278.963,20	2.999.952.438,78	4.115.946.731,44	
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	-	2.778.076.782,00	2.835.000.000,00	1.575.000.000,00	2.520.000.000,00	
4.1.3.01.02	PD. BPR (Bank Gresik)	1.014.253.000,00	1.135.963.360,0	1.272.278.963,20	1.424.952.438,78	1.595.946.731,44	12,00%
4.1.3.01.03	PT Gresik Migas	-		-	-	-	
4.1.3.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	9.627.139.000,00	10.527.353.000,00	10.965.089.000,00	11.422.718.000,00	11.899.503.000,00	
4.1.3.02.01	PT Bank Jatim	9.610.102.000,00	10.510.387.000,00	10.948.089.000,00	11.404.019.000,00	11.878.936.000,00	4,16%
4.1.3.02.02	PT BPR	17.037.000,00	16.966.000,00	17.000.000,00	18.699.000,00	20.567.000,00	9,99%
		-		-	-	-	
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	282.413.434.000,00	295.365.916.000,00	326.225.173.000,00	361.012.726.000,00	411.745.031.000,00	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	316.391.000,00		-	-	-	
4.1.4.02	Jasa Giro	4.800.000.000,00	5.000.000.000,00	5.696.842.000,00	6.490.802.000,00	7.395.415.000,00	13,94%
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	6.000.000.000,00	12.000.000.000,00	13.000.000.000,00	14.000.000.000,00	15.000.000.000,00	4,27%
4.1.4.06	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.019.390.000,00		-	-	-	
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak1)	2.019.390.000,00		-	-	-	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	557.536.000,00		-	-	-	
4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	-		-	-	-	
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	-		-	-	-	
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	12.415.000,00		-	-	-	

4.1.4.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2.341.200.000,00		-	-	-	
4.1.4.15	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	145.000.000.000,00	153.000.000.000,00	165.000.000.000,00	177.000.000.000,00	200.000.000.000,00	7,40%
4.1.4.16	Pendapatan Bidang Perhubungan	-		-	-	-	
4.1.4.17	Pendapatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	46.262.527.000,00	48.873.416.000,00	62.211.206.000,00	79.188.943.000,00	100.799.986.000,00	27,29%
4.1.4.18	Tindak Lanjut Penghapusan Aset	234.585.000,00		-	-	-	
	BOS	72.850.000.000,00	76492500000	80.317.125.000,00	84.332.981.000,00	88.549.630.000,00	
		-		-	-	-	
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.390.841.608.000,00	1.495.845.403.580,00	1.616.410.650.000,00	1.753.729.408.000,00	1.917.143.950.000,00	5,47%
		-		-	-	-	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	544.724.629.000,00	599.572.756.800,00	664.235.923.000,00	734.242.117.000,00	811.294.842.000,00	22,47%
	Belanja Daerah	2.916.599.254.842	3.103.976.407.816	3.404.558.333.087	3.754.478.604.325	4.146.114.904.499	
	Belanja Langsung	1.315.856.159.651	1.415.898.691.459	1.649.087.361.024	1.791.628.957.853	1.977.534.920.341	
	Prioritas I	809.957.405.425	875.484.386.150	1.015.392.801.514	1.102.603.664.631	1.221.916.768.555	
	Prioritas II	505.898.754.226	540.414.305.309	633.694.559.510	689.025.293.222	755.618.151.786	
	Non Urusan	254,277,675,445	279,417,480,401	317,656,015,510	342,059,116,220	364,109,376,389	
	Belanja Tidak Langsung Prioritas III	1.600.743.095.191	1.688.077.716.357	1.755.470.972.063	1.962.849.646.472	2.168.579.984.158	

	Defisit	(71.113.868.842)	(75.595.778.294)	(83.038.008.124)	(91.572.648.886)	(101.124.753.768)	
		-2,50%	-2,50%	-2,50%	-2,50%	-2,50%	

Mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan pendapatan pada tiap objek dalam komponen pendapatan, kondisi perekonomian global maupun lokal serta pelbagai kebijakan pemerintah pusat hingga daerah yang berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan daerah seperti kebijakan pemerintah pusat terkait dana perimbangan, pelbagai indikator teknis maupun fundamental perekonomian nasional yang berpengaruh dengan munculnya sentimen negatif maupun positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kondusifitas dan pelbagai faktor lainnya dalam diproyeksikan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Gresik mencapai Rp4.146.114.904.499.dengan rata-rata pertumbuhan (year on year)diestimasi mencapai 15-17%. Estimasi pendapatan daerah secara komposit dibagi menjadi 3(tiga) bagian dengan komposisi kontribusi (a) Pendapatan Asli Daerah mencapai 30-33% (b) Dana Perimbangan mencapai 42-45%, dan (c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 20-23%.

Estimasi belanja daerah diproyeksikan sesuai dengan kebutuhan pendanaan program-program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebijakan umum yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah selama 5(lima) tahun kedepan.

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas

belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Dengan demikian, kapasitas riil keuangan daerah dapat dialokasikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5

Alokasi Kapasitas Riil Keuangan 2016 – 2021

JENIS DANA		ALOKASI											
		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	PRIORITAS I	28	851,749,146,000	27	969,368,358,000	27	1,095,922,402,000	26	1,269,120,314,000	26	1,449,223,739,000	25	1,699,853,362,000
2	PRIORITAS II	17	522,584,239,000	17	611,002,456,000	18	735,494,883,000	18	878,030,585,000	19	1,065,047,022,000	19	1,284,066,267,000
3	PRIORITAS III	55	1,668,924,235,000	55	1,919,413,430,000	55	2,225,105,025,000	55	2,610,242,525,000	55	3,057,643,160,000	55	3,630,226,875,000
TOTAL		100	3,043,257,620,000	100	3,499,784,244,000	100	4,056,522,310,000	100	4,757,393,424,000	100	5,571,913,921,000	100	6,614,146,504,000

Bab IV

Permasalahan dan Analisis Isu-Isu Strategis

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan gambaran umum daerah maka persalahan pembangunan Kabupaten Gresik selama periode 2011-2016 dijabarkan sebagaimana berikut:

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan Pembangunan
1.	Pendidikan	- Masih lemahnya evaluasi dan klarifikasi terhadap APBS. - Integrasi Output Pendidikan dan Networking Dunia Kerja - Integrasi dan Validasi Data Pokok Pendidikan - Pencapaian SPM yang belum optimal terutama untuk satuan pendidikan madrasah - Kesejahteraan tenaga pendidik masih belum terdistribusikan dengan merata - Banyak penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang didirikan oleh masyarakat belum berbadan hukum
2.	Kesehatan	- Prevalensi HIV / AIDS Tinggi - Prevalensi TB tinggi - Proporsi rumah tangga yang mempunyai akses berkelanjutan terhadap air minum layak belum mencapai 100%; - Proporsi rumah tangga yang mempunyai akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak belum mencapai 100%; - Masih Ditemukan Garam Konsumsi Dengan Kandungan Iodium Dibawah 30 Ppm - Jumlah Dokter Umum dan Dokter Spesialis Masih Kurang

3.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	- Ketersediaan distribusi air bersih perpipaan PDAM dan non perpipaan belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat - jumlah keluarga memiliki SPAL 60,99%, sehingga masih ada 39,01% yang belum memiliki SPA - Kesulitan memproses izin mendirikan bangunan karena terdapat disharmoni antara dokumen pertanahan dengan rencana bangunan - Penataan ruang secara mendetail melalui RDTR belum terlaksana untuk seluruh kecamatan
4.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	- Gresik mengalami backlog perumahan sebesar 1,700,708 unit rumah dengan asumsi ketersediaan rumah dengan type landed housing - Masih terdapat kawasan kumuh - penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman seringkali tidak sesuai antara yang akan diserahkan dengan ketentuan
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	- Belum optimalnya forum kewaspadaan dini masyarakat/FKDM di Kabupaten/ Kec/ Kel/ Desa; - Masyarakat masih rentan terhadap isu-isu yang berpotensi konflik ; - Gresik merupakan daerah rawan bencana banjir dan kekeringan
6.	Sosial	- Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) belum optimal - Pelaksanaan pemutakhiran data penanganan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Basis Data Terpadu) belum optimal - Belum Tersedia Pusat Rehabilitasi Sosial Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah - Belum Tersedia Panti Asuhan untuk Anak-Anak dan Lansia Terlantar Yang

		Diselenggarakan dan/atau Difasilitasi Penuh oleh Pemerintah
7.	Tenaga Kerja	- Data urusan ketenagakerjaan belum faktual dan up to date - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan - Job fair belum efektif menyerap tenaga kerja terutama warga Gresik - Belum ada data terkait beberapa perlindungan TKI - Masih adanya perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan PP dan PKB karena masih dalam proses perundingan
8.	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	- Masih Lemahnya Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan anak termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat - Lemahnya Kelembagaan serta Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat Tentang Kesetaraan Gender serta Kekerasan pada Perempuan dan Anak
9.	Pangan;	- minimnya sarana prasarana penunjang ketahanan pangan - perubahan iklim global yang berpengaruh pada ketersediaan dan keterbatasan infrastruktur pendukung akses dan distribusi pangan - alih fungsi lahan - kurang optimalnya diversifikasi pangan - keterbatasan daya beli masyarakat terhadap pangan, - belum adanya sistem pengendalian dan pengawasan pangan.
10.	Pertanahan	- Porses pembebasan lahan masih terhambat terutama kerjasama warga terdampak - Penggunaan kembali tanah-tanah terlantar - Rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat

11.	Lingkungan Hidup	- Perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten belum optimal - Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup wilayah belum optimal - Jumlah produksi sampah (m3/ hari) mencapai 3.270 m3/ hari sedangkan penanganan sampah mencapai 2.435 m3/ hari atau 74,46%
12.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	- Keterbatasan blangko dalam penerbitan dokumen kependudukan - Diskrepansi data register dan data proxy
13.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	- Perencanaan tata ruang Desa dan pengembangan kawasan perdesaan belum optimal. - Penataan asset-asset desa masih belum teridentifikasi dalam GIS - Regulasi Penataan Desa belum terbentuk - Belum adanya kerjasama antar Desa yang telah memiliki legal standing - Belum adanya pengaturan terhadap Asset, Resources dan Profit Shares. - Sistem Informasi Desa belum aplikatif dan integratif - Basis data, Kapasitas kelembagaan, dan Sumber Daya Pemerintah Desa - Belum terbentuknya Tim Terpadu Pembangunan Basis Data Desa - Peningkatan alokasi anggaran Desa
14.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	- Laju Pertumbuhan Penduduk lebih tinggi dari nasional - Beban PLKB belum sesuai SPM
15.	Perhubungan	- Penataan parkir on street dan of street belum optimal

		- Pengelolaan perkeretapian belum mejadi alternatif dalam sistem logistic barang dan orang - Konektivitas daerah belum optimal terkoneksi dengan sistem logistik nasional
16.	Komunikasi Dan Informatika	- Sistem informasi penunjang kinerja OPD belum terintegrasi - belum optimalnya aksesibilitas koneksi jaringan internet di wilayah pedesaan - Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM aparatur terhadap TIK
17.	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;	- Pasar bebas di lingkup ASEAN dapat menjadi ancaman bagi pelaku Koperasi dan UKM yang tidak mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif. - Pendataan perkembangan UKM masih belum optimal sehingga menyulitkan untuk membuat waiting list UKM yang akan diikutsertakan dalam kegiatan promosi - Pihak yang ingin melakukan Izin usaha simpan pinjam kurang memahami persyaratan prosedur pengurusan Badan Hukum - Masih belum optimalnya penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang sudah terdaftar. - Masih belum optimalnya memfasilitasi bagi anggota koperasi agar lebih memahami tentang seluk beluk koperasi
18.	Penanaman Modal	- Kesulitan memproses izin mendirikan bangunan karena terdapat disharmoni antara dokumen pertanahan dengan rencana bangunan - Kurangnya event – event promosi khususnya dibidang investasi - operasional PTSP belum memberikan kemudahan pelayanan perzininan secara optimal - fasilitasi dan pengendalian tentang penanaman modal (Regulasi pemberian

		fasilitas/intensif, peta potensi, pengendalian pelaksanaan) - Masih tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan.
19.	Kepemudaan Dan Olah Raga	- Peranan kepemudaan belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan pembangunan - Advokasi terhadap organisasi kepemudaan di Gresik belum terlaksana secara komprehensif pada tataran peningkatan kapasitas, pengembangan kewirausahaan, pengarusutamaan gender hingga perkembangan mental dan perilaku - belum terdapatnya basis data keolahragaan yang komprehensif - Prestasi keolahragaan Kabupaten Gresik pada jenjang usia pelajar hingga tingkat professional masih belum memunculkan prestasi ikonik
20.	Statistik	- Diskrepansi data register dan data proxy
21.	Persandian	- Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi belum optimal - Belum ditetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar OPD
22.	Kebudayaan	- kurang optimalnya inisiasi kebudayaan Gresik dalam produksi produk-produk lokal baik di lingkup mikro, menengah, maupun industri besar; - inovasi cipta karya seni yang kurang mengangkat budaya khas Gresik, - belum adanya city branding berbasis kebudayaan Gresik - belum optimal pengelolaan, promosi, dan pengembangan. Cagar budaya religi, sejarah, dan permuseuman
23.	Perpustakaan	- Kemudahan, kesederhanaan, dan kecepatan akses informasi secara online telah menggeser perilaku kebutuhan informasi secara konservatif melalui perpustakaan.

		- Pengelolaan perpustakaan tidak meningkatkan daya tarik masyarakat untuk membaca - lemahnya basis data terkait naskah kuno milik Daerah dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah
24.	Kearsipan	- pengelolaan arsip baik bersifat statis maupun dinamis adalah kecenderungan kesalahan klasifikasi, - kompetensi arsiparis yang tidak menyesuaikan dengan tatakerja kearsipan terkini, fasilitas penunjang kearsipan yang belum memadai, - kurangnya advokasi terhadap pegawai mengenai peranan penting arsip. - Ketidaktelesediaan Record Center atau depo pengelolaan arsip terpadu dengan klasifikasi tertentu - Publikasi dan/atau penggunaan arsip-arsip dengan klasifikasi tertutup masih belum diatur secara normatif
25.	Kelautan Dan Perikanan	- Daya Dukung lahan masih kurang optimal - Terdapat alih fungsi tambak akibat tidak adanya perlindungan lahan tambak produktif - Kurangnya bibit ikan/udang yang berkualitas. - Sarana dan Prasarana penangkapan ikan kurang memadai sehingga kurang optimalnya hasil tangkapan
26.	Pariwisata	- Perkembangan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud belum diiringi manajemen pengelolaan yang representatif untuk menghadirkan pelayanan kepariwisataan yang elegan dan berdaya tarik tinggi. - pengembangan ekonomi kreatif berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah masih belum terintegrasi dengan destinasi pariwisata.

		- frekuensi promosi yang masih rendah
27.	Pertanian	- Semakin tingginya konversi lahan pertanian ke lahan no pertanian - Ketersediaan bibit tanaman perkebunan baik jumlah kualitas maupun ketepatan waktu penyediaannya sangat kurang ; - Tingkat penguasaan teknologi petani masih terbatas ditengah persaingan pasar yang semakin ketat. - Produk pangan segar pertanian belum bersertifikat baik prima tani maupun SNI
28.	Kehutanan	- Adanya Perubahan Aturan perundang undangan yang berlaku terkait kewenangan, prosedur, tatakelola maupun penatausahaan hasil hutan. - Masih terbatasnya upaya konversi hutan dan lahan
29.	Energi Dan Sumber Daya Mineral	- Belum adanya kajian dan fasilitasi Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.
30.	Perdagangan	- Lemahnya pengawasan terhadap pendirian took modern yang berbenturan dengan took tradisional - Masih kurangnya fasilitasi dan koordinasi tentang promosi, kerjasama dan pengawasan jaringan distribusi perdagangan - Pengembangan pasar sebagai sarana distribusi perdagangan serta Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat - Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
31.	Perindustrian	- Masih kurangnya fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana bagi industri kecil dan menengah - Masih kurangnya fasilitasi kemitraan antara Industri Besar terhadap Industri Kecil
32.	Transmigrasi	- Kabupaten Gresik bukan tujuan transmigrasi

Berdasarkan urian permasalahan pembangunan yang dibarkan tiap urusan maka persalahan pokok pembangunan Kabupaten Gresik dijabarkan sebagaimana berikut:

Permasalahan	Permasalahan Pokok Pembangunan
a. Lemahnya kompetensi perencana di tingkat satuan pendidikan; b. Kurangnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan c. Lemahnya evaluasi dan klarifikasi terhadap APBS. d. Data pokok pendidikan belum sepenuhnya mengakomodasi pelbagai input data yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan dibidang pendidikan e. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang didirikan oleh masyarakat belum berbadan hukum Indonesia; f. Kondisi minat baca Kabupaten yang belum teridentifikasi. g. Kasus Kematian Ibu Meningkat h. Prevalensi HIV/AIDS Tinggi i. Cakupan Desa UCI Belum Mencapai Target j. Proporsi rumah tangga yang mempunyai akses berkelanjutan terhadap air minum layak belum mencapai 100%; k. Jumlah Dokter Umum dan Dokter Spesialis Masih Kurang	1. Atribusi Layanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan;
a. Angka Kemiskinan Gresik yang cenderung tinggi b. Belum Tersedia Pusat Rehabilitasi Sosial Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah c. Belum Tersedia Panti Asuhan untuk Anak-Anak dan Lansia Terlantar Yang Diselenggarakan dan/atau Difasilitasi Penuh oleh Pemerintah d. Tenaga kerja yang dikelola oleh swasta atau individu tidak sepenuhnya dilaporkan ke dinas tenaga kerja	2. Kesejahteraan Sosial; a. Penanggulangan Kemiskinan; b. Ketenagakerjaan; c. Kondusifitas Daerah; d. Penegakan Hak Asasi Manusia.

a. Proporsi rumah tangga yang mempunyai akses berkelanjutan terhadap air minum layak belum mencapai 100%; b. Penanganan permukiman kumuh yang kurang optimal c. Identifikasi untuk melakukan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih dilakukan sektoral dan belum komprehensif	3. Pembangunan Berkelanjutan berwawasan lingkungan; a. Ketersedian Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, dan Pelayanan Sanitasi Dasar b. Konektivitas Daerah c. Permukiman Inklusif d. Pengendalian Banjir e. Lingkungan Hidup f. Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik
a. Pendataan perkembangan UKM masih belum optimal; b. Kurangnya fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan Koperasi serta UMKM di Kabupaten Gresik c. Masih kurangnya pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	4. Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Pangan;
a. Database pelayanan publik yang belum terintegrasi b. Aksesibilitas Sistem informasi Pelayanan publik yang belum optimal c. Penetrasi penggunaan teknologi masih rendah. d. Pelayanan publik belum menekankan pendekatan <i>human centered design</i>. e. Mekanisme pelaporan dan evaluasi masih konvensional atau belum efektif diimplementasikan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Data Pembangunan;
a. Penetrasi penggunaan teknologi masih rendah. b. Sistem Inovasi daerah belum terbangun sebagai suatu sistem yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran.	6. Akselerasi pembangunan melalui Sistem Inovasi Daerah dan Gresik Smart City;
a. Masih Lemahnya Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender	7. Pengarusutamaan Gender;

dan anak termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat. b. Lemahnya Kelembagaan serta Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat Tentang Kesetaraan Gender serta Kekerasan pada Perempuan dan Anak	
a. Perencanaan tata ruang Desa dan pengembangan kawasan perdesaan belum optimal. b. Penataan asset-asset desa masih belum teridentifikasi dalam GIS c. Regulasi Penataan Desa belum terbentuk a. Belum adanya kerjasama antar Desa yang telah memiliki legal standing b. Belum adanya pengaturan terhadap Asset, Resources dan Profit Shares; c. Administrasi Pemerintahan Desa Belum Optimal.	8.Kemandirian Desa.

4.2 ISU STRATEGIS

4.2.1 Isu - Isu Strategis Global dan Regional

Isu strategis berskala global dan regional yang dibahas meliputi (a) Pembangunan Berkelanjutan (b) Ketidakpastian Ekonomi Global (c) Kerawanan Pangan Global dan Lingkungan Hidup (d) Masyarakat Ekonomi ASEAN (e) Energi Terbarukan (f) Ketersediaan Sumber Daya Air dan (g) Perubahan Iklim.

4.2.1.1 Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan telah dicanangkan melalui Millenium Development Goals (MDGs) sebagai tujuan-tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional pada Tahun 2000 oleh 169 kepala negara, termasuk Presiden Indonesia. Target MDGs merupakan target 15 tahun, dan direncanakan tercapai pada Tahun 2015. Sebagai kelanjutan dari agenda pembangunan millennium ini, dirumuskan agenda pembangunan baru yang disebut Global Goals for Sustainable Development (SDGs). SDGs telah disepakati oleh lebih dari 150 pemimpin negara pada Sidang Umum PBB di New York, 25 September 2015.Dalam kesempatan itu, Presiden Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden, juga telah menandatangani kesepakatan internasional tersebut.

SDGs yang sudah disepakati terdiri dari 17 goals dan 169 target. Adapun calon indikator sejumlah ±300 indikator masih dalam proses pembahasan dan akan ditetapkan pada Bulan Maret 2016. Tujuh belas goals, 169 targets dan ±300 calon indikator ini tidak seluruhnya merupakan indikator baru yang belum pernah dihitung. Sebagian besar diantaranya merupakan indikator yang sudah ada di BPS, diantaranya adalah indikator MDGs yang masih relevan dan diadopsi kembali menjadi indikator SDGs. Sebagai salah satu negara perumus SDGs, RPJMN Republik Indonesia 2015-2019 telah mempunyai kerangka yang sejalan dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan / SDGs. Sehubungan dengan itu, bagi Kabupaten / Kota, terutama yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 2015, diharapkan menyusun dokumen perencanaannya dengan mengacu pada target dan indikator SDGs.

Untuk menjamin kelangsungan upaya pencapaian, perencanaan dan pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) harus terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Sebagaimana diketahui, dokumen perencanaan terdiri dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) / 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) / 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) / 1 Tahun.

Semua goal, target dan indikator pembangunan berkelanjutan sebanyak mungkin harus tercantum dalam dokumen perencanaan tersebut. Dengan demikian, akan terjamin dukungan sumberdayanya.

Global Goals for Sustainable Development (SDGs)

Sebagaimana diketahui, MDGs telah berakhir pada Tahun 2015 ini. MDGs, yang terdiri dari 8 Goals dan 18 Target, mencakup penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar, kesehatan ibu dan anak, menanggulangi penyakit menular, kesetaraan gender, kelestarian lingkungan hidup serta kerjasama global. Sebagai kelanjutan dari MDGs, SDGs berangkat dari kesadaran bahwa menanggulangi kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, termasuk kemiskinan yang ekstrim, adalah tantangan terbesar dalam pembangunan. Tak terelakkan lagi, dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tantangan ini harus diselesaikan. Dengan 17 tujuan dan 169 target, SDGs disusun untuk melanjutkan, serta menyelesaikan apa yang belum terselesaikan dalam Millenium Development Goals (MDGs).

SDGs merupakan langkah penting, yang diambil dalam mendesakannya kebutuhan untuk mengakhiri tirani kemiskinan serta untuk melindungi dan memulihkan keadaan bumi, dan memastikan bahwa dalam proses mewujudkan semua itu, tidak ada siapapun, atau golongan manapun, yang ketinggalan. Tujuan dan target SDGs merupakan rencana tindakan 15 tahun, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam tiga dimensi, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs dimaksudkan untuk mewujudkan hak asasi manusia bagi semua termasuk mencapai kesetaraan gender, pemberdayaan wanita dan anak perempuan, yang merupakan bagian tak terpisahkan pada tiga dimensi dalam pembangunan berkelanjutan. Adapun 17 Goals SDGs adalah:

1) No Poverty / Tidak Ada Kemiskinan:

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.

2) Zero Hunger / Menghapuskan Kelaparan

Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

3) Good Health and Well Being / Kesehatan Yang Baik

Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.

4) Quality Education / Pendidikan Berkualitas

Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.

5) Gender Equality / Kesetaraan Gender

Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.

6) Clean Water dan Sanitation / Air Bersih dan Sanitasi

Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.

7) Affordable and Clean Energy / Energi Terbarukan

Memastikan akses ke energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.

8) Decent Work and Economic Growth / Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi

Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.

9) Industry, Innovation and Infrastructure / Inovasi dan Infrastruktur

Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.

10) Reduced Inequality / Berkurangnya Ketidaksetaraan

Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.

11) Sustainable Cities and Communities / Kota dan Masyarakat Berkelanjutan

Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.

12) Responsible Consumption and Production / Pemakaian Yang Bertanggungjawab

Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.

13) Climate Action / Aksi Iklim

Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya

14) Life Below Water / Kehidupan di Bawah Air

Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya

15) Life on Land / Kehidupan di Darat

Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.

16) Peace and Justice Strong Institutions / Perdamaian dan Keadilan

Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.

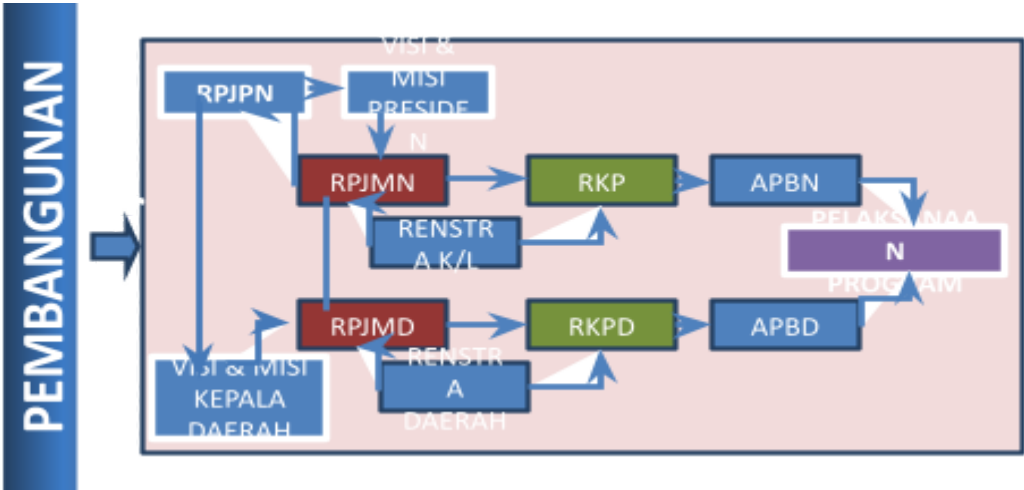
17) Partnerships for The Goals / Kemitraan untuk Tujuan

Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan SDGs pada Tahun 2030 sebagaimana telah disepakati, tujuan-tujuan SDGs harus menjadi kerangka penyusunan

dokumen perencanaan dan diwujudkan dalam dokumen penganggaran pusat maupun daerah. Mainstreaming SDGs ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Tingkat Nasional Maupun Daerah dilakukan dengan bagan kerja sebagaimana dibawah ini:

Gambar 4.1
Mainstreaming SDGs ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Tingkat Nasional Maupun Daerah



RPJMN telah mengakomodasi tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan / SDGs, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Fokus Global Goals SDGs

No .	Fokus Global Goals SDGs	RPJMN 2015-2019
1.	<i>End poverty everywhere</i> Mengakhiri Kemiskinan Dimanapun	√
2.	<i>End hunger/ Improve nutrition and promote sustainable agriculture</i> Mengakhiri Kelaparan, meningkatkan gizi dan pertanian yang berkelanjutan	√
3.	<i>Attain healthy lives for all</i> Mencapai Kehidupan yang Sehat untuk Semua	√
4	<i>Provide quality education and life-long learning opportunities for all</i> Menyediakan pendidikan dan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua	√

5.	<i>Attain gender equality, empower women and girls everywhere</i> Mencapai kesetaraan gender, memberdayakan wanita dan anak-anak perempuan dimanapun.	√
6.	<i>Ensure availability and sustainable use of water and sanitation for all</i> Memastikan ketersediaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan atas air bersih dan sanitasi untuk semua.	√
7.	<i>Ensure sustainable energy for all</i> Memastikan energy yang berkelanjutan untuk semua	√
8.	<i>Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all</i> Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tenaga kerja produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.	√
9.	<i>Promote sustainable infrastructure and industrialization and foster innovation</i> Meningkatkan infrastruktur dan industrialisasi yang berkelanjutan dan mendorong inovasi.	√
10.	<i>Reduce inequality within and between countries</i> Menurunkan kesenjangan dalam dan diantara negara-negara.	√
11.	<i>Make cities and human settlements inclusive, safe and sustainable</i> menciptakan kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman dan berkelanjutan.	√
12.	<i>Promote sustainable consumption and production patterns</i> Mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.	√
13.	<i>Tackle climate change and its impacts</i> Menanggulangi perubahan iklim dan dampaknya.	√
14.	<i>Conserve and promote sustainable use of oceans, seas and marine resources</i> Memulihkan dan memajukan pemanfaatan yang berkelanjutan akan sumber daya laut.	√
15.	<i>Protect and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, halt desertification, land degradation and biodiversity loss</i>	√

	Melindungi dan memajukan penggunaan yang berkelanjutan atas ekosistem bumi, menghentikan penggundulan hutan, pengrusakan tanah dan kerusakan keanekaragaman hayati.	
16.	<i>Achieve peaceful and inclusive societies, access to justice for all, and effective and capable institution</i> Mencapai masyarakat yang damai dan inklusif, akses terhadap keadilan untuk semua, dan institusi yang efektif dan mampu (melaksanakan fungsi tersebut).	√
17.	<i>Strengthen the means of implementation and the global partnership for sustainable development</i> Menguatkan perangkat implementasi dan kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan.	√

Relevansi Arah Kebijakan Umum RPJMN dengan tujuan SDGs adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Arah Kebijakan Umum dan Relevansi dengan SDGs

Arah Kebijakan Umum	Relevansi dengan SDGs
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Goal 1, Goal 8, Goal 9, Goal 17
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan	Goal 7, Goal 12, Goal 14 Goal 6
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.	Goal 11, Goal 13, Goal 15,
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim	Goal 10, Goal 16 Goal 2, Goal 3, Goal 4, Goal 5, Goal 6, Goal 17
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh	Goal 8, Goal 10
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan	
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah	

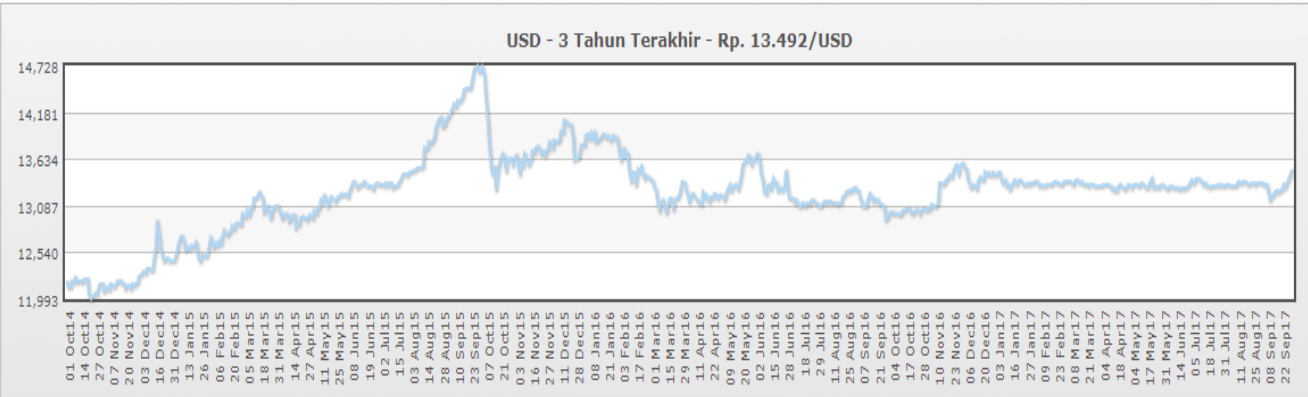
4.2.1.2 Ketidakpastian Ekonomi Global

Sejak era globalisasi, krisis keuangan menjadi lebih sering terjadi daripada sebelumnya. Salah satu alasan utamanya adalah kemajuan dalam teknologi informasi, yang, sampai batas tertentu, memperbesar gelombang krisis dan mempercepat penyebarannya ke daerah atau negara lain. Alasan lain adalah perkembangan pesat dari sektor keuangan. Dalam dua dekade terakhir, setidaknya dua krisis keuangan besar terjadi, yaitu Krisis Keuangan Asia Timur 1997 dan Krisis Keuangan Global 2008. Jika krisis pada tahun 1997 disebabkan oleh kurangnya transparansi dan kredibilitas pemerintah yang menyebabkan distorsi struktural dan kebijakan gejolak ekonomi tahun 2008 terutama dipicu oleh inovasi yang cepat dalam produk keuangan seperti praktek sekuritisasi dan “*credit default swap*”. Hal ini diperburuk oleh spekulasi properti dan peringkat kredit yang tidak akurat. Pada kedua kasus, perkembangan krisis menyebar ke benua-benua lain dan, dalam waktu singkat, menjadi krisis global karena efek menular di tengah sistem keuangan yang terintegrasi secara global dan persebaran informasi yang cepat.

Indonesia mampu melewati gejolak krisis keuangan global dalam dua dekade terakhir dengan kualitas dan kapasitas daya saing sektor mikro, kecil, dan menengah yang tulang punggung perekonomian nasional meskipun menjelang akhir tahun 2015, Indonesia dan dunia mengalami perlambatan ekonomi. Berbagai indikator, seperti nilai tukar rupiah yang terus melemah, meningkatnya suku bunga bank, menurunnya ekspor dan tingkat harga ekspor kita di pasar dunia, juga kegagalan panen di sentra produksi padi, sebenarnya sudah memberikan gambaran bahwa ekonomi Indonesia tengah menghadapi kesulitan. Salah satu indikator populer yang menunjukkan gejolak perekonomian nasional adalah nilai tukar rupiah yang mencapai Rp.14.000 per US Dollar meskipun tidak mencapai nilai kurs terparah pada krisis ekonomi 1997.

Gambar 4.2

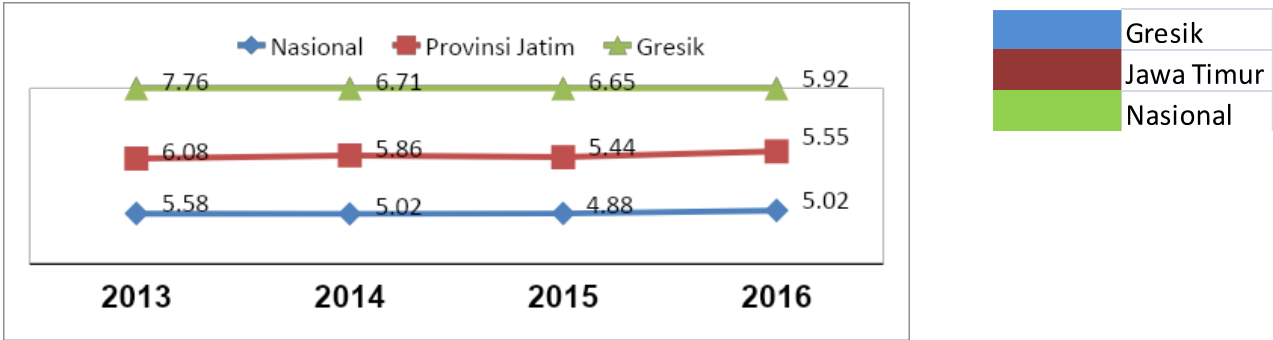
Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar selama 2014-2017



Sumber : Bank Indonesia 2017

Meskipun tidak menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi namun melemahnya nilai tukar rupiah berdampak sistemik terhadap pertumbuhan ekonomi yang dibawah 5% atau melambat dibandingkan data 5 tahun terakhir.

Gambar 4.3 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur, dan Gresik 2013-2016



Salah satu dampak ketidakpastian global dalam perlambatan ekonomi Indonesia berimbas pada munculnya krisis moneter dengan banyaknya modal asing yang tidak hanya masuk ke dalam sektor keuangan tetapi juga sudah membanjiri pasar modal tanah air. Artinya, jika investor asing suatu saat 'bermigrasi' dari Indonesia, bukan hal yang tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis moneter. Sekitar 60% saham asing yang beredar di pasar modal nasional dan surat berharga negara sudah 40% dikuasai oleh asing. Perkembangan ekonomi diproyeksikan semakin memburuk dengan

kepastian peningkatan tingkat suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat, *theFederal Reserve System* pada Desember 2015. Manuver kenaikan tingkat suku bunga *the Fed* berpotensi meningkatkan *net selldengan* menyedot aliran modal, dari negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk kembali ke AS. Pada gilirannya, aliran balik dana ini telah meningkatkan suku bunga pinjaman pemerintah, dunia usaha, dan menghempaskan harga SBI, SUN, dan efek-efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta sebagaimana diperlihatkan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan yang sempat mencapai peak performance pada kisaran 5.500-5.600 pada kuartal I 2015 hingga merosot pada kisaran 4.400-4.600 pada akhir tahun. IHSG kembli melonjak mencapai titik tertinggi pada kuartal III Tahun 2017.

Gambar 4.4

Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan 2013-2017



4.2.1.3 Kerawanan Pangan Global dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan semakin berkembangnya sarana teknologi di bidang kesehatan dan pelbagai factor lainnya menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang pesat pada beberapa dekade terakhir yang tentu saja berdampak pada aspek aksesibilitas pendidikan, iklim ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Pertambahan penduduk berbanding lurus terhadap eksplorasi bahan makanan, air, energi, papan, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh manusia yang berarti semakin banyak tanah yang harus diolah, pemakaian pupuk dan pestisida, merosotnya kualitas air, pembangunan proyek-proyek pembangkit tenaga listrik dan pemompaan sumur-sumur minyak. Kondisi ini berdampak sistemik dengan munculnya ancaman kerwawan pangan, kerusakan lingkungan dengan semakin parahnya erosi tanah, polusi air dan udara, masalah kesehatan karena sanitasi, berkurangnya habitat keanekaragaman hayati (biodiversity).

Revolusi Industri yang terjadi di Eropa dan menyebar ke Amerika Utara sebelum pertengahan abad ke-18 telah menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk secara tajam. Penemuan teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian, perternakan, dan perikanan sehingga suplai bahan makanan terpenuhi dan juga kemajuan teknologi kesehatan yang mampu meningkatkan pemeliharaan kesehatan manusia, seperti penemuan penisilin pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 menurunkan angka kematian manusia secara tajam, misalnya orang-orang memakai sabun, baju yang terbuat dari katun yang dapat menjaga dari parasit yang menular. Pertambahan penduduk di abad ke-20 memacu peningkatan eksploitasi terhadap sumber bahan mentah yang ada, sehingga mencapai titik batas kemampuan alam dan menyebabkan sumber-sumber alam tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Keadaan ini telah menyebabkan terjadinya masalah-masalah global seperti krisis ekonomi, sosial, kelaparan, migrasi, hingga konflik sosial atau peperangan.

Dalam konteks perubahan iklim dan ancaman terhadap kondisi lingkungan diuraikan pelbagai isu strategis lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia meliputi;

- a. Pemanasan Global merupakan fenomena peningkatan temperature global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbondioksida, metana, dinitrooksida, dan CFC sehingga energy matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Dampak bagi lingkungan biogeofisik adalah pelelehan es di kutub, kenaikan mutu air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, migrasi fauna dan hama penyakit. Dampak bagi aktifitas sosial ekonomi masyarakat adalah gangguan pada pesisir dan kota pantai, gangguan terhadap prasarana fungsi jalan, pelabuhan dan bandara, gangguan terhadap pemukiman penduduk, produktifitas pertanian, dan peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit
- b. Penipisan Lapisan Ozon dalam lapisan statosfer pengaruh radiasi ultraviolet, CFC terurai dan membebaskan atom klor. Klor akan mempercepat penguraian ozon menjadi gas oksigen yang mengakibatkan efek rumah kaca. Beberapa atom lain yang mengandung brom seperti metal bromide dan halon juga ikut memperbesar penguraian ozon. Dampak bagi makhluk hidup adalah lebih banyaknya kasus kanker kulit melanoma yang bisa menyebabkan kematian, meningkatkan

kasus katarak pada mata dan kanker mata, menghambat daya kebal pada manusia (imun), penurunan produksi tanaman jagung, kenaikan suhu udara dan kematian pada hewan liar, dll.

- c. Hujan Asam akibat proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut bisa bereaksi air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Ancaman ini menyebabkan proses korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit, sistem pernafasan, menyebabkan pengasaman pada tanah..
- d. Penurunan keanekaragaman hayati yang berpotensi mengancam jumlah atau spesies di suatu wilayah, keunikan spesies, gen serta ekosistem.
- e. Pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, bersifat korosif.

4.2.1.4 Masyarakat Ekonomi Asean

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN,

Pada saat yang sama, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap

Negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam melalui *Initiative for ASEAN Integration* dan inisiatif regional lainnya. Bentuk Kerjasamanya adalah :

1. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas;
2. Pengakuan kualifikasi profesional;
3. Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan;
4. Langkah-langkah pembiayaan perdagangan;
5. Meningkatkan infrastruktur
6. Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN;
7. Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah;
8. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun MEA.

Dalam menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Kabupaten Gresik masih menghadapi tantangan antara lain Pertumbuhan ekonomi yang masih belum bersifat inklusif, hal ini diindikasikan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi namun juga diiringi dengan tingkat kemiskinan, tantangan perdagangan yang semakin ketat terutama pengembangan UMKM, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap MEA.

Perkembangan jumlah UMKM dan Usaha Besar (UB) cenderung meningkat dengan proporsi yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa baik UMKM maupun UB memberikan kontribusi yang tetap dalam perekonomian Kabupaten Gresik. Proporsi jumlah UMKM yang cenderung konstan jika dibandingkan dengan perkembangan jumlah UB. Pada sisi yang lain, ternyata hampir 50 persen dari PDRB Kabupaten Gresik dihasilkan dari usaha masyarakat yang berskala besar. Rendahnya daya saing UMKM Kabupaten Gresik menimbulkan tingkat resiko yang tinggi jika dihadapkan dengan perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

4.2.1.5 Energi Terbarukan

Ketersediaan energi dan akses kepada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang merupakan kepentingan global dalam menghadapi cadangan energy minyak dan sumber daya alam yang semakin tergerus seiring dengan kemajuan teknologi dan tumbuhnya pusat-pusat perekonomian yang membutuhkan dukungan energi secara berkelanjutan. Pada tahun 2014 terdapat peningkatan sebesar 15 kali lipat pada penggunaan energi surya dan 3 kali lipat pada penggunaan energi angin di seluruh dunia sejak tahun 2007. Hal ini didukung dengan biaya

yang dikeluarkan untuk energi matahari dan angin telah menurun secara mendalam. Sebagai contoh Biaya fotovoltaiik Surya (PV) telah mengalami penurunan sebesar 80% sejak tahun 2008 dan diharapkan dapat terus menurun. Sehingga biaya untuk energi surya sekarang ini lebih bersaing jika dibandingkan dengan energi konvensional tanpa subsidi. Penurunan biaya secara dramatis menjadikan energi terbarukan menjadi sumber energi listrik baru dengan biaya termurah.

Masing-masing negara di dunia sudah mencapai andil yang besar dalam penggunaan energi angin, surya dan energi terbarukan lainnya di Spanyol, energi angin adalah sumber energi listrik tertinggi di negara tersebut pada 2013, dibanding energi dari nuklir, batubara dan gas. Energi terbarukan menyediakan 42% dari total kebutuhan listrik di daratan Spanyol pada 2013, dan menyediakan sebesar 50% pada semester pertama 2014. Menurut Agensi Energi Internasional (the International Energy Agency), setiap negara sekarang dapat mencapai saham yang tinggi dengan biaya yang efektif dari penggunaan energi angin dan energi surya.

Dalam tataran global, berdasarkan riset Green Peace diketahui bahwa energi terbarukan sekarang menyediakan sebesar 22% kebutuhan listrik dunia. Tingkat pertumbuhan membuktikan bagaimana energi terbarukan dapat dengan cepat digunakan dan ditingkatkan Hanya dalam waktu dua tahun, Jepang telah memasang 11 GW energi surya. Dalam aliran listrik, hal tersebut setara dengan lebih dari dua reaktor nuklir (membangun pembangkit listrik nuklir biasanya memakan waktu satu dekade atau lebih). Selanjutnya, Jepang juga telah menyetujui sebanyak 72 GW proyek energi terbarukan, yang sebagian besar adalah solar. Hal tersebut sebanding dengan sekitar 16 reaktor nuklir, atau setara pula dengan sekitar 20 unit pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Sedangkan Hanya dalam waktu tiga tahun, Jerman telah meningkatkan pangsa energi terbarukan dari 17% menjadi 24%. Energi surya sendiri menghasilkan 30 TWhs listrik tahun lalu, yang setara dengan hasil yang diperoleh dari sekitar empat reaktor nuklir Jerman.

Secara sudut pandang finansial, Bank-bank investasi terkemuka mulai menyarankan investor untuk beralih pada investasi energi terbarukan. Bagi masyarakat dan berguna untuk membangun ketahanan. Tidak memiliki akses terhadap listrik berarti kehilangan banyak kesempatan dalam hidup. Hal tersebut masih menjadi

kenyataan bagi sekitar 1,3 miliar orang di dunia. Tapi sekarang, energi terbarukan membuat akses terhadap energi menjadi lebih terjangkau.

Energi terbarukan secara menyeluruh atau 100% adalah solusi yang harus diambil. Energi terbarukan dapat memenuhi semua kebutuhan energi kita. Sebagaimana temuan IPCC, bahwa potensi teknis dari penggunaan energi terbarukan jauh lebih tinggi daripada semua permintaan energi global. Sebagaimana contoh komitmen Sydney, kota terpadat di Australia, akan beralih ke 100% energi terbarukan dalam penggunaan listriknya pada tahun 2030. Kota-kota dengan suhu udara dingin lain yang akan menyusul mencakup tiga ibukota Nordic (Oslo, Stockholm dan Copenhagen) juga telah memiliki semua target yang ditetapkan untuk beralih ke 100% energi terbarukan, sementara Reykjavik juga sudah membahas masalah tersebut. Sementara negara berangin Jerman, Schleswig-Holstein, direncanakan dapat mencapai 100% listrik terbarukan tahun 2015, sementara Cape Verde, sebuah negara kepulauan di Afrika, memiliki target 100% energi terbarukan pada tahun 2020. Di Denmark, seluruh negeri bertujuan untuk memenuhi seluruh daya listrik yang dibutuhkan dengan 100% energi terbarukan hanya dalam kurun waktu 20 tahun dan semua energi, termasuk transportasi, pada tahun 2050.

4.2.1.6 Ketersediaan Sumber Daya Air

Pemanfaatan sumberdaya air bagi kebutuhan umat manusia semakin hari semakin meningkat. Hal ini seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di dunia, yang memberikan konsekuensi logis terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Disatu sisi kebutuhan akan sumberdaya air semakin meningkat pesat dan disisi lain kerusakan dan pencemaran sumberdaya air semakin meningkat pula sebagai implikasi pertumbuhan populasi dan industrialisasi. Sumberdaya air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia paling dominan berasal dari air hujan. Menurut Shiklomanov (1997) dalam Unesco (2003) disebutkan bahwa lebih dari 54% runoff yang dapat dimanfaatkan, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apabila tingkat kebutuhan semakin lama semakin tinggi, maka dikuatirkan ketersediaan air tidak mencukupi. Pada saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 2 milyar manusia per hari terkena dampak kekurangan air di lebih dari 40 negara didunia. 1,1 milyar tidak

mendapatkan air yang memadai dan 2,4 milyar tidak mendapatkan sanitasi yang layak (WHO/UNICEF, 2000). Implikasinya jelas pada munculnya penyakit, kekurangan makanan, konflik kepentingan antara penggunaan dan keterbatasan air dalam aktivitas-aktivitas produksi dan kebutuhan sehari-hari.

Prediksi pada tahun 2050 secara mencemaskan dikemukakan bahwa 1 dari 4 orang akan terkena dampak dari kekurangan air bersih (Gardner-Outlaw and Engelman, 1997 dalam UN, 2003). Pada saat ini di negara-negara berkembang mempunyai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air minum per kapita per tahun yaitu 1.7000 m³ sebagai air bersih yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari dan untuk pemenuhan aspek kesehatan. Hal ini sebagian besar terdapat di Afrika, diikuti kemudian oleh Asia dan beberapa bagian di Eropa Timur dan Amerika Selatan.

4.2.1.7 Perubahan Iklim Global

Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (CO₂, CH₄, CFC, HFC, N₂O), terutama peningkatan konsentrasi CO₂, di atmosfer menyebabkan terjadinya global warming (peningkatan suhu udara secara global) yang memicu terjadinya global climate change (perubahan iklim secara global). Fenomena ini memberikan berbagai dampak yang berpengaruh penting terhadap keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di planet bumi ini, di antaranya adalah pergeseran musim dan perubahan pola/distribusi hujan yang memicu terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau, naiknya muka air laut yang berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil dan banjir rob, dan bencana badai/gelombang yang sering meluluhlantakan sarana-prasarana penopang kehidupan di kawasan pesisir.

Perubahan iklim global sebagai implikasi dari pemanasan global telah mengakibatkan ketidakstabilan atmosfer di lapisan bawah terutama yang dekat dengan permukaan bumi. Pemanasan global ini disebabkan oleh meningkatnya gas-gas rumah kaca yang dominan ditimbulkan oleh industri-industri. Gas-gas rumah kaca yang meningkat ini menimbulkan efek pemantulan dan penyerapan terhadap gelombang panjang yang bersifat panas (inframerah) yang diemisikan oleh permukaan bumi kembali ke permukaan bumi. Pengamatan temperatur global sejak abad 19 menunjukkan adanya perubahan rata-rata temperatur yang menjadi indikator adanya perubahan iklim.

Ilmuwan memperingatkan bahwa dengan tingkat pemanasan dunia kita yang seperti ini, Kutub Utara akan kehilangan seluruh esnya pada musim panas 2040. Jika temperatur global meningkat hingga 6 derajat Celsius maka 95% dari seluruh spesies Bumi akan musnah. Secara nyata semua makhluk akan musnah karena topan besar, banjir, gas hidrogen sulfida, dan bola api metana yang membakar permukaan Bumi dengan kekuatan seperti bom atom. Organisme yang dapat bertahan dalam kondisi seperti itu hanyalah bakteri.

. Arktik atau Kutub Utara diperkirakan tanpa es pada tahun 2082 oleh IPCC. Tanpa perlindungan lapisan es dalam memantulkan cahaya matahari, 90 persen dari panas matahari dapat masuk ke air terbuka, yang mempercepat pemanasan global. Perubahan dalam lapisan es Arktik sangatlah dramatis, dimana ahli iklim mengatakan bahwa hanya 10 persen dari es yang ada sekarang adalah es yang lebih tua dan tebal, sementara lebih dari 90 persennya adalah es yang baru terbentuk dan tipis. Perubahan Arktik lainnya adalah mencairnya lapisan es, yang umumnya merupakan lapisan beku di atas Bumi yang berisi simpanan metana. Mencairnya lapisan es tersebut di tahun-tahun belakangan ini telah menyebabkan gas metana terlepas sehingga jumlahnya di atmosfer telah naik dengan tajam sejak tahun 2004. Pemanasan global lebih jauh akan melampaui kenaikan 2 derajat Celcius yang dapat menyebabkan miliaran ton metana dilepaskan ke dalam atmosfer yang dapat mengantar kepunahan masal bagi kehidupan di planet ini. 18 pulau telah tenggelam sepenuhnya di seluruh dunia, dengan lebih dari 40 negara pulau lainnya terancam oleh naiknya permukaan air laut.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis berskala nasional yang dibahas meliputi (a) Agenda Pembangunan Nawa Cita (b) Agenda Pembangunan Jawa Bali (c) Ketahanan Pangan Nasional (d) Kualitas Lingkungan Hidup dan Keaneragaman Hayati (e) Ketahanan Energi Nasional (f) Ketahanan Air Nasional (g) Perubahan Iklim Nasional (h) Penerapan SPM.

4.2.2.1 Agenda Prioritas Pembangunan Nawa Cita

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan, postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis

Daya tahan suatu bangsa terhadap berbagai deraan gelombang sejarah tergantung pada ideologi. Ideologi sebagai penuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi sebagai pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai bintang pengarah. Ideologi itu adalah PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI. Selanjutnya penjabaran TRISAKTI diwujudkan dalam bentuk:

- a. **Kedaulatan dalam politik** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.
- b. **Berdikari dalam ekonomi** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.
- c. **Kepribadian dalam kebudayaan** diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan. Dengan demikian, prinsip dasar TRISAKTI ini menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, yang menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA yaitu;

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

4.2.2.2 Agenda Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Jawa-Bali, maka tema besar Pembangunan Wilayah Jawa-Bali sebagai Lumbung pangan nasional

- a. Pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja;
- b. Salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari.

Tujuan pengembangan Wilayah Jawa-Bali tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Jawa-Bali dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan produksi sektor pertanian pangan, khususnya padi, pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, telematika, kimia, alumina dan besi baja, serta pengembangan idustri pariwisata dan ekonomi kreatif; (b) penyediaan infrastruktur wilaah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

4.2.2.3 Ketahanan Pangan Nasional

Dalam rangka menuju kemandirian dan kedaulatan pangan sebagaimana tertuang dalam UU No. 17/2007 tentang RPJPN 2005- 2025,

UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan sesuai dengan visi-misiprogram Presiden, maka upaya penguatan pasokan pangan dan diversifikasi konsumsi akan dilakukan melalui strategi: (1) Peningkatan produktivitas dan perluasan areal; (2) Penanganan cadangan pangan dan diversifikasi konsumsi; dan (3) Mitigasi kerawanan pangan. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar global (impor). Menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan, diarahkan kepada dua sasaran utama, yaitu untuk: menjamin akses pangan masyarakat dan meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat, baik dari sisi jumlah, keberagaman, maupun mutunya. Mitigasi kerawanan pangan dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif kondisi iklim/cuaca maupun permasalahan pangan lainnya.

Pada tahun 2014, produksi bahan pangan pokok padi mencapai 70,6 juta ton dengan estimasi pertumbuhan 3% hingga pada tahun 2019. Sedangkan konsumsi pangan utama kalori mencapai 1.967 kkal dengan skor Pola Pangan Harapan mencapai 81,8.

4.2.2.4 Kualitas Lingkungan Hidup dan Keaneragaman Hayati Nasional

Pelestarian lingkungan hidup nasional diprioritaskan dalam menjaga kualitas dan ketersediaan data dan informasi parameter yang dipergunakan di dalam IKLH; memantapkan metodologi analisis yang digunakan untuk penilaian; dan memantapkan aspek kriteria dan ukuran yang lebih komprehensif dan konsisten. Dalam hal, memperkuat data dan informasi lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, dicapai dengan memperluas cakupan dan meningkatkan frekuensi pemantauan kualitas lingkungan hidup, terutama udara, air, dan tanah/lahan; memperkuat sistem informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup yang terpadu baik pusat dan daerah, maupun antar sektor; memantapkan ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup; dan mengembangkan sistem neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai pendukung sistem informasi lingkungan hidup.

Gambar 4.5

Indeks kualitas Lingkungan Hidup 2011-2014



Sumber : IKLH Nasional Tahun 2015

Berdasarkan data IKLH nasional, diketahui bahwa kualitas lingkungan hidup terjadi penurunan secara berturut dari 65.76 pada tahun 2011 hingga 63.42 pada tahun 2014. Dalam rangka melestarikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud, pemerintah telah melakukan pelbagai penguatan lintas sektoral di bidang ketenagakerjaan, industri, hingga social awareness dari tiap masyarakat melalui kampanye moral dan pemahaman akan pentingnya lingkungan yang menopang aktivitas kehidupan masyarakat.

Dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan keekonomian Keaneragaman Hayati sesuai revisi dengan arahan dalam Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-2020 yang direvisi. Pelestarian dan pemanfaatan yang bijaksana atas keanekaragaman hayati menjadi sangat penting dalam memasuki abad ke-21 yang sering juga disebut sebagai abad biologi atau abad hayati. Pada masa ini, industri yang akan maju pesat adalah “industri ilmu kehidupan” yaitu farmasi, kesehatan, pangan, pertanian dan kosmetika, dimana industri tersebut mengandalkan keanekaragaman hayati sebagai bahan baku, dengan pengetahuan dan teknologi yang menyertainya, dan hanya bisa dilakukan dalam kerangka besar pembangunan secara berkelanjutan. Iklim usaha yang kondusif, serta penyusunan panduan dan standar untuk mengembangkan keekonomian keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan sangat diperlukan, untuk memperkuat pembangunan perekonomian, dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, kemudahan akses untuk pengembangan ketersediaan informasi mengenai nilai ekonomi Keaneragaman Hayati, pemanfaatan Keaneragaman Hayati dan jasa

lingkungan dan pengembangan mekanisme insentifnya perlu dijamin oleh Pemerintah.

4.2.2.5 Ketahanan Air Nasional

Kondisi ketahanan air tercermin dari kemampuan menyimpan air baik yang tersimpan secara alami maupun yang tersimpan dalam bangunan penampung air. Hingga tahun 2014, kapasitas tampung air telah mencapai 58,6 m³/kapita, atau naik 12,7 persen terhadap kapasitas tahun 2010 yang sebesar 52 m³/kapita. Namun demikian, kapasitas tampung tersebut baru dapat memenuhi sekitar 3% dari kebutuhan ideal sebesar 1.975 m³/kapita. Terhambatnya pembangunan penampung air seperti waduk, terutama disebabkan oleh keterlambatan persiapan pembangunan (Studi Potensi, FS, SID, DED, AMDAL, Sertifikasi), lamanya proses izin pemanfaatan lokasi (terutama di lahan hutan), serta lamanya pembebasan lahan dan pemukiman kembali penduduk yang terkena dampak.

Kurang optimalnya pengelolaan waduk tercermin dari percepatan penurunan fungsi waduk. Sebagian besar dari 284 waduk termasuk yang berfungsi sebagai PLTA, sebagian besar mengalami percepatan sedimentasi. Secara kelembagaan belum optimalnya fungsi unit pengelola bendungan, yang menyebabkan sebagian besar pengelolaan bendungan selama ini belum memenuhi standar minimal. Kehandalan sumber air irigasi yang berasal dari waduk baru mencapai sekitar 11 persen dari 7,2 juta hektar areal irigasi yang telah dibangun, sedangkan sisanya masih mengandalkan debit sungai atau mata air (free intake). Lebih dari setengah jaringan irigasi tersebut atau sebesar 3,74 juta hektar memerlukan rehabilitasi baik rehabilitasi ringan maupun rehabilitasi berat.

Daerah Irigasi Rawa yang telah dikembangkan seluas kurang lebih 1,8 juta hektar merupakan lahan potensial pendukung ketahanan pangan, sehingga diperlukan 9-13 pengelolaan yang optimal melalui peningkatan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi. Khusus pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kondisi kemampuan keuangan daerah merupakan kendala utama dalam peningkatan, rehabilitasi, dan operasi dan pemeliharaan. Di sisi lain, belum adanya manajer irigasi atau pengelola daerah irigasi merupakan salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan daerah irigasi. Sumber air

baku yang berasal dari waduk dan embung yang ketersediaan airnya dapat terjamin sepanjang tahun relatif masih rendah, mengingat sumber air irigasi yang berasal dari waduk dan embung baru mencapai 11 persen dari luasan daerah irigasi di Indonesia. Sumber air baku lainnya berasal dari pengambilan bebas atau free intake pada aliran sungai dan mata air yang keandalannya tergantung dari debit sungai, yang akan menurun pada musim kemarau. Ketersediaan air baku yang berasal dari waduk, embung dan pengambilan bebas dari sungai sampai saat ini belum mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan air akibat dari pesatnya pertumbuhan penduduk, berkembangnya aktivitas manusia, dan kurang efisiennya pemanfaatan air. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana air baku, serta penurunan debit dan kualitas air pada sumber-sumber air. Belum memadainya suplai air baku menyebabkan tingginya eksploitasi air tanah untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan pokok sehari-hari. Pada tahun 2012 tidak kurang dari 55,5 persen keluarga di Indonesia masih mengandalkan air tanah sebagai sumber air minum. Secara kualitas, kendala yang masih dihadapi dalam penyediaan air baku di Indonesia diantaranya adalah tingginya pencemaran sumber-sumber air dari limbah rumah tangga, perkotaan, dan industri, serta dari budidaya pertanian yang cenderung berlebihan dalam penggunaan pupuk dan pestisida.

Luas areal rawa di Indonesia mencapai kurang lebih 33,4 juta hektar atau kurang lebih sebesar 17,4 persen dari luas daratan, yang terdiri dari 60,2 persen merupakan rawa pasang surut, dan 39,8 persen merupakan rawa non pasang surut. Lahan rawa tersebut berpotensi sebagai penyedia lahan budidaya pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan lahan perkebunan seperti sawit dan karet. Pengembangan lahan rawa sebagai lahan alternatif perlu diupayakan dengan pendekatan adaptif dengan mengedepankan kelestarian lingkungan, yakni suatu bentuk pengelolaan yang menyeimbangkan upaya pengembangan (pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi) dan konservasi, untuk dapat mencapai pemanfaatan lahan rawa secara optimal, serta meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi ekologis ekosistem rawa.

4.2.2.6 Ketahanan Energi Nasional

Ketahanan energi (energy security) menggambarkan sampai sejauh mana energi dapat disediakan secara tepat waktu dan terjamin ketersediaannya dengan harga yang terjangkau dan mutu yang dapat diterima. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan ketahanan energi adalah jumlah energi (availability), baik sumber daya maupun cadangan, ketersediaan infrastruktur (accessability), harga energi (affordability), kualitas energi (acceptability), serta portofolio atau bauran energi (energy mix). Di samping itu, ketahanan energi juga mempunyai elemen keberlanjutan (sustainability), sehingga energi dituntut untuk dikelola dengan memperhatikan daya dukung lingkungan (environment).

Jumlah energi yang dibutuhkan selama lima tahun mendatang diperkirakan akan meningkat dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 5-6 persen untuk energi primer, dan 7-8 persen per tahun untuk energi final. Meningkatnya kebutuhan energi ini menuntut tersedianya sumber daya dan cadangan energi yang cukup serta infrastruktur energi yang memadai. Selain itu, harga energi perlu disesuaikan untuk menjamin ketersediaan pasokan energi dengan tidak mengganggu kemampuan daya beli masyarakat. Ketergantungan terhadap minyak bumi perlu dikurangi sehingga bauran energi menjadi lebih sehat dengan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dan mengoptimalkan pemanfaatan gas alam. Konsumsi energi juga perlu dikelola dengan baik sehingga pemborosan serta jumlah emisi dapat dikurangi.

Produksi minyak mentah (crude) terus menurun. Sepanjang lima tahun terakhir ini, produksi rata-rata minyak bumi di bawah 1 juta barel per hari (bph). Pada tahun 2010, produksi minyak bumi mencapai 945 ribu barrel per hari, terus menurun menjadi 824 ribu bph (2013), dan diperkirakan akan menjadi 798 ribu bph pada tahun 2014. Mulai tahun 2013, asumsi makro pembangunan telah memasukkan produksi gas bumi, selain hanya dari produksi minyak bumi. Meskipun relatif stabil, produksi gas bumi juga mengalami penurunan dari tahun 2010 ke 2013. Pada tahun 2010, produksi gas bumi mencapai 1.582 ribu barrel setara minyak (SBM) per hari, namun kemudian turun menjadi 1.441 ribu SBM per hari pada tahun 2013. Meskipun begitu pertumbuhan penggunaan gas masih dapat dipenuhi oleh produksi gas. Produksi batubara meningkat cukup pesat sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan ekspor. Pada tahun 2010, produksi batubara

mencapai 275 juta ton, dan pada tahun 2013 mencapai 421 juta ton. Pada tahun 2010 ekspor batubara mencapai 208 juta ton, dan terus meningkat mencapai 349 juta ton pada tahun 2013, atau sekitar 76 persen dari total produksi batubara nasional.

Cadangan penyangga dan operasional Minyak Mentah, BBM dan LPG masih sangat terbatas. Penyediaan energi nasional saat ini belum mempertimbangkan perlunya ketersediaan cadangan BBM dan LPG jika terjadi krisis atau kelangkaan energi. Kapasitas penyimpanan saat ini adalah sebesar 6,7 juta KL untuk BBM dan 420 ribu Metric Ton (MT) untuk LPG. Cadangan yang ada berupa cadangan operasional minyak mentah dengan fasilitas penyimpanan (storage) atau penimbunan (stock) untuk 17 hari, cadangan operasional BBM untuk 21-23 hari, dan cadangan LPG untuk 17 hari. Untuk meningkatkan kehandalan dalam pasokan energi, diperlukan sekurang-kurangnya cadangan operasional dengan kapasitas fasilitas penyimpanan atau penimbunan BBM dan LPG selama 30 hari.

Penguatan ketahanan energi ditempuh dengan meningkatkan diversifikasi pemanfaatan energi dan mempertahankan produksi minyak dan gas bumi yang didukung dengan sarana prasarana memadai serta teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Peningkatan Eksplorasi dan Produksi – Peningkatan pasokan minyak dan gas bumi sangat tergantung dari hasil penemuan cadangan terbukti dari potensi cadangan minyak dan gas bumi. Sedangkan dalam rangka penyediaan infrastruktur energy, peningkatan kapasitas kilang dan pembangunan kilang baru. Langkah-langkah yang dilakukan guna menjamin pasokan BBM dan LPG dari dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dalam rangka pengelolaan energi yang lebih efisien dilakukan melalui penguasaan dan penerapan teknologi efisien energi dalam penyediaan, penggunaan, dan pemanfaatan energi terutama di sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan bangunan gedung

Adapun dalam upaya akselerasi pemanfaatan energy terbarukan, Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan dilakukan melalui pemanfaatan panas bumi dan tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik dan bahan bakar nabati (BBN) untuk mensubstitusi BBM, terutama di sektor transportasi, dan juga pembangkit listrik skala kecil.

4.2.2.7 Perubahan Iklim Nasional

Meskipun belum ada data komprehensif mengenai dampak perubahan iklim di Indonesia. Namun beberapa data menunjukkan bahwa: Suhu rata-rata tahunan menunjukkan peningkatan 0,3 derajat Celcius sejak tahun 1990. Musim hujan datang lebih lambat, lebih singkat, namun curah hujan lebih intensif sehingga meningkatkan risiko banjir. Pada 2080 diperkirakan sebagian Sumatera dan Kalimantan menjadi 10-30% lebih basah pada musim hujan; sedangkan Jawa dan Bali 15% lebih kering.

Variasi musiman dan cuaca ekstrim diduga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di Selatan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi (CIFOR 2004). 4. Perubahan pada kadar penguapan air, dan kelembaban tanah akan berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. Perubahan iklim akan menurunkan kesuburan tanah sekitar 2% sampai dengan 8%, diperkirakan akan mengurangi panen padi sekitar 4% per tahun, kacang kedelai sekitar 10%, dan jagung sekitar 50%. Kenaikan permukaan air laut akan mengancam daerah dan masyarakat pesisir. Sebagai contoh air Teluk Jakarta naik 57 mm tiap tahun. Pada 2050, diperkirakan 160 km² dari Kota Jakarta akan terendam air, termasuk Kelapa Gading, Bandara Sukarno-Hatta dan Ancol (Susandi, Jakarta Post, 7 Maret 2007). Di Bali kerusakan lingkungan pada 140 titik abrasi dari panjang pantai sekitar 430 km. Laju kerusakan pantai di Bali diperkirakan 3,7 km per tahun dengan erosi ke daratan 50-100 meter per tahun (Bali Membangun, 2004). Kerusakan ini ditambah potensi dampak dari perubahan iklim diduga akan menyebabkan muka air laut naik 6 meter pada 2030, sehingga Kuta dan Sanur akan tergenang (Bali Post, 16 Agustus 2007). Hal ini mengancam keberlangsungan pendapatan dari pariwisata yang mengandalkan kekayaan dan keindahan pantai dan laut di Bali. Daerah yang lebih 'aman' adalah pantai berkarang yang bersifat terjal, seperti Uluwatu dan Nusa Penida serta daerah perbukitan dan pegunungan yang saat ini mempunyai ketinggian di atas 50 meter.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi risiko kehilangan banyak pulau-pulau kecilnya dan penciutan kawasan pesisir akibat kenaikan permukaan air laut. Wilayah Indonesia akan berkurang dan akan ada pengungsi dalam negeri. Dampak kenaikan muka air laut akan mengurangi lahan pertanian dan perikanan yang pada akhirnya akan menurunkan potensi pendapatan rata-rata masyarakat petani dan nelayan. Kerusakan pesisir dan bencana yang terkait dengan hal itu akan mengurangi pendapatan negara dan masyarakat dari sektor

pariwisata. Sementara itu, negara harus menaikkan anggaran untuk menanggulangi bencana yang meningkat, mengelola dampak kesehatan, dan menyediakan sarana bagi pengungsi yang meningkat akibat bencana. Industri di kawasan pesisir juga kemungkinan besar akan menghadapi dampak ekonomi akibat permukaan air laut naik. Kesemuanya ini akan meningkatkan beban anggaran pembangunan nasional dan daerah.

4.2.2.8 Perubahan Standar Pelayanan Minimal

Penyusunan dan Penetapan SPM mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penerapan SPM, dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian SPM. SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/LPNK meliputi 13 (tiga belas) SPM, yakni:

1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang SPM Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Keluarga Perencana
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota

Dalam perkembangannya, target akhir SPM yang mayoritas selesai pada akhir tahun 2015 akan dilakukan perubahan lebih lanjut melalui peraturan teknis yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Dengan demikian, dibutuhkan review RPJMD dan Renstra untuk menyesuaikan perubahan SPM pada masa mendatang.

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Isu strategis berskala Provinsi Jawa Timur yang dibahas meliputi (a) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Disparitas Wilayah (b) Ketahanan dan Kemandirian Pangan (c) Sinergitas Kebijakan antar wilayah dan (d) Antar Wilayah Agenda Pembangunan tata Ruang Jawa Timur

4.2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Disparitas Wilayah

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2009-2012) menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga

diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM.

Kualitas pertumbuhan yang terkategori memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagaimana adanya kesenjangan wilayah yang diindikasikan pada perbedaan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu antara Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri, Wilayah Utara (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo), dan Kota Malang dengan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PDRB perkapita kecil ada di Wilayah Selatan (Pacitan, Trenggalek, Ponorogo), Tapal Kuda (Bondowoso, Jember), Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).

Keberadaan UMKM di Jawa Timur memiliki nilai penting dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, karena selain sebagai katup pengaman sekaligus juga sebagai penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin. Hal ini direpresentasikan dengan kontribusi nilai tambah UKM Jawa Timur ADHB terhadap total PDRB menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu pada tahun 2009-2012 meningkat dari 53,49% (2009) menjadi 54,39% (2012). Disisi lain perkembangan Koperasi di Jawa Timur tahun 2012 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2009, total koperasi menjadi 29.159 unit atau meningkat 50,54% jika dibandingkan dengan 2009 sebesar 19.369 unit. Isu strategis yang mengemuka pada urusan Koperasi dan UMKM dalam 5 tahun kedepan adalah peningkatan skala usaha UMKM dan pemberdayaan koperasi sebagaimana berikut;

- a. Peningkatan produktivitas UMKM terkait dengan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya);
- b. Peningkatan inovasi dan standarisasi;
- c. penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan) ;
- d. perluasan pemasaran;

- e. peningkatan tata kelola usaha dan tata kelola kelembagaan koperasi.

4.2.3.2 Ketahanan dan Kemandirian Pangan Jawa Timur

Jawa Timur memiliki luasan lahan sawah sebesar 1.017549,73 hektar. Sebaran pemanfaatan potensi ini terwujud dalam bentuk surplus komoditas pangan yaitu beras sebesar 4,48 juta ton. Meskipun demikian secara umum Jawa Timur sudah mampu mewujudkan sebagai provinsi yang berdaulat pangan, tetapi belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat, dan sesuai sumber daya dan budaya dengan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin rawan pangan. Adapun beberapa Isu Strategis pada sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Masih tingginya penduduk miskin yang tinggal di pedesaan; sebanyak 4,98 juta rumah tangga pada tahun 2013
2. Fenomena perubahan iklim global memberikan dampak terhadap capaian produksi dan produktivitas pertanian;
3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumber daya alam;
4. Belum optimalnya peran Kelembagaan petani;
5. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan system agribisnis;
6. Ketahanan Pangan;
7. Ketergantungan beras sebagai komoditas pangan pokok masih cukup tinggi Pola konsumsi masyarakat masih belum beragam, bergizi, seimbang dan aman
8. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian

4.2.3.3 Sinergitas Kebijakan antar Wilayah

Perbedaan karakteristik dan potensi wilayah diantara dua wilayah yang saling berbataasan, hingga saat ini masih berpotensi memicu gejolak

antar masyarakat. Di sisi lain perbedaan dalam aturan dan penerapannya juga memungkinkan munculnya permasalahan yang memungkinkan terjadinya gejolak antar wilayah. Isu strategis dari permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antar Provinsi (Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, maupun Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Bali) maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur antara lain :

a. Disharmoni aturan, kebijakan serta penerapannya;

Fenomena ini muncul seperti adanya perbedaan penerapan aturan pada sektor Pendidikan (misalnya perbedaan aturan Sekolah di dua wilayah perbatasan), kesehatan (misalnya dalam kebersamaan Pemberantasan Wabah Penyakit), Sosial (misalnya dalam kebersamaan penanganan PMKS), Perikanan & Kelautan (misalnya kesamaan dalam penerapan aturan pemakaian Jaring di Laut)

b. Kesenjangan Sosial/ekonomi;

Kesenjangan karakteristik Sosial Ekonomi kemasyarakatan seperti pada dua wilayah yang berbeda akan semakin memperlebar disparitas antar wilayah.

c. Disorientasi Prioritas Pembangunan;

Perbedaan orirntasi pembangunan yang akan diprioritaskan berpotensi memunculkan masalah di wilayah perbatasan seperti perbedaaan waktu penanganan Infrastruktur jalan yang saling berhubungan pada dua wilayah yang saling berbatasan.

d. Eksploitasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam perlu dipertimbangkan dampaknya pada wilayah lain di luar wilayah administrasinya sendiri. Fenomena pemakaian Air Bersih dari Provinsi lain dengan perlunya juga mempertimbangkan konservasi hutan serta daya dukung lingkungan.

e. Penetapan Batas Wilayah

4.2.3.4 Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

Pemantapan peran dan fungsi Kawasan Strategis sebagai pusat pertumbuhan wilayah untuk mendorong pengembangan kawasan dalam rangka pemerataan wilayah. Untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru dan pemerataan wilayah diperlukan pengembangan kawasan terkait Kabupaten Gresik yaitu;

- a. *Cluster Metropolitan* yang terdiri dari Kota Surabaya, Kota Batu, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto.
- b. *Cluster Segitiga Emas* yang terdiri dari Kawasan Strategis Segitiga Emas Pertumbuhan Tuban, Lamongan dan Bojonegoro; *Kawasan Strategis Agroindustri Gresik dan Lamongan*; dan kawasan perbatasan antarkabupaten/kota yang memiliki potensi pertumbuhan perekonomian sektoral yang tinggi pada Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bojonegoro;
- c. Peningkatan dan pembangunan jalan Raya Gresik untuk mendukung aksesibilitas kegiatan kepelabuhanan Teluk Lamong yang merupakan pengembangan kapasitas dari Pelabuhan Tanjung Perak;

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Gresik

Isu strategis yang dibahas dalam Kabupaten Gresik merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan berkaitan dengan sinkronisasi terhadap isu strategis berskala internasional, nasional, hingga regional provinsi. Adapun isu strategis yang ditelaah meliputi

1. Atribusi Layanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan;
2. Kesejahteraan Sosial;
 - a. Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. Ketenagakerjaan;
 - c. Kondusifitas Daerah;
 - d. Penegakan Hak Asasi Manusia.
3. Pembangunan Berkelanjutan berwawasan lingkungan;

- a. Ketersediaan Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, dan Pelayanan Sanitasi Dasar
 - b. Konektivitas Daerah
 - c. Permukiman Inklusif
 - d. Pengendalian Banjir
 - e. Lingkungan Hidup
 - f. Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik
4. Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Pangan;
 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Data Pembangunan;
 6. Akselerasi pembangunan melalui Sistem Inovasi Daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis *Smart City*.
 7. Pengarustamaan Gender;
 8. Kemandirian Desa. dan
 9. Pengarustamaan pembangunan berkelanjutan;

4.2.4.1 Atribusi Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan

(a) Atribusi Layanan Dasar Pendidikan

Tantangan Pendidikan dalam Menghadapi Menghadapi MEA

Dilaksanakannya Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015 merupakan tantangan yang harus dihadapi dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Gresik pada khususnya. Masuknya tenaga kerja asing menciptakan persaingan baru dalam memperebutkan kesempatan kerja di dalam negeri. Di sisi lain, tuntutan kompetensi dan kualifikasi tertentu harus dipenuhi untuk bisa memanfaatkan peluang kerja pada sesama negara anggota MEA. Kabupaten Gresik selaku kabupaten dengan struktur utama perekonomian di bidang industri manufaktur, menawarkan banyak peluang kerja di bidang tersebut. Dengan kian tingginya kecenderungan perusahaan untuk beralih pada penggunaan teknologi tinggi, permintaan akan tenaga kerja dengan berbagai keterampilan khusus semakin meningkat. Sementara itu, pencari kerja di Kabupaten Gresik masih didominasi oleh tenaga kerja unskilled dan uneducated. Intervensi dunia pendidikan untuk menghadapi tantangan ini bisa dilakukan antara lain dengan meningkatkan peran Sekolah Menengah Kejuruan, yang menciptakan tenaga siap kerja, alih-alih Sekolah Menengah Umum yang mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan untuk pengelolaan Sekolah Menengah ada pada pemerintah provinsi. Hal ini berarti, koordinasi Kabupaten Gresik dengan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus dilakukan dengan intensif dan dengan spesifik dan mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja, khususnya di Kabupaten Gresik sendiri. Untuk menuju kesana, pemetaan kebutuhan tenaga kerja harus terlebih dulu disusun dengan menampilkan jenis-jenis pekerjaan dan spesifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan secara spesifik. Informasi ini harus menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan bidang pendidikan, terutama pendidikan menengah, pendidikan tinggi serta pendidikan luar sekolah.

Kebutuhan lain yang tidak kalah penting adalah sinergi antara dunia pendidikan, terutama SMK dan Pendidikan Luar Sekolah dengan Lembaga Sertifikasi Nasional dan Internasional. LSN merupakan lembaga yang berhak memberikan sertifikasi atas dimilikinya keterampilan tertentu, sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang berlaku dengan standar nasional. Tenaga Kerja yang mempunyai keterampilan dan telah bersertifikat mempunyai peluang lebih besar untuk bekerja dengan upah yang tinggi dan pada perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional.

Peningkatan Mutu Sekolah Menuju Standar Nasional Pendidikan

Hasil survey SPM Tahun 2015 menunjukkan sebagian besar dari sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Gresik telah mencapai, atau mendekati pencapaian standar minimal pelayanan (SPM) pendidikan. Begitu juga capaian SPM Pendidikan dari pihak pemerintah Kabupaten Gresik, menunjukkan hasil yang bagus. Hal itu merupakan perkembangan yang baik dan menggembirakan, sekaligus membawa kepada tantangan berikutnya, yaitu mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sebagaimana diketahui, SPM merupakan standar yang ditetapkan sebagai bagian dari strategi untuk menuju kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Indonesia, yaitu SNP. Lingkup Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 meliputi, standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. SNP berisi ketentuan tentang delapan standar yang harus diwujudkan pada semua satuan pendidikan. Dengan memberlakukan SNP, akan tercapai sistem pendidikan yang menciptakan generasi muda dengan kompetensi yang diharapkan, yaitu meliputi seperangkat sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, dihayati dan dikuasai.

Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Hingga akhir Tahun 2015, Kabupaten Gresik belum memiliki data jumlah anak berkebutuhan khusus. Ketiadaan data ini menyebabkan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar anak berkebutuhan khusus tidak dapat dihitung dan kebutuhan pendidikan khusus maupun sekolah inklusi tidak dapat dipetakan. Dengan kata lain, belum tersedia data yang dapat menyediakan informasi mengenai terpenuhinya kebutuhan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Gresik. Baik ketersediaan data maupun ketersediaan lembaga pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, termasuk di dalamnya adalah tersedianya aksesibilitas untuk anak berkebutuhan khusus pada sekolah-sekolah umum.

Hal ini antara lain telah *menjadi tujuan internasional, sebagaimana disebutkan pada tujuan ke-4 Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals*, yaitu Menjamin Pemerataan Pendidikan yang Berkualitas serta Meningkatkan Kesempatan Belajar untuk Semua Orang. Selain itu, memperoleh pendidikan sesuai kebutuhannya merupakan salah satu hak anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya pasal 51 yang berbunyi : anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

(b) Atribusi Layanan Dasar Kesehatan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dunia kesehatan menghadapi tantangan baru. Sebagaimana diamanatkan oleh, Undang-Undang tersebut BPJS merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Pertama, BPJS menggunakan sistem rujukan berjenjang. Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis, yaitu dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama

di fasilitas kesehatan tingkat pertama, jika diperlukan pelayanan lanjutan oleh spesialis maka pasien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua. Pelayanan kesehatan tingkat kedua di fasilitas sekunder diberikan atas rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (Faskes Primer). Begitu juga fasilitas kesehatan tingkat ketiga di fasilitas kesehatan tersier (Faskes Tersier) hanya dapat diberikan atas rujukan dari faskes sekunder dan faskes primer. Sistem rujukan berjenjang ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Melalui sistem ini, pasien akan terfilter sesuai kebutuhannya, dimana pasien untuk penyakit-penyakit yang bisa dilayani oleh fasilitas kesehatan primer tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan sekunder dan begitu juga dengan fasilitas kesehatan tersier. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak perlu berdesakan di fasilitas kesehatan tingkat dua, melainkan terdistribusi ke fasilitas kesehatan primer yang lokasinya lebih dekat dan jumlahnya lebih banyak. Konsekuensi yang timbul dari pelayanan kesehatan dengan sistem rujukan berjenjang ini adalah mendesaknya kebutuhan akan fasilitas kesehatan primer dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Tercakup di dalamnya adalah kebutuhan akan dokter umum, dokter gigi, bidan dan tenaga medis lain, yang berkompeten dan dalam jumlah yang memadai untuk memberikan pelayanan pada fasilitas kesehatan primer. Kebutuhan lain yang tidak kalah mendesak adalah kebutuhan akan sistem informasi dan sarana komunikasi yang efektif dan efisien. Sistem ini dibutuhkan agar fasilitas kesehatan dapat melakukan koordinasi rujukan, dimana faskes perujuk bisa memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien sesuai kebutuhan medis, dan faskes tujuan perujuk mendapatkan informasi secara dini terhadap kondisi pasien.

Kedua, BPJS merupakan penyelenggara program jaminan sosial, dimana setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta. Untuk memastikan seluruh anggota masyarakat memiliki jaminan sosial ini, Pemerintah telah menyediakan program BPJS Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI). BPJS PBI merupakan kepesertaan BPJS yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Peserta BPJS PBI berbasis pada Basis Data Terpadu (BDT) Program Perlindungan Sosial. BDT adalah basis data yang berisi nama dan alamat penduduk pada tingkat kesejahteraan tertentu yang telah ditetapkan menjadi sasaran untuk program-program penanggulangan sosial. Namun,

karena keterbatasan APBN, belum semua individu dalam basis data ini mendapatkan BPJS PBI.

Selain itu, sebagaimana hasil pendataan yang lain, BDT mempunyai tingkat kesalahan. Dalam hal ini, kesalahan dalam pendataan meliputi inklusi error dan eksklusi error. Inklusi error adalah terdatanya individu yang tidak berhak mendapat bantuan. Sedang eksklusi error adalah terdapat individu yang seharusnya berhak mendapat bantuan namun belum terdaftar. Pembaruan BDT dilakukan secara nasional setiap 3 tahun sekali. Rentang waktu yang cukup panjang ini juga menjadi salah satu pendukung untuk menarik kesimpulan bahwa penduduk yang tidak mampu membayar iuran BPJS tidak terbatas pada mereka yang sudah tercantum pada BDT saja.

Secara ringkas, terdapat sedikitnya tiga kategori individu yang belum dan tidak mampu memperoleh perlindungan kesehatan, yaitu: (a) Individu yang tercantum dalam BDT namun belum memperoleh BPJS PBI; dan (b) Individu yang tidak tercantum dalam BDT, belum menjadi anggota BPJS dan tidak mampu membayar iuran BPJS. Individu yang tidak tercantum dalam BDT, sudah menjadi anggota BPJS, namun karena sesuatu hal tidak mampu melanjutkan pembayaran iurannya; Mekanisme pembiayaan kesehatan bagi individu yang termasuk dalam tiga kategori ini harus dirumuskan dengan baik sehingga seluruh anggota masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya.

Ketiga, dibutuhkan mekanisme pengaduan yang efisien dan efektif sebagai alat kontrol dan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masa mendatang.

4.2.4.2 Kesejahteraan Sosial

Pelbagai faktor baik internal maupun eksternal mempengaruhi kesejahteraan suatu masyarakat di suatu daerah seperti konstelasi politik lokal, pemanfaatan sumber-sumber daya alam maupun manusia, kondusifitas iklim investasi hingga pemenuhan layanan dasar. Pelbagai indikator makro juga dapat diasumsikan untuk menggambarkan kesejahteraan sosial suatu masyarakat di daerah meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, laju inflasi hingga pelbagai data spesifik seperti dalam capaian pembangunan seperti kondisi capaian layanan air bersih, tingkat

partisipasi pendidikan, maupun capaian di bidang kesehatan. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi hingga indikator yang digunakan untuk mendiskripsikan secara makro kondisi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud maka isu strategis di bidang kesejahteraan sosial Kabupaten Gresik yang ditelaah meliputi kondisi kemiskinan dan ketenagakerjaan, kondusifitas sosial, dan keberdayaan masyarakat desa.

a. Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan/Persentase Penduduk Miskin/*Headcount Index*/PO adalah pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Secara sederhana, PO menghitung persentase penduduk miskin dari keseluruhan jumlah penduduk di suatu wilayah. Yang didefinisikan sebagai penduduk miskin disini adalah mereka yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun Garis Kemiskinan / *Poverty Line* adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK dihitung pada tingkat kabupaten/kota, dan berbeda-beda jumlahnya untuk masing-masing kabupaten. Pada Tahun 2013, Garis Kemiskinan untuk Kabupaten Gresik adalah Rp.393.47,-per kapita per bulan, merupakan nilai tertinggi ke-3 dari 38 Kabupaten / Kota se-Jawa Timur. GK Kabupaten Gresik juga lebih tinggi dari Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2016 adalah Rp.321.761,- sedangkan Nasional sebesar Rp. 292.951,-

Gambar 4.6

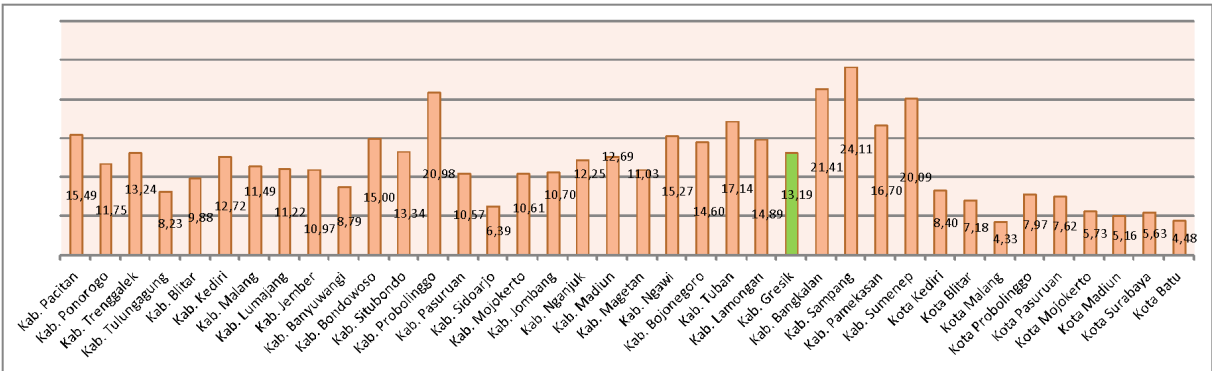
Posisi Relatif Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Kode	Kabupaten/Kota	2016				
		Jum lah	Persentase	P1	P2	Garis
		Penduduk	Penduduk			Kemiskinan
		Miskin (000)	Miskin			(Rp/Kap/bulan)
3501	Kab. Pacitan	85,53	15,49	2,86	0,79	239 339
3502	Kab. Ponorogo	102,06	11,75	1,47	0,28	266 312
3503	Kab. Trenggalek	91,49	13,24	1,74	0,37	275 426
3504	Kab. Tulungagung	84,35	8,23	0,98	0,18	304 518
3505	Kab. Blitar	113,51	9,88	1,53	0,35	272 358
3506	Kab. Kediri	197,43	12,72	1,66	0,37	272 374
3507	Kab. Malang	293,74	11,49	1,57	0,33	282 933
3508	Kab. Lumajang	115,91	11,22	1,62	0,35	258 840
3509	Kab. Jember	265,10	10,97	1,33	0,29	299 823
3510	Kab. Banyuwangi	140,45	8,79	1,41	0,34	311 722
3511	Kab. Bondowoso	114,63	15,00	2,54	0,64	331 975
3512	Kab. Situbondo	89,68	13,34	1,79	0,39	270 406
3513	Kab. Probolinggo	240,47	20,98	3,24	0,80	373 569
3514	Kab. Pasuruan	168,06	10,57	1,56	0,33	306 311
3515	Kab. Sidoarjo	136,79	6,39	0,95	0,23	394 401
3516	Kab. Mojokerto	115,38	10,61	1,53	0,35	330 940
3517	Kab. Jombang	133,32	10,70	1,26	0,25	337 217
3518	Kab. Nganjuk	127,90	12,25	1,72	0,36	341 653
3519	Kab. Madiun	85,97	12,69	2,08	0,56	294 451
3520	Kab. Magetan	69,24	11,03	1,37	0,26	288 246
3521	Kab. Ngawi	126,65	15,27	2,30	0,52	264 706
3522	Kab. Bojonegoro	180,99	14,60	2,41	0,54	295 250
3523	Kab. Tuban	198,35	17,14	3,03	0,82	294 543
3524	Kab. Lamongan	176,92	14,89	2,40	0,66	321 002
3525	Kab. Gresik	167,12	13,19	2,19	0,56	393 447
3526	Kab. Bangkalan	205,71	21,41	4,00	1,13	334 338
3527	Kab. Sampang	227,80	24,11	4,19	1,05	296 268
3528	Kab. Pamekasan	142,32	16,70	2,38	0,54	292 631
3529	Kab. Sumenep	216,14	20,09	2,90	0,75	301 781
3571	Kota Kediri	23,64	8,40	0,96	0,20	400 096
3572	Kota Blitar	9,97	7,18	1,04	0,20	356 147
3573	Kota Malang	37,03	4,33	0,54	0,09	426 527
3574	Kota Probolinggo	18,37	7,97	0,98	0,20	418 480
3575	Kota Pasuruan	14,93	7,62	1,35	0,32	362 224
3576	Kota Mojokerto	7,24	5,73	0,62	0,13	364 021
3577	Kota Madiun	9,05	5,16	0,94	0,26	376 956
3578	Kota Surabaya	161,01	5,63	0,92	0,25	438 283
3579	Kota Batu	9,05	4,48	0,55	0,11	398 401
	JAWA TIMUR	4 703,30	12,05	1,98	0,47	321 761
Sumber : Badan Pusat Statistik						

Pada tahun yang sama, hasil Susenas menunjukkan kurang lebih 167.120 jiwa atau 13,19% jumlah penduduk di Kabupaten Gresik mempunyai pendapatan kurang dari Rp. 393.47,- per kapita per bulan. Dibandingkan dengan kabupaten / kota lain se-Jawa Timur, jumlah ini

cukup besar. Dari 38 Kabupaten / Kota, Kabupaten Gresik menduduki peringkat ke-25 dalam tingkat kemiskinan;

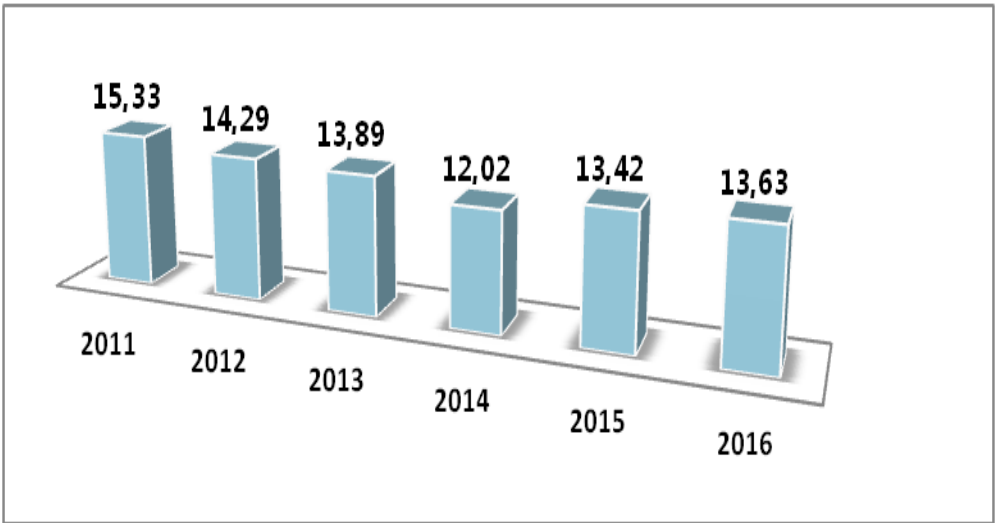
Gambar 4.7
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik
Terhadap Kabupaten / Kota se-Jawa Timur Tahun 2016



Sumber Data: BPS, diolah

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik lebih tinggi dari Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Tingkat Kemiskinan Nasional. Pada Tahun 2016, Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 12,05 % sedang Tingkat Kemiskinan Nasional adalah 11.47%. Pada perkembangan antar waktu, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 4 Tahun, yaitu Tahun 2011 – 2016, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik telah berkurang sebanyak 1,70 poin persen sebagaimana berikut;

Gambar 4.8
Perkembangan Antar Waktu Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik
Terhadap Kabupaten / Kota se-Jawa Timur Tahun 2016



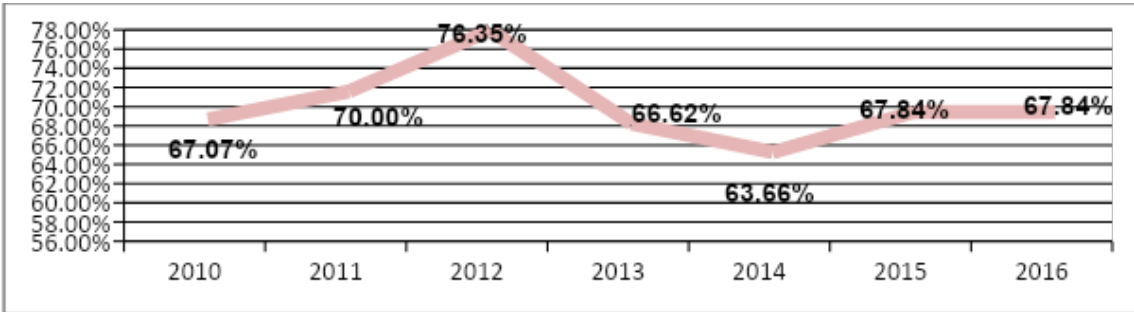
Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 4 tahun

tersebut, gap antara Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik dengan Tingkat Kemiskinan Provinsi dan Nasional semakin menyempit. Hal ini menunjukkan penurunan kemiskinan yang lebih cepat di Kabupaten Gresik dibandingkan Provinsi Jawa Timur & Nasional.

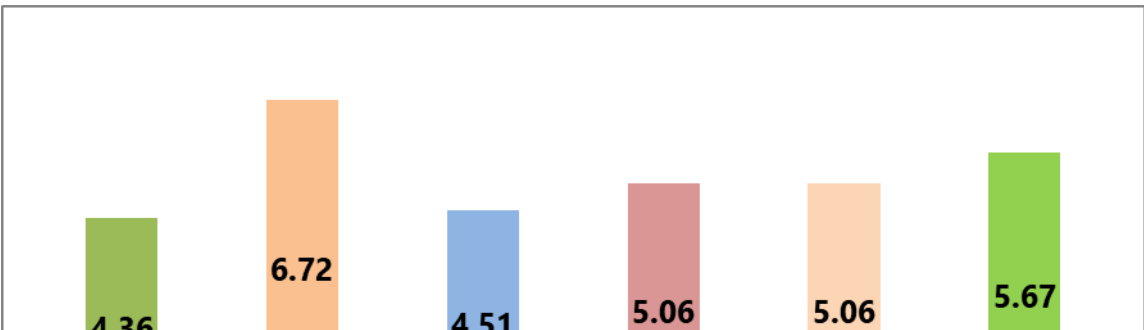
b. Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran Kabupaten Gresik mengalami fluktuasi selama periode 2010-2014, pelbagai asumsi diangkat dalam menjelaskan fenomena ini seperti pertumbuhan investasi yang berdampak sistemik namun cenderung padat modal dibandingkan padat karya sebagaimana ditinjau dalam sektor industri yang mendominasi proporsi PDRB Kabupaten Gresik mencapai 49,3 %. Selain itu, pertumbuhan UMK yang mencapai 181% pada tahun 2015 sebesar Rp2.727.000 dibanding tahun 2009 yang hanya mencapai Rp971.624 menjadin daya tarik terbesar bagi tenaga kerja luar Gresik untuk berkarya di Kota ini yang secara langsung menyisihkan sebagian proporsi partisipasi tenaga kerja asli Gresik.

Gambar 4.9
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gresik
2010-2016



Partisipasi angkatan kerja mencapai *peak* pada tahun 2012 sebesar 76,35% dan terus menurun hingga tahun 2014 hingga mencapai 63,66%. Pada tahun 2016, partisipasi angkatan kerja bergerak stagnan pada 67,84%. Potensi meningkatnya kuantitas usia angkatan kerja dan volatilitas pertumbuhan investasi harus disertai kebijakan lintas sektor yang sensitif dan responsif. Ke”alfa”an peran pemerintah dalam iklim ini akan berdampak sistemik di dunia usaha hingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Indikator paling “eksplisit” dalam menjelaskan isu strategis ini adalah tingkat pengangguran yang seolah tidak terkontrol.



Gambar 4.25
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik
2010-2016

Penanggulangan pengangguran terbuka sebagai bagian penanggulangan kemiskinan daerah adalah upaya untuk memenuhi hak asasi setiap individu dalam memperoleh kehidupan yang sejahtera dengan pekerjaan dan penghasilan yang layak dalam standart tertentu. Fluktuaktif-nya data pengangguran Kabupaten Gresik sebagaimana di atas tidak mendeskripsikan secara nyata peran Pemerintah Daerah dalam me”*mantainance*” penurunan pengangguran atau dalam pengertian lainnya dapat diasumsikan bahwa capaian tingkat pengangguran terbuka cenderung lebih mengarah pada pengaruh mekanisme pasar.

c. Kondusifitas Daerah

Kondusifitas daerah dalam artian terjaganya ketertiban dan ketentraman umum merupakan salah satu sentimen utama yang mempengaruhi perkembangan perekonomian daerah. Kondisi sosial yang rawan konflik secara sistemik akan menghambat perkembangan ekonomi dengan menurunnya tingkat kepercayaan investor untuk menginvestasikan dananya di daerah, tidak lancarnya proses produksi akibat ketidakharmonisan iklim ketenagakerjaan maupun iklim usaha, dan secara umum akan mempengaruhi *branding* Gresik sebagai daerah yang menjunjung tinggi religiusitasnya.

Dalam hal menjaga kondusifitas daerah, pemerintah daerah telah berhasil mentransformasikan nilai-nilai budaya dalam menekan potensi konflik yang muncul sebagaimana terbukti dari semua aksi demonstrasi yang muncul keseluruhnya mampu berjalan damai dengan istighosah dan pendekatan spiritual lainnya. Akan tetapi, masih muncul potensi konflik dengan belum optimalnya forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dari jenjang pemerintah Kabupaten hingga Desa, masih tingginya angka kriminalitas dan munculnya potensi paham radikalisme meskipun sebagian besar pengaruhnya berasal dari luar daerah.

Selain potensi konflik sosial, kondusifitas daerah juga dipengaruhi dengan resiko bencana. Kabupaten Greisk memiliki penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana, yang umumnya merupakan kelompok penduduk yang rentan secara sosial ekonomi, sehingga mempunyai keterbatasan kemampuan dalam menyikapi dan mengatasi bencana alam. Keterbatasan

dalam penanggulangan bencana juga menjadi isu utama mengingat sumber daya tim penanggulangan bencana masih belum mencukupi secara kuantitas untuk menjangkau daerah-daerah rawan bencana serta masih belum optimal secara kualitas mengingat kapasitas tim penanggulangan bencana daerah masih didominasi sukarelawan-sukarelawan yang masih minim pelatihan bencana.

d. Penegakan Hak Asasi Manusia

Apresiasi keberhasilan dan kemajuan berdasarkan data yang terpampang bukanlah tujuan akhir pembangunan. Pembangunan Gresik harus berlandaskan dan beriringan dengan kepedulian pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder untuk mengawal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Kita bersama harus menghadirkan komitmen dari setiap jengkal tanah di pelosok Desa hingga Pulau Bawean yang disambungkan dengan Lautan Jawa. Pembangunan Gresik harus tetap berlanjut untuk rakyat, demi rakyat, dan oleh rakyat melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang peduli akan Hak Asasi Manusia. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HaK Asasi Manusaia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yang mencabut Peraturan Menteri Hukum dan HaK Asasi Manusaia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia berikut kami sampaikan dengan hormat capaian kriteria Peduli hak asasi manusia Kabupaten Gresik berdasarkan data yang termutakhir.



Hak Atas Kesehatan



Hak Atas Pendidikan



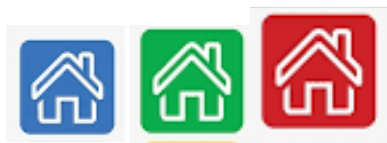
Hak Atas Perempuan dan Anak



Hak Atas Kependudukan



Hak atas Pekerjaan



Hak atas Perumahan



Hak atas Lingkungan yang Berkelanjutan

4.2.4.3 Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

a. Ketersediaan Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, dan Pelayanan Sanitasi Dasar

Ketersediaan Air Minum Layak

Berdasarkan data RISPAM Kabupaten Gresik Tahun 2014 cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Gresik terhadap jumlah total penduduk keseluruhan wilayah administrasi Kabupaten Gresik meningkat menjadi 33%. Hal ini mengindikasikan belum tercapainya Standart Pelayanan Air Minum MDG's pada tahun 2015 sebesar 80 % masyarakat perkotaan dan 60% masyarakat perdesaan; Sedangkan secara jangkauan kewilayahan, ketersediaan air bersih perpipaan PDAM masih mencakup 9 Kecamatan dari 18 Kecamatan Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik.

Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Kab. Gresik 2014, PDAM Kab Gresik dan Dinas PU Kab Gresik yang termuat dalam RAD AMPL 2015-2019, persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum baik dari perpipaan PDAM maupun non perpipaan PDAM sekitar 49,58%. Capaian akses air minum ini dapat dikatakan cukup jauh dari target Pemerintah Pusat tahun 2019 yaitu mencapai 100% air bersih;



Pengentasan Kawasan Kumuh

Pengentasan kawasan kumuh masih belum optimal disebabkan perencanaan makro yang masih belum komprehensif sehingga upaya pengentasan berdasarkan data parsial dengan metodologi penetapan kawasan kumuh tertentu. Penetapan kawasan kumuh di Kabupaten Gresik didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 050/970/HK/437.12/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik. Dalam SK Bupati tersebut terdapat 50 (lima puluh) lokasi kawasan kumuh yang tersebar di seluruh Kabupaten Gresik, namun rencana penanganan permukiman kumuh yang tertuang dalam dokumen Penyusunan Rencana Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan lebih difokuskan pada kawasan perkotaan saja yaitu pada 23 lokasi yang tersebar pada Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar. Kedepannya, perencanaan penanganan permukiman lebih difokuskan pada wilayah pedesaan yang notabene keterjangkauan terhadap pelayanan dasar prasarana-sarana serta fasilitas pelayanan publik yang rendah.

Dari 50 lokasi penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik, baru 8 lokasi yang masuk rencana penanganan dengan luasan sekitar $\pm 15,74$ ha atau 8,19% dari total luasan $\pm 192,18$ ha Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang baru ditangani. Dibutuhkan upaya lebih untuk dapat mencapai target yang telah diamanatkan RPJMN 2019 yaitu 0% kumuh.

Pelayanan Sanitasi Dasar

Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tanki septik (septic tank)/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang digunakan sendiri atau bersama. Capaian Kabupaten Gresik pada Tahun 2013, capaian Kabupaten Gresik meningkat hingga 86.62 %.

Adapun di sektor pengolahan persampahan tingkat layanan sampah masih sangat kecil hanya berkisar 20.91 %, paling besar masyarakat mengelola sampah rumah tangga dengan cara dibakar hingga mencapai 49.43 %, dibuang ke lahan kosong 18.21%, dan masih ada 8,7 % yang dibuang ke sungai, sedangkan pengolahan limbah cair grey water di Kabupaten Gresik sesuai data keluarga dengan kepemilikan sanitasi dasar SPAL menunjukkan jumlah keluarga memiliki SPAL 60,99%, sehingga masih ada 39,01% yang belum memiliki SPAL. SPAL yang dimaksud adalah saluran drainase ke air, dan sisanya dibuang di saluran tidak ke air (halaman rumah). Produksi limbah cair rumah tangga secara keseluruhan mencapai 70% - 80% dari pemakaian air bersih di mana rata-rata penggunaan air 100 l/orang/hari. Berdasarkan data PDAM tahun 2012 kemampuan produksi total 646 l/dt. Tingkat kebocoran 28% sehingga kebutuhan yang dipergunakan oleh masyarakat Kabupaten Gresik sebesar 465,52 l/dt.

b. Konektivitas Daerah

Ditinjau dari segi infrastruktur jalan jalan kabupaten di Kabupaten Gresik yang mencapai 512,16 km didominasi jenis perkerasan aspal yaitu sepanjang 329,29 km. Jalan Kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 261,28 km (51,01%); kondisi sedang 140,18 km (27,37%); kondisi sedang/rusak sepanjang 36,57 km (7,14%); kondisi rusak sepanjang 19,30 km (3,77%); dan rusak berat sepanjang 54,83 km (10,71%). Dengan demikian jalan yang memenuhi kriteria mantap yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang sepanjang 401,46 km atau sebesar 78,39% sedangkan sisanya adalah tidak mantap.

Adapun ditelaah secara kondisi geografis, kabupaten Gresik merupakan wilayah penyangga Surabaya dengan dominasi beban dalam sektor industri, permukiman, perdagangan dan jasa. Aksesibilitas merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang seluruh aktivitas kegiatan ekonomi dan sosial. Pergantian dan integrasi antar moda merupakan hal sangat penting dalam lingkup perhubungan, untuk itu perlu

adanya Integrasi transportasi melalui terminal kargo dan pemfungsian kembali jalur kereta api di Gresik, untuk menunjang sektor angkutan barang ke pelabuhan (internasional kalimireng, kali lamong, perak) dan kawasan-kawasan industri, serta integrasi terminal orang (bunder) dengan stasiun kereta api di Duduksampean.

Selain itu, diperlukan evaluasi dan penataan ulang jalur (trayek) angkutan umum pedesaan dan perkotaan dilihat dari karakteristik skala pelayanan serta pergerakan diseluruh wilayah perbatasan hingga perkotaan. Serta peningkatan infrastruktur Jalan (Jalan Kabupaten, Jalan Nasional, Jalan Tol dan Kebutuhan Flyover), lapangan terbang (bandara) dan pelabuhan harus diikuti dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Untuk itu perlu Pusat Informasi dan Pengendalian Lalu Lintas yang dikelola secara online, agar permasalahan lalu-lintas yang terjadi bisa diatasi lebih sangat cepat saat itu juga.

Di sektor perhubungan laut, peningkatan sarana dan pelayanan moda angkutan perhubungan laut, seperti penambahan armada transportasi kapal laut dari Gresik ke Pulau Bawean yang mampu berlayar ketika ombak/gelombang besar. Sedangkan untuk sektor perhubungan udara dalam hal ini adalah lapangan terbang bawean adalah melalui pengembangan dan peningkatan fasilitas serta tata kelola di Lapter Bawean, agar segera beroperasi dengan baik.

c. Permukiman Inklusif

Selain upaya pengentasan kawasan kumuh yang mencakup permukiman kumuh, ketersediaan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat secara inklusif adalah isu strategis utama yang membutuhkan penguatan lintas sektor. Dalam hal infrastruktur drainase, Kondisi sistem drainase permukiman di wilayah-wilayah kecamatan atau desa di Kabupaten Gresik, selain di wilayah kota masih banyak terdapat daerah terbuka yang mampu berfungsi sebagai daerah resapan air sehingga potensi banjir dan genangan kecil. Sedangkan di wilayah perkotaan Gresik, khususnya di wilayah Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar walaupun telah memiliki sistem drainase yang terbangun cukup lengkap dan merata di seluruh wilayah kota, tetap saja banjir dan genangan masih sering terjadi di beberapa lokasi terutama apabila terjadi hujan yang cukup lebat. Keadaan ini disebabkan oleh saluran-saluran tersier dan sekunder yang dimensinya terlalu kecil, tersumbat sampah, dan bozem-bozem yang tidak

lagi berfungsi akibat pendangkalan dan pengurukan menjadi kawasan permukiman.

Dalam hal ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), masih belum optimalnya pengawasan terutama dalam implementasi ketentuan penyediaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) telah diatur komposisi penyediaan lahannya dalam Perempera Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman sehingga pembangunan baik perumahan ataupun rumah atau bangunan pribadi dalam proses perijinannya sudah sesuai dengan IMB namun dalam pelaksanaan pembangunan maupun dengan berjalannya waktu ternyata bangunan tidak sesuai atau terjadi perubahan dengan yang tercantum dalam IMB. Sedangkan dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah, pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan dengan cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah. Namun, kondisi di lapangan, penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman seringkali tidak sesuai antara yang akan diserahkan dengan ketentuan yang dipersyaratkan baik dari persyaratan umum, persyaratan teknis maupun persyaratan administrasi, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Adapun estimasi kebutuhan rumah, berdasarkan hasil Analisis dan Kajian RP3KP Kabupaten Gresik, diproyeksikan dalam dua puluh tahun kedepan (tahun 2035), Kabupaten Gresik mengalami backlog perumahan sebesar 1,700,708 unit rumah dengan asumsi ketersediaan rumah dengan type landed housing (rumah horisontal).

d. Pengendalian Banjir

Bencana Banjir di Kabupaten Gresik yang disebabkan oleh Bengawan Solo terdapat 5 (Lima) Kecamatan terdampak banjir meliputi Kecamatan Dukun, Bungan, Sidayu, ujungpangkah dan Manyar. Pengendalian Bencana banjir akibat Bengawan Solo telah diminimalisir dengan ketersediaan tanggul dan didukung dengan terbangunnya Bandung Gerak Sembayat. Bencana banjir akibat luapan Kali Lamong berpengaruh terhadap 5 (Lima)

kecamatan terdampak meliputi Benjeng, Cerme, Balongpanggang, Menganti, dan sebagian kecil Kecamatan Kebomas.. Pengendalian banjir akibat luapan kali lamong terutama pada Kecamatan Benjeng, Cerme, dan Balongpanggang menjadi prioritas dalam pembangunan pertanian dalam rangka mendukung ketahanan dan kerawanan pangan. Adapun pengendalian banjir masih belum optimal karena belum tersedianya tanggul. Pembangunan tanggul terhambat akibat masih belum selesainya pembebasan lahan terhadap Daerah Aliran Sungai.

Bencana banjir selanjutnya adalah akibat luapan Kali Surabaya pada Daerah Driyorejo. Pengendalian banjir pada segmen ini masih belum optimal disebabkan tanggul yang belum tersedia. Wilayah terdampak banjir adalah daerah perkotaan yang menjadi salah satu aglomerasi industri sehingga diperlukan penguatan lintas sektor dalam pengendaliannya. Sedangkan Bbanjir Perkotaan pada Kecamatan Kebomas dan Gresik telah dikendalikan dengan fasilitas Rumah Pompa didukung sistem drainase melalui Bozem. Hal ini ditunjang dengan dirumuskannya masterplan drainase yang telah mencakup wilayah perkotaan.. Adapun Di Pulau Bawean telah terdapat sistem drainase permukiman, terutama permukiman-permukiman yang terdapat di tepi jalan raya. Kondisi system drainase masih belum optimal dan cenderung berpotensi tertimbun longsor tanah dari lereng-lereng bukit atau kebun disekitarnya.

e. Lingkungan Hidup

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten dimulai dengan melakukan perubahan prosedur perizinan kegiatan dan/atau usaha dengan memprioritaskan lingkungan hidup sebelum investasi. Seperti yang telah disampaikan didalam peraturan perundangan bidang lingkungan hidup bahwa suatu kegiatan yang akan dilakukan harus sesuai dengan tata ruang maka pertimbangan yang utama adalah eksistensi tata ruang yang dapat memihak kelestarian lingkungan hidup. Data yang dapat dihimpun sampai saat ini adalah pada akhir tahun 2014, jumlah kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Gresik kegiatan dari segmen terendah sampai dengan kegiatan skala nasional dijelaskan bahwa terdapat 199 kegiatan usaha yang Jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara dan 60 usaha Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.

Dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan hidup dalam agenda pembangunan jangka menengah dibutuhkan rumusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS memuat kajian antara lain kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan/atau tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (Pasal 16 UU 32/2009) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme (Pasal 15 ayat 3 UU 32/2009):

- a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup wilayah;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

f. Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik

Agenda pembangunan wilayah Gresik sebagaimana tertuang dalam rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten yang terbagi atas;

- a. RDTR BWP Duduksampeyan dan Cerme
 - b. RDTR BWP Gresik Perkotaan (Kecamatan Gresik dan Kebomas)
 - c. RDTR BWP Gresik Selatan (Kecamatan Driyorejo, Menganti, dan Kedamean)
 - d. RDTR BWP Gresik Utara (Kecamatan Panceng, Sidayu, dan Ujungpangkah)
 - e. RDTR BWP Manyar dan Bungah
- rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Sedangkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan terbagi menjadi Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan. Adapun agenda pokok pembangunan tata ruang wilayah Kabupaten Gresik sebagaimana berikut;

1. Pembangunan Pelabuhan Kali Mireng II yang berskala internasional di Kecamatan Manyar seluas kurang lebih 5.000 ha. Yang diperkirakan

akan mempengaruhi struktur ruang yang signifikan di Kabupaten Gresik.

2. Implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan ruang laut, peisir dan pulau-pulau kecil di kelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pengelolaan ruang laut sampai 12 mil dikelola oleh pemerintah provinsi sedangkan pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan, pesisir kabupaten Gresik banyak demand terhadap pelabuhan terutama pada pesisir di ujungpangkah – Bunga.h
3. Perencanaan Jalan Tol Krian – Legundi - Bunder.
4. Inisiasipembangunan 320 titik menara telekomukasi (tower) di Kabupaten Gresik hingga tahun 2015. Sedangkan, terdapat beberapa menara yang penempatannya berada di luar rencana 208 titik zona tower yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Gresik .
5. Rencana PLU di Ujungpangkah yang dapat mendukung kegiatan di Pelabuhan Kalimireng II.
6. Pembebasan lahan di Kecamatan Wringinanom untuk pembangunan TPA Regional belum terlaksana karena tanah yang akan digunakan merupakan tanah warga, sedangkan warga menolak untuk pembangunan TPA Regional. Rencana penempatan TPA Regional tersebut dialihkan ke Desa Banyu Tengah Kecamatan Panceng.
7. Pemangunan dan pemanfaatan Bendung Gerak Sembayat sebagai salah satu sumber air baku.
8. Intensitas perkembangan jumlah perumahan dan industri yang pesat di Kabupaten Gresik.
9. Pemetaan jenis rawan bencana lain di Kabupaten Gresik yaitu rawan bencana kekeringan dan rawan bencana teknologi industri.
10. Alih fungsi perubahan lahan pertanian dan tambak produktif menjadi kawasan terbangun seperti industri dan permukiman yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik.
11. Inisiasi Mou Bupati dan Walikota seluruh Jawa Timur terkait pengelolaan aliran DAS Brantas dari Mojokerto – Surabaya.
12. Rencana pembangunan Central Business District yang berada di Gresik Kota Baru.

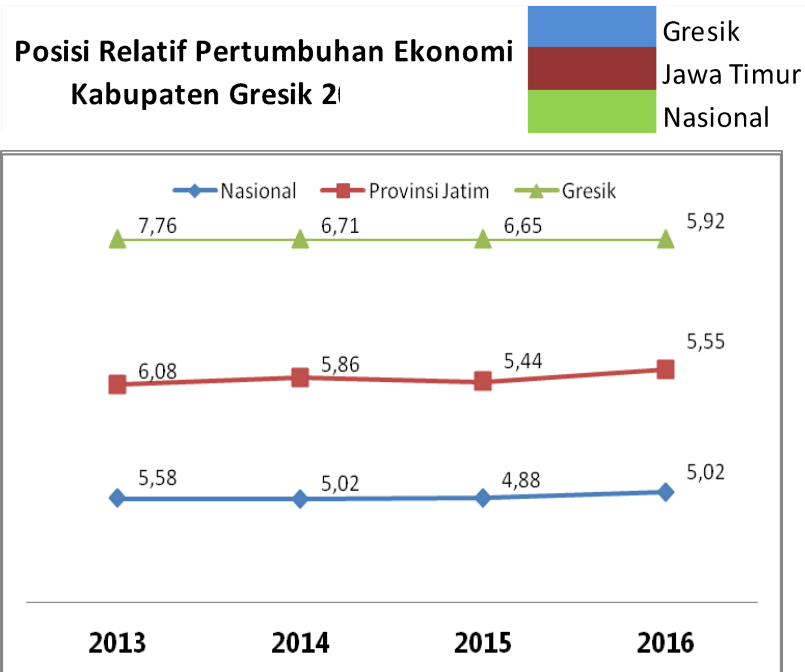
13. Terdapat asset-aset Tanah Negara terkait Pertahanan dan Keamanan Negara di Desa Kepuhklagen Kecamatan Wringinanom dan Desa Wedoroanom Kecamatan Driyorejo.
14. Rencana Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan nasional.
15. Penurunan status Kawasan Cagar Alam di wilayah Bawean menjadi Taman Wisata Alam.
16. Perwujudan keterpaduan moda kendaraan umum (Angkutan Umum, Kendaraan Pribadi, dll) menuju ke angkutan massal (Kereta Api) dengan menggunakan sistem Transit Oriented Development (TOD) di Kecamatan Duduksampeyan, melalui pemindahan terminal Bunder yaitu terminal kelas B dari Kecamatan Kebomas ke Kecamatan Duduksampeyan yang lokasinya berdekatan dengan stasiun Kereta Api.
17. Perwujudan sistem prasarana pada jaringan transportasi darat berupa pengembangan Jalan Lingkar Barat Gresik.
18. Jaringan gas ke arah utara menjangkau Kecamatan Bungah dan Pulau Bawean di Kabupaten Gresik.

4.2.4.4 Kemandirian Ekonomi Daerah dan Ketahanan Pangan

a. Kemandirian Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik cenderung stabil dengan capaian yang selalu di atas provinsi dan nasional sejak tahun 2011 hingga 2016. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik cenderung didominasi sektor Industri yang mendominasi PDRB dan pertanian yang menjadi penyumbang kedua terbesar bagi PDRB. Pertumbuhan ini ditunjang dengan kapasitas PDRB yang mencapai Rp 84, 9 juta dengan progress yang selalu meningkat secara

Gambar 4.26

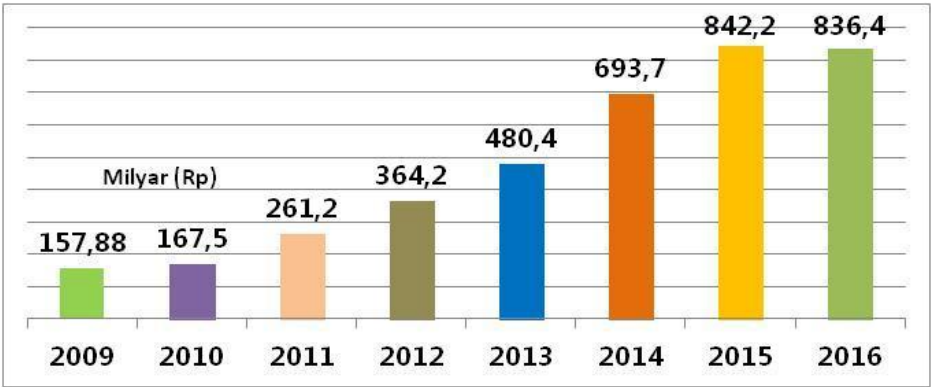


konsisten. Sedangkan gini ratio memiliki ketimpangan rendah mencapai 0,31. Berdasarkan telaah kondisi perekonomian Gresik yang tumbuh dnegan baik maka dibutuhkan pembangunan yang tematik berbasis pendekatan spasial sebagai upaya mengurangi disparitas atau ketimpangan wilayah secara ekonomi dengan mengoptimalkan keberagaman potensi merupakan suatu langkah untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara inklusif dan merata.

Salah satu pilar yang menunjang agar daerah mampu mengoptimalkan pemerataan pembangunannnya dibutuhkan kemandirian ekonomi sebagai penyangga perekonomian ketika arus pasar global yang cenderung mengalami ketidakpastian dan tantangan masyarakat ekonomi ASEAN yang telah bergulir pada tahun 2016. Ditinjau dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 sebagai *peak performance* yang mencapai Rp.842,196,736,425 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 434% jika dibandingkan dengan Tahun 2009 yang hanya mencapai Rp157,633,849,936.

Gambar 4.27

Histori Perkembangan PAD Kabupaten Gresik s/d Tahun 2016

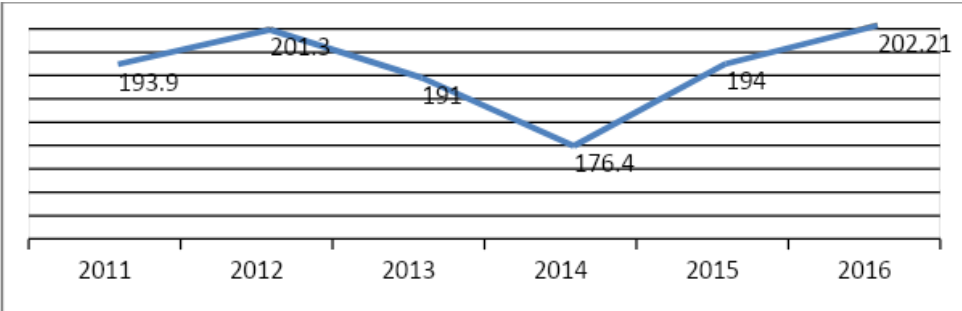


Sejalan dengan prinsip trisakti pilar berdikari secara ekonomi maka kemandirian ekonomi daerah adalah suatu sasaran utama yang strategis untuk memberikan dampak sistemik dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan pelbagai stimulus di layanan investasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, optimalisasi pembangunan infraktuktur, dan pelbagai kebijakan lainnya yang mendukung secara sistemik seperti peningkatan kualitas layanan birokrasi, kondusifitas daerah, maupun mendorong pertumbuhan asli desa.

b. Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan utama di daerah dalam rangka menuju kemandirian dan kedaulatan pangan nasional merupakan salah satu agenda utama pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok penduduk secara langsung dan menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan secara sistemik. Ditinjau dari ketersediaan pangan utama dapat dilihat pada tahun 2012 ketersediaan pangan sebesar 201.3 kg/kapita/Tahun. Namun pada tahun 2013 hingga tahun 2014 mengalami penurunan ketersediaan pangan hingga menjadi 176.36 kg/kapita/Tahun. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan mencapai 202.21 kg/kapita/Tahun.

Gambar 4.28
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Gresik
Tahun 2011 – 2016 (kg/kapita/Tahun)



Penurunan ketersediaan pangan utama bukanlah indikator tunggal yang mempengaruhi pencapaian kemandirian pangan daerah melainkan masih terdapat kerawanan pangan, diversifikasi pangan, hingga luas areal produksi tanaman pangan. Ditelaah dari sisi kerawanan pangan, Kabupaten Gresik belum memiliki sistem mitigasi kerawanan pangan yang optimal tanpa didukung ketersediaan peta-peta kerawanan pangan meskipun infrstruktur penunjang produksi pertanian telah dibangun dan dikembangkan selama tahun 2011-2016. Penguasaan teknologi budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim masih belum terimplementasikan sedangkan budaya pertanian yang konvensional masih mendominasi. Selain itu kesejahteraan petani dan buruh tani yang masih tertinggal akibat tidak adanya standard dan nilai tambah yang mengangkat taraf hidup petani maupun buruh tani meskipun pertanian memberikan sumbangsih terbesar kedua di PDRB Kabupaten Gresik.

Pangan Harapan merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi kelompok pangan utama (baik secara

absolute maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan). Dalam konteks diversifikasi konsumsi pangan utama, ditunjukkan dengan tingkat konsumsi kalori yang pada tahun 2014 mencapai 91,32 kg/kapita/tahun. Capaian ini terus menurun jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi kalori yang pada tahun 2012 yang mencapai 95,40 91,32 kg/kapita/tahun.

Adapun dalam hal plotting area atau lahan pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud ditetapkan seluas 24.716 Ha (dua puluh empat ribu tujuh ratus enam belas hektar) dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gresik, yang luasannya didasarkan pada studi penentuan luasan dan peta deliniasinya. Sedangkan, Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan seluas 3.005 Ha (tiga ribu lima hektar) dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gresik, yang luasannya didasarkan pada studi penentuan luasan dan Peta deliniasinya. Penetapan LP2B tersebut bertujuan untuk bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

4.2.4.5 Peningkatan Pelayanan Publik dan Penguatan Basis Data Pembangunan

a. Peningkatan Pelayanan Publik

Keterjaminan kualitas pelayanan publik di pelbagai urusan pemerintahan daerah merupakan kewajiban utama pemerintahan daerah selain fungsi *ad interim* pembangunan. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilaksanakan reformasi birokrasi baik dari tatanan organisasi, kualitas sumber daya aparatur, hingga standar operasional procedural yang mengacu pada penerapan standar pelayanan minimal. Pelbagai kebijakan tersebut masih belum optimal ketika masih belum dilaksanakan pengukuran secara menyeluruh terhadap layanan yang diselenggarakan oleh setiap SKPD dengan cara tersederhana yaitu melakukan survey kepuasan masyarakat meskipun sangat cenderung akan unsur subyektifitas.

Kepuasan masyarakat dalam pelayanan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Gresik masih belum diukur secara komprhensif

mengingat tidak semua SKPD melaksanakan survey kepuasan masyarakat sehingga proses monitoring dan evaluasi sangat sulit untuk diterapkan dalam meningkatkan atau sekedar membenahi kualitas pelayanan publik. Berdasarkan telaah di atas, hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah daerah merupakan isu strategis utama dalam peningkatan pelayanan publik.

b. Penguatan Basis Data Pembangunan

Basis data pembangunan baik merupakan kebutuhan essensial dalam pelaksanaan pembangunan daerah maupun dalam menudukung pelayanan publik dengan keterbukaan dan akuntabilitas informasinya. Berdasarkan report isian satuan informasi pembangunan daerah (SIPD) diketahui bahwa cakupan pengisian data pembangunan daerah pada tahun 2016 telah mencapai 100%. Kondisi ini merupakan perhatian utama mengingat kebutuhan data pembangunan yang sangat penting baik data report based berdasarkan laporan SKPD maupun survey based yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik serta data-data pembangunan yang meunjang pengukuran capaian kinerja agenda pembangunan jangka menengah maupun untuk menilai capaian Kabupaten Gresik dalam mengejar Sustainable Development Goal's.

Penguatan basis data pembangunan merupakan suatu langkah strategis yang akan berdampak sistemik terhadap akurasi dan atribusi perencanaan hingga kelancaran proses monitoring dan evaluasi dan bahkan menjadi landasan utama dalam pertimbangan perumusan kebijakan.

c. Fokus Intermediary Kecamatan

Selama ini urusan pemerintahan daerah yang diampu oleh Kecamatan masih terlau komplikatif dengan anggaran yang minim, sumber daya manusia yang kurang secara kuantitas, dihadapkan dengan rentang kendali yang begitu luas serta tanggungjawab yang sangat strategis sebagai intermediary atau penghubung desa dan pemerintah Kabupaten. Dalam agenda pembangunan teknokratis ini, fokus kecamatan ditetapkan sebagai berikut;

1. melaksanakan pelayanan publik dan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah;
2. memfasilitasi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan;
dan

3. memfasilitasi penguatan basis data pembangunan dengan domain data pada kecamatan dan desa.

4.2.4.6 Akselerasi pembangunan melalui Sistem Inovasi Daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis *Smart City*

Arahan Penguatan sistem inovasi nasional bagi daerah sebagaimana yang tercantum dalam amanat rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) yaitu agar pemerintah daerah mampu mentransformasikan perekonomian daerah dari yang berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menuju perekonomian yang berbasis keunggulan kompetitif. Upaya transformasi ini hanya dapat dilakukan dengan prinsip dasar mengelola peningkatan produksi dan produktivitas daerah melalui sistem inovasi daerah (SIDa).

Arah kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di Kabupaten Gresik ditetapkan dan difokuskan pada aspek penguatan regulasi dan pembiayaan untuk pengembangan iptek dan inovasi, penyediaan infrastruktur dan sarana kreatifitas dan inovasi, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) secara kuantitas dan kualitas di bidang iptekin, dan keberlanjutan dan pemanfaatan potensi sumberdaya unggulan daerah.

Arah kebijakan penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) Kabupaten Gresik diarahkan untuk mempercepat keberhasilan pembangunan terutama pada sektor pertanian, industri pengolahan, perikanan. Sebagaimana dalam struktur ekonomi pada PDRB Kabupaten Gresik ketiga sektor tersebut menempati urutan teratas dalam memberikan sumbangsih besar terhadap perekonomian Kabupaten Gresik. Pengembangan pada ketiga sektor tersebut kemudian dipaduserasikan dengan pengembangan industri pariwisata agar ekonomi daerah semakin cepat meningkat.

Pelbagai tantangan multidimensional berkelindan di setiap aspek kehidupan bernegara menjadi tantangan untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur sebagaimana termuat dalam Perpres Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Perjalanan sejarah untuk mewujudkan indoensia yang dicita-citakantelah melalui pelbagai lembaran panjang dimulai dari zaman kolonialisasi, perjuangan kemerdekaan yang kedaerahan, kesatuan perjuangan, pasca kemederkaan, reformasi politik

dan tata kelola pemerintahan yang diiringi revolusi industri, hingga masa pasca reformasi yang memasuki era digitalisasi. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, penetrasi perangkat digital di Indonesia berkembang pesat sebagaimana tercatat bahwa 88,1 Juta penduduk Indonesia telah mengakses internet atau mencapai 34%. Dari pengguna internet tersebut, 64,1 Juta penduduk mengakses melalui mobile phone¹. Jumlah tersebut akan semakin bertambah seiring dengan meningkatkan kemandirian infrastruktur jaringan internet di seluruh wilayah didukung antusiasme industri telekomunikasi dan digital untuk melakukan pengembangan usahanya.

Penetrasi jaringan internet yang semakin meluas memunculkan era baru digital dengan grand scenario berupa tren Internet of Things (IoT). Melalui skenario IoT, pemanfaatan jaringan internet akan dieksploitasi secara komprehensif melalui pengembangan suatu obyek, sensor, dan perangkat meskipun bukan komputer untuk beraktivitas dengan meminimalkan interaksi manusia. Perkembangan digital yang mendorong IoT diantaranya adalah data dan informasi yang saling terkoneksi (ubiquitous connectivity), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (computing economics), teknologi miniature (miniaturization), big data analytics dan berkembangnya komputasi awan (cloud computing).²

Inisiasi teknologi informasi yang dalam kehidupan manusia telah mendorong entitas Negara untuk membetuk peradaban baru yang mengintegrasikan digitalisasi baru sebagai suatu modernitas untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cerdas, pemberdayaan masyarakat yang lebih menyentuh ke setiap pintu rumah hingga ke pelosok jembatan, dan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mengedepankan kemajuan ekonomi namun juga menghadirkan kepedulian lingkungan hidup dan inklusifitas perekonomian berbasis kerakyatan. Perbaikan di setiap fungsi adalah guratan tegas untuk mewujudkan Indonesia Smart Nation. Negara cerdas yang dibentuk dengan membangun kota-kotanya untuk menjadi cerdas pula. Membangun smart city adalah mewujudkan ekosistem daerah yang lebih layak tinggal dengan kultur daerah yang kreatif, memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan serta dengan ciri khas memanfaatkan teknologi. ³ Ciri khas pemanfaatan teknologi

¹ Ahmadjayadi, Cahyana.2016. Melesat atau Kandas? New Indonesia. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

² Ibid.

³ Ibid.

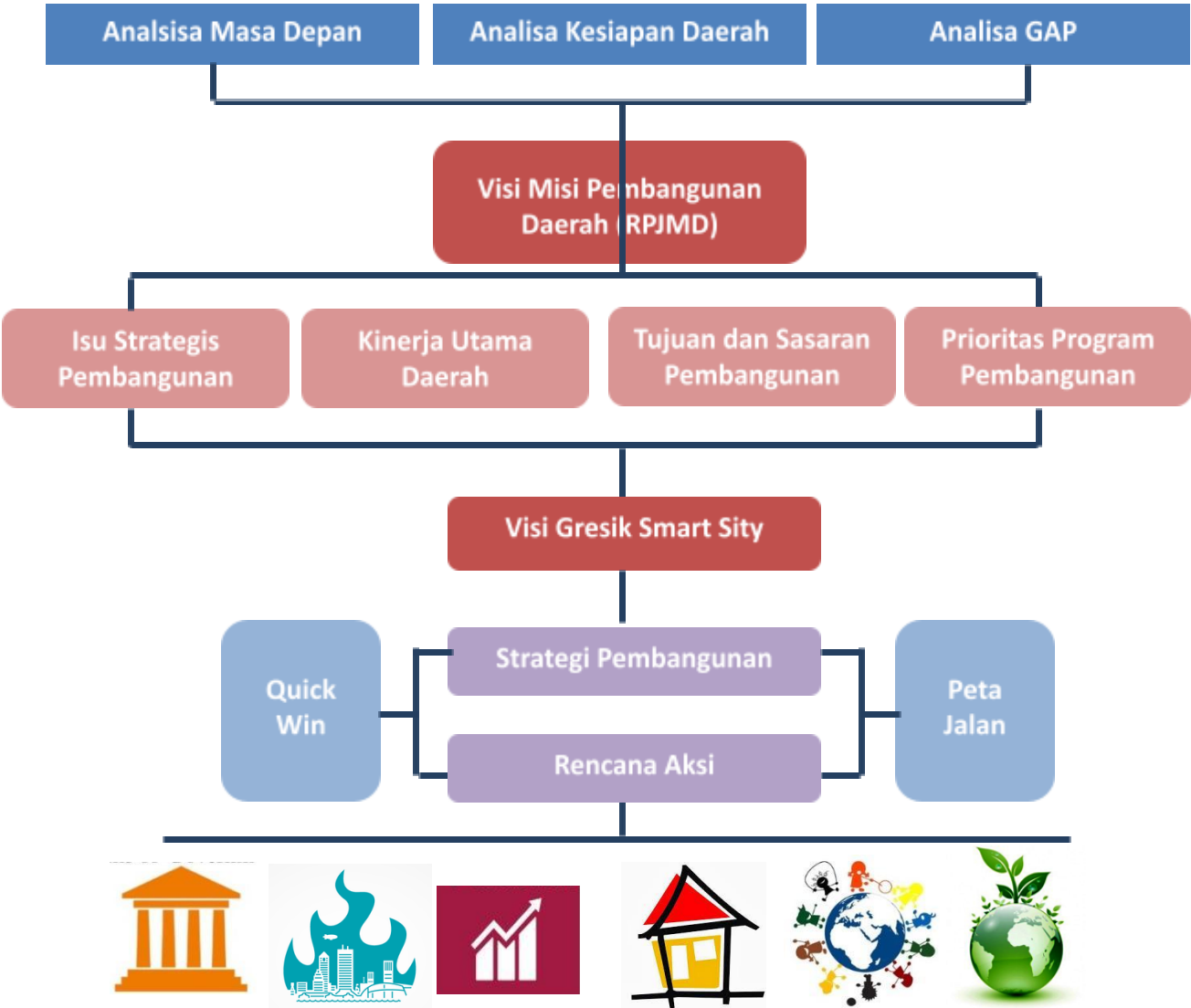
informasi menjadi bagian penting dalam perbaikan fungsi-fungsi pemerintahan untuk mewujudkan Kota yang Cerdas. Sebagaimana Cities in Motion Index⁴ yang dirilis oleh IESE pada tahun 2016 berbasis penilaian terhadap 77 indikator yang mencakup 10 dimensi dalam tata kelola perkotaan meliputi ekonomi, teknologi, sumber daya manusia, kohesi sosial, jangkauan internasional, lingkungan, mobilitas dan transportasi, perencanaan perkotaan, manajemen publik serta tata kelola pemerintahan. Indeks ini menempatkan Indonesia (Jakarta) di peringkat 170 jauh tertinggal dari Singapura (22), Bangkok (84), dan Kuala Lumpur (88).

Pelbagai dimensi smart city menjadi prioritas perubahan meliputi tata kelola birokrasi (smart governance), pemasaran daerah (smart branding), perekonomian (smart economy), ekosistem permukiman penduduk (smart living), lingkungan masyarakat (smart society), dan pemeliharaan lingkungan (smart environment). Dalam rangka mengembangkan smart city di Indonesia, Pada tahun 2017, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kementerian lain untuk menginisiasi Gerakan menuju 100 smart City atau mendorong terciptanya 100 kota cerdas pada tahun 2019.

Pada tahun 2017, Kabupaten Gresik terpilih dari salah satu diantara 25 Kota untuk menjadi Pilot Project Smart City. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan smart nation yang dirangkai dari smart cities maka Kabupaten Gresik melakukan akselerasi pembangunan dengan konsep pemanfaatan teknologi informasi untuk mengimplementasikan smart city melalui perencanaan dan pelaksanaan “Quick win” Gresik Smart City, dan pelaksanaan roadmap atau peta jalan pembangunan Gresik Smart City dalam 5 hingga 10 Tahun. Berlandaskan kesepahaman visi pembangunan nasional dan daerah didukung keteguhan komitmen maka seluruh “Quick win” maupun peta jalan pembangunan Gresik Smart City dituangkan dalam Masterplan Gresik Smart City sebagai bagian perencanaan operasional yang menjadi penjabaran dari rencana strategis melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2017 dan menjadi landasan harmonisasi prioritas perencanaan pembangunan di sektor lain.

⁴ Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo RI. 2017 Panduan penyusunan Masterplan Smart City.

Kerangka pikir Gresik Smart City terdiri dari merupakan kesinambungan analisa masa dpean, kesiapan daerah, dan gap yang dirangkai secara komprehensif untuk menunjukkan Smart City Readiness. Sebagian dari arsitektur perencanaan pembangunan maka konsep smart city menjadi bagian dari perencanaan strategis RPJMD yang memuat isu-isu strategis, kinerja utama, tujuan, sasaran, dan prioritas program pembangunan. Penelaahan dari arsisitektur perencanaan strategis menjadi rumusan visi Gresik smart city yang kemudian dijabarkan dalam strategi dan rencana aksi di 6 (enam) dimensi dimana dimuat program unggulan (quick wins) dan pembagian prioritas pelaksanaan strategi dan rencana aksi pada peta jalan.



Gambar 4.29

Kerangka Pikir Gresik Smart City

4.2.4.7 Pengarusutamaan Gender

Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 4 tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, akan tetapi sebagian besar SKPD masih belum mengetahui keberadaan perda ini. Dengan diberlakukannya peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 4 tahun 2012 tentang pengarusutamaan gender, tentu mengikat SKPD-SKPD di Kabupaten Gresik untuk mengimplementasikannya dalam setiap perencanaan dan penganggaran program/kegiatan. Berdasarkan hasil isian kuesioner tentang kajian kebijakan dalam pelaksanaan PuG dan PPRG, menghasilkan rata-rata capaian di tingkat Kabupaten Gresik sebesar 54,34%. Dengan hasil capaian sebesar itu, Pemerintah Kabupaten Gresik secara umum berada pada kondisi “netral gender” dalam hal perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;

Adapun tujuan pembangunan millenium (millenium development goals/ MDG's) yang berakhir pada tahun 2015 ini, mencantumkan permasalahan gender pada salah tujuannya yaitu tujuan/goals ke-3: “Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015”. Kabupaten Gresik dalam pencapaian seluruh indikator pada goals ini (terdapat 10 indikator) menunjukkan prestasi sebesar 63,33%. Dengan perincian status capaian: 4 indikator (40%) menunjukkan status capaian “telah mencapai target”; 3 indikator (30%) menunjukkan status “menuju arah pencapaian target”; dan 2 indikator (20%) dengan status capaian “masih jauh dari arah pencapaian target”; sedangkan 1 indikator belum diketahui status capaiannya. Untuk SDG's tujuan pengarusutamaan Gender adalah Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.

Implementasi PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) selain membutuhkan dukungan perundang-undangan, juga kesiapan khususnya pemahaman para aparatur pemerintah. Berdasarkan hasil kuesioner tentang pemahaman aparatur pemerintah Kabupaten Gresik, menunjukkan hasil bahwa hanya 48,54% pejabat eselon III dan IV yang memiliki pemahaman tentang: konsep gender; gender equality; pengarusutamaan gender/PuG; gender focal point (GFP); dan perencanaan penganggaran respon-sif gender (PPRG). Bahkan bila dilihat khusus

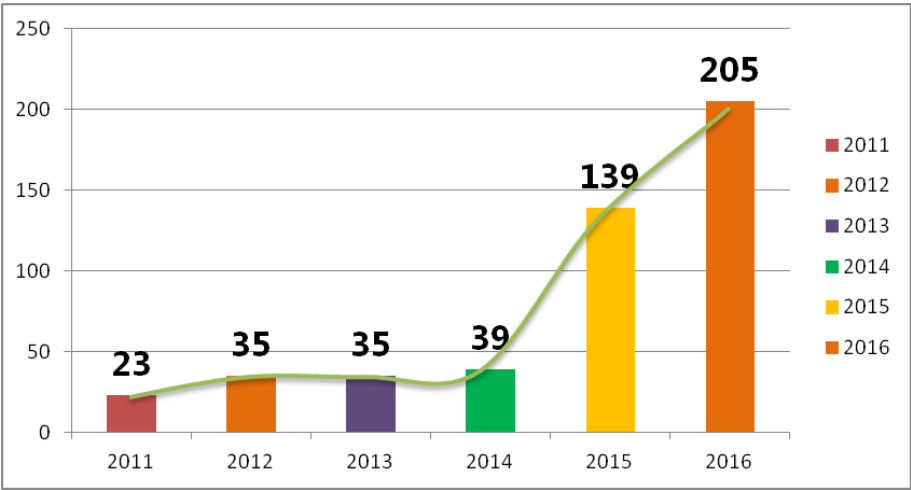
terhadap pemahaman PPRG, hanya terdapat sekitar 36,59% saja. Hal ini menjadi pertimbangan kebijakan untuk segera menyelenggarakan bimbingan teknis, mengingat Kabupaten Gresik telah mengesahkan perda tentang pengarusutamaan gender.

4.2.4.8 Kemandirian Desa

Pelaksanaan undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintahan desa, peningkatan kualitas program pembangunan desa, penguatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Implementasi UU Desa tersebut berdampak pada pelbagai faktor sebagaimana peningkatan alokasi anggaran ke desa yang terbagi menjadi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa. Peningkatan signifikan alokasi anggaran ke desa tentu saja menuntut perumusan rencana pembangunan desa yang komprehensif baik dalam tataran perencanaan jangka menengah melalui RPJMDesa maupun rencana tahunan atau RKPDesa.

Perencanaan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan haruslah akomodatif terhadap kebutuhan dan permasalahan obyektif yang dihadapi masyarakat desa dengan mengedepankan pengkajian keadaan desa serta muyawarah desa.



Gambar 4.30 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu komponen pendapatan Desa yang telah dikelola terlebih dahulu oleh pemerintah desa sebelum Dana Desa maupun bagi hasil merupakan sumber daya keuangan utama bagi mayoritas desa di Kabupaten Gresik yang tidak memiliki pendapatan

asli Desa untuk melaksanakan pembangunan dan membiayai penyelenggaraan operasional pemerintahannya.

Selain peningkatan alokasi anggaran desa, implementasi UU desa juga berdampak pada kebutuhan akan akselerasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan asumber daya apatur pemerintahan Desa yang harus secara optimal menyelenggarakan pembangunan desa di 4 (empat) bidang utama yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan Desa. Dalam rangka penguatan ekonomi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, maka otoritas desa didukung partisipasi masyarakat harus mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber perekonomian desa, optimalisasi kerja sama desa maupun pengelolaan badan usaha milik desa, ketersediaan data-data potensi desa, dan ketertiban administrasi pengelolaan arsip.

4.2.4.9 Pengarustamaan pembangunan berkelanjutan;

Sebagaimana diketahui bahwa Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDG's) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut. Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian

anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

Meskipun Indonesia merupakan salah satu premakarsa pelaksanaan tujuan pembangunan millennium dengan komitmen yang sangat kuat namun implementasi untuk melegitimasi hasil kesepakatan global kedalam prioritas pembangunan nasional baru dilaksanakan pada tahun 2010 atau 1(satu) dekade setelahnya. Legitimasi tersebut hanya dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan Presiden Republik Indonesia, untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, dan untuk kesinambungan serta penajaman prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Melalui instruksi ini pemerintah dimaksudkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan sebagaimana termuat dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program:

1. Pro rakyat;
2. Keadilan untuk semua (justice for all);
3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals - MDG's).

Pada pencapaiannya, Indonesia gagal dalam pencapaian program Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals - MDG's) Karen tidak berhasil (off the track) di tiga target penting dalam pembangunan diantaranya menekan angka kematian ibu saat oersalinan, menurunkan penyebaran virus HIV/AIDS, dan meningkatkan akses air bersih dan sanitasi dasar.

Pasca MDG's dilaksanakan agenda pembangunan multidimensi 2030 yang disebutustainable Development Goalsatau SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). SDG's merupakan rencana aksi global untuk mewujudkan kemakmuran bersama, perdamaian, dan penghargaan pada kebebasan. 193 kepala Negara dan pemerintahan, termasuk Indonesia mendatangi agenda ini dalam Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlansung di New York, 25 September 2015 yang lalu. Program PBB berskala global ini merupakan kelanjutan dari Millennium

Development Goals - MDG's. Program tersebut diluncurkan melihat kemiskinan dengan berbagai dimensinya yang ekstrem masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan ekstrem adalah tantangan global yang paling besar untuk diselesaikan bersama.

Dengan prinsip no one leave behind, Agenda 2030 mensyaratkan semua lapisan masyarakat tidak ada yang ditinggalkan dalam proses pembangunan yang inklusif dan partisipatif. Dengan 17 tujuan, 169 sasaran, dan lebih dari 234 indikator diharapkan memstimulasi aksi setiap Negara sepanjang lima belas tahun ke depan dalam pembangunan di setiap dimensi yang penting dalam kehidupan manusia dan lingkungan.

Observasi bahwa informasi mengenai Sustainable Development Goals atau SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di Indonesia masih terlalu sedikit. Sementara itu, informasi yang dikandung di dalam SDGs ternyata terlampaui banyak dan tidak semua mudah dipahami. SDGs dapat dipahami dalam berbagai dimensi yang berbeda; (i) kronologinya dan prosesnya; (ii) tujuan dan targetnya dan di dalamnya skala perubahan yang diimpikannya; (iii) proses perundingannya; serta (iv) perbedaan dibandingkan pendahulunya, Millenium Development Goals(MDGs).

Di sisi lain, keterlibatan pemerintah daerah perlu didorong dalam pencapaian SDG'S sebagaimana hal yang belum dilakukan secara optimal dalam pelaksanaan MDG's. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa sejak pemberlakuan desentralisasi di Indonesia, dua pertiga nasib dan kualitas hidup warga, dalam praktiknya, sangat ditentukan oleh baik-buruknya kinerja pemerintah daerah, mulai dari soal kebersihan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, hingga kualitas sekolah dan pelayanan kesehatan. Kita semua tergantung pada tinggi-rendahnya mutu pelayanan publik di daerah. Bahkan, hal ini bukan saja gejala Indonesia tetapi juga sebuah arus di tingkat dunia. Benjamin Barber, dalam buku *If Major Ruled The World*(2013), meletakkan harapan kepada para wali kota untuk mengatasi masalah-masalah besar dunia (perubahan iklim, pencegahan terorisme, pengurangan kemiskinan, tata niaga perdagangan obat). Merekalah tenaga dan energi perubahan. Menurut Barber, ada tiga alasan yang menyebabkannya: (i) kota merupakan hunian bagi lebih dari separuh penduduk dan karenanya merupakan mesin penggerak ekonomi; (ii) kota telah menjadi rumah pencetus dan inkubator berbagai inovasi sosial, ekonomi dan budaya; dan (iii) para pemimpin kota dan pemerintah daerah

tidak terbebani dengan isu kedaulatan serta batas-batas bangsa yang menghalangi mereka untuk bekerja sama.

SDGs adalah (a) sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs. Masa berlakunya 2015–2030; (b) sebuah dokumen setebal 35 halaman yang disepakati oleh lebih dari 190 negara; (c) berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum).

Keberhasilan SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah. Karena pemerintah kota dan kabupaten (a) berada lebih dekat dengan warganya; (b) memiliki wewenang dan dana; (c) dapat melakukan berbagai inovasi; serta (d) ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah. Dari pengalaman era MDGs (2000–2015), Indonesia ternyata belum berhasil menurunkan angka kematian ibu, akses kepada sanitasi dan air minum, dan penurunan prevalensi AIDS dan HIV. Mengapa? Karena pemerintah daerah tidak aktif terlibat di dalam pelaksanaan MDGs baik. Juga karena pemerintah daerah kurang didukung. Bagaimana agar pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lebih siap dan lebih mampu melaksanakan SDGs? Salah satu upaya untuk mendorong keberhasilan SDGs di daerah adalah melalui penyediaan informasi yang cukup bagi pemerintah daerah serta mengharmonisasikan kaidah SDG's dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan daerah.

Harmonisasi kaidah SDG's dalam peraturan perundang-undangan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan pusat dan daerah merupakan pembelajaran dari kegagalan pelaksanaan tujuan pembangunan millennium (Millennium Development Goals/MDG) pada akhir tahun 2015.



Gambar 1. Tujuan SDG'S

Pembangunan berkelanjutan telah dicanagkan melalui Millenium Development Goals (MDGs) sebagai tujuan-tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional pada Tahun 2000 oleh 169 kepala negara, termasuk Presiden Indonesia. Target MDGs merupakan target 15 tahun, dan direncanakan tercapai pada Tahun 2015. Sebagai kelanjutan dari agenda pembangunan millennium ini, dirumuskan agenda pembangunan baru yang disebut Global Goals for Sustainable Development (SDGs). SDGs telah disepakati oleh lebih dari 150 pemimpin negara pada Sidang Umum PBB di New York, 25 September 2015. Dalam kesempatan itu, Presiden Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden, juga telah menandatangani kesepakatan internasional tersebut.

SDGs yang sudah disepakati terdiri dari 17 goals dan 169 target. Adapun calon indikator sejumlah ±300 indikator masih dalam proses pembahasan dan akan ditetapkan pada Bulan Maret 2016. Tujuh belas goals, 169 targets dan ±300 calon indikator ini tidak seluruhnya merupakan indikator baru yang belum pernah dihitung. Sebagian besar diantaranya merupakan indikator yang sudah ada di BPS, diantaranya adalah indikator MDGs yang masih relevan dan diadopsi kembali menjadi indikator SDGs. Sebagai salah satu negara perumus SDGs, RPJMN Republik Indonesia 2015-2019 telah mempunyai kerangka yang sejalan dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan / SDGs. Sehubungan dengan itu, bagi Kabupaten / Kota, terutama yang akan menyelenggarakan Pilkada pada

2015, diharapkan menyusun dokumen perencanaannya dengan mengacu pada target dan indikator SDGs.

Untuk menjamin kelangsungan upaya pencapaian, perencanaan dan pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) harus terintegrasi dalam sitem perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun maupun di daerah. Sebagaimana diketahui, dokumen perencanaan terdiri dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) / 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) / 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) / 1 Tahun. Semua goal, target dan indikator pembangunan berkelanjutan sebanyak mungkin harus tercantum dalam dokumen perencanaan atau rencana aksi pengarustamaan SDG’s di pusat maupun daerah. Dengan demikian, akan terjamin dukungan sumberdayanya.

4.2 Keselarasan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2016 - 2021

Tabel 3.4

Keselarasn Permasalahan, Isu Strategis dan Rumusan Misi

Permasalahan	Isu Strategis	Misi
a. Lemahnya kompetensi perencana di tingkat satuan pendidikan; b. Kurangnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan c. Lemahnya evaluasi dan klarifikasi terhadap APBS. d. Data pokok pendidikan belum sepenuhnya mengakomodasi pelbagai input data yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan dibidang pendidikan e. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang didirikan oleh masyarakat belum berbadan hukum Indonesia;	1. Atribusi Layanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan;	MISI 4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

f. Kondisi minat baca Kabupaten yang belum teridentifikasi. g. Kasus Kematian Ibu Meningkat h. Prevalensi HIV/AIDS Tinggi i. Cakupan Desa UCI Belum Mencapai Target j. Proporsi rumah tangga yang mempunyai akses berkelanjutan terhadap air minum layak belum mencapai 100%; k. Jumlah Dokter Umum dan Dokter Spesialis Masih Kurang		
a. Angka Kemiskinan Gresik yang cenderung tinggi b. Belum Tersedia Pusat Rehabilitasi Sosial Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah c. Belum Tersedia Pantiasuhan untuk Anak-Anak dan Lansia Terlantar Yang Diselenggarakan dan/atau Difasilitasi Penuh oleh Pemerintah d. Tenaga kerja yang dikelola oleh swasta atau individu tidak sepenuhnya dilaporkan ke dinas tenaga kerja	2. Kesejahteraan Sosial; a. Penanggulangan Kemiskinan; b. Ketenagakerjaan; c. Kondusifitas Daerah; d. Penegakan Hak Asasi Manusia.	Misi 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan; Misi 1 Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;
a. Proporsi rumah tangga yang mempunyai akses berkelanjutan terhadap air minum layak belum mencapai 100%; b. Penanganan permukiman kumuh yang kurang optimal	3. Pembangunan Berkelanjutan berwawasan lingkungan; a. Ketersediaan Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, dan Pelayanan Sanitasi Dasar b. Konektivitas Daerah	Misi 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan

c. Identifikasi untuk melakukan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih dilakukan sektoral dan belum komprehensif	c. Permukiman Inklusif d. Pengendalian Banjir e. Lingkungan Hidup f. Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik	kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;
a. Pendataan perkembangan UKM masih belum optimal; b. Kurangnya fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan Koperasi serta UMKM di Kabupaten Gresik c. Masih kurangnya pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	4. Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Pangan;	Misi 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;
a. Database pelayanan publik yang belum terintegrasi b. Aksesibilitas Sistem informasi Pelayanan publik yang belum optimal c. Penetrasi penggunaan teknologi masih rendah. d. Pelayanan publik belum menekankan pendekatan <i>human centered design</i>. e. Mekanisme pelaporan dan evaluasi masih konvensional atau belum efektif diimplementasikan.	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Data Pembangunan;	Misi 2 Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik

a. Penetrasi penggunaan teknologi masih rendah. b. Sistem Inovasi daerah belum terbangun sebagai suatu sistem yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran.	6. Akselerasi pembangunan melalui Sistem Inovasi Daerah dan Gresik Smart City;	Misi 2 Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik
a. Masih Lemahnya Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan anak termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat. b. Lemahnya Kelembagaan serta Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat Tentang Kesetaraan Gender serta Kekerasan pada Perempuan dan Anak	7. Pengarusutamaan Gender;	Misi 4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
a. Perencanaan tata ruang Desa dan pengembangan kawasan perdesaan belum optimal. b. Penataan asset-asset desa masih belum teridentifikasi dalam GIS c. Regulasi Penataan Desa belum terbentuk d. Belum adanya kerjasama antar Desa yang telah memiliki legal standing e. Belum adanya pengaturan terhadap Asset, Resources dan Profit Shares; f. Administrasi Pemerintahan Desa Belum Optimal.	8. Kemandirian Desa.	Misi 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;

Bab V

Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah

5.1 Visi

“Permata Pulau Jawa di antara Pelabuhan Dagang” sebagaimana digurat Tome Pires dalam Suma Oriental-nya hanyalah segelintir bukti dari kebesaran Gresik sebagai pusat perdagangan dan kota Bandar. Kemasyhuran Gresik sang pelabuhan dagang utama mengundang perhatian pelbagai bangsa mulai dari Cina, Arab, Champa, Bengali, hingga Gujarat sejak abad ke-14. Riuh kapal-kapal yang bersandar di pantai Gresik selaras dengan sapaan saudagar-saudagar dari seberang lautan yang berujar “*Qorosyaik*” atau bermakna tempat dimana jangkar berlabuh. Kebesaran Gresik tempo dulu bukan hanya dikenal sebagai pelabuhan dagang utama namun juga sebagai pusat penyebaran Islam di nusantara sekitar abad ke-15 s.d ke-17. Sunan giri dengan “Giri Kedaton”-nya, sebuah kerajaan kecil namun sangat berpengaruh menyebarkan Islam ke pelosok Jawa, hingga Syech Maulana Malik Ibrahim yang disanjung sebagai tiang para raja. Guratan tinta emas ini menempatkan Gresik dalam lembaran sejarah sebagai Kota Para Wali.

Kebesaran dan Religiusitas Gresik adalah warisan leluhur atau *heritage* yang masih bertahan hingga saat ini meskipun industrialisasi berkembang sangat pesat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kearifan lokal dan kekayaan budaya dalam tuntunan keluhuran yang agamis menjadi poros kekuatan Gresik untuk membangun bangsa menyeluruh ke pelosok-pelosok desa, mendekatkan pemerintahan dengan rakyatnya, serta menghadirkan Gresik yang telah baik untuk menjadi semakin baik. Berlandaskan telah sebagaimana diuraikan di atas maka pada masa bhakti 2016-2021 pemerintah Kabupaten Gresik mencetuskan visi untuk merangkul semangat seluruh stakeholder dalam menghadapi pelbagai permasalahan dan tantangan pembangunan dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah serta mengedepankan nilai-nilai luhur demi kesejahteraan masyarakat Gresik sebesar-besarnya yaitu;

**“Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan
Berkehidupan yang Berkualitas”**

Secara filosofis, visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung makna untuk menghadirkan Gresik yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagama'an guna merajut kebersamaan dalam keberagaman, meletakkan keadilan dalam pembangunan untuk pemerataan kemakmuran rakyat, merangkul komitmen seluruh stakeholder dalam kemuliaan integritas guna mewujudkan Gresik yang sejahtera, dan menciptakan kehidupan yang berkualitas di segala aspek. Adapun makna yang terkandung dalam setiap frase dijelaskan sebagai berikut;

Terwujudnya

Menjamin terlaksananya semua Program Pembangunan untuk kepentingan rakyat Gresik.

Gresik

Satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.

Agamis

Kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebera'agama'an dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kaidah keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam menjalin hubungan antar manusia dan lingkungannya.

Adil

Perwujudan kesetaraan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.

Sejahtera

Kehidupan individu dan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; memiliki pendapatan yang memadai; serta sadar terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku.

Berkehidupan yang Berkualitas

Kemandirian dalam segala aspek kehidupan yang dinikmati oleh segenap komponen masyarakat secara berkeadilan dan bermartabat.

5.2 Misi

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam 4 (empat) rencana strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2016-2021 sebagaimana berikut;

Misi ke-1

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;

Misi ke-2

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik;

Misi ke-3

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;

Misi ke-4

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Adapun Motto yang diusung dalam pembangunan Gresik Periode 2016-2021 adalah “**Dengan Kejujuran, Kebersamaan, Kerja Keras, Kesabaran, Keikhlasan mewujudkan Gresik yang Lebih Baik**”

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja (*Money Follow Program*) maka perencanaan pembangunan menggunakan prinsip yang identik dengan menekankan pada target kinerja baik dampak (impact), kebermanfaatan hasil (*outcome*), maupun keluaran (output) dari suatu sasaran, program, hingga kegiatan. Berlandaskan terhadap keselarasan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025, sinkronisasi Kebijakan Jangka Menengah Pemerintah 2014-2019, Kebijakan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan serta memperhatikan visi misi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Jangka Menengah sebagai berikut;

Dalam rangka implementasi **Misi Pertama** “*Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri*” ditetapkan tujuan yaitu;

Mewujudkan Keharmonisan Sosial Berlandaskan Keluhuran Budaya Gresik

Perwujudan perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dengan landasan nilai-nilai agama sebagai cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri adalah upaya dalam menciptakan tatanan kehidupan berbangsa yang harmonis dan kondusif berlandaskan keluhuran Budaya Gresik yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman guna menciptakan kebersamaan yang damai dalam keberagaman moral, pemikiran, dan nilai-nilai budaya. Upaya ini ditunjang dengan pembangunan karakter dan mental yang dilandasi kearifan dan keluhuran Budaya Gresik.

Penetapan Sasaran Pembangunan Misi Pertama didukung 3 (tiga) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan (1)Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, (2)Kepemudaan dan olahraga, dan (3) Kebudayaan sebagaimana berikut;

Sasaran urusan **Ketentraman, Ketertiban Umum,& Perlindungan Masyarakat** meliputi;

Sasaran ke-1

Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat

Sasaran ke-2

Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan kebakaran

Sasaran pada urusan **Kepemudaan dan Olahraga** meliputi;

Sasaran ke-3

Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan

Sasaran pada urusan **Kebudayaan** meliputi;

Sasaran ke-4

Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal

Dalam rangka implementasi **Misi Kedua** “*Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik*” ditetapkan tujuan yaitu;

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik;

Perwujudan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik dimaknai dengan prioritas penguatan pada aspek keterbukaan informasi, akuntabilitas birokrasi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, supremasi hukum dan keadilan pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat serta sektor privat dalam pembangunan. Penetapan Sasaran Pembangunan Misi Kedua didukung 12 (Dua Belas) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan (1)Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2)Komunikasi dan Informatika, (3)Statistik, (4)Persandian, (5)Kearsipan, (6)Kecamatan, (7)Perencanaan, (8)Inspektorat, (9)Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan, (10)Sekretariat Daerah, (11)Sekretariat DPRD, dan (12)Penelitian dan Pengembangan sebagaimana berikut;

Sasaran pada urusan **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kearsipan, dan Kecamatan** meliputi;

Sasaran ke-1

Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik

Sasaran pada urusan **Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian** meliputi;

Sasaran ke-2

Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi

Sasaran pada urusan **Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan** meliputi;

Sasaran ke-3

Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Sasaran pada urusan **Inspektorat** meliputi;

Sasaran ke-4

Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Sasaran pada urusan **Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah** meliputi;

Sasaran ke-5

Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

Sasaran pada urusan **Kepegawian serta Pendidikan dan Pelatihan** meliputi;

Sasaran ke-6

Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah

Dalam rangka implementasi **Misi Ketiga** “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan” ditetapkan tujuan yaitu;

Tujuan ke-1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Tujuan ke-2

Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Mewujudkan penanggulangan kemiskinan secara terpadu.

Peningkatan pertumbuhan secara menyeluruh dapat dimaknai dengan pembangunan perkonomian inklusif dengan dukungan infrastuktur yang berkelanjutan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia secara komprehensif dengan pendekatan strategis lintas sektoral dan terciptanya akses terhadap sumber daya pembangunan. Optimalisasi potensi daerah, penguatan ekonomi lokal, dan konsep ekonomi kerakyatan merupakan arsitektur pembangunan perekonomian secara integratif dengan mengedepankan kearifan lokal, membangun secara inklusif dengan penguatan pilar-pilar ekonomi daerah dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan berwawasan lingkungan dimaknai dengan Meletakkan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk menghadirkan kemajuan peradaban berdaya saing yang berwawasan lingkungan, mewujudkan kemadirian ekonomi, dan meneguhkan karakter kehidupan berbangsa berlandaskan keluhuran nilai-nilai budaya Gresik. Sedangkan *global competition oriented* adalah pembangunan perekonomian yang berdikari untuk menghadapi tantangan pasar global dalam rangka membangun Gresik sebagai salah satu poros perekonomian nasional. Sedangkan menekan angka kemiskinan bermakna optimalisasi penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh pada dimensi kemiskinan.

Penetapan Sasaran Pembangunan Tujuan Misi Ketiga didukung 20 (Dua Puluh) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi (1) Penanaman Modal, (2) Pertanahan, (3) Pariwisata, (4) Kelautan dan Perikanan, (5) Keuangan, (6) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (7)Perhubungan, (8) Lingkungan Hidup, (9) Tenaga Kerja, (10) Transmigrasi, (11) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, (12) Perdagangan, (13) Sosial, (14)Perindustrian, (15) Energi dan Sumber Daya Mineral, (16) Kehutanan, (17)Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, (18)Pangan, (19)Pertanian, (20) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana berikut;

Dalam rangka mendukung pencapaian **tujuan ke-1 misi ke-3** ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Penanaman Modal** dan **Pertanahan** meliputi;

Sasaran ke-1

Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah

Sasaran pada urusan **Pariwisata** meliputi;

Sasaran ke-2

Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif

Sasaran pada urusan **Kelautan dan Perikanan** meliputi;

Sasaran ke-3

Meningkatkan keberdayaan ekonomi nelayan

Sasaran pada urusan **Keuangan** meliputi;

Sasaran ke-4

Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah

Sasaran pada urusan **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** meliputi;

Sasaran ke-5

Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.

Sasaran pada urusan **Perhubungan** meliputi;

Sasaran ke-6

Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu

Dalam rangka mendukung pencapaian **tujuan ke-2 misi ke-3** ditetapkan sasaran strategis yaitu;

Sasaran pada urusan **Lingkungan Hidup** dan **Kehutanan** meliputi;

Sasaran ke-7

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan

Dalam rangka mendukung pencapaian **tujuan ke-3** misi **ke-3** ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Tenaga Kerja** dan **Transmigrasi** meliputi;

Sasaran ke-8

Menurunnya tingkat pengangguran

Sasaran pada urusan **Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah** meliputi;

Sasaran ke-9

Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha mikro dan Koperasi yang inovatif

Sasaran pada urusan **Perdagangan, Perindustrian, dan Energi dan Sumber Daya Mineral** meliputi;

Sasaran ke-10

Meningkatkan produktivitas perdagangan dan pertumbuhan industri kecil dan menengah secara berkelanjutan

Sasaran pada urusan **Sosial** meliputi;

Sasaran ke-11

Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan

Sasaran pada urusan **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** meliputi;

Sasaran ke-12

Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.

Sasaran pada urusan **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** meliputi;

Sasaran ke-13

Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa

Sasaran pada urusan **Pangan dan Pertanian** meliputi;

Sasaran ke-14

Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian

Dalam rangka implementasi **Misi Keempat** “*Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya*” ditetapkan tujuan yaitu;

Tujuan ke-1

Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan

Tujuan ke-2

Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan

Peningkatan kualitas kehidupan dimaknai dengan menghadirkan pembangunan insan manusia cendikia, cerdas dan berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan atribut pelayanan pendidikan dasar, penyelenggaraan pendidikan yang inklusif didukung oleh suprastruktur dan infrastruktur pendidikan berlandaskan keluhuran budaya Gresik. Hal ini selaras dengan upaya peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Disisi lain, kualitas hidup masyarakat merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang mengedepankan pemerataan, kemudahan akses, keberlindungan dan kepastian layanan bagi seluruh masyarakat Gresik. Penetapan Sasaran Pembangunan Tujuan Misi Keempat didukung 4 (Empat) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi (1) Pendidikan, (2) Perpustakaan (3) Kesehatan, (4) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan (5) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana berikut

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-1 misi ke-4 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Pendidikan dan Perpustakaan** meliputi

Sasaran ke-1

Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif

Sasaran pada urusan **Kesehatan** meliputi;

Sasaran ke-2

Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-2 misi ke-4 ditetapkan sasaran strategis yaitu

Sasaran pada urusan **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** meliputi;

Sasaran ke-3

*Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
didukung optimalisasi program Keluarga Berencana*

Sasaran pada urusan **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** meliputi;

Sasaran ke-4

*Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan
perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender*

Sasaran ke-5

*Mewujudkan perlindungan perempuan
dan anak serta kota layak nak*

Tabel 5.1

Penelahaan Kembali Tujuan Pembangunan Kabupaten Gresik

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	B a s e l i n e	Target						Penelaah Kembali
	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
1	Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah.	Nilai Peduli HAM	75,29	77	78	79	80	81	82	Mewujudkan keharmonisan so berlandaskan keluhuran Buday Gresik.
2	Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha;	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	N / A	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif	Indeks Reformasi Birokrasi	N / A	B	B	B	B	B	B	
		Nilai Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah.	Pertumbuhan Ekonomi	6.15	6.15	6.30	6.45	6.60	6.75	6.90	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ink
			5	6.65	6.85	6.95	7.1	7.25	7.45	

5	Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,47	57.5-64.8	59.5-66	61.5-68.2	66.5-70.4	68.5-72.6	70.5-74.8	Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
6	Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.67%	5.67-5.35%	5.50-5.20%	5.35-5.05%	5.20-4.90%	5.05-4.75%	4.90-4.60%	
7	Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2014 sebesar 13,42%	13,25-12,25%	12,75-11,75%	12,25-11,25%	11,75-10,75%	11,25-10,25%	10,75-9,50%	Mewujudkan penanggulangan kemiskinan secara terpadu

8	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	76.75	76.57	77.05	77.35	77.51	77.75	78.05	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan
9	Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Tahun 2014	89.28	89.38	89.90	90.05	90.09	90.18	Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan

Tabel 5.2
Penelaahan Kembali Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik

No	Sasaran Pembangunan Urusan	Indikator Sasaran	Baseline	Target						Penelaah Kembali
	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
1.1	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat

1.2	Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran	Persentase Desa Tangguh Bencana	48,48% 32 desa ataun gg u h d a r i 6 6 D e s a t e r d a m p a k	56,06%	60,60%	71,2%	78,78%	86,36%	100%	Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran
1.3	Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuh-kembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemimpinan dan patriotisme, dan menggugah kreatifitas dalam kemandirian	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	N / A	40-50%	45-55%	50-60%	55-65%	60-70%	65-75%	Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan

1.4	Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global	Persentase Kelestarian Cagar Budaya	Obuah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal

2.1	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi	Persentase Ketunggalan Identitas Berbasis e-KTP	66,38%	69,72%	73,87%	76,67%	83,45%	88,16%	93,12%	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik
2.2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.	Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	N / A	60-70%	65-75%	70-80%	75-85%	80-90%	85-95%	
2.3	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel melalui tata kelola kearsipan berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat.	Persentase Capaian Alih Media Arsip	N / A	75%	80%	85%	90%	95%	100%	
2.4	Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi	Persentase Pertumbuhan kumulatif pengakses Website Resmi Pemda	710 Informasi dalam Tahun	2,5-3,5%	2,7-3,7%	2,9-3,9%	3,1-4,1%	3,3-4,3%	3,5-4,5%	Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi

		Persentase Keterse diaan Data Report Based (Online)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.5	Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan inovasi daerah.	Nilai Pangrip ta	N / A	B	B	B	A	A	A	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan da
2.6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif	Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyar akat	Ti nd ak la nj ut au dit in te rn al 100 %, au dit ek te rn al 50 %, da n M as ya ra ka t 100 %	100 %-60%-100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelola keuangan daerah
2.7	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif	Persentase Produkt ivitas Perda Inisiatif DPRD	36 P e r d a	100%	100%	100%	100%	100%	200%	Meningkatkan akuntabilitas kine pemerintahan daerah

2.8	Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase standar disasi pelayanan publik	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)	C	CC	B	B	BB	BB	A	
2.9	Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan <i>good and clean governance</i>	Indeks Profesionalitas ASN	N / A	71%	72%	73%	74%	75%	76%	Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah
3.1	Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	Rp 23,45 Triliun	17,06% (Rp. 27,45 T)	24,12% (Rp. 31,45 T)	51,17% (Rp. 55,45 T)	68,23% (Rp. 94,45 T)	85,29% (Rp. 113,45 T)	104,69% (Rp. 148 T)	Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah
3.2	Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.3	Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif	Persentase Apresiasi Wisata	3.107.278 wisatawan	0,16%	0,18%	0,20%	0,22%	0,24%	0,26%	Meningkatnya kunjungan wisata pengembangan ekonomi kreatif

3.4	Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi	Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	4.033.509.44 juta Rupiah (4,30%)	4,2-42,4%	4,25-42,45%	4,27-42,47%	42,3-44,5%	43,2-45,2%	43,4-45,4%	Meningkatkan keberdayaan Ekonomi Nelayan
3.5	Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual	Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah;	800.625.969	1-13% (800 - 900 Milyar)	13-25% (900 - 1000 Milyar)	25-50% (1000 - 1200 Milyar)	50-75% (1200 - 1400 Milyar)	75-106% (1400 - 1500 Milyar)	106-144% (1500 - 1950 Milyar)	Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah

3.6	Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	41,9 km Jalan (81,81 %)	83,31 % Jalan	84,81 % Jalan	86,11 % Jalan	87,21 % Jalan	88,41 % Jalan	89,51 % Jalan	Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.

			si b ai k d ar i 1 4 7. 3 5 6 m' (5 ,2 3 %))							
		Persentase Akses Air Bersih/Minum	55,95%	65.95%	75.95%	85.95%	100%	100%	100%	
		Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.7	Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertim-bangkan daya dukung lingkungan	Rasio Konektivitas Transp ortasi	1.441 di b a n di n g k a n 4 1 9 k m (0.25 p e r 1 0 0.00	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36	Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan dan ketepatan wa

			0 p e n d u d u k)							
3.8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan	Indeks Kualita s Air Sungai	I P A 4 7, 2 9	4 7. 3 - 5 1. 5	5 1. 5 - 5 5. 7 5	5 5. 7 5 - 6 0	6 0 - 6 4. 3	6 4. 3 - 6 8	6 8 - 7 2. 5	
		Indeks Kualita s Udara	I P U 7 2, 2 3	7 2. 5 - 7 5	7 5 - 7 9	7 9 - 8 3	8 3 - 8 7, 5	8 7, 5 - 9 0	9 0 -- 9 3. 5	
										Meningkatnya kual lingkungan hidup secara menyeluruh berkelanjutan

3.9	Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,84% 596.841 pendudukan angka kat an k a r i 879.777 penduduk usia kerja	67.88%	67.90%	67,92%	67,94%	67,96%	67,98%	Menurunnya tingkat pengangguran

		Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	88,04% 81 penyelesaian dari 92 pengajuan	88,54%	89%	89,42%	89,81%	90,17%	90,5%	
3.10	Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif	Angka Pertumbuhan Kumulatif UMKM Angka Pertumbuhan Koperasi sehat	18,534 304	0,33% (18,9156) 1,97% (310)	0,66% (18,9780) 3,62% (315)	0,99% (19,047) 5,26% (320)	1,33% (19,905) 6,91% (325)	1,66% (19,965) 8,55% (330)	2,00% (19,988) 10,20% (335)	Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha mikro dan Koperasi yang inovatif
3.11	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan	Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang /Komoditi (US \$)	1.378,355	15% (1.381,7863,55)	5% (1.383,763,54)	13,4% (1.409,457,28)	24,74% (1.419,643,903)	40,96% (1.485,761,040)	53,41% (2.021,750,42)	Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan

		Angka Pertum buhan Komula tif Industri Kecil Meneng ah (IKM)	7 0 3 6 I K M	0, 7 1 % (7 0 8 6)	1, 4 2 % (7 1 3 6)	2, 1 3 % (7 1 8 6)	2, 8 4 % (7 2 3 6)	3, 5 5 % (7 2 8 6)	4, 2 6 % (7 3 3 6)	
3.12	Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.	Persent ase penang anan terhada p jumlah PMKS, eks Penyan dang Penyaki t Sosial, penyan dang disabilit as	4, 4 9 % 6. 0 6 4 d ar i 1 3 5. 1 4 2 P M K S, 1 8. 2 % 1 3 1 d ar i 7 2 7 ek s Pe n ya n d a n g Pe n ya ki t S os ia l. 2 % 8 6 d	4, 3 - 4, 8 %	4, 5 - 5 %	4, 7 - 5, 2 %	4, 9 - 5, 4 %	5, 1 - 5, 6 %	5, 3 - 5, 8 %	Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan

			ar i 7. 1 4 9 or a n g pe n ya d a n g di sa bi lit as							
3.1 3	Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.	Luas Penurunan kawasan permukaan kumuh	1 8 1, 9 2 Ha	1 0 ha	1 0 ha	1 5 ha	3 0 ha	4 0 ha	4 0 ha	Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.

		Persentase Rumah Layak Huni	85.53% (232.928 rumah layak huni dari 272.348 rumah)	85,64%	85,75%	85,86%	85,97%	86,08%	86,19%	
3.14	Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.	Indeks Pembangunan Desa	65,94%	66,45	70,90%	74,35%	78,80%	82,35%	86,91%	Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa

3.15	Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan	Rasio Keterse diaan Pangan Utama	193,23 Kg / K p t / T h n	194 Kg / K p t / T h n	194 Kg / K p t / T h n	194 Kg / K p t / T h n	194 Kg / K p t / T h n	194 Kg / K p t / T h n	194 Kg / K p t / T h n	Mencapai kemandirian pang dan kesejahteraan pelaku pertanian
4.1	Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas berlandaskan perluasan aksesibilitas, penguatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang menyeluruh pada aspek suprastruktur dan infrastruktur pendidikan	Persentase Partisipasi PAUD	4188 Siswa	83.00 %	84.00 %	85.00 %	87.00 %	89.00 %	90.00 %	Menghadirkan pelayanan pendid yang berkualitas d inklusif
		APM SD dan Sederajat	116.288 Siswa	98.88 %	98.96 %	99.02 %	99.10 %	99.15 %	99.20 %	
		APM SMP sederajat;	51.365 Siswa	86.75 %	86.80 %	86.83 %	86.99 %	87.10 %	87.23 %	
		Angka Rata rata lama sekolah	Tahun 2014	9.029.10	9.059.13	9.089.16	9.119.19	9.149.22	9.179.25	

			9.02 Tahun							
4.2	Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca.	Indeks Minat Baca Daerah	192,498 pemustaka di bandingkan 1,303 jiwa (1:6,8)	1 : 6,7	1 : 6,6	1 : 6,4	1 : 6,5	1 : 6,4	1 : 6,3	
4.3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan	AKI per 100.000 kelahiran hidup;	93.65 per 100.000	115	110	105	102	100	95	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan
		AKB per 1.000 kelahiran hidup;	3.59 per 1000	4.15	4.12	4.10	4.05	4	4	
		Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71.671.671 ta	71.780	71.785	71.800	71.805	71.900	

			h u n							
		SKM layanan RSUD	N /A	75 %	7 6 %	7 7 %	7 8 %	7 9 %	8 0 %	
4.4	Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertumbuhan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga	Angka laju pertumbuhan penduduk	0.65 Tahun 2015 sejumlah lah 1.303.773 jiwa a de ng an ta h u n da sar 2011 sejumlah lah 1.270.351	0.6-1.4	0.6-1.4	0.6-1.4	0.6-1.4	0.6-1.4	0.6-1.4	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana
		Persentase Prevalensi peserta KB Aktif;	86,45% 185.122 peserta K B ak	87%	88%	89%	90%	91%	92%	

			tif da ri 21 4. 14 5 P U S							
4.5	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	T a h u n 2 0 1 4 s e b e s a r 6 2. 2 6	6 2. 5 0 - 6 3. 0 0	6 2. 7 5 - 6 3. 2 5	6 3. 0 - 6 3. 5 0	6 3. 2 5 - 6 3. 7 5	6 3. 5 0 - 6 4. 0 0	6 3. 7 5 - 6 4. 2 5	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender
		Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap P2TP2A	3 0 0 o r a n g	1 0 0 %	1 0 0 %	1 0 0 %	1 0 0 %	1 0 0 %	1 0 0 %	Mewujudkan perlindungan perempuan dan a serta kota layak n

Tabel 5.3

Matrikulasi Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Urusan	OPD	Baseline/Dat a Awal			
							2017	2018	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	

	Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi	Indeks e-Governement	Indeks	Komunikasi dan Informatika Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahun 2015 2.87	2.90-3.00	2.95-3.05	
	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Pangripta	Nilai	Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan	B	B	B	
	Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Nilai	Pengawasan	Inspektorat Daerah	WTP	WTP	WTP	
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	CC	B	BB	
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	75,8	76	77	
Pertumbuhan Ekonomi						5.92	>5.9-6.25	>6.0-6.35	
Laju Inflasi						3.01	3-4%	3-4%	
	Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	36% (31.95 T)	24,12 % (Rp.31,45 T)	51,17 % (Rp35,45T)	

	Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Peningkatan wisatawan meliputi 4.974 Wisatawan Mancanegara dan 3.258.126 Wisatawan Dalam Negeri 5,01%	5,5-6,5%	6,0-7,0%
	Meningkatkan keberdayaan Ekonomi Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	111,56	111,75	112,00
	Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	%	Keuangan	BPPKAD	Pendapatan Asli Daerah 715,5 M disbanding Dana Perimbangan 1,33 Trilyun 53,5%	55%	57%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						58.30	59.5-66	61.5-68.2
	Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	%	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dari 512,16 km jalan kabupaten, 426,68 km dalam kondisi mantap (83,31%)	419 km Jalan (81,81%)	83,31% Jalan
		Persentase Akses Air Bersih/Minum	%	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	61,95%	75.95%	85.95%

		Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	100%	100%	100%
	Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu	Angka Kecelakaan Angkutan Umum	%	Perhubungan	Dinas Perhubungan	787 kecelakaan 526.093 angkutan 0.15%	0,14 %	0,13%
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungnn Hidup	49.01	51.5-55.75	55.75-60
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungnn Hidup	68	75-79	79-83
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungnn Hidup	Rasio Kawasan lindung 21.670 ha dibanding luas wilayah 119.125 ha (18,19%)	18,19 %	18,19 %
Tingkat Kemiskinan						13.19%	13,25 -12,25 %	12.75 - 11.75 %
	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	5,67%	5.50-5.20 %	5.35-5.05%
	Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif	Pertumbuhan Usaha Mikro	%	Koperasi dan Umkm	Dinas Koperasi, Udaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	0.12 (200 usaha mikro)	0.13 (210 usaha mikro)	0.14 (230 usaha mikro)
		Pertunbuhan Koperasi Sehat	%	Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	1.97%(310)	3.62 % (315)	5.26% (320)

	Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	%	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	1-5% (1.317.863,55)	5% (1.383.756,55)	13.4% (1.494.457,28)
		Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah	%	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	0.17% (7086)	0.77% (7141)	0.83% (72.01)
	Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	%	Sosial	Dinas Sosial	5.44%	4,5-5%	4,7-5,2%
	Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	Ha	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12,15 ha Dari 181.92 ha menjadi 169.42 ha 93%	88% (10 ha)	79% (15 ha)
		Persentase Rumah Layak Huni	%	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	85,94	85,75%	85,86%
	Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,6208	0,6225	0,6250
	Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	Kg/Kpt/Thn	Pangan	Dinas Pertanian	202.21 Kg/Kpt/Thn	194 Kg/Kpt/Thn	194 Kg/Kpt/Thn
		Nilai Tukar Petani	%	Pertanian	Dinas Pertanian	108,72	108,92	109,12
Indeks Pembangunan Manusia						74.46* metode baru	75-76	76-77

	Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	APM SD dan Sederajat	%	Pendidikan	Dinas Pendidikan	98.62%	98.96 %	99.02 %
		APM SMP sederajat;	%	Pendidikan	Dinas Pendidikan	86.04%	86.80 %	86.83 %
		Angka Harapan Rata rata lama sekolah	%	Pendidikan	Dinas Pendidikan	9.2	9,3	9,4
	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	%	Pendidikan	Dinas Pendidikan	72 Tahun	72,2	72,4
Indeks Pembangunan Gender						89.31	89.3-89.9	89.6-90.2
	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana	Angka laju pertumbuhan penduduk	%	Keluarga Berencana	Dinas KBPP	1.18	0.6-1.4	0.6-1.4
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas KBPP	62,79	62.75-63.25	63.00-63.50
	Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak nak	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap P2TP2A	%	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas KBPP	100%	100%	100%
		Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas KBPP	624	650-700	700-775

Bab VI

Strategi dan Arah Kebijakan

Pembangunan Jangka Menengah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif yang menjadi landasan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Sedangkan **Strategi** merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam perumusan ini Perencanaan Jangka Menengah ini pendekatan yang digunakan adalah *Perencanaan Strategik* yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Berikut penjabaran Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2016-2021;

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

VISI :Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas
MISI 1 : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dengan landasan nilai-nilai agama sebagai cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri	1. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat	1.1.Sinergitas Law Enforcement yang menjunjung tinggi keadilan dengan keberdayaan moral, perilaku, dan pemahaman masyarakat dalam koridor religiusme budaya Gresik Kota Kota Wali dan Kota Santri. 1.2.Avokasi pembinaan karakter masyarakat yang berwawasan kebangsaan melalui revolusi mental	1. Integrasi keluhuran Budaya Gresik yang religius dalam mewujudkan kondusifitas kehidupan berbangsa didukung Pamong Praja yang tangguh
	2. Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran	1.3.Peningkatan kualitas penanggulangan bencana daerah melalui penguatan peran masyarakat tanggap bencana, keterbukaan informasi, dan pembangunan basis data ancaman dan resiko bencana.	2. Pengelolaan penanggulangan bencana yang responsif guna menguatkan penegakan hak atas rasa aman, mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

	3. Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan	1.4. Peningkatan kapasitas pemuda melalui inisiasi pendidikan terpadu meliputi intelektual, emosional dan spiritual dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan inovasi pemuda, perlindungan terhadap napza, miras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit seksual menular di kalangan pemuda. 1.5. Menumbuhkembangkan budaya olahraga dan prestasi pada jenjang pendidikan pendidikan dasar dengan mengedepankan sportifitas didukung penguatan sarana infrastruktur dan suprastuktur kepemudaan dan olahraga. 1.6. Menanamkan nilai-nilai sosial patriotisme, kasadaran akan hak dan kewajiban, kedisiplinan dan nilai-nilai luhur budaya yang religius dalam rangka menata moral dan etika generasi muda secara berkelanjutan.	3. Pembangunan kepemudaan yang berkarakter dan peningkatan prestasi olahraga daerah secara partisipatif dengan menciptakan kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual, dilandasi kearifan dan keluhuran Budaya Gresik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagama'an.
	4. Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal	1.7. Inisiasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan untuk mewujudkan pendidikan karakter yang berorientasi pada kreativitas, inovasi, kepedulian lingkungan, pemahaman akan hak dan kewajiban, nasionalis, dan pelbagai nilai positif lainnya; 1.8. Pelestarian warisan budaya para Wali dan pengikutnya baik yang bersifat tangible maupun intangible serta meningkatkan	4. Pengarustamaan nilai-nilai kebudayaan Gresik yang luhur dan mulia dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan, pembangunan manusia berakhlak, dan pengelolaan sumber-sumber daya peradaban.

		apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas budaya melalui fasilitasi pelbagai event strategis. 1.9. Mewujudkan ruang kreasi publik sebagai tempat berinteraksi, melakukan promosi, menggelar karya seni dan sarana pagelaran budaya, serta meningkatkan informasi budaya berkualitas bagi masyarakat.	

Dalam ruang lingkup Misi pertama : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri, Berdasarkan analisa yang memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, maka dirumuskanlah 9 (sembilan) strategi dan 4 (empat) arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dengan landasan nilai-nilai agama sebagai cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri, dan 4 (empat) sasaran sebagaimana tabel di atas.

VISI :Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas
MISI 2 : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik	2.1. Pembangunan Basis Data terpadu kependudukan dan catatan sipil yang telah terharmonisasi secara agregat pada jenjang pemerintah desa, intermediary kecamatan, daerah hingga pusat; 2.2. Percepatan pelayanan dengan mendekatkan basis layanan kepada masyarakat melalui Kecamatan hingga secara bertahap mengoptimalkan peran Pemerintah Desa sebagai kunci pelayanan didukung pemenuhan jaringan internet, ketersediaan piranti, peningkatan kapasitas kelembagan dan sumber daya aparatur desa; 2.3. Harmonisasi dan aktualisasi data kependudukan dan catatan sipil didukung perlindungan secara menyeluruh terhadap dokumen melalui ahli media yang telah terautentifikasi. 2.4. Pemanfaatan basis data kependudukan (ketunggalan identitas) sebagai basis identitas penerima manfaat program pembangunan daerah seluas-luasnya di seluruh satuan kerja perangkat daerah. 2.5. Peningkatan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan catatan sipil melalui penguatan edukasi terhadap masyarakat maupun petugas pelayanan	1. Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil didukung pemutakhiran teknologi dengan mendekatkan basis pelayanan kepada masyarakat

		2.6. Advokasi pengelolaan arsip secara baku pada setiap jenjang pemerintahan didukung pengembangan sumber daya arsiparis melalui peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan kearsipan termutakhir; 2.7. Peningkatan alihmedia terhadap khasanah arsip statis guna menjamin keselamatan dan kelestarian dan mempermudah pemanfaatan data.	2. Penyelenggaraan pengelolaan kearsipan yang tertib didukung keterjaminan perlindungan dan kelestarian output atau memori penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung perumusan kebijakan daerah yang strategis dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
		2.8. Pelimpahan kewenangan secara bertahap sesuai tematik prioritas tahunan daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan. 2.9. Penguatan sumber daya aparatur kecamatan melalui bimbingan teknis, lokakarya, dan pelbagai media secara terintegratif antara perangkat daerah ditunjang dukungan anggaran yang mencukupi.	3. Pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh hingga pelosok desa melalui penguatan intermediary kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan koordinator kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan di Desa
	2. Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi	2.10. Pemerataan jaringan internet di kawasan perdesaan guna menunjang pertumbuhan ekonomi, percepatan pelayanan publik, dan mendukung kemajuan penyelenggaraan pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan informasi; 2.11. Memperkuat ketersediaan informasi data pembangunan Gresik yang up to	4. Keterbukaan informasi secara aktual dan faktual dalam koridor <i>e-Government</i> guna menggugah partisipasi publik secara konstruktif untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi dan pemanfaatan data pembangunan, serta

		date dalam layanan official website pemerintah Daerah. 2.12. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah pada jenjang pemerintah desa, intermediary kecamatan hingga satuan kerja perangkat daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung kinerja birokrasi dan pelayanan publik; 2.13. Penguatan media, ruang, atau wahana idea sharing antara publik, pemerintahan daerah, dan swasta dalam mengungkapkan aspirasi, kritik dan saran terhadap kebijakan, kebutuhan akan informasi pembangunan serta media untuk menampilkan inovasi atau karya tertentu melalui ruang konservatif maupun melalui internet network 2.14. Mewujudkan pembangunan smart city berbasis 6 (enam) pilar	mendukung optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan. 5. Akselerasi pembangunan melalui pemanfaatan TIK mejadi quick wins pembangunan 6 (enam) dimensi smart city.
		2.15. Penyempurnaan klasifikasi dan standardisasi serta harmonisasi ketersediaan data report based oleh setiap perangkat daerah dan Desa; 2.16. Peningkatan kompetensi pengolah data didukung penerapan aplikasi informatif yang komprehensif; 2.17. Pembentukan tim terpadu pembangunan basis data terpadu pada	6. Pembangunan basis data terpadu yang komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan akuntable

		jenjang desa, intermediary kecamatan, hingga perangkat daerah dan meningkatkan kerjasama serta koordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Swasta, dan stakeholder terkait	
		2.18. Pengamanan informasi pemerintahan daerah yang dikecualikan melalui penetapan pola hubungan sandi antar perangkat daerah	7. Perlindungan kerahasiaan informasi Daerah yang dikecualikan secara komprehensif dalam rangka menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	3. Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	2.19. Penguatan sistem informasi perencanaan yang mendukung penyelenggaraan perencanaan di setiap jenjang pemerintahan; 2.20. Pengarustamaan prioritas pembangunan sebagai komitmen pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk menjadi landasan penyusunan program pembangunan; 2.21. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya perencanaan melalui pengembangan kapasitas didukung intensifikasi koordinasi dalam perumusan kebijakan; 2.22. Peningkatan aksesibilitas informasi dan data survey based maupun repot	8. Perencanaan terbaik untuk pembangunan yang lebih baik

		based sebagai landasan pertimbangan dan analisa perumusan perencanaan yang berkualitas.	
		2.23. Penguatan sistem inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen rencana tahunan; 2.24. Elaborasi secara intensif dengan perguruan tinggi melalui Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri dan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Swasta; 2.25. Peningkatan kualitas kajian penelitian daerah melalui penguatan roadmap dan research yang responsif sesuai kebutuhan kebijakan pembangunan	9. Akselerasi inovasi daerah didukung sinergitas penelitian dan pengembangan oleh pemerintah, swasta, dan akademisi dengan melibatkan peran aktif masyarakat

	4. Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	2.26. Sinergitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui koordinasi intensif melalui pengawasan internal (melekat dan fungsional), eksternal, dan pengawasan masyarakat; 2.27. Inisiasi budaya kerja dengan etos kerja, integritas, dan gotong royong melalui revolusi mental birokrasi; 2.28. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawas internal pemerintahan; 2.29. Sinkronisasi penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban melalui sistem informasi aplikatif di jenjang pemerintahan daerah hingga desa; 2.30. Advokasi secara berkala berkaitan dengan regulasi-regulasi pokok yang menjadi tertib administratif penyelenggaraan pemerintahan.	10. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan didukung atribusi pengawasan yang konstruktif dan komprehensif dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima

	5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2.31. Penegakan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif diperkuat strategi pencegahan korupsi dan transparansi penyelenggaraan pelayanan 2.32. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja dengan percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual; penyelerasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev dan pelaporan berbasis sitem informasi; 2.33. Penataan kelembagaan instansi pemerintahan daerah yang tepat fungsi melalui penyederhanaan struktur organisasi dan optimalisasi penempatan pegawai berbasis kapasitas keilmuan dan profesionalitas birokrat; 2.34. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui restrukturisasi tunjangan perbaikan penghasilan berbasis kinerja serta penerapan assesment dalam rangka mewujudkan remunerasi aparatur sipil negara. 2.35. Perumusan produk hukum daerah yang akomodatif dalam mendukung pelayanan publik, permasalahan pembangunan yang dihadapi satuan kerja perangkat daerah, kebutuhan dan apsirasi masyarakat;	11. Menghadirkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif, transparan, dan akuntabel dilandasi Kejujuran Kebersamaan, Kesabaran, Kerja Keras, dan Keikhlasan 12. Pembangunan Birokrasi yang bersih dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis, dan integratif

		2.36. Peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan daerah dalam perumusan peraturan daerah inisiatif DPRD 2.37. Mendorong inklusifitas dalam menghimpun aspirasi dan kebutuhan masyarakat.	13. Menghadirkan pemerintahan daerah yang berkualitas, aspiratif, dan inklusif
	6. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah	2.38. Perumusan blueprint Aparatur Pemerintahan dalam rangka menunjang jenjang karir dan penataan jabatan struktural sesuai dengan kapasitas dan kompetensi; 2.39. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara yang kompetitif berbasis merit system diperkuat penyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan implementasi CAT system; 2.40. Peningkatan etoskerja pegawai melalui penegakan disiplin kerja didukung pengembangan sistem informasi kepegawaian	14. Pembangunan sumber daya aparatur yang berkualitas berlandaskan kaidah good and clean governance

Dalam ruang lingkup Misi kedua : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan analisa yang memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, maka dirumuskanlah 40 (empat puluh) strategi dan 14 (empat belas) arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, profesionalitas, kejujuran, dan akuntabilitas, dan 6 (enam) sasaran sebagaimana tabel di atas.

VISI :Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas

MISI 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan ke-1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah	3.1. Jaminan kepastian investasi melalui kepastian hukum dan penghapusan regulasi yang mempersulit pertumbuhan dunia usaha untuk berinvestasi dalam koridor keluhuran Budaya Gresik dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup; 3.2. Pengembangan layanan investasi melalui penyederhanaan prosedur, pemberian insentif, transparansi dan kemudahan akses informasi dalam pelayanan perizinan 3.3. Penguatan investasi inklusif yang memprioritaskan sumber daya lokal dan pemerataan pembangunan dunia usaha berbasis kearifan lokal; 3.4. Peningkatan kemitraan investasi dan promosi investasi; 3.5. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) melalui penyederhanaan dan standarisasi prosedur, proses perijinan secara paralel, penciptaan	1. Penguatan iklim investasi dan iklim usaha yang berdaya saing didukung efisiensi prosedural, peningkatan akurasi, kredibilitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan berbasis teknologi dan kemudahan akses informasi

		transparansi dan akuntabilitas proses perijinan, serta meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan.	
		3.6. Penertiban penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); 3.7. Legalisasi asset atau tanah-tanah pemerintah daerah yang terlantar dalam rangka mengurangi potensi sengketa tanah; 3.8. Peningkatan performance pelayanan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah melalui basis data pembangunan yang valid.	2. Penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang strategis dengan mengedepankan keselarasan pemahaman melalui harmonisasi peraturan agraria, peningkatan akurasi dalam akselerasi pelayanan, dan partisipasi masyarakat melalui inisiatif stimulan.
	2. Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif	3.9. Pengarustaamaan nilai-nilai budaya secara integratif dalam dunia pendidikan dan kolaboratif melalui lembaga kemasyarakatan desa guna menumbuhkembangkan kesadaran sosial masyarakat pada kawasan destinasi pariwisata; 3.10. Pengembangan promosi wisata yang inovatif secara meluas dan menciptakan branding pariwisata khas Daerah; 3.11. Pembangunan indutri pariwisata partispatif dengan meningkatkan keterlibatan usha lokal dan berdaya saing dengan meningkatkan	3. Penguatan nilai-nilai budaya Gresik dalam pengembangan kepariwisataan yang didukung keberlanjutan pembangunan infrastuktur pariwisata, kemudahan akses konektivitas destinasi-destinasi pariwisata, dan promosi pariwisata yang inovatif

		keragaman produk/jasa pariwisata yang ditawarkan.	
	3. Mencapai swasembada produksi perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi teknologi perikanan	3.12. Intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya melalui penerapan teknologi perikanan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan; 3.13. Pengembangan sistem logistic dan sistem distribusi hasil perikanan guna menjangkau pangsa pasar konsumsi dan industri; 3.14. Revitalisasi infrastuktur kelautan dan perikanan meliputi Depo Perikanan atau Pasar Ikan Modern, Saluran Tambak, Tempat Pelelangan Ikan, Kapal Penangkapan Ikan, dan Tambatan Perahu; 3.15. Peningkatan mutu, nilai tambah, dan inovasi teknologi perikanan yang terintegrasi dalam pengembangan Usaha Mikro pengolahan hasil perikanan.	4. Peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing perikanan berbasis penerapan inovasi teknologi dan pengembangan sumber daya kelautan secara berkesinambungan dan responsif terhadap pangsa pasar global.
	4. Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	3.16. Intensifikasi, ekstensifikasi, dan revitalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah guna memacu pertumbuhan pendapatan asli daerah didukung optimalisasi sistem informasi, kualitas pelayanan, dan identifikasi pendataan pajak dan retribusi daerah;	5. Pembangunan kemandirian dan keberdayaan ekonomi daerah berlandaskan potensi lokal secara inklusif.

		3.17. Pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar dipelbagai daerah di Kabupaten Gresik, serta kerjasama kemitraan dengan lembaga Non Pemerintah lainnya baik dalam lingkup kabupaten maupun provinsi	
		3.18. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akuntansi akrual; 3.19. Perumusan penganggaran berbasis kinerja didukung akurasi penetapan regulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara tepat waktu berlandaskan prioritas pembangunan. 3.20. Peningkatan kualitas penatausahaan serta pemanfaatan asset daerah secara optimal secara komprehensif;	6. Penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual.

	5. Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.	3.21. Penguatan basis data pembangunan infrastruktur 3.22. Peningkatan kualitas pembangunan infrastuktur diiringi maintenance yang berkelanjutan. 3.23. Pembangunan infrastruktur pendukung dalam pengembangan kawasan strategis meliputi Gelora Joko Samudro, WEP, dan infrastuktur lain serta penguatan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali dengan penataan kawasan religi, Islamic Centre, pusat kegiatan dan budaya Islam	7. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan harmonis berlandaskan Rencana Tata Ruang guna mendukung daya saing daerah, menguatkan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali didukung keselarasan dan pemerataan pembangunan.
		3.24. Penguatan institusional dan kerjasama antar sektor dalam pelayanan air minum, air baku, dan sanitasi untuk meningkatkan atribusi pelayanan kepada masyarakat. 3.25. Optimalisasi infrastruktur air minum dan sanitasi eksisting melalui penurunan Non-Revenue Water dan pemanfaatan idle capacity; 3.26. Peningkatan kualitas rencana dan implementasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK); 3.27. Optimalisasi Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;	8. Peningkatan kualitas layanan dasar infrastruktur melalui perbaikan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan, sarana prasarana penunjang, dan peningkatan keberdayaan masyarakat.

		3.28. Peningkatan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian Banjir akibat Bengawan Solo, Luapan Kali Lamong, Luapan Kali Surabaya, Banjir Perkotaan, dan Banjir Pulau Bawean	
		3.29. Pemenuhan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif, spesifik, dan harmonis; 3.30. Peningkatan peran lintas sektor melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam rangka intervensi secara spesifik dan responsif guna menghadirkan keselarasan pembangunan.	9. Penguatan peran lintas sektor dalam meletakkan pembangunan sesuai dengan tata ruang ditunjang komprehensifitas regulasi dan validitas data.
	6. Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu	3.31. Pembangunan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan Kecamatan dan menjangkau arus perekonomian perdesaan; 3.32. Penguatan sistem transpotasi intermoda maupun multimoda dalam rangka mendukung kelancaran sistem logistik daerah dan regional, dan mendukung kerja sama antar daerah; 3.33. Pembangunan sarana prasarana transportasi yang ramah lingkungan; 3.34. Peningkatan sumber daya perhubungan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi dan penerapan manajemen transportasi	10. Penguatan konektivitas antar wilayah melalui pengembangan layanan dan pembangunan sarana prasarana penunjang transportasi dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, keselamatan pengguna, mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi wilayah, atribusi dan akurasi layanan transportasi.

		berbasis IT guna mewujudkan keselamatan hingga menuju zero accident;	
Tujuan ke-2 Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan	3.35. Penguatan basis data terpadu dan ketersediaan informasi yang mendukung pengukuran kualitas lingkungan hidup daerah 3.36. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara terpadu didukung kebijakan yang ramah lingkungan. 3.37. Pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan lingkungan abiotik didukung optimalisasi fungsi Laboratorium Lingkungan Hidup. 3.38. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan pengendalian polusi udara secara bertahap. 3.39. Menghapuskan degradasi kualitas lingkungan melalui Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan secara menyeluruh didukung ketegasan law enforcement secara formal, penataan taman kota, kepedulian dunia usaha dan peran masyarakat dalam dunia pendidikan untuk melaksanakan penghijauan, serta penguatan pengolahan limbah/persampahan secara terpadu melalui reuse, reduce, recycle.	11. Meletakkan pembangunan infrastruktur dalam konteks berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, peduli terhadap perubahan iklim, dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan.

		3.40. Memperhatikan pelestarian dan pemanfaatan nilai ekonomi kenaeragaman hayati sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-2020 dengan mendukung pengembangan kebijakan yang mendukung keunggulan komparatif industri hilir (nilai tambah); dan industri berbasis bioresource (energi, farmasi, kesehatan, kosmetik, pangan, dan biomaterial) serta pengembangan IPTEK dan inovasi teknologi terapan yang tepat (termasuk local wisdom) secara terintegrasi.	
		3.41. Meningkatkan kualitas tata kelola hutan (taman hutan rakyat) yang mengedepankan kualitas lingkungan dan kelestarian ekosistem hutan secara partisipatif; 3.42. Pengelolaan hutan produksi dalam produksi kayu dan non kayu yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan. 3.43. Adokasi perlindungan dan konservasi ekosistem hutan serta pemanfaatan lahan kritis secara optimal	12.Preservasi dan konservasi secara berkelanjutan terhadap cakupan hutan daerah (Taman Hutan Raya) dan lahan kritis serta mengoptimalkan hasil hutan dengan prioritas akan keberlangsungan ekosistem hutan.
Tujuan ke-3 Mewujudkan penanggulangan	8. Menurunnya tingkat pengangguran	3.44. Pemerataan dan perluasan kesempatan kerja didukung dengan pengembangan kapasitas dan kualitas	13.Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui penguatan akses dan

kemiskinan secara terpadu.		tenaga kerja berorientasi demand driven dan berbasis kewirausahaan (pencari kerja dan santri), keterbukaan informasi serta pembangunan jejaring kemitraan lintas sektor	produktifitas terhadap pengelolaan sumberdaya produktif
		3.45. Pengarustamaan norma-norma ketenagakerjaan secara konsisten serta penerapan collective bargaining antara pekerja dan pemberi kerja secara efektif guna meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan didukung advokasi peraturan ketenagakerjaan secara berkelanjutan; 3.46. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan memperkuat kerja sama dengan komisi perlindungan serta pemerintah dalam rangka memberikan keterjaminan perlindungan bagi pekerja migran;	14. <i>Maintanance</i> terhadap keselarasan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan hubungan industrial yang harmonis melalui pendekatan yang kooperatif dan ketertiban penegakan regulasi dalam dunia usaha.
	9. Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha Usaha Mikro dan Koperasi yang inovatif	3.47. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal didukung standardisasi produk nasional maupun sertifikasi keunggulan mutu dan kualitas produk. 3.48. Pengembangan peluang investasi Koperasi dan Usaha Mikro di Indeks Harga Saham Gabungan guna mendukung stabilitas pasar saham	15. Pengembangan sektor Usaha Mikro sebagai landasan ekonomi keraktyatan secara inklusif dengan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk dan membuka peluang pasar yang lebih luas.

		yang berdampak sistemik pada perekonomian nasional	
		3.49. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kewirausahaan yang sistemik dan integratif dalam kurikulum dunia pendidikan, pelatihan berbasis teknologi dan pendampingan kolaboratif dalam mengakses networking dunia kerja, 3.50. Peningkatan akses pembiayaan dan skema perluasan pembiayaan melalui lembaga pembiayaan formal perbankan maupun non-bank disertai advokasi dan perlindungan finansial;	16. Pembangunan ekonomi daerah yang berdikari, disokong inovasi dan kreatifitas koperasi serta jiwa kewirausahaan Usaha Mikro guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Gresik
		3.51. Peningkatan iklim usaha berdaya saing melalui kemudahan akses perizinan dan pembenahan prosedur perdagangan melalui e-Commerce 3.52. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga melalui revitalisasi pasar-pasar desa dan kecamatan 3.53. Pengembangan sistem informasi perdagangan antar wilayah dan peningkatan aktivitas perdagangan melalui inovasi promosi dagang 3.54. Pengarustamaan pemanfaatan produk-produk dalam negeri dan khas	17. Penguatan daya saing dan kondusifitas iklim usaha perdagangan daerah dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi berlandaskan perlindungan terhadap konsumen dan standardisasi produk khas Gresik.

		daerah serta pengembangan kapasitas pengusaha mikro, kecil, dan menengah.	
	10. Meningkatkan produktivitas perdagangan dan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan	3.55. Pengembangan kapasitas industri mikro dan kecil melalui pengembangan kewirausahaan yang sistemik dan integratif dalam kurikulum dunia pendidikan, stimulasi penerapan teknologi, dan akses terhadap lembaga keuangan formal 3.56. Peningkatan investasi dan penataan struktur industri serta pengembangan sentra-sentra industri potensial 3.57. Peningkatan iklim perindustrian berdaya saing melalui kemudahan akses dan pembenahan prosedur perizinan	18. Penguatan investasi sektor industrial guna meningkatkan populasi industri berskala besar dan menengah serta pengembangan kapasitas secara berkelanjutan bagi industri berskala mikro dan kecil.
		3.58. Pengawasan kolaboratif dan partisipatif secara berkesinambungan terhadap pemanfaatan energi dan sumber daya mineral daerah	19. Pemanfaatan energi dan sumber daya mineral daerah secara berkelanjutan melalui tata kelola yang peduli lingkungan hidup.
	11. Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan	3.59. Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar yang komprehensif melalui penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang efektif, penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi, pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan kerja;	20. Keberlanjutan dan Kebersinambungan layanan sosial dengan memperluas jangkauan pelayanan secara merata, kepastian layanan yang berkeadilan, dan kemudahan akses serta optimalisasi penanggulangan kemiskinan.

		3.60. Inisiasi lembaga dan/atau layanan sosial berbasis kewilayahan didukung regulasi yang komprehensif; 3.61. Peningkatan kapasitas masyarakat penyandang masalah sosial secara partisipatif serta literasi nilai-nilai sosial yang positif. 3.62. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan program-program unggulan kemiskinan, penguatan peran intermediary, dan peningkatan keberdayaan masyarakat miskin maupun rentan miskin secara menyeluruh dalam dimensi kemiskinan meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan infrastuktur dasar serta ditunjang peningkatan pendapatan dan pengembangan kegiatan perekonomian.	
	12. Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	3.63. Mewujudkan kawasan permukiman yang kondusif, inklusif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	21. Penguatan pembangunan kawasan permukiman melalui percepatan pengentasan lingkungan kumuh, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan kemudahan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat miskin.

	13. Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan Untuk mencapai kemandirian Desa	3.64. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintah desa melalui pendampingan perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan Data Potensi Desa), pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan rencana pembangunan; 3.65. Reformasi pelayanan publik di perdesaan melalui pemerataan jaringan internet dan ketersediaan piranti Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3.66. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dukungan finansial secara stimulan dan kemudahan akses terhadap lembaga keuangan formal guna pengembangan usaha atau kewirausahaan, bantuan modal, pemanfaatan teknologi, dan akses pemasaran didukung penguatan BUMDesa dan BUMaDes. 3.67. Pembangunan kawasan perdesaan melalui penataan desa secara terpadu, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; 3.68. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sesuai	22. Membangun Desa, Desa Membangun

		dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya, kearifan lokal yang tertanam, dan permasalahan riil yang dihadapi desa dalam penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya dengan meletakkan kesetaraan Gender sebagai perspektif society enabling & empowering. 3.69. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui program-program pembangunan berskala desa serta akselerasi pembangunan melalui bantuan keuangan dengan prioritas pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi perdesaan, optimalisasi perpustakaan desa, pengembangan media komunitas lokal, Desa Learning Center, dan fasilitasi pemberdayaan perempuan perdesaan berbasis komunitas.	
	14. Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan	3.70. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu; 3.71. Revitalisasi pembenihan dan perbibitan bahan pangan pokok utama	23. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok ditunjang perbaikan infrastruktur, diversifikasi konsumsi pangan utama, dan mitigasi kerawanan pangan.

		didukung penyuluhan yang berkelanjutan; 3.72. Akselerasi penerapan teknologi budidaya pertanian secara signifikan yang dapat meningkatkan produktifitas, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim seperti system of rice intensification (SRI) dan budidaya pertanian organik; 3.73. Pemerataan akses dan perlindungan finansial terhadap petani didukung stimulus sarana pendukung pertanian yang dikelola secara berkelompok dan terpadu; 3.74. Avokasi terhadap perkembangan pengelolaan pertanian, dan pengembangan benih unggul.	
		3.75. Menjaga stabilitas harga pangan utama melalui operasi pasar yang efektif; 3.76. Memperkuat mitigasi kerawanan pangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan pemetaan secara menyeluruh terhadap basis-basis produksi pangan kewilayahan, kerentanan, dan ketahanan pangan didukung dengan inisiasi teknologi	

		3.77. Peningkatan mutu dan daya saing agribisnis melalui pengembangan standardisasi hasil pertanian dengan perbaikan teknologi produksi, penerapan standar mutu komoditas, pembinaan dan pengawasan mutu produk pertanian, peningkatan kuantitas dan peran lembaga sertifikasi. 3.78. Peningkatan aksesibilitas petani di kawasan perdesaan terhadap inovasi teknologi pertanian, sumber-sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan formal, desiminasi informasi pasar dan akses pasar. 3.79. Pembangunan infrastruktur pertanian secara berkelanjutan dan kolaboratif melalui penguatan peran lintas sektor	24. Revitalisasi sumber daya pertanian diiringi peningkatan mutu dan daya saing hasil pertanian secara berkelanjutan guna mendukung eksplorasi potensi agribisnis secara optimal.

Dalam ruang lingkup Misi ketiga : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Berdasarkan analisa SWOT yang memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, maka dirumuskanlah 78 (tujuh delapan) strategi dan 25 (dua puluh lima) arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi daerah, penguatan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan menuju pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada kompetisi global, dan 14 (empat belas) sasaran sebagaimana tabel di atas.

VISI :Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas

MISI 4 : Meningkatnya kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan	1. Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	4.1. Penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan. 4.2. Penguatan kredibilitas kurikulum ajar, peningkatan kualitas proses pembelajaran, penerapan sistem penilaian pendidik yang komprehensif dan proporsional; 4.3. Pengembangan kapasitas dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan karir, peningkatan kualifikasi, peningkatan kesejahteraan, pengembangan profesi dan kompetensi; 4.4. Penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan melalui perlindungan finansial terhadap siswa kategori keluarga miskin dan pemberian insentif bagi siswa berprestasi ditunjang akuntabilitas dan	1. Peningkatan atribusi dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dasar untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan seluruh masyarakat Gresik didukung penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, transparan, berkualitas, dan inklusif dengan mengintegrasikan keluhuran Budaya Gresik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagama'an;

		transparansi disertai kemudahan akses dan keterbukaan informasi masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar; 4.5. Internalisasi nilai-nilai luhur budaya Gresik dalam dunia pendidikan melalui peningkatan kemampuan hafalan Qur'an peserta didik pada jenjang dan klasifikasi tertentu; 4.6. Menciptakan linkage dunia pendidikan dan dunia usaha melalui inovasi pembelajaran dengan menerapkan kebutuhan dunia usaha dalam kurikulum ajar; 4.7. Peningkatan kualitas output pendidikan melalui avokasi secara berkelanjutan dalam menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi peserta didik dalam menciptakan karya tulis.	
		4.8. Intensifikasi Pengawasan terhadap pembiayaan pendidikan, pengelolaan anggaran pendidikan dalam APBS dan perizinan penyelenggaraan pendidikan serta pembangunan fasilitas sarana prasarana penunjang secara berkelanjutan; 4.9. Memperkuat peranan swasta dan masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas;	2. Penguatan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pengelolaan anggaran pendidikan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai.

		4.10. Meningkatkan budaya gemar membaca melalui promosi membaca dan inisiasi peningkatan karya tulis siswa yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan; 4.11. Meningkatkan layanan perpustakaan daerah dengan meningkatkan preservasi dan konservasi bahan perpustakaan, keberagaman koleksi buku, pustaka online, dan pembangunan kapasitas pustakawan.	3. Peningkatan kapasitas, akses, dan utilitas perpustakaan sebagai <i>turning point</i> pembangunan pendidikan masyarakat yang berkualitas dengan menguatkan budaya gemar membaca dan pengembangan kompetensi pustakawan.
	2. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	4.12. Menginisiasikan continuum of care terhadap pelayanan ibu dan anak dengan peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan; 4.13. Pengarustamaan upaya kesehatan promotif dan preventif dalam peningkatan derajat ibu dan anak didukung seluruh stakeholder kesehatan.	4. Peningkatan pembangunan kesehatan melalui penguatan upaya kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) secara promotif maupun preventif, pemenuhan jaminan kesehatan, aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan serta pembangunan sumber daya kesehatan.
		4.14. Enabling dan empowering dalam peningkatan peran masyarakat untuk meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif dalam meningkatkan status dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan melalui Upaya Kesehatan Sekolah	5. Penguatan pembangunan gizi masyarakat melalui penguatan upaya kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) secara promotif maupun preventif ditunjang penguatan keberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan.

		(UKS), pelayanan imunisasi tepat waktu, dan Posyandu; 4.15. Perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene dan pengasuhan serta meningkatkan pemantauan pertumbuhan anak;	
		4.16. Pemerataan pelayanan kesehatan melalui akselerasi pembangunan sumber daya kesehatan dan perbaikan pengelolaan pelayanan kesehatan di tingkat Daerah, Kecamatan (Puskesmas dan Puskesmas Pembantu), dan Desa (Ponkesdes) 4.17. Pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit daerah yang professional ditunjang kemudahan akses, mutu internal fasilitas kesehatan, dan efektivitas pengelolaan dana kesehatan; 4.18. Pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan pada puskesmas dan ponkesdes;	6. Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan Obat, Mutu Obat, Makanan, dan Sumberdaya Manusia Kesehatan
		4.19. Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik untuk menjamin pemenuhan kualitas pelayanan (quality assurance)	7. Perlindungan terintegratif secara promotif, preventif, dan kuratif (finansial) terhadap masyarakat kategori miskin dan rentan miskin

		kesehatan masyarakat secara terintegratif melalui pendekatan promotif dan preventif didukung perlindungan finansial dalam pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin.	dalam mengakses layanan kesehatan.
Tujuan 2 Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana	4.20. Penguatan dan pengembangan strategi avokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait program-program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga terhadap masyarakat terutama remaja yang dalam penyiapan berkeluarga; 4.21. Pemerataan dan kemudahan akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; 4.22. Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter, moralitas, serta mental kepribadian generasi penerus.	8. Pengendalian dinamika kependudukan dan internalisasi nilai- nilai pembangunan keluarga yang sehat dan sejahtera guna mewujudkan keseimbangan daya dukung alam dan lingkungan, tatanan sosial ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk secara merata.
	4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender	4.23. Integrasi pengarusutamaan Gender dalam penguatan kerjasama lintas dalam tataran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah. 4.24. Meletakkan kesetaraan Gender sebagai perspektif society enabling &	9. Sinergitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan

		empowering maupun kaidah penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif.	
	5. Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak anak	4.25. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya perlindungan perempuan dan anak serta avokasi terhadap pelbagai upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak didukung upaya preventif dan promotif berbasis pemberdayaan masyarakat 4.26. Peningkatan akses anak terhadap layanan berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup melalui akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran, pembangunan lingkungan ramah anak dalam tataran sekolah hingga Daerah, ketersediaan layanan PAUD yang berkualitas dan filter informasi layak anak dalam rangka menuju kabupaten layak anak	10. Mewujudkan keberdayaan perempuan yang mandiri dalam pembangunan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup yang berkualitas.

Dalam ruang lingkup Misi keempat : Meningkatnya kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Berdasarkan analisa yang memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, maka dirumuskanlah 26 (dua puluh enam) strategi dan 10 (sepuluh) arah kebijakan dalam rangka

pencapaian tujuan meningkatnya kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, dan 5 (lima) sasaran sebagaimana tabel di atas.

Tabel 6.2
 Pemetaan Timline Strategi dan Arah Kebijakan
 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

VISI :Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas
MISI 1 : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri

Tujuan	Meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dengan landasan nilai-nilai agama sebagai cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri		Time Line				
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat	1.1.Sinergitas Law Enforcement yang menjunjung tinggi keadilan dengan keberdayaan moral, perilaku, dan pemahaman masyarakat dalam koridor religiusme budaya Gresik Kota Kota Wali dan Kota Santri. 1.2.Avokasi pembinaan karakter masyarakat yang berwawasan kebangsaan melalui revolusi mental	1. Integrasi keluhuran Budaya Gresik yang religius dalam mewujudkan kondusifitas kehidupan berbangsa didukung Pamong Praja yang tangguh					
							

2. Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran	1.3.Peningkatan kualitas penanggulangan bencana daerah melalui penguatan peran masyarakat tanggap bencana, keterbukaan informasi, dan pembangunan basis data ancaman dan resiko bencana.	2. Pengelolaan penanggulangan bencana yang responsif guna menguatkan penegakan hak atas rasa aman, mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.					
3. Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan	1.4.Peningkatan kapasitas pemuda melalui inisiasi pendidikan terpadu meliputi intelektual, emosional dan spiritual dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan inovasi pemuda, perlindungan terhadap napza, miras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit seksual menular di kalangan pemuda. 1.5.Menumbuhkembangkan budaya olahraga dan prestasi pada jenjang pendidikan pendidikan dasar dengan mengedepankan sportifitas didukung penguatan sarana infrastruktur dan suprastuktur kepemudaan dan olahraga. 1.6.Menanamkan nilai-nilai sosial patriotisme, kasadaran akan hak dan kewajiban, kedisiplinan dan nilai-nilai luhur budaya yang religius dalam rangka menata moral dan etika generasi muda secara berkelanjutan.	3. Pembangunan kepemudaan yang berkarakter dan peningkatan prestasi olahraga daerah secara partisipatif dengan menciptakan kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual, dilandasi kearifan dan keluhuran Budaya Gresik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagama'an.					
							
							
4. Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal	1.7.Inisiasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan untuk mewujudkan pendidikan karakter yang berorientasi pada kreativitas, inovasi, kepedulian lingkungan, pemahaman akan hak dan kewajiban, nasionalis, dan pelbagai nilai positif lainnya;	4. Pengarustamaan nilai-nilai kebudayaan Gresik yang luhur dan mulia dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan, pembangunan manusia berakhlak,					

	1.8. Pelestarian warisan budaya para Wali dan pengikutnya baik yang bersifat tangible maupun intangible serta meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas budaya melalui fasilitasi pelbagai event strategis.	dan pengelolaan sumber-sumber daya peradaban.					
	1.9. Mewujudkan ruang kreasi publik sebagai tempat berinteraksi, melakukan promosi, menggelar karya seni dan sarana pagelaran budaya, serta meningkatkan informasi budaya berkualitas bagi masyarakat.						

MISI 2 : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik		Time Line				
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik	2.1. Pembangunan Basis Data terpadu kependudukan dan catatan sipil yang telah terhamonisasi secara agregat pada jenjang pemerintah desa, intermediary kecamatan, daerah hingga pusat; 2.2. Percepatan pelayanan dengan mendekatkan basis layanan kepada masyarakat melalui Kecamatan hingga secara bertahap	1. Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil didukung pemutakhiran teknologi dengan mendekatkan basis pelayanan kepada masyarakat					

	mengoptimalkan peran Pemerintah Desa sebagai kunci pelayanan didukung pemenuhan jaringan internet, ketersediaan piranti, peningkatan kapasitas kelembagan dan sumber daya aparatur desa;						
	2.3. Harmonisasi dan aktualisasi data kependudukan dan catatan sipil didukung perlindungan secara menyeluruh terhadap dokumen melalui ahli media yang telah terautentifikasi.						
	2.4. Pemanfaatan basis data kependudukan (ketunggalan identitas) sebagai basis identitas penerima manfaat program pembangunan daerah seluas-luasnya di seluruh satuan kerja perangkat daerah.						
	2.5. Peningkatan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan catatan sipil melalui penguatan edukasi terhadap masyarakat maupun petugas pelayanan						
	2.6. Advokasi pengelolaan arsip secara baku pada setiap jenjang pemerintahan didukung pengembangan sumber daya arsiparis melalui peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan kearsipan termutakhir;	2. Penyelenggaraan pengelolaan kearsipan yang tertib didukung keterjaminan perlindungan dan kelestarian output atau memori penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung perumusan kebijakan daerah yang strategis dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan					
	2.7. Peningkatan alihmedia terhadap khasanah arsip statis guna menjamin keselamatan dan kelestarian dan mempermudah pemanfaatan data.						

	2.8. Pelimpahan kewenangan secara bertahap sesuai tematik prioritas tahunan daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan.	3. Pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh hingga pelosok desa melalui penguatan intermediary kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan koordinator kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan di Desa					
	2.9. Penguatan sumber daya aparatur kecamatan melalui bimbingan teknis, lokakarya, dan pelbagai media secara terintegratif antara perangkat daerah ditunjang dukungan anggaran yang mencukupi.						
2. Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi	2.10. Pemerataan jaringan internet di kawasan perdesaan guna menunjang pertumbuhan ekonomi, percepatan pelayanan publik, dan mendukung kemajuan penyelenggaraan pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan informasi;	4. Keterbukaan informasi secara aktual dan faktual dalam koridor e-Government guna menggugah partisipasi publik secara konstruktif untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi dan pemanfaatan data pembangunan, serta mendukung optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan. 5. Akselerasi pembangunan melalui pemanfaatan TIK mejadi quick wins pembangunan 6 (enam) dimensi smart city.					
	2.11. Menguatkan ketersediaan informasi data pembangunan Gresik yang up to date dalam layanan official website pemerintah Daerah.						
	2.12. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah pada jenjang pemerintah desa, intermediary kecamatan hingga satuan kerja perangkat daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung kinerja birokrasi dan pelayanan publik;						
	2.13. Penguatan media, ruang, atau wahana idea sharing antara publik, pemerintahan daerah, dan swasta dalam mengungkapkan aspirasi, kritik dan saran terhadap kebijakan, kebutuhan akan informasi pembangunan serta media untuk						

	menampilkan inovasi atau karya tertentu melalui ruang konservatif maupun melalui internet network 2.14. Mewujudkan pembangunan smart city berbasis 6 (enam) pilar						
	2.15. Penyempurnaan klasifikasi dan standardisasi serta harmonisasi ketersediaan data report based oleh setiap perangkat daerah dan Desa; 2.16. Peningkatan kompetensi pengolah data didukung penerapan aplikasi informatif yang komprehensif; 2.17. Pembentukan tim terpadu pembangunan basis data terpadu pada jenjang desa, intermediary kecamatan, hingga perangkat daerah dan meningkatkan kerjasama serta koordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Swasta, dan stakeholder terkait	6. Pembangunan basis data terpadu yang komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan akuntable					
							
							
	2.18. Pengamanan informasi pemerintahan daerah yang dikecualikan melalui penetapan pola hubungan sandi antar perangkat daerah	7. Perlindungan kerahasiaan informasi Daerah yang dikecualikan secara komprehensif dalam rangka menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.					
3. Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	2.19. Penguatan sistem informasi perencanaan yang mendukung penyelenggaraan perencanaan di setiap jenjang pemerintahan;	8. Perencanaan terbaik untuk pembangunan yang lebih baik					

	2.20. Pengarustamaan prioritas pembangunan sebagai komitmen pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk menjadi landasan penyusunan program pembangunan;						
	2.21. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya perencanaan melalui pengembangan kapasitas didukung intensifikasi koordinasi dalam perumusan kebijakan;						
	2.22. Peningkatan aksesibilitas informasi dan data survey based maupun repot based sebagai landasan pertimbangan dan analisa perumusan perencanaan yang berkualitas.						
	2.23. Penguatan sistem inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen rencana tahunan;	9. Akselerasi inovasi daerah didukung sinergitas penelitian dan pengembangan oleh pemerintah, swasta, dan akademisi dengan melibatkan peran aktif masyarakat					
	2.24. Elaborasi secara intensif dengan perguruan tinggi melaui Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri dan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Swasta;						
	2.25. Peningkatan kualitas kajian penelitian daerah melalui penguatan roadmap dan research yang responsif sesuai kebutuhan kebijakan pembangunan						
4. Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	2.26. Sinergitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui koordinasi intensif melalui pengawasan internal (melekat dan	10. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan didukung atribusi pengawasan yang konstruktif dan komprehensif					

	fungsional), eksternal, dan pengawasan masyarakat; 2.27. Inisiasi budaya kerja dengan etos kerja, integritas, dan gotong royong melalui revolusi mental birokrasi; 2.28. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawas internal pemerintahan; 2.29. Sinkronisasi penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban melalui sistem informasi aplikatif di jenjang pemerintahan daerah hingga desa; 2.30. Advokasi secara berkala berkaitan dengan regulasi-regulasi pokok yang menjadi tertib administratif penyelenggaraan pemerintahan.	dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima					
							
							
							
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2.31. Penegakan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif diperkuat strategi pencegahan korupsi dan transparansi penyelenggaraan pelayanan 2.32. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja dengan percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual; penyelerasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev dan pelaporan berbasis sitem informasi; 2.33. Penataan kelembagaan instansi pemerintahan daerah yang tepat fungsi melalui penyederhanaan struktur organisasi	11. Menghadirkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif, transparan, dan akuntabel dilandasi Kejujuran Kebersamaan, Kesabaran, Kerja Keras, dan Keikhlasan 12. Pembangunan Birokrasi yang bersih dalam meuwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis, dan integratif					
							
							

	dan optimalisasi penempatan pegawai berbasis kapasitas keilmuan dan profesionalitas birokrat; 2.34. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui restrukturisasi tunjangan perbaikan penghasilan berbasis kinerja serta penerapan assesment dalam rangka mewujudkan remunerasi aparatur sipil negara. 2.35. Perumusan produk hukum daerah yang akomodatif dalam mendukung pelayanan publik, permasalahan pembangunan yang dihadapi satuan kerja perangkat daerah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat;						
							
	2.36. Peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan daerah dalam perumusan peraturan daerah inisiatif DPRD 2.37. Mendorong inklusifitas dalam menghimpun aspirasi dan kebutuhan masyarakat.	13. Menghadirkan pemerintahan daerah yang berkualitas, aspiratif, dan inklusif					
							
6. Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah	2.38. Perumusan blueprint Aparatur Pemerintahan dalam rangka menunjang jenjang karir dan penataan jabatan struktural sesuai dengan kapasitas dan kompetensi; 2.39. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara yang kompetitif berbasis merit system diperkuat penyempurnaan tatakelola	14. Pembangunan sumber daya aparatur yang berkualitas berlandaskan kaidah <i>good and clean governance</i>					
							

	seleksi dan perluasan implementasi CAT system; 2.40. Peningkatan etoskerja pegawai melalui penegakan disiplin kerja didukung pengembangan sistem informasi kepegawaian						

VISI :Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas
MISI 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Timeline				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tujuan ke-1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif						
1. Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah	3.1. Jaminan kepastian investasi melalui kepastian hukum dan penghapusan regulasi yang mempersulit pertumbuhan dunia usaha untuk berinvestasi dalam koridor keluhuran Budaya Gresik dan	1. Penguatan iklim investasi dan iklim usaha yang berdaya saing didukung efisiensi prosedural, peningkatan akurasi, kredibilitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan berbasis					

	mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup; 3.2. Pengembangan layanan investasi melalui penyederhanaan prosedur, pemberian insentif, transparansi dan kemudahan akses informasi dalam pelayanan perizinan 3.3. Penguatan investasi inklusif yang memprioritaskan sumber daya lokal dan pemerataan pembangunan dunia usaha berbasis kearifan lokal; 3.4. Peningkatan kemitraan investasi dan promosi investasi; 3.5. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) melalui penyederhanaan dan standardisasi prosedur, proses perijinan secara paralel, penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perijinan, serta meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan.	teknologi dan kemudahan akses informasi					
							
							
							
	3.6. Penertiban penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); 3.7. Legalisasi asset atau tanah-tanah pemerintah daerah yang terlantar dalam rangka mengurangi potensi sengketa tanah; 3.8. Peningkatan performance pelayanan pertanahan yang menjadi kewenangan	2. Penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang strategis dengan mengedepankan keselarasan pemahaman melalui harmonisasi peraturan agraria, peningkatan akurasi dalam akselerasi pelayanan, dan partisipasi masyarakat melalui inisiatif stimulan.					
							
							

	daerah melalui basis data pembangunan yang valid.							
2. Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif	3.9. Pengarustaamaan nilai-nilai budaya secara integratif dalam dunia pendidikan dan kolaboratif melalui lembaga kemasyarakatan desa guna menumbuhkembangkan kesadaran sosial masyarakat pada kawasan destinasi pariwisata;	3. Penguatan nilai-nilai budaya Gresik dalam pengembangan kepariwisataan yang didukung keberlanjutan pembangunan infrastuktur pariwisata, kemudahan akses konektivitas destinasi-destinasi pariwisata, dan promosi pariwisata yang inovatif						
	3.10. Pengembangan promosi wisata yang inovatif secara meluas dan menciptakan branding pariwisata khas Daerah;							
	3.11. Pembangunan industri pariwisata partisipatif dengan meningkatkan keterlibatan usaha lokal dan berdaya saing dengan meningkatkan keragaman produk/jasa pariwisata yang ditawarkan.							
3. Mencapai swasembada produksi perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi teknologi perikanan	3.12. Intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya melalui penerapan teknologi perikanan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan;	4. Peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing perikanan berbasis penerapan inovasi teknologi dan pengembangan sumber daya kelautan secara berkesinambungan dan responsif terhadap pangsa pasar global.						
	3.13. Pengembangan sistem logistic dan sistem distribusi hasil perikanan guna menjangkau pangsa pasar konsumsi dan industri;							
	3.14. Revitalisasi infrastuktur kelautan dan perikanan meliputi Depo Perikanan atau Pasar Ikan Modern, Saluran Tambak, Tempat Pelelangan Ikan, Kapal							

	Penangkapan Ikan,dan Tambatan Perahu; 3.15. Peningkatan mutu, nilai tambah, dan inovasi teknologi perikanan yang terintegrasi dalam pengembangan Usaha Mikro pengolahan hasil perikanan.						
4. Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	3.16. Intensifikasi, ekstensifikasi, dan revitalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah guna memacu pertumbuhan pendapatan asli daerah didukung optimalisasi sistem informasi, kualitas pelayanan, dan identifikasi pendataan pajak dan retribusi daerah; 3.17. Pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar dipelbagai daerah di Kabupaten Gresik, serta kerjasama kemitraan dengan lembaga Non Pemerintah lainnya baik dalam lingkup kabupaten maupun provinsi	5. Pembangunan kemandirian dan keberdayaan ekonomi daerah berlandaskan potensi lokal secara inklusif.					
							

	3.18. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akuntansi akrual; 3.19. Perumusan penganggaran berbasis kinerja didukung akurasi penetapan regulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara tepat waktu berlandaskan prioritas pembangunan. 3.20. Peningkatan kualitas penatausahaan serta pemanfaatan asset daerah secara optimal secara komprehensif;	6. Penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual.					
							
							
5. Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.	3.21. Penguatan basis data pembangunan infrastruktur 3.22. Peningkatan kualitas pembangunan infrastuktur diiringi <i>maintenance</i> yang berkelanjutan. 3.23. Pembangunan infrastruktur pendukung dalam pengembangan kawasan strategis meliputi Gelora Joko Samudro, WEP, dan infrastuktur lain serta penguatan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali dengan penataan kawasan religi, Islamic Centre, pusat kegiatan dan budaya Islam	7. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan harmonis berlandaskan Rencana Tata Ruang guna mendukung daya saing daerah, menguatkan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali didukung keselarasan dan pemerataan pembangunan.					
							
	3.24. Penguatan institusional dan kerjasama antar sektor dalam pelayanan air minum, air baku, dan sanitasi untuk meningkatkan atribusi pelayanan kepada masyarakat.	8. Peningkatan kualitas layanan dasar infrastruktur melalui perbaikan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan, sarana prasarana penunjang, dan					

	3.25.	Optimalisasi infrastruktur air minum dan sanitasi eksisting melalui penurunan Non-Revenue Water dan pemanfaatan idle capacity;	peningkatan keberdayaan masyarakat.					
	3.26.	Peningkatan kualitas rencana dan implementasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK);						
	3.27.	Optimalisasi Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;						
	3.28.	Peningkatan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian Banjir akibat Bengawan Solo, Luapan Kali Lamong, Luapan Kali Surabaya, Banjir Perkotaan, dan Banjir Pulau Bawean						
	3.29.	Pemenuhan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif, spesifik, dan harmonis;	9. Penguatan peran lintas sektor dalam meletakkan pembangunan sesuai dengan tata ruang ditunjang komprehensifitas regulasi dan validitas data.					
	3.30.	Peningkatan peran lintas sektor melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam rangka intervensi secara spesifik dan responsif guna menghadirkan keselarasan pembangunan.						
6.	Mewujudkan pelayanan perhubungan dengan prioritas keselamatan, dan ketepatan waktu	3.31. Pembangunan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan Kecamatan dan menjangkau arus perekonomian perdesaan;	10. Penguatan konektivitas antar wilayah melalui pengembangan layanan dan pembangunan sarana prasarana penunjang transportasi dengan					

	3.32. Penguatan sistem transportasi intermoda maupun multimoda dalam rangka mendukung kelancaran sistem logistik daerah dan regional, dan mendukung kerja sama antar daerah; 3.33. Pembangunan sarana prasarana transportasi yang ramah lingkungan; 3.34. Peningkatan sumber daya perhubungan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi dan penerapan manajemen transportasi berbasis IT guna mewujudkan keselamatan hingga menuju zero accident;	mempertimbangkan dampak lingkungan, keselamatan pengguna, mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi wilayah, atribusi dan akurasi layanan transportasi.					
							
							
Tujuan ke-2	Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan						
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan	3.35. Penguatan basis data terpadu dan ketersediaan informasi yang mendukung pengukuran kualitas lingkungan hidup daerah 3.36. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara terpadu didukung kebijakan yang ramah lingkungan. 3.37. Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan lingkungan abiotik didukung optimalisasi fungsi Laboratorium Lingkungan Hidup.	11.Meletakkan pembangunan infrastruktur dalam konteks berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, peduli terhadap perubahan iklim, dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan.					
							

	3.38. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan pengendalian polusi udara secara bertahap.						
	3.39. Menghapuskan degradasi kualitas lingkungan melalui Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan secara menyeluruh didukung ketegasan law enforcement secara formal, penataan taman kota, kepedulian dunia usaha dan peran masyarakat dalam dunia pendidikan untuk melaksanakan penghijauan, serta penguatan pengolahan limbah/persampahan secara terpadu melalui reuse, reduce, recycle.						
	3.40. Memperhatikan pelestarian dan pemanfaatan nilai ekonomi kenaeragaman hayati sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-2020 dengan mendukung pengembangan kebijakan yang mendukung keunggulan komparatif industri hilir (nilai tambah); dan industri berbasis bioresource (energi, farmasi, kesehatan, kosmetik, pangan, dan biomaterial) serta pengembangan IPTEK dan inovasi teknologi terapan yang tepat (termasuk local wisdom) secara terintegrasi.						
							

	3.41. Meningkatkan kualitas tata kelola hutan (taman hutan rakyat) yang mengedepankan kualitas lingkungan dan kelestarian ekosistem hutan secara partisipatif; 3.42. Pengelolaan hutan produksi dalam produksi kayu dan non kayu yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan. 3.43. Adokasi perlindungan dan konservasi ekosistem hutan serta pemanfaatan lahan kritis secara optimal	12. Preservasi dan konservasi secara berkelanjutan terhadap cakupan hutan daerah (Taman Hutan Raya) dan lahan kritis serta mengoptimalkan hasil hutan dengan prioritas akan keberlangsungan ekosistem hutan.					
Tujuan ke-3	Mewujudkan penanggulangan kemiskinan secara terpadu.						
8. Menurunnya tingkat pengangguran	3.44. Pemerataan dan perluasan kesempatan kerja didukung dengan pengembangan kapasitas dan kualitas tenaga kerja berorientasi demand driven dan berbasis kewirausahaan (pencari kerja dan santri), keterbukaan informasi serta pembangunan jejaring kemitraan lintas sektor	13. Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui penguatan akses dan produktifitas terhadap pengelolaan sumberdaya produktif					
	3.45. Pengarustamaan norma-norma ketenagakerjaan secara konsisten serta penerapan collective bargaining antara pekerja dan pemberi kerja secara efektif guna meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan didukung advokasi	14. <i>Maintenance</i> terhadap keselarasan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan hubungan industrial yang harmonis melalui pendekatan yang kooperatif dan ketertiban					

	peraturan ketenagakerjaan secara berkelanjutan; 3.46. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan memperkuat kerja sama dengan komisi perlindungan serta pemerintah dalam rangka memberikan keterjaminan perlindungan bagi pekerja migran;	penegakan regulasi dalam dunia usaha.					
9. Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha Usaha Mikro dan Koperasi yang inovatif	3.47. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal didukung standardisasi produk nasional maupun sertifikasi keunggulan mutu dan kualitas produk.	15. Pengembangan sektor Usaha Mikro sebagai landasan ekonomi kerakyatan secara inklusif dengan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk dan membuka peluang pasar yang lebih luas.					
	3.48. Pengembangan peluang investasi Koperasi dan Usaha Mikro di Indeks Harga Saham Gabungan guna mendukung stabilitas pasar saham yang berdampak sistemik pada perekonomian nasional						
	3.49. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kewirausahaan yang sistemik dan integratif dalam kurikulum dunia pendidikan, pelatihan berbasis teknologi dan pendampingan kolaboratif dalam mengakses networking dunia kerja,	16. Pembangunan ekonomi daerah yang berdikari, disokong inovasi dan kreatifitas koperasi serta jiwa kewirausahaan Usaha Mikro guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Gresik					
	3.50. Peningkatan akses pembiayaan dan skema perluasan pembiayaan melalui lembaga pembiayaan formal perbankan						

	maupun non-bank disertai advokasi dan perlindungan finansial;							
	3.51. Peningkatan iklim usaha berdaya saing melalui kemudahan akses perizinan dan pembenahan prosedur perdagangan melalui e-Commerce	17. Penguatan daya saing dan kondusifitas iklim usaha perdagangan daerah dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi berlandaskan perlindungan terhadap konsumen dan standardisasi produk khas Gresik.						
	3.52. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga melalui revitalisasi pasar-pasar desa dan kecamatan							
	3.53. Pengembangan sistem informasi perdagangan antar wilayah dan peningkatan aktivitas perdagangan melalui inovasi promosi dagang							
	3.54. Pengarustamaan pemanfaatan produk-produk dalam negeri dan khas daerah serta pengembangan kapasitas pengusaha mikro, kecil, dan menengah.							
10. Meningkatkan produktivitas perdagangan dan pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan	3.55. Peningkatan mutu dan daya saing agribisnis melalui pengembangan standardisasi hasil pertanian dengan perbaikan teknologi produksi, penerapan standar mutu komoditas, pembinaan dan pengawasan mutu produk pertanian, peningkatan kuantitas dan peran lembaga sertifikasi.	18. Revitalisasi sumber daya pertanian diiringi peningkatan mutu dan daya saing hasil pertanian secara berkelanjutan guna mendukung eksplorasi potensi agribisnis secara optimal.						
	3.56. Peningkatan aksesibilitas petani di kawasan perdesaan terhadap inovasi teknologi pertanian, sumber-sumber							

	pembiayaan melalui lembaga keuangan formal, desiminasi informasi pasar dan akses pasar. 3.57. Pembangunan infrstruktur pertanian secara berkelanjutan dan kolaboratif melalui penguatan peran lintas sektor.						
	3.58. Pengembangan kapasitas industri mikro dan kecil melalui pengembangan kewirausahaan yang sistemik dan integratif dalam kurikulum dunia pendidikan, stimulasi penerapan teknologi, dan akses terhadap lembaga keuangan formal 3.59. Peningkatan investasi dan penataan struktur industri serta pengembangan sentra-sentra industri potensial 3.60. Peningkatan iklim perindustrian berdaya saing melalui kemudahan akses dan pembenahan prosedur perizinan melalui e-Commerce	19. Penguatan investasi sektor industrial guna meningkatkan populasi industri berskala besar dan menengah serta pengembangan kapasitas secara berkelanjutan bagi industri berskala mikro dan kecil.					
							
							
	3.61. Pengawasan kolaboratif dan partisipatif secara berkesinambungan terhadap pemanfaatan energi dan sumber daya mineral daerah	20. Pemanfaatan energi dan sumber daya mineral daerah secara berkelanjutan melalui tata kelola yang peduli lingkungan hidup.					

11. Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan	3.62. Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar yang komprehensif melalui penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang efektif, penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi, pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan kerja;	21. Keberlanjutan dan Kebersinambungan layanan sosial dengan memperluas jangkauan pelayanan secara merata, kepastian layanan yang berkeadilan, dan kemudahan akses serta optimalisasi penanggulangan kemiskinan.					
	3.63. Inisiasi lembaga dan/atau layanan sosial berbasis kewilayahan didukung regulasi yang komprehensif;						
	3.64. Peningkatan kapasitas masyarakat penyandang masalah sosial secara partisipatif serta literasi nilai-nilai sosial yang positif.						
	3.65. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan program-program unggulan kemiskinan, penguatan peran intermediary, dan peningkatan keberdayaan masyarakat miskin maupun rentan miskin secara menyeluruh dalam dimensi kemiskinan meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan infrastuktur dasar serta ditunjang peningkatan pendapatan dan pengembangan kegiatan perekonomian.						
12. Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh	3.66. Mewujudkan kawasan permukiman yang kondusif, inklusif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	22. Penguatan pembangunan kawasan permukiman melalui percepatan pengentasan					

	didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni		lingkungan kumuh, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan kemudahan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat miskin.					
13.	Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan Untuk mencapai kemandirian Desa	3.67. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintah desa melalui pendampingan perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan Data Potensi Desa), pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan rencana pembangunan; 3.68. Reformasi pelayanan publik di perdesaan melalui pemerataan jaringan internet dan ketersediaan piranti Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3.69. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dukungan finansial secara stimulan dan kemudahan akses terhadap lembaga keuangan formal guna pengembangan usaha atau kewirausahaan, bantuan modal, pemanfaatan teknologi, dan akses pemasaran didukung penguatan BUMDesa dan BUMaDes. 3.70. Pembangunan kawasan perdesaan melalui penataan desa secara terpadu,	23. Membangun Desa, Desa Membangun					
								
								
								

	pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; 3.71. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya, kearifan lokal yang tertanam, dan permasalahan riil yang dihadapi desa dalam penguatan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya dengan meletakkan kesetaraan Gender sebagai perspektif society enabling & empowering. 3.72. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui program-program pembangunan berskala desa serta akselerasi pembangunan melalui bantuan keuangan dengan prioritas pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi perdesaan, optimalisasi perpustakaan desa, pengembangan media komunitas lokal, Desa Learning Center, dan fasilitasi pemberdayaan perempuan perdesaan berbasis komunitas.						
							
14. Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas	3.73. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu;	24. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok ditunjang perbaikan infrastruktur, diversifikasi konsumsi pangan utama, dan mitigasi kerawanan pangan.					

sumber daya pertanian secara berkelanjutan	3.74. Revitalisasi pembenihan dan perbibitan bahan pangan pokok utama didukung penyuluhan yang berkelanjutan;						
	3.75. Akselerasi penerapan teknologi budidaya pertanian secara signifikan yang dapat meningkatkan produktifitas, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim seperti system of rice intensification (SRI) dan budidaya pertanian organik;						
	3.76. Pemerataan akses dan perlindungan finansial terhadap petani didukung stimulus sarana pendukung pertanian yang dikelola secara berkelompok dan terpadu;						
	3.77. Avokasi terhadap perkembangan pengelolaan pertanian, dan pengembangan benih unggul.						
	3.78. Peningkatan mutu dan daya saing agribisnis melalui pengembangan standardisasi hasil pertanian dengan perbaikan teknologi produksi, penerapan standar mutu komoditas, pembinaan dan pengawasan mutu produk pertanian, peningkatan kuantitas dan peran lembaga sertifikasi.	25.Revitalisasi sumber daya pertanian diiringi peningkatan mutu dan daya saing hasil pertanian secara berkelanjutan guna mendukung eksplorasi potensi agribisnis secara optimal.					
	3.79. Peningkatan aksesibilitas petani di kawasan perdesaan terhadap inovasi teknologi pertanian, sumber-sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan						

	formal, desiminasi informasi pasar dan akses pasar. 3.80. Pembangunan infrstruktur pertanian secara berkelanjutan dan kolaboratif melalui penguatan peran lintas sektor						
	3.81. Menjaga stabilitas harga pangan utama melalui operasi pasar yang efektif; Memperkuat mitigasi kerawanan pangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan pemetaan secara menyeluruh terhadap basis-basis produksi pangan kewilayahan, kerentanan, dan ketahanan pangan didukung dengan inisiasi teknologi	25. Penguatan literasi abad hayati secara mendalam guna menggugah <i>social awareness</i> dan kepedulian dunia usaha didukung kebijakan konservasi sumber daya alam dan hayati, penguatan basis data lingkungan hidup, serta pembangunan berwawasan lingkungan.					

VISI :Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas

MISI 4 : Meningkatnya kualitas hidup melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Time Line				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tujuan 1	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan						
1. Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	4.1. Penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan.	1. Peningkatan atribusi dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dasar untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan seluruh masyarakat Gresik didukung penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, transparan, berkualitas, dan inklusif dengan mengintegrasikan keluhuran Budaya Gresik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagama'an;					
	4.2. Penguatan kredibilitas kurikulum ajar, peningkatan kualitas proses pembelajaran, penerapan sistem penilaian pendidik yang komprehensif dan proporsional;						
	4.3. Pengembangan kapasitas dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan karir, peningkatan kualifikasi, peningkatan kesejahteraan, pengembangan profesi dan kompetensi;						

	4.4. Penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan melalui perlindungan finansial terhadap siswa kategori keluarga miskin dan pemberian insentif bagi siswa berprestasi ditunjang akuntabilitas dan transparansi disertai kemudahan akses dan keterbukaan informasi masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar;						
	4.5. Internalisasi nilai-nilai luhur budaya Gresik dalam dunia pendidikan melalui peningkatan kemampuan hafalan Qur'an peserta didik pada jenjang dan klasifikasi tertentu;						
	4.6. Menciptakan linkage dunia pendidikan dan dunia usaha melalui inovasi pembelajaran dengan menerapkan kebutuhan dunia usaha dalam kurikulum ajar;						
	4.7. Peningkatan kualitas output pendidikan melalui avokasi secara berkelanjutan dalam menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi peserta didik dalam menciptakan karya tulis.						

	4.8. Intensifikasi Pengawasan terhadap pembiayaan pendidikan, pengelolaan anggaran pendidikan dalam APBS dan perizinan penyelenggaraan pendidikan serta pembangunan fasilitas sarana prasarana penunjang secara berkelanjutan; 4.9. Memperkuat peranan swasta dan masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas;	2. Penguatan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pengelolaan anggaran pendidikan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai.					
							
	4.10. Meningkatkan budaya gemar membaca melalui promosi membaca dan inisiasi peningkatan karya tulis siswa yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan; 4.11. Meningkatkan layanan perpustakaan daerah dengan meningkatkan preservasi dan konservasi bahan perpustakaan, keberagaman koleksi buku, pustaka online, dan pembangunan kapasitas pustakawan.	3. Peningkatan kapasitas, akses, dan utilitas perpustakaan sebagai <i>turning point</i> pembangunan pendidikan masyarakat yang berkualitas dengan menguatkan budaya gemar membaca dan pengembangan kompetensi pustakawan.					
							
6. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	4.12. Menginisiasikan continuum of care terhadap pelayanan ibu dan anak dengan peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan; 4.13. Pengarustamaan upaya kesehatan promotif dan preventif dalam peningkatan derajat ibu dan anak	4. Peningkatan pembangunan kesehatan melalui penguatan upaya kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) secara promotif maupun preventif, pemenuhan jaminan kesehatan, aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan serta					
							

	didukung seluruh stakeholder kesehatan.	pembangunan sumber daya kesehatan.					
	4.14. Enabling dan empowering dalam peningkatan peran masyarakat untuk meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif dalam meningkatkan status dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan melalui Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), pelayanan imunisasi tepat waktu, dan Posyandu;	5. Penguatan pembangunan gizi masyarakat melalui penguatan upaya kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) secara promotif maupun preventif ditunjang penguatan keberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan.					
							
	4.15. Perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene dan pengasuhan serta meningkatkan pemantauan pertumbuhan anak;						
	4.16. Pemerataan pelayanan kesehatan melalui akselerasi pembangunan sumber daya kesehatan dan perbaikan pengelolaan pelayanan kesehatan di tingkat Daerah, Kecamatan (Puskesmas dan Puskesmas Pembantu), dan Desa (Ponkesdes)	6. Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan Obat, Mutu Obat, Makanan, dan Sumberdaya Manusia Kesehatan					
							
	4.17. Pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit daerah yang professional						

	ditunjang kemudahan akses, mutu internal fasilitas kesehatan, dan efektivitas pengelolaan dana kesehatan; 4.18. Pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan pada puskesmas dan ponkesdes;						
	4.19. Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik untuk menjamin pemenuhan kualitas pelayanan (quality assurance) kesehatan masyarakat secara terintegratif melalui pendekatan promotif dan preventif didukung perlindungan finansial dalam pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin.	7. Perlindungan terintegratif secara promotif, preventif, dan kuratif (finansial) terhadap masyarakat kategori miskin dan rentan miskin dalam mengakses layanan kesehatan.					
Tujuan 2	Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan						
7. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana	4.20. Penguatan dan pengembangan strategi advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait program-program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga terhadap masyarakat terutama remaja yang dalam penyiapan berkeluarga;	8. Pengendalian dinamika kependudukan dan internalisasi nilai-nilai pembangunan keluarga yang sehat dan sejahtera guna mewujudkan keseimbangan daya dukung alam dan lingkungan, tatanan sosial ekonomi, dan					

	4.21. Pemerataan dan kemudahan akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; 4.22. Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter, moralitas, serta mental kepribadian generasi penerus.	peningkatan kesejahteraan penduduk secara merata.					
							
8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender	4.23. Integrasi pengarusutamaan Gender dalam penguatan kerjasama lintas dalam tataran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah. 4.24. Meletakkan kesetaraan Gender sebagai perspektif society enabling & empowering maupun kaidah penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif.	9. Sinergitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan					
							
9. Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak anak	4.25. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya perlindungan perempuan dan anak serta avokasi terhadap pelbagai upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak didukung upaya preventif dan promotif berbasis pemberdayaan masyarakat 4.26. Peningkatan akses anak terhadap layanan berkualitas dalam rangka	10. Mewujudkan keberdayaan perempuan yang mandiri dalam pembangunan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup yang berkualitas.					

	mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup melalui akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran, pembangunan lingkungan ramah anak dalam tataran sekolah hingga Daerah, ketersediaan layanan PAUD yang berkualitas dan filter informasi layak anak dalam rangka menuju kabupaten layak anak						

Tabel 6.3
 Perumusan Prioritas Pembangunan Tematik
 Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021

Berdasarkan pemetaan timeline strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 maka dirumuskan arah kebijakan utama tiap tahun yang menjadi penentuan prioritas pembangunan tematik sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

Tahun	Arah Kebijakan Utama	Prioritas Pembangunan Tematik
2017	1. Pembangunan infastruktur pendukung perekonomian yang berkelanjutan 2. Peningkatan perekonomian secara inklusif berlandaskan ekonomi kerakyatan 3. Pembangunan berwawasan lingkungan	Percepatan pembangunan infrastruktur dan Perekonomian yang Inklusif, Berwawasan Lingkungan, dan Berintegritas untuk kesejahteraan masyarakat.
2018	1. Akselerasi Pembangunan kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah dalam mendukung perekonomian regional; 2. Pemenuhan pelayanan dasar yang berkualitas; 3. Pengentasan kemiskinan kronis secara terpadu dan Bersasaran; 4. Efektifitas dan efisiensi pelayanan publik didukung akselerasi reformasi birokrasi.	Gresik, City of Invesment Anchorage’s Gresik, Kota Berlabuhnya Investasi
2019	1. Pembangunan ekologi untuk mewujudkan kota layak huni berlandaskan keluhuran Gresik sebagai Kota Santri 2. Pengembangan kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah dalam mendukung perekonomian secara berkelanjutan; 3. Pemenuhan layanan dasar dan pengentasan kemiskinan bersasaran melalui pemanfaatan integrasi pelayanan publik, pendekatan <i>human centered design</i> dan pembangunan sektoral;	Gresik, Theater of Sustainable Ecology Develepment Gresik, Teater Pembangunan Ekologi yang Berkelanjutan

	4. Penetrasi teknologi informasi dalam pelayanan publik;	
2020	1. Akselerasi pengembangan Gresik era digital melalui pemanfaatan dan integrasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan pembangunan sektoral; 2. Pengembangan kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah serta penguatan perekonomian daerah secara berkelanjutan; 3. Penguatan pembangunan ekologi secara berkelanjutan; 4. Pemenuhan layanan dasar dan pengentasan kemiskinan bersasaran melalui pemanfaatan integrasi pelayanan publik, pendekatan <i>human centered design</i> dan pembangunan sektoral;	Gresik, The Smart Livable City Gresik, Kota Cerdas yang Layak Huni
2021	1. Pelayanan publik berlandaskan <i>human centered design</i> yang memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi; 2. Pembangunan perekonomian inklusif yang menjadi hub Indonesia Barat dan Timur melalui kemantapan infrastruktur, konektivitas daerah, dan ekologi berkelanjutan. 3. Pembangunan keluhuran budaya berlandaskan pengarustamaan keluhuran Gresik yang agamis	Gresik, The City of World Gresik, Kota Dunia

Bab VII

Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan umum merupakan telaah strategi pembangunan yang telah ditentukan untuk menghasilkan program yang paling efektif mencapai sasaran. Rumusan kebijakan umum menjadi wahana untuk mengkompilasikan program-program prioritas yang *inherent* dalam mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan arah kebijakan yang ditentukan.

Tahapan selanjutnya adalah perumusan **Program Pembangunan Daerah**. Urgensi program pembangunan dalam perumusan RPJMD sangatlah *masif* karena rumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah karena perumusan program pembangunan daerah merupakan *planning core* atau inti perencanaan strategis yang menjadi jembatan dalam pencapaian visi yang dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran, hingga strategi yang berpedoman pada arah kebijakan.

Dalam perencanaan jangka menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, Kebijakan umum diletakkan sebagai wahana yang komprehensif untuk mengkompilasi program-program pembangunan daerah berdasarkan strategi yang ditetapkan guna mencapai sasaran. Sedangkan program pembangunan daerah diterjemahkan sebagai program prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran strategis dengan klasifikasi yang *inherent* dan spesifik di setiap wadah kebijakan umum sehingga mampu dihasilkan capaian kinerja untuk menunjang setiap pencapaian sasaran setiap misi menjadi program integratif dalam mencapai Integrated Development Plan serta mampu menklasifikasikan secara aplikatif terhadap indikator kinerja yang menjadi tolok ukur pencapaian sasaran pada *tataran leading indicator* maupun *lagging indikator*. Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan sebagaimana matriks berikut;

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

Misi Pertama		Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri							
Tujuan		Meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dengan landasan nilai-nilai agama sebagai cerminan Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri							

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program	Urusan	Perangkat Daerah
					Baseline 2016	2021			
1	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat	Integrasi keluhuran Budaya Gresik yang religius dalam mewujudkan kondusifitas kehidupan berbangsa didukung Pamong Praja yang tangguh	Sinergitas <i>Law Enforcement</i> yang menjunjung tinggi keadilan dengan keberdayaan moral, perilaku, dan pemahaman masyarakat dalam koridor religiusme budaya Gresik Kota Wali dan Kota Santri. Avokasi pembinaan karakter masyarakat yang berwawasan kebangsaan melalui revolusi mental;	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan) dalam rangka penegakan perda	100%	100%	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Ketenraman, Ketertiban Umum, & Pelindungan Masyarakat	Dinas Polisi Pamong Praja
				Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	2/10000 Penduduk	3/10000 Penduduk	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		
				Persentase Linmas yang dibina	6%	29%	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		

				Persentase Penurunan Kebakaran	1-20% (20-15)	50-75% (9-6)	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		
				Persentase konflik yang dapat diselesaikan	100%	100%	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Bangsa		
				Persentase Pemanfaatan Hak Pilih	55%	75%			
				Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga	55%	75%			
				Persentase Pembinaan FKDM	60%	85%			
2	Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran	Pengelolaan penanggulangan bencana yang responsif guna menguatkan penegakan hak atas rasa aman, mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.	Peningkatan kualitas penanggulangan bencana daerah melalui penguatan peran masyarakat tanggap bencana, keterbukaan informasi, dan pembangunan basis data ancaman dan resiko bencana.	Persentase Pengurus Desa Tangguh dan Relawan Bencana yang dilatih	38,43%	100%	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Keten traman, Keter tiban Umu m,& Pelrin dunga n Masya rakat	Bada n Pena nggul anga n Benc ana Diera h
				Persentase Penyaluran Logistik terhadap korban bencana	100%	100%	Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana		
				Persentase kerusakan kerusakan infrastruktur pasca bencana yang ditangani	100%	100%	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana		

3	Menggugah kreatifitas pemuda dalam kemandirian dan pembangunan	Pembangunan kepemudaan yang berkarakter dan peningkatan prestasi olahraga daerah secara partisipatif dengan menciptakan kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual, dilandasi kearifan dan keluhuran Budaya Gresik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagama'an.	Peningkatan kapasitas pemuda melalui inisiasi pendidikan terpadu meliputi intelektual, emosional dan spiritual dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan inovasi pemuda, perlindungan terhadap napza, miras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit seksual menular di kalangan pemuda.	Persentase peningkatan kapasitas Kepemudaan	85%	95%	Program Peningkatan Partisipasi Kepemudaan	Kepe muda an dan Olahr aga	Dinas Kepe muda an dan Olahr aga
			Menumbuhkembangkan budaya olahraga dan prestasi pada jenjang pendidikan pendidikan dasar dengan mengedepankan sportifitas didukung penguatan sarana infrastruktur dan suprastuktur kepemudaan dan olahraga.	Persentase atlit berprestasi	89%	95%	Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan, Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga		
			Menanamkan nilai-nilai sosial patriotisme, kasadaran akan hak dan kewajiban, kedisiplinan dan nilai-nilai luhur budaya yang religius	Jumlah partisipan olahraga rekreasi	29.000 orang	54.000 orang			
				Persentase sarpras olahraga yang dipelihara	50%	90%			

4	Melestarikan keluhuran budaya berbasis kearifan lokal	Pengarustamaan nilai-nilai kebudayaan Gresik yang luhur dan mulia dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan, pembangunan manusia berakhlak, dan pengelolaan sumber-sumber daya peradaban.	Inisiasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan untuk mewujudkan pendidikan karakter yang berorientasi pada kreativitas, inovasi, kepedulian lingkungan, pemahaman akan hak dan kewajiban, nasionalis, dan pelbagai nilai positif lainnya; Pelestarian warisan budaya para Wali dan pengikutnya baik yang bersifat <i>tangible</i> maupun <i>intangible</i> serta meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas budaya melalui fasilitasi pelbagai event strategis. Mewujudkan ruang kreasi publik sebagai tempat berinteraksi, melakukan promosi, menggelar karya seni dan sarana pagelaran budaya, serta meningkatkan informasi budaya berkualitas bagi masyarakat.	Persentase Cagar Budaya yang difasilitasi	100% (4 cagar budaya)	100%	Program Pengelolaan Keragaman Dan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Persentase Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	6 jenis	100%	Program Pengembangan Nilai Budaya Dan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya		

Misi Kedua	Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program	Urusan	Perangkat Daerah
					Baseline 2016	2021			
1	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik	Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil didukung pemutakhiran teknologi dengan mendekatkan basis pelayanan kepada masyarakat	Pembangunan Basis Data terpadu kependudukan dan catatan sipil yang telah terhamonisasi secara agregat pada jenjang pemerintah desa, intermediary kecamatan, daerah hingga pusat;	Persentase perekaman KTP-el	89.88 %	98.26 %	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Percepatan pelayanan dengan mendekatkan basis layanan kepada masyarakat melalui Kecamatan hingga secara bertahap mengoptimalkan peran Pemerintah Desa sebagai kunci pelayanan didukung pemenuhan jaringan internet, ketersediaan piranti, peningkatan kapasitas kelembagan dan sumber daya aparatur desa;	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	0.00 %	93.75 %			
			Harmonisasi dan aktualisasi data kependudukan dan catatan sipil didukung perlindungan secara menyeluruh terhadap	Persentase penerbitan Akta Kelahiran per-Tahun	89.34 %	95.59 %	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil		
				Persentase Penertiban Akta Kematian Per-Tahun	27.81 %	80.00 %			

			dokumen melalui ahli media yang telah terautentifikasi.	Persentase validasi Data Ganda dan Anomali	46.29 %	99.00 %	Program Pengelolaan Informasi Kependudukan		
			Pemanfaatan basis data kependudukan (ketunggalan identitas) sebagai basis identitas penerima manfaat program pembangunan daerah seluas-luasnya di seluruh satuan kerja perangkat daerah.	Persentase Layanan kependudukan yang memiliki SOP	100.00 %	100.00 %	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan		
			Peningkatan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan catatan sipil melalui penguatan edukasi terhadap masyarakat maupun petugas pelayanan.	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data adminstrasi kependudukan	3 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan inovasi Pelayanan		
			Persentase Arsip Akta Kependudukan yang dialihmediakan	16.23 %	67 %				

		Penyelenggaraan pengelolaan kearsipan yang tertib didukung keterjaminan perlindungan dan kelestarian output atau memori penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung perumusan kebijakan daerah yang strategis dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.	Advokasi pengelolaan arsip secara baku pada setiap jenjang pemerintahan didukung pengembangan sumber daya arsiparis melalui peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan kearsipan termutakhir; Peningkatan alihmedia terhadap khasanah arsip statis guna menjamin keselamatan dan kelestarian dan mempermudah pemanfaatan data.	Persentase pencipta arsip yang dibina	N/A	50.85%	Program Pelayanan Kearsipan Daerah	Kearsi pan	Di nas Per pu sta ka an da n Ars ip;
		Pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh hingga pelosok desa melalui penguatan intermediary kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan koordinator kegiatan	Pelimpahan kewenangan secara bertahap sesuai tematik prioritas tahunan daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan. Penguatan sumber daya aparatur kecamatan melalui bimbingan teknis, lokakarya, dan pelbagai media secara terintegratif antara Perangkat Daerah ditunjang dukungan anggaran yang mencukupi.	Persentase kegiatan pemerintahan desa yang difasilitasi	100%	100%	Program koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik	Urusan Kecam atan	Ke ca ma tan
				Persentase pelayanan publik di lingkup kecamatan sesuai SOP	100%	100%			

		pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibina	100%	100%	Program koordinasi pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa		
				Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	Program koordinasi pelaksanaan pembangunan		
				Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan	100%	100%	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		
				Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi	100%	100%	Program pengelolaan keuangan, asset, dan perekonomian desa		
2	Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi	Keterbukaan informasi secara aktual dan faktual dalam koridor <i>e-Government</i> guna menggugah partisipasi publik secara konstruktif untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan efektifitas dan	Pemerataan jaringan internet di kawasan perdesaan guna menunjang pertumbuhan ekonomi, percepatan pelayanan publik, dan mendukung kemajuan penyelenggaraan pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan informasi;	Pertumbuhan Jumlah Hotspot di Ruang Publik	10 titik	12,90%	Program Pembangunan Komunikasi dan Persandian Daerah	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika

		efisiensi diseminasi dan pemanfaatan data pembangunan, serta mendukung optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan.	Menguatkan ketersediaan informasi data pembangunan Gresik yang <i>up to date</i> dalam layanan <i>official website</i> pemerintah Daerah. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah pada jenjang pemerintah desa, <i>intermediary</i> kecamatan hingga satuan kerja perangkat daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung kinerja birokrasi dan pelayanan publik; Penguatan media, ruang, atau wahana <i>idea sharing</i> antara publik, pemerintahan daerah, dan swasta dalam mengungkapkan aspirasi, kritik dan saran terhadap kebijakan, kebutuhan akan informasi pembangunan serta media untuk menampilkan inovasi atau karya tertentu melalui ruang konservatif maupun melalui <i>internet network</i>.	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang dibina	100 (4 KIM)	100			
				Persentase OPD yang dapat mengakses Wan dan Fiber Optik	100%	100%	Program Pengembangan E-Government		
				Kecepatan Akses internet untuk perkantoran Pemerintahan	150 Mbps	350 Mbps			
				Persentase sistem informasi yang aktif	78,31	100			
				Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi informasi	76.29	88.56			

		Pembangunan basis data terpadu yang komprehensif dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan akuntabel. Perlindungan kerahasiaan informasi Daerah yang dikecualikan secara komprehensif dalam rangka menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Penyempurnaan klasifikasi dan standardisasi serta harmonisasi ketersediaan data <i>report based</i> oleh setiap Perangkat Daerah dan Desa; Peningkatan kompetensi pengolah data didukung penerapan aplikasi informatif yang komprehensif; Pembentukan tim terpadu pembangunan basis data terpadu pada jenjang desa, intermediary kecamatan, hingga Perangkat Daerah dan meningkatkan kerjasama serta koordinasi dengan Badan Pusat Statistik, Swasta, dan stakeholder terkait. Pengamanan informasi pemerintahan daerah yang dikecualikan melalui penetapan pola hubungan sandi antar perangkat daerah.	Persentase data statistik (survey dan report based) yang dipublikasikan	100	100	Program Pengembangan Data/Informasi /Statistik Daerah	Statistik	PD Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
				Pertumbuhan Informasi Official website pemerintah daerah	745 Informasi	4,06%	Program Kerjasama Informasi		
2	Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan terbaik untuk pembangunan yang berkualitas.	Penguatan sistem informasi perencanaan yang mendukung penyelenggaraan perencanaan di setiap jenjang pemerintahan; Pengarustamaan prioritas pembangunan sebagai komitmen pembangunan	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi	100%	100%	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Urusan Perencanaan	Bappeda

			yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk menjadi landasan penyusunan program pembangunan; Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya perencanaan melalui pengembangan kapasitas didukung intensifikasi koordinasi dalam perumusan kebijakan; Peningkatan aksesibilitas informasi dan data <i>survey based</i> maupun <i>reput based</i> sebagai landasan pertimbangan dan analisa perumusan perencanaan yang berkualitas.	Persentase keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	100%	100%	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		
				Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	100%	100%	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		
				Persentase pelaksanaan musrenbang dan Forum Perangkat Daerah sesuai juknis	100%	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah;		
				Persentase capaian Program Perencanaan Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76	70%	95%			
			Penguatan sistem inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen rencana tahunan; Elaborasi secara intensif dengan perguruan tinggi melaui Kerjasama	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	100%	100%	Program Pengembangan Data Dan Informasi	Urusan Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan

			Perguruan Tinggi Negeri dan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Swasta; Peningkatan kualitas kajian penelitian daerah melalui penguatan roadmap dan research yang responsif sesuai kebutuhan kebijakan pembangunan	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	Program Penelitian Dan Pengembangan		an gu na n Pe nel itia n da n Pe ng em ba ng an
4	Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan didukung atribusi pengawasan yang konstruktif dan komprehensif dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima	Sinergitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui koordinasi intensif melalui pengawasan internal (melekat dan fungsional), eksternal, dan pengawasan masyarakat; Inisiasi budaya kerja dengan etos kerja, integritas, dan gotong royong melalui revolusi mental birokrasi; Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawas internal pemerintahan; Sinkronisasi penyelenggaraan perencanaan, penganggaran,	Persentase temuan audit yang bersifat material nihil	100%	100%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Urusan Inspektorat	Inspektorat
				Persentase APIP yang bersertifikat Bidang Pengawasan	33	100%	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		

			pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban melalui sistem informasi aplikatif di jenjang pemerintahan daerah hingga desa;	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan SPIP	0	100%	Program Penguatan Pengawasan		
			Advokasi secara berkala berkaitan dengan regulasi-regulasi pokok yang menjadi tertib administratif penyelenggaraan pemerintahan.	Persentase Penyelenggara Negara/ASN Yang Melaporkan Harta Kekayaannya	10%	100%	Program Pencegahan Korupsi		
5	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Menghadirkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif, transparan, dan akuntabel dilandasi Kejujuran Kebersamaan, Kesabaran, Kerja Keras, dan Keikhlasan	Penegakan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif diperkuat strategi pencegahan korupsi dan transparansi penyelenggaraan pelayanan;	Persentase PD/Unit Kerja yang telah menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)	100%	100%	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
				Persentase fasilitasi dan koordinasi kehumasan daerah	100%	100%	Program Fasilitasi Kehumasan Daerah		
				Persentase Sosialisasi Penggunaan Produk	100%	100%	Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai		

				Berpita Cukai melalui Media Cetak dan Elektronik					
		Pembangunan Birokrasi yang bersih dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis, dan integratif.	Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja dengan percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual; penyelerasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev dan pelaporan berbasis sitem informasi; Penataan kelembagaan instansi pemerintahan daerah yang tepat fungsi melalui penyederhanaan struktur organisasi dan optimalisasi penempatan pegawai berbasis kapasitas keilmuan dan profesionalitas birokrat; Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui restrukturisasi tunjangan perbaikan penghasilan berbasis kinerja serta penerapan assesment dalam rangka mewujudkan remunerasi aparatur sipil negara. Perumusan produk hukum daerah yang	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan kinerja baik	55%	85%	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
				Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya	100%	100%			
				Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Anjab dan ABK Baik	100%	100%			
				Persentase PD/Unit Kerja menyusun SOP Tata Laksana	55%	85%			
				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum	100%	100%	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum		
				Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	N/A	100%			
				Persentase inventarisasi unsur rupa bumi	N/A	28%			
				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis	100%	100%	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan		

			akomodatif dalam mendukung pelayanan publik, permasalahan pembangunan yang dihadapi satuan kerja perangkat daerah, kebutuhan dan apsirasi masyarakat;	Pembangunan Daerah			Strategis Pembangunan Daerah		
				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis engelolaan Keuangan, Aset, dan Barang Daerah	100%	100%	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Barang Daerah		
				Persentase Fasilitasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah	100%	100%	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah		
				Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah	100%	100%	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah		
				Persentase fasilitasi terhadap pelayanan administrasi keuangan	100%	100%	Program Pelayanan Administrasi Keuangan		
				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis SDA LH	100%	100%	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup		
				Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat		

				Persentase Pengesahan Produk Hukum Daerah	100%	100%	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		
				Jumlah Sosialisasi Penggunaan Produk Berpita Cukai melalui Media Cetak Dan Elektronik	100%	100%	Program sosialisasi ketentuan dibidang cukai		
		Menghadirkan pemerintahan daerah yang berkualitas, aspiratif, dan inklusif	Peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan daerah dalam perumusan peraturan daerah inisiatif DPRD	Persentase Fasilitasi Pengaduan Masyarakat	100%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Urusan Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD
			Mendorong inklusifitas dalam menghimpun aspirasi dan kebutuhan masyarakat.	Jumlah Produktivitas Perda Inisiatif DPRD	100%	100%	Program Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan DPRD Dengan Masyarakat		
6	Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah	Pembangunan sumber daya aparatur yang berkualitas berlandaskan kaidah <i>good and clean governance</i>	Perumusan blueprint Aparatur Pemerintahan dalam rangka menunjang jenjang karir dan penataan jabatan struktural sesuai dengan kapasitas dan kompetensi;	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional lebih dari 80 JP	63,64%	74%	Program Pendidikan dan Pelatihan ASN	Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	BKD
			Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara yang kompetitif berbasis <i>merit system</i> diperkuat	Persentase Pejabat Struktural yang sudah memiliki sertifikat Diklatim sesuai dengan jenjangnya	70%	100%			

			penyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan implementasi <i>CAT system</i> ;	Persentase ASN yang capaian kinerjanya sesuai dengan target	100%	100%	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN		
			Peningkatan etoskerja pegawai melalui penegakan disiplin kerja didukung pengembangan sistem informasi kepegawaian	Persentase ASN yang tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin jam kerja	99,93%	100%			
				Persentase kebutuhan formasi sesuai dengan ABK	100%	100%	Program Data Formasi dan Pengembangan ASN		
				Persentase akurasi data kepegawaian	100%	100%			
				Persentase usulan penempatan ASN sesuai Anjab	85%	100%	Program Mutasi dan Kepangkatan ASN		
				Persentase kenaikan pangkat tepat waktu	100%	100%			
				Persentase KGB tepat waktu	100%	100%			
				Persentase penyerahan SK Pensiun tepat waktu	100%	100%			

Misi Ketiga	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Upaya Menambah Peluang Kerja Dan Peluang Usaha Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Menekan Angka Kemiskinan
Tujuan Ke-1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Urusan	Perangkat

					Baeline 2016	2021			t Da era h
1	Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka menjaga kondusifitas iklim investasi, meningkatkan kuantitas nilai investasi dan frekuensi usaha di Daerah	Penguatan iklim investasi dan iklim usaha yang berdaya saing didukung efisiensi prosedural, peningkatan akurasi, kredibilitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan berbasis teknologi dan kemudahan akses informasi	Jaminan kepastian investasi melalui kepastian hukum dan penghapusan regulasi yang mempersulit pertumbuhan dunia usaha untuk berinvestasi dalam koridor keluhuran Budaya Gresik dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup;	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	5%	5-10%	Program Pengembangan Iklim, Promosi Dan Data Dan Informasi Penanaman Modal	Penan aman Modal	Dina s Pena nam an Mod al dan PTSP
			Pengembangan layanan investasi melalui penyederhanaan prosedur, pemberian insentif, transparansi dan kemudahan akses informasi dalam pelayanan perizinan;	Persentase Verifikasi izin realisasi investasi	75% per tahun	75% per tahun	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
			Penguatan investasi inklusif yang memprioritaskan sumber daya lokal dan pemerataan pembangunan dunia usaha berbasis kearifan lokal; Peningkatan kemitraan investasi dan promosi investasi; Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) melalui	Presentase Penyelasian Izin Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu dan Non Perizinan	75% per tahun	75% per tahun	Program Pelayanan Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu & Non Perizinan		

			penyederhanaan dan standardisasi prosedur, proses perijinan secara paralel, penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perijinan, serta meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan.	Persentase Penyelesaian Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	75% per tahun	75% per tahun	Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan Dan Lingkungan		
		Penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang strategis dengan mengedepankan keselarasan pemahaman melalui harmonisasi peraturan agraria, peningkatan akurasi dalam akselerasi pelayanan, dan partisipasi masyarakat melalui inisiatif stimulan.	Penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); Legalisasi asset atau tanah-tanah pemerintah daerah yang terlantar dalam rangka mengurangi potensi sengketa tanah; Peningkatan <i>performance</i> pelayanan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah melalui basis data pembangunan yang valid.	Persentase tanah pemerintah daerah yang diverifikasi dalam rangka sertifikasi asset	-	50%	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penanggungan dan Pemanfaatan tanah	Pertanahan	Dinas Pertanahan

				Persentase konflik pertanahan yang diselesaikan	85.19%	100%	Program Pembinaan dan Pembebasan Lahan		
2	Meningkatnya kunjungan wisata dan pengembangan ekonomi kreatif	Penguatan nilai-nilai budaya Gresik dalam pengembangan kepariwisataan yang didukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur pariwisata, kemudahan akses konektivitas destinasi-destinasi pariwisata, dan promosi pariwisata yang inovatif	Pengarustaamaan nilai-nilai budaya secara integratif dalam dunia pendidikan dan kolaboratif melalui lembaga kemasyarakatan desa guna menumbuhkembangkan kesadaran sosial masyarakat pada kawasan destinasi pariwisata; Pengembangan promosi wisata yang inovatif secara meluas dan menciptakan branding pariwisata khas Daerah;	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	4,874 orang	5380 orang	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Jumlah Kunjungan Wisata Dalam Negeri	3,258,126 orang	3,632,498 orang			
				Persentase Pelaku Usaha ekonomi kreatif yang dikembangkan	129 pelaku usaha	61%	Program Pengembangan Kemitraan		

Pembangunan indutri pariwisata partispatif dengan meningkatkan

			keterlibatan usha lokal dan berdaya saing dengan meningkatkan keragaman produk/jasa pariwisata yang ditawarkan.	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	6 destinasi	100%	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		
3	Mencapai swasembada produksi perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi teknologi perikanan	Peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing perikanan berbasis penerapan inovasi teknologi dan pengembangan sumber daya kelautan secara berkesinambungan dan responsif terhadap pangsa pasar global.	Intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya melalui penerapan teknologi perikanan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan; Pengembangan sistem logistic dan sistem distribusi hasil perikanan guna menjangkau pangsa pasar konsumsi dan industri; Revitalisasi infrastuktur kelautan dan perikanan meliputi Depo Perikanan atau Pasar Ikan Modern, Saluran Tambak, Tempat Pelelangan Ikan, Kapal Penangkapan Ikan,dan Tambatan Perahu; Peningkatan mutu, nilai tambah, dan inovasi teknologi perikanan yang terintegrasi dalam pengembangan UMKM pengolahan hasil perikanan.	Produktivitas perikanan budidaya	89.233.41 ton	144.760 ton	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kela utan dan Perik anan	Dinas Perika nan
				Persentase yang saluran tambak yang direhabilitasi	19%	38%			
				Produktivitas Perikanan Tangkap	18.786 ton	21.358	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		
				Persentase tempat pendaratan ikan yang direhabilitasi	25%	150%			
				Persentase Produksi Perikanan yang diolah dan dipasarkan	5%	38%	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		
				Produktivitas Garam	5.250 ton	6.700 ton			
				Persentase Tambatan Perahu dan Dermaga yang direhabilitasi	15 %	91%	Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)		
				Luas kawasan pesisir yang direhabilitasi:	7%	41%			

				Persentase Produksi Perikanan yang diolah dan dipasarkan	5%	38%	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan		
4	Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerahserta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual	Pembangunan kemandirian dan keberdayaan ekonomi daerah berlandaskan potensi lokal secara inklusif.	Intensifikasi, ekstensifikasi, dan revitalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah guna memacu pertumbuhan pendapatan asli daerah didukung optimalisasi sistem informasi, kualitas pelayanan, dan identifikasi pendataan pajak dan retribusi daerah;	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun DPA sesuai ketentuan	100%	100%	Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran	Pen gelo laan Keu ang an Dae rah	BPPKA D
		Penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual.	Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akuntansi akrual; Perumusan penganggaran berbasis kinerja didukung akurasi penetapan regulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara tepat waktu berlandaskan prioritas pembangunan.	Persentase Perangkat Daerah yang dibina dalam penatausahaan keuangan daerah	100%	100%	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah		
				Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	100%	100%	Program Peningkatan Dan Pengembangan Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah		
				Persentase capaian target pendapatan pajak daerah lain (selain PBB dan BPHTB)	92%	100%	Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah		
				Persentase capaian Target Pendapatan PBB dan BPHTB	86%	100%	Program Pengelolaan Pendapatan PBB Dan BPHTB		
				Persentase capaian target penagihan pajak daerah	42%	58%	Program Peningkatan Pelayanan Dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah		
			Peningkatan kualitas penatausahaan serta						

			pemanfaatan asset daerah secara optimal secara komprehensif;	terhadap tunggakan potensial					
				Persentase capaian target pendapatan daerah selain pajak daerah	90%	100%			
				SKM Pelayanan	B	B			
5	Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunanberla ndaskan tata ruang.	Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan harmonis berlandaskan Rencana Tata Ruang guna mendukung daya saing daerah, menguatkan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali didukung keselarasan dan pemerataan pembangunan.	Penguatan basis data pembangunan infrastruktur Peningkatan kualitas pembangunan infrastuktur diiringi <i>maintenance</i> yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur pendukung dalam pengembangan kawasan strategis meliputi Gelora Joko Samudro, WEP, dan infrastuktur lain serta penguatan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali dengan penataan kawasan religi, Islamic Centre, pusat kegiatan dan budaya Islam.	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	71.7%	74,2%	Program Peningkatan kualitas Jalan dan Jembatan	Pekerj aan Umum dan Pen ataa n Rua ng	Dinas Pekerj aan Umum dan Tata Ruang
				Persentase Jumlah jembatan dalam kondisi baik	64,71%	68,71%			
				Persentase ketersediaan Lampu PJU sesuai kebutuhan	44,07%	74%	Program Peningkatan kualitas prasarana kebinamargaan		
		Peningkatan kualitas layanan dasar infrastruktur melalui perbaikan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan, sarana	Penguatan institusional dan kerjasama antar sektor dalam pelayanan air minum, air baku, dan sanitasi untuk meningkatkan atribusi pelayanan kepada masyarakat.	Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara	15.23	60,23%	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerj aan Umum dan Penat aan Ruang	Dinas Pekerj aan Umum dan Tata Ruang

		prasarana penunjang, dan peningkatan keberdayaan masyarakat.	Optimalisasi infrastruktur air minum dan sanitasi eksisting melalui penurunan <i>Non-Revenue Water</i> dan pemanfaatan <i>idle capacity</i> ; Peningkatan kualitas rencana dan implementasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK); Optimalisasi Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; Peningkatan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian Banjir akibat Bengawan Solo, Luapan Kali Lamong, Luapan Kali Surabaya, Banjir Perkotaan, dan Banjir Pulau Bawean	Persentase kapasitas daya tampung air waduk kabupaten	63.86	76.36%	Program penyediaan dan pengolahan air baku		
				Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik	24.5	49%	Program pengendalian banjir		
				Persentase Panjang Saluran Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik	49.61	55,21 %	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong		
				Persentase Pemenuhan Rumah Tangga yang Mengakses Air Bersih/minum non PDM dibanding Kebutuhan air bersih/minum non PDAM	65.95	68,72%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum		
				Jumlah RDTR dan RTBL yang disusun	0 RDTR 17 RTBL	5 RDTR 26 RTBL	Program Perencanaan Tata Ruang		
				Persentase pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi/ijin tata ruang	65%	95%	Program pengendalian pemanfaatan ruang		
				Jumlah sertifikat bangunan laik fungsi yang diterbitkan	1	2	Program pengaturan jasa konstruksi		

		Penguatan peran lintas sektor dalam meletakkan pembangunan sesuai dengan tata ruang ditunjang komprehensifitas regulasi dan validitas data.	Pemenuhan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif, spesifik, dan harmonis; Peningkatan peran lintas sektor melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam rangka intervensi secara spesifik dan responsif guna menghadirkan keselarasan pembangunan.	Jumlah Infrastuktur yang dibangun	15 Lokasi	2 Lokasi	Program pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah strategis	Pekerj aan Umum dan Penat aan Ruang	Dinas Pekerj aan Umum dan Tata Ruang
6	Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan	Penguatan konektivitas antar wilayah melalui pengembangan layanan dan pembangunan sarana prasarana penunjang transportasi dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, keselamatan pengguna, mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi wilayah, atribusi dan akurasi layanan transportasi.	Pembangunan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan Kecamatan dan menjangkau arus perekonomian perdesaan; Penguatan sistem transpotasi intermoda maupun multimoda dalam rangka mendukung kelancaran sistem logistik daerah dan regional, dan mendukung kerja sama antar daerah; Pembangunan sarana prasarana transportasi yang ramah lingkungan; Peningkatan sumber daya perhubungan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi dan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Tersedia sesuai Kebutuhan;	11	38	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Per hub ung an	Dinas Perhub ungan.
					28.95%	100%			
				Persentase Lokasi Parkir yang ditetapkan;	56	114			
					49.12%	100%			
				Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dipelihara;	9	33	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan		
					81.82%	86.84%			
				Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Angkutan Umum;	232	116	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		
					11.45%	19.83%			

			penerapan manajemen transportasi berbasis IT guna mewujudkan keselamatan hingga menuju zero accident;	Peningkatan Penumpang Angkutan Penyeberangan Gresik-Bawean	126,606	164,372			
					4.49%	5.36%			
				Persentase Traffic Light yang terpasang ATCS;	3	12	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas		
					25.00%	100%			
				Persentase Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang tersedia sesuai kebutuhan;	1545	1871			
					82.58%	100%			
				Peningkatan Kawasan Tertib Lalu Lintas	3	7			
					42.86%	100.00%			

Misi 3 Tujuan Ke-2	Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program	Uru san	Pe ra ng ka t Da er ah
					Baeline 2016	2021			

7	Meningkatnya kualitas lingkup hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan	Meletakkan pembangunan infrastruktur dalam konteks berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, peduli terhadap perubahan iklim, dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan.	Penguatan basis data terpadu dan ketersediaan informasi yang mendukung pengukuran kualitas lingkungan hidup daerah	Persentase cakupan pengelolaan sampah	47%	70%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara terpadu didukung kebijakan yang ramah lingkungan.	Persentase luas ruang terbuka hijau dibanding luas wilayah perkotaan	15.35 %	20%	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)		
			Pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan lingkungan abiotik didukung optimalisasi fungsi Laboratorium Lingkungan Hidup.	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Terhadap Persyaratan Administrasi dan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup	20%	45%	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup		
			Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan pengendalian polusi udara secara bertahap.	Persentase Lokasi yang dimiliki oleh pelaku usaha/kegiatan dengan tingkat polusi sesuai ambang batas	15%	40%	Program Peningkatan Pengendalian Polusi		

		Penguatan literasi abad hayati secara mendalam guna menggunggah <i>social awareness</i> dan kepeduliaan dunia usaha didukung kebijakan konservasi sumber daya alam dan hayati, penguatan basis data lingkungan hidup, serta pembangunan berwawasan lingkungan.	Menghapuskan degradasi kualitas lingkungan melalui Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan secara menyeluruh didukung ketegasan <i>law enforcement</i> secara formal, penataan taman kota, kepeduliaan dunia usaha dan peran masyarakat dalam dunia pendidikan untuk melaksanakan penghijauan, serta penguatan pengolahan limbah/persampahan secara terpadu melalui <i>reuse, reduce, recycle</i> . Memperhatikan pelestarian dan pemanfaatan nilai ekonomi kenaeragaman hayati sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-2020 dengan mendukung pengembangan kebijakan yang mendukung keunggulan komparatif industri hilir (nilai tambah); dan industri berbasis <i>bioresource</i> (energi, farmasi, kesehatan, kosmetik, pangan, dan biomaterial)	Persentase lembaga yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup	20%	45%	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Lin gk un gan Hid up	Dina s Ling kung an Hidu p
			Persentase kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup	20%	45%				
			Persentase lokasi konservasi	15%	40%	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam			

			serta pengembangan IPTEK dan inovasi teknologi terapan yang tepat (termasuk <i>local wisdom</i>) secara terintegrasi;						

Misi 3 Tujuan Ke-3	Mewujudkan penanggulangan kemiskinan secara terpadu.

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program	Urusan	Per ang kat Dae rah
					Baeline 2016	2021			
8	Menurunnya tingkat pengangguran.	Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui penguatan akses dan produktifitas terhadap pengelolaan	Pemerataan dan perluasan kesempatan kerja didukung dengan pengembangan kapasitas dan kualitas tenaga kerja berorientasi <i>demand driven</i> dan berbasis kewirausahaan (pencari kerja	Persentase Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja berbasis Demand Driven	4%	11.11%	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Tena ga Kerja	Dinas Tenaga Kerja.

		sumberdaya produktif	dan santri), keterbukaan informasi serta pembangunan jejaring kemitraan lintas sektor	Persentase Peningkatan Kompetensi Santri dan Pencari Kerja berbasis Entrepreneurship	5%	12%			
				Persentase Informasi Pasar Kerja yang dipublikasikan	92.31%	94.44%	Program Informasi Pasar Kerja Dan Peningkatan Produktifitas		
		Maintanance terhadap keselarasan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan hubungan industrial yang harmonis melalui pendekatan yang kooperatif dan ketertiban penegakan regulasi dalam dunia usaha.	Pengarustamaan norma-norma ketenagakerjaan secara konsisten serta penerapan <i>collective bargaining</i> antara pekerja dan pemberi kerja secara efektif guna meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan didukung advokasi peraturan ketenagakerjaan secara berkelanjutan; Peningkatan tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan memperkuat kerja sama dengan komisi perlindungan serta pemerintah dalam rangka	Persentase perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan	16.95%	51%	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tena ga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

			memberikan keterjaminan perlindungan bagi pekerja migran;	Persentase Penempatan Pencari Kerja	65%	72.01%	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		
9	Meningkatkan produktivitas perdagangan dan pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan	Penguatan daya saing dan kondusifitas iklim usaha perdagangan daerah dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi berlandaskan perlindungan terhadap konsumen dan standardisasi produk khas Gresik.	Peningkatan iklim usaha berdaya saing melalui kemudahan akses perizinan dan pembenahan prosedur perdagangan melalui <i>e-Commerce</i> Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga melalui revitalisasi pasar-pasar desa dan kecamatan Pengembangan sistem informasi perdagangan antar wilayah dan peningkatan aktivitas perdagangan	Persentase barang kebutuhan pokok yang dimonitoring tahun n Persentase Alat UTP yang dikalibrasi sesuai Standart Persentase Peningkatan jumlah eksportir	100% 10.03% 5%	100% 10.13% 5%	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Peindustrian dan Perdagangan

			melalui inovasi promosi dagang Pengarustamaan pemanfaatan produk-produk dalam negeri dan khas daerah serta pengembangan kapasitas pengusaha mikro, kecil, dan menengah.	Persentase peningkatan omzet penjualan Usaha Mikro, usaha koperasi, Industri Kecil dan Menengah selama mengikuti jaringan promosi & pemasaran	5%	5%	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		
				Persentase stand Pasar kab yang dipelihara	5.18%	5.18%	Program Peningkatan Pasar		
		Penguatan investasi sektor industrial guna meningkatkan populasi industri berskala besar dan menengah serta pengembangan kapasitas secara berkelanjutan bagi industri berskala mikro dan kecil.	Pengembangan kapasitas industri mikro dan kecil melalui pengembangan kewirausahaan yang sistemik dan integratif dalam kurikulum dunia pendidikan, stimulasi penerapan teknologi, dan akses terhadap lembaga keuangan formal Peningkatan investasi dan penataan struktur industri serta pengembangan sentra-sentra industri potensial Peningkatan iklim perindustrian berdaya saing melalui kemudahan akses	Persentase Sentra Industri Kecil dan Menengah yang difasilitasi	104 Sentra	9.6 10 Sentra	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan

			dan pembenahan prosedur perizinan	Persentase Industri Mikro Kecil dan Menengah yang difasilitasi	7086 IMKM	17,6 1250 IMKM	Program Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah		
10	Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan Usaha Mikro dan Koperasi yang inovatif	Pengembangan sektor Usaha Mikro sebagai landasan ekonomi keraktyatan secara inklusif dengan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk dan membuka peluang pasar yang lebih luas.	Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal didukung standardisasi produk nasional maupun sertifikasi keunggulan mutu dan kualitas produk. Pengembangan peluang investasi Koperasi dan Usaha Mikro di Indeks Harga Saham Gabungan guna mendukung stabilitas pasar saham yang berdampak sistemik pada perekonomian nasional	Pertumbuhan volume usaha koperasi	3.16%	4.21%	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Di na s Ko pe ras i, Us ah a Mi kr o, Peir dust ian dan Per agan gan

		Pembangunan ekonomi daerah yang berdikari, disokong inovasi dan kreatifitas koperasi serta jiwa kewirausahaan Usaha Mikro guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Gresik	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kewirausahaan yang sistemik dan integratif dalam kurikulum dunia pendidikan, pelatihan berbasis teknologi dan pendampingan kolaboratif dalam mengakses <i>networking</i> dunia kerja, Peningkatan akses pembiayaan dan skema perluasan pembiayaan melalu lembaga pembiayaan formal perbankan maupun non-bank disertai advokasi dan perlindungan finansial;	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	0.12%	0.21%	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Di na s Ko pe ras i, Us ah a Mi kr o, Peir dust ian dan Per agan gan
11	Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan	Keberlanjutan dan Kebersinambungan layanan sosial dengan memperluas jangkauan pelayanan secara merata, kepastian layanan yang berkeadilan, dan	Inisiasi lembaga dan/atau layanan sosial berbasis kewilayahan didukung regulasi yang komprehensif; Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar yang komprehensif melalui	Persentase penanganan penyandang disabilitas	2.1%	2.8%	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Sosial	Dina s Sosi al

		kemudahan akses serta optimalisasi penanggulangan kemiskinan.	penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang efektif, penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi, pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan kerja; Peningkatan kapasitas masyarakat penyandang masalah sosial secara partisipatif serta literasi nilai-nilai sosial yang positif. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan program-program unggulan kemiskinan, penguatan peran <i>intermediary</i> , dan peningkatan keberdayaan masyarakat miskin maupun rentan miskin secara menyeluruh dalam dimensi kemiskinan meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan infrastuktur dasar serta ditunjang peningkatan pendapatan dan pengembangan kegiatan perekonomian.	Persentase penanganan eks Penyandang Penyakit Sosial	40%	80%	Progam Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial		
				Persentase Peningkatan pelayanan dan pelatihan bagi PMKS	0.21%	0.34%	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
				Persentase Panti Asuhan yang difasilitasi	58.82%	58.82%	Program Pembinaan Bagi Panti Asuhan/Panti Jompo		
				Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS	4.44%	6.07%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		
				Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	20%	90%	Progam Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial		
				Persentase penanganan WRSE	2.06%	4.12%			
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					

				Persentase data PMKS dan PSKS yang tervalidasi	100 per tahun	100 per tahun			
				Jumlah Keluarga rentan yang ditangani	200 Keluarga	350 Keluarga			
12	Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni huni	Penguatan pembangunan kawasan permukiman melalui percepatan pengentasan lingkungan kumuh, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan kemudahan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat miskin.	Mewujudkan kawasan permukiman yang kondusif, inklusif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani	23,3	1,01	Program Pengembangan Rumah Swadaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Penurunan Backlog Rumah Umum	12,56	3,36	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Rumah Umum		
				Persentase Prasarana Sarana dan utilitas Umum Perkotaan yang dipelihara	1.79	1,00	Program Peningkatan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan PSU		

				Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani	0 Ha	14.77 (27,83 ha)	Program Pengeloaan Kawasan Permukiman		
13	Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan Untuk mencapai kemandirian Desa	Membangun Desa, Desa Membangun	kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintah desa melalui pendampingan perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan Data Potensi Desa), pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan rencana pembangunan; Reformasi pelayanan publik di perdesaan melalui pemerataan jaringan internet dan	Persentase Desa dengan pengelolaan aset desa yang baik	10.9 (36 Desa)	50	Program Peningkatan Potensi Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase Desa dengan pengelolaan anggaran desa yang baik	5.45 (18 Desa)	100			
				Persentase desa dengan dokumen perencanaan yang baik	5.45 (18 Desa)	100			
				Persentase desa yang melaksanakan kerja sama	6.06 (20 Desa)	36.3			
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	12.1 (40 LKDes)	60,05	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		
				Rasio Swadaya Murni terhadap APBDesa	N/A	4 - 4.5%	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		
				Persentase Aparatur pemerintah desa yang memiliki pengetahuan dan	22.09	75	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		

				keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintah desa					
				Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) yang memiliki Kontribusi terhadap PADes	32,12	100	Program Pengembangan Ekonomi desa		
				Persentase Pasar desa dalam kondisi baik	51.9	62			
				Pertumbuhan TTG yang dihasilkan oleh POKMAS dan/atau warga masyarakat	13.6	27			

14	Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan	Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok ditunjang perbaikan infrastruktur, diversifikasi konsumsi pangan utama, dan mitigasi kerawanan pangan.	Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu;	Persentase penanganan luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang terserang hama dan penyakit	61%	81%	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Horikultura	Pan gan	Dinas Pertanian
			Revitalisasi pembenihan dan perbibitan bahan pangan pokok utama didukung penyuluhan yang berkelanjutan;	Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Pangan dan Hortikultura	660.964 ton	681.102 ton	Program Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura		
			Akselerasi penerapan teknologi budidaya pertanian secara signifikan yang dapat meningkatkan produktifitas, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim seperti <i>system of rice intensification</i> (SRI) dan budidaya pertanian organik;	Persentase penyuluh bersertifikat	15,62%	68,18%	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan		
			Pemerataan akses dan perlindungan finansial terhadap petani didukung stimulus sarana pendukung pertanian yang dikelola secara berkelompok dan terpadu;						
			Menjaga stabilitas harga pangan utama melalui operasi pasar yang efektif;						
			Menguatkan mitigasi kerawanan pangan dan adaptasi terhadap						

			perubahan iklim dengan pemetaan secara menyeluruh terhadap basis-basis produksi pangan kewilayahan, kerentanan, dan ketahanan pangan didukung dengan inisiasi teknologi pertanian, avokasi terhadap perkembangan pengelolaan pertanian, dan pengembangan benih unggul.						
		Revitalisasi sumber daya pertanian diiringi peningkatan mutu dan daya saing hasil pertanian secara berkelanjutan guna mendukung eksplorasi potensi agribisnis secara optimal.	Peningkatan mutu dan daya saing agribisnis melalui pengembangan standardisasi hasil pertanian dengan perbaikan teknologi produksi, penerapan standar mutu komoditas, pembinaan dan pengawasan mutu produk pertanian, peningkatan kuantitas dan peran lembaga sertifikasi. Peningkatan aksesibilitas petani di kawasan perdesaan terhadap inovasi teknologi pertanian, sumber-sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan formal, desiminasi informasi pasar dan akses pasar. Pembangunan infrstruktur pertanian secara berkelanjutan dan kolaboratif melalui penguatan peran lintas sektor.	Persentase Jumlah Olahan Produk Unggulan Pertanian yang dipasarkan Persentase penanganan luas lahan Tanaman Perkebunan yang terserang hama dan penyakit Jumlah produksi komoditas Unggulan Perkebunan Cakupan Varietas Bahan Baku nikotin Rendah Persentase kelompok tani tembakau yang difasilitasi	94,44% 100% 161.056 ton 0 0	100% 100% 163.784 ton 2 71,435	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan Program Perlindungan Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Produksi Perkebunan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Pertanian	Dinas Pertanian

				Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Peternakan	2.661,99 ton	4.287,16 ton	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		
				Persentase Penanganan terhadap jumlah ternak yang terserang penyakit;	79,87%	88,36%	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak		
				Persentase Infrastruktur Pendukung pertanian dalam kondisi baik	17,65%	28,89%	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan		
				Persentase kelompok tani dengan klasifikasi utama sesuai permentan no 82 tahun 2013	0	0,63	Program Pemberdayaan Kelompok Tani		
				Persentase Stabilitas Harga Pangan Utama	94,27%	89%	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan		
				Persentase Keamanan Pangan Segar	68,75%	80%			
				Pola Pangan Harapan	90,7	91			

Misi Keempat	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya
Tujuan Ke-1	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program	Uru san	Per an gk at Da era h
					Baeline 2016	2021			
1	Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	Peningkatan atribusi dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dasar untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan seluruh masyarakat Gresik didukung penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, transparan,	Penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan. Penguatan kredibilitas kurikulum ajar, peningkatan kualitas proses pembelajaran, penerapan sistem penilaian pendidik yang komprehensif dan proporsional; Pengembangan kapasitas dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan	Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;	93,93%	94%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pe ndi dik an	Di na s Pe ndi dik an

		berkualitas, dan inklusif dengan mengintegrasikan keluhuran Budaya Gresik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagama'an;	karir, peningkatan kualifikasi, peningkatan kesejahteraan, pengembangan profesi dan kompetensi; Penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan melalui perlindungan finansial terhadap siswa kategori keluarga miskin dan pemberian insentif bagi siswa berprestasi ditunjang akuntabilitas dan transparansi disertai kemudahan akses dan keterbukaan informasi masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar; Internalisasi nilai-nilai luhur budaya Gresik dalam dunia pendidikan melalui peningkatan kemampuan hafalan Qur'an peserta didik pada jenjang dan klasifikasi tertentu; Menciptakan <i>linkage</i> dunia pendidikan dan dunia usaha melalui inovasi pembelajaran dengan menerapkan kebutuhan dunia usaha dalam kurikulum ajar; Peningkatan kualitas output pendidikan melalui avokasi secara berkelanjutan dalam menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi peserta didik dalam menciptakan karya tulis.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;	105%	108%			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat;	92.75%	94%				
			Angka Partisipasi PAUD In Formal	74,00%	80,00%	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal			
			Angka Partisipasi PAUD Non Formal	24.50%	28.00%				
			Angka Kelulusan Paket A	89%	94%				
			Angka Kelulusan Paket B	87%	92%				
			Angka Kelulusan Paket C	86%	91%				
			Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4	93,67%	94%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			

				Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi Kompetensi	54%	58%			
				Prosentase Jumlah Guru SMP memenuhi Kompetensi	50%	54%			
		Penguatan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pengelolaan anggaran pendidikan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai.	Intensifikasi Pengawasan terhadap pembiayaan pendidikan, pengelolaan anggaran pendidikan dalam APBS dan perizinan penyelenggaraan pendidikan serta pembangunan fasilitas sarana prasarana penunjang secara berkelanjutan; Memperkuat peranan swasta dan masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas;	Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);	41,86%	46%	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pe ndi dik an	Di na s Pe ndi dk an
				Persentase Sarana dan prasarana SD sesuai SPM	50%	55%			
				Persentase Sarana dan prasarana SMP sesuai SPM	54%	58%			
		Peningkatan kapasitas, akses, dan utilitas perpustakaan sebagai <i>turning point</i> pembangunan pendidikan masyarakat yang berkualitas dengan menguatkan budaya gemar membaca	Meningkatkan budaya gemar membaca melalui promosi membaca dan inisiasi peningkatan karya tulis siswa yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan; Meningkatkan layanan perpustakaan daerah dengan meningkatkan preservasi dan konservasi bahan perpustakaan,	Persentase Peningkatan koleksi bahan pustaka	5.58%	42.55%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpu staka an	Di na s Per pu sta ka an da n
				Persentase Perpustakaan yang dibina	7%	25%			

		dan pengembangan kompetensi pustakawan.	keberagaman koleksi buku, pustaka online, dan pembangunan kapasitas pustakawan.						Arsip
2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	Peningkatan pembangunan kesehatan melalui penguatan upaya kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) secara promotif maupun preventif, pemenuhan jaminan kesehatan, aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan serta pembangunan sumber daya kesehatan. Penguatan pembangunan gizi masyarakat melalui penguatan upaya kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) secara promotif maupun preventif ditunjang penguatan keberdayaan	Menginisiasikan <i>continuum of care</i> terhadap pelayanan ibu dan anak dengan peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan; Pengarustamaan upaya kesehatan promotif dan preventif dalam peningkatan derajat ibu dan anak didukung seluruh stakeholder kesehatan. <i>Enabling</i> dan <i>empowering</i> dalam peningkatan peran masyarakat untuk meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif dalam meningkatkan status dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan melalui Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), pelayanan imunisasi tepat waktu, dan Posyandu; Perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang	Cakupan pelayanan nifas	91.75%	95%	Program Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Ke se ha ta n	Di na s Ke se ha t an
				Cakupan peyanan KN lengkap	94.46%	98%			
				Persentase balita gizi kurang	6.91%	7%			
				Cakupan pelayanan kesehatan remaja	82.24%	90%			
				Cakupan pelayanan kesehatan lansia	68.84%	75%			
				Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	78.4%	85%	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaaan Masyarakat		
				Persentase keluarga yang ber STBM	3%	15%	Program Kesehatan Lingkungan, Kerja Dan Olah Raga		
				Persentase TTU yang bersanitasi dasar	45.02%	70%			
				Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	103.8	93%	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit		
				Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan	100%	90%			

		masyarakat dalam upaya kesehatan; Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan Obat, Mutu Obat, Makanan, dan Sumberdaya Manusia Kesehatan Perlindungan terintegratif secara promotif, preventif, dan kuratif (finansial) terhadap masyarakat kategori miskin dan rentan miskin dalam mengakses layanan kesehatan	kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene dan pengasuhan serta meningkatkan pemantauan pertumbuhan anak; Pemerataan pelayanan kesehatan melalui akselerasi pembangunan sumber daya kesehatan dan perbaikan pengelolaan pelayanan kesehatan di tingkat Daerah, Kecamatan (Puskesmas dan Puskesmas Pembantu), dan Desa (Ponkesdes) Pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit daerah yang professional ditunjang kemudahan akses, mutu internal fasilitas kesehatan, dan efektivitas pengelolaan dana kesehatan; Pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan pada puskesmas dan ponkesdes; Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik untuk menjamin pemenuhan kualitas pelayanan (quality assurance) kesehatan masyarakat secara terintegratif melalui	Penyelidikan Epidemiologi Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR) Insiden / Angka kesakitan DBD Persentase kasus pemasangan yang ditangani Persentase puskesmas terakreditasi Persentase Pustu sesuai standar Persentase Ponkesdes sesuai standar Persentase klinik yang memiliki ijin operasional Persentase RS yang memiliki ijin operasional Persentase penyehat tradisional terdaftar	3.89% 137.79 kasus 65.24 insiden 2.8% 34% 37.8% 54.2% 100% 100% 58.9%	7% 174 kasus 52 insiden 2.5% 100% 74% 66% 100% 100% 80%	Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional		

			pendekatan promotif dan preventif didukung perlindungan finansial dalam pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin.	Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100%	100%	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan		
				Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	52.35%	75%			
				Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	87.2%	92%			
				Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	25.9%	56%			
				Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu, dan Ponkesdes			Program Pengadaan, Peningkatan &Perbaikan Sarana &Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya		
				Puskesmas :	59.4%	100%			
				Pustu :	60.8%	100%			

				Presentase KetersediaanPrese ntase Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok	100%	100%	Program Pembinaan Lingkungan Sosial		
				Persentase Patient Safety	-	100%	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Ke seh ata n	BL UD RS UD Ibn u sin a
				Persentase Indikator SPM yang mencapai target	68,48%	100%			
				Persentase keluhan pasien (number of complain)	0,01%	0,50%			
				Persentase pasien dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi	0,40%	1%			
				Persentase pasien pulang paksa	2,47%	2,25%			

				Persentase perolehan pasien baru (customer acquisition)	35%	45%			
				Persentase perolehan pasien lama (customer loyality)	65%	80%			
				Persentase HAIS (Healthcare Associated Infection)	-	<0,5%			
				Persentase pemenuhan laporan keuangan	100%	100%			
				Sales Growth Rate (SGR)	18,57%	15%			
				Curent Rasio ,	128,21%	100%			
				Cash Rasio	91,21%	100%			
				Solvabilitas	13,28%	10%			
				Quick Rasio	107,17%	115%			
				Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	100%			
				Persentase kecukupan SDM berdasarkan katagori SDM	80%	95%			

				Persentase elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit pendidikan	-	100%			
				Persentase Pasien yang terlayani	80%	95%			
				Persentase Pencapaian mutu untuk prioritas Rumah Sakit	55%	75%			
		Perlindungan terintegratif secara promotif, preventif, dan kuratif (finansial) terhadap masyarakat kategori miskin dan rentan miskin dalam mengakses layanan kesehatan.	Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik untuk menjamin pemenuhan kualitas pelayanan (quality assurance) kesehatan masyarakat secara terintegratif melalui pendekatan promotif dan preventif didukung perlindungan finansial dalam pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin.	Presentase Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok	N/A (Pemenuhan Spirometer, Peak flow meter, Micro CO analyzer, Kolesterol check, Glukosa check, Kotinin urine, Nebulizer, Electro Kardio Grafi, dan alkes lain yang ditentukan)	100%	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Dampak Tembakau	Ke seh ata n	BL UD RS UD Ibn u sin a

3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana	Pengendalian dinamika kependudukan dan internalisasi nilai-nilai pembangunan keluarga yang sehat dan sejahtera guna mewujudkan keseimbangan daya dukung alam dan lingkungan, tatanan sosial ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk secara merata.	Penguatan dan pengembangan strategi avokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait program-program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga terhadap masyarakat terutama remaja yang dalam penyiapan berkeluarga; Pemerataan dan kemudahan akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter, moralitas, serta mental kepribadian generasi penerus.	Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB	9.38%	10.25 %	Program Keluarga Berencana	Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana	Badan KB PPA
				Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB per Desa/Kelurahan;	1/5	1/4	Program Pengendalian Penduduk		
				Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun;	0.56%	1.0%	Program Keluarga Sejahtera		
4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Gender berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender	Mewujudkan keberdayaan perempuan yang mandiri dalam pembangunan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelansungan hidup yang berkualitas.	Integrasi pengarusutamaan Gender dalam penguatan kerjasama lintas dalam tataran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah. Meletakkan kesetaraan Gender sebagai perspektif society enabling & empowering maupun kaidah penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif.	Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah	≥30	≥30	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlingduan	

5	Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kota layak nak	Sinergitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya perlindungan perempuan dan anak serta avokasi terhadap pelbagai upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak didukung upaya preventif dan promotif berbasis pemberdayaan masyarakat Peningkatan akses anak terhadap layanan berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup melalui akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran, pembangunan lingkungan ramah anak dalam tataran sekolah hingga Daerah, ketersediaan layanan PAUD yang berkualitas dan filter informasi layak anak dalam rangka menuju kabupaten layak anak	Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A);	100%	100%	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Anak	

Keterangan :

	Prioritas I
	Prioritas II

wBab VIII
Indikasi Rencana Program Prioritas
dan Kebutuhan Pendanaan

Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah *Budget follows Program*. Selaras dengan penganggaran berbasis kinerja maka kebutuhan dana berlandaskan pada program pembangunan yang ditetapkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Selain itu, ketetapan pendanaan mempertimbangkan pada pelbagai regulasi pokok dalam penganggaran meliputi ketetapan minimal alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, komposisi belanja langsung dan tidak langsung, alokasi anggaran ke desa melalui alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, serta pelbagai kaidah lainnya yang mempengaruhi mempertimbangkan pencapaian sasaran sebagaimana termuat dalam perencanaan jangka menengah.

Ketetapan Program Prioritas Perencanaan Jangka menengah sebagaimana tabel berikut;

Tabel 8.1
Perubahan Program Prioritas Perencanaan Jangka menengah Daerah

No	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Perubahan Program Prioritas Pembangunan Daerah	PD Penanggungjawab
Misi ke-1 Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri			
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum,& Perlindungan Masyarakat			
1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Program Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Dinas Satpol PP
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tidak ada Perubahan	
3	Tidak ada Perubahan	Tidak ada Perubahan	
4	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tidak ada perubahan	
5	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Tidak ada Perubahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana	Tidak ada Perubahan	

7	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Tidak ada Perubahan	
Urusan Kepemudaan dan Olahraga			
8	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Program Peningkatan Partisipasi Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
9	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda		
10	Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan, Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Tidak Ada Perubahan	
Kebudayaan			
11	Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya	Tidak Ada Perubahan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
12	Program Pengembangan Nilai Budaya dan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tidak Ada Perubahan	
Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat			
13	Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tidak ada Perubahan	Kantor Kesbangpol
Misi Ke-2			
Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik			
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tidak Ada Perubahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Tidak Ada Perubahan	
3	Program Peningkatan Pengelolaan Informasi, dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Kependudukan	
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan Dan Catatan Sipil	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	
		Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
Komunikasi dan Informatika			
5	Program Pengembangan E-Government	Tidak Ada Perubahan	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengembangan Komunikasi Daerah	
Statistik			

6	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tidak Ada Perubahan	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Program Kerjasama Informasi	Tidak Ada Perubahan	
Persandian			
8	Program Pembangunan Komunikasi Dan Persandian Daerah	Program Pembangunan Komunikasi Dan Persandian Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
Perpustakaan			
9	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Tidak Ada Perubahan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kearsipan			
10	Program Pelayanan Kearsipan Daerah	Program Pengelolaan Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Urusan Perencanaan			
11	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;	Tidak Ada Perubahan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
12	Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya;	Tidak Ada Perubahan	
13	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	
14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah;	Tidak Ada Perubahan	
Penelitian dan Pengembangan			
15	Program Penelitian dan Pengembangan	Tidak Ada Perubahan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
16	Program Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Tidak Ada Perubahan	
Inspektorat			
17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tidak Ada Perubahan	Inspektorat
18	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tidak Ada Perubahan	
19	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Dihapus	
20	Program Penguatan Pengawasan	Tidak Ada Perubahan	
		Program Pencegahan Korupsi	
Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan			
21	Program Data Formasi dan Pengembangan ASN	Tidak Ada Perubahan	Badan Kepegawaian Daerah

22	Program Pendidikan dan Pelatihan ASN	Tidak Ada Perubahan	
23	Program Mutasi dan Kepangkatan ASN	Tidak Ada Perubahan	
24	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	Tidak Ada Perubahan	
Sekretariat Daerah			
25	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tidak Ada Perubahan	Sekretariat Daerah
26	Program Fasilitasi Kehumasan Pemerintahan Daerah	Tidak Ada Perubahan	
27	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah	Tidak Ada Perubahan	
28	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Aset, dan Barang Daerah	Tidak Ada Perubahan	
29	Program Fasilitasi dan Koordinasi kebijakan otonomi daerah dan kerjasama	Tidak Ada Perubahan	
30	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah	Tidak Ada Perubahan	
31	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tidak Ada Perubahan	
32	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat	Tidak Ada Perubahan	
33	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tidak Ada Perubahan	
34	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tidak Ada Perubahan	
35	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah	Tidak Ada Perubahan	
36	Program Pelayanan Administrasi Keuangan (Non Urusan-Bag Keuangan)	Tidak Ada Perubahan	
37	Program Sosialisasi ketentuan dibidang cukai	Tidak Ada Perubahan	
Sekretariat DPRD			
38	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tidak Ada Perubahan	Sekretariat DPRD
39	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Program Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan DPRD Dengan Masyarakat	

Kecamatan			
40	Program Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.	Tidak Ada Perubahan	Kecamatan
41	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Tidak Ada Perubahan	
42	Program Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Perekonomian Desa	Tidak Ada Perubahan	
43	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tidak Ada Perubahan	
44	Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Tidak Ada Perubahan	
Misi Ke-3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan			
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Program Peningkatan kualitas Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan		
3	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Program Peningkatan kualitas prasarana kebinamargaan	
4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan		
5	Program Pengendalian Banjir	Tidak Ada Perubahan	
6	Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Tidak Ada Perubahan	
7	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Tidak Ada Perubahan	
8	Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku	Tidak Ada Perubahan	
9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum	Tidak Ada Perubahan	
10	Program Pengembangan Dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis	Tidak Ada Perubahan	
11	Program Pengembangan Dan Pembangunan Gedung Negara	Di Hapus	
12	Program Perencanaan Tata Ruang	Tidak Ada Perubahan	
13	Program Pemanfaatan Ruang	Di Hapus	
14	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tidak Ada Perubahan	
15	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Tidak Ada Perubahan	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			

16	Program Lingkungan Sehat Permukiman	Program Pengeloaan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
17	Program Pengembangan Permukiman		
18	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Program Peningkatan, Pemiliharaan, Dan Pengembangan PSU	
19	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Rumah Umum	Tidak Ada Perubahan	
20	Program Pengembangan Rumah Swadaya	Tidak Ada Perubahan	
21	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Di Hapus	
Tenaga Kerja			
22	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tidak Ada Perubahan	Dinas Tenaga Kerja
23	Program Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas	Tidak Ada Perubahan	
24	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tidak Ada Perubahan	
25	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tidak Ada Perubahan	
Transmigrasi			
26	Program Fasilitasi Transmigrasi	Dihapus	Dinas Tenaga Kerja
Pangan			
27	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Tidak Ada Perubahan	Dinas Pertanian
28	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pangan	Dihapus	
Pertanahan			
29	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Program Pembinaan dan Pembebasan Lahan	Dinas Pertanahan
30	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tidak Ada Perubahan	
Lingkungan Hidup			
31	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tidak ada Perubahan	Dinas Lingkungan Hidup
32	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Tidak ada Perubahan	
33	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Tidak ada Perubahan	
34	Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Dihapus	
35	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tidak ada Perubahan	
36	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tidak ada Perubahan	

37	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tidak ada Perubahan	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
38	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tidak Ada Perubahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
39	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tidak Ada Perubahan	
40	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tidak Ada Perubahan	
41	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pengembangan Ekonomi desa	
		Program Peningkatan Potensi Desa	
Perhubungan			
42	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tidak Ada Perubahan	Dinas Perhubungan
43	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Dihapus	
44	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tidak Ada Perubahan	
45	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tidak Ada Perubahan	
46	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Tidak Ada Perubahan	
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
47	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Tidak Ada Perubahan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
48	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Tidak Ada Perubahan	
Penanaman Modal			
49	Program Pengembangan Iklim, Promosi Dan Data Dan Informasi Penanaman Modal	Tidak Ada Perubahan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
51	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tidak Ada Perubahan	
52	Program Pelayanan Perizinan Usaha Dan Perizinan Tertentu	Tidak Ada Perubahan	
53	Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan Dan Lingkungan	Tidak Ada Perubahan	
Kelautan dan Perikanan			
54	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Tidak Ada Perubahan	Dinas Perikanan
55	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Tidak Ada Perubahan	
56	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tidak Ada Perubahan	

57	Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)	Tidak Ada Perubahan	
Pariwisata			
58	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tidak Ada Perubahan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
59	Program Pengembangan Kemitraan	Tidak Ada Perubahan	
60	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tidak Ada Perubahan	
Pertanian			
61	Program Pemberdayaan Kelompok Tani	Tidak Ada Perubahan	Dinas Pertanian
62	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan	Tidak Ada Perubahan	
63	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan	Tidak Ada Perubahan	
64	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan	Tidak Ada Perubahan	
65	Program Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura	Tidak Ada Perubahan	
66	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tidak Ada Perubahan	
67	Program Peningkatan Produksi perkebunan	Tidak Ada Perubahan	
68	Program Perlindungan Tanaman Perkebunan	Tidak Ada Perubahan	
69	Program Peningkatan Produksi Perternakan	Tidak Ada Perubahan	
70	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tidak Ada Perubahan	
71	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Tidak Ada Perubahan	
Kehutanan			
72	Program Pengelolaan Taman Hutan Raya	Dihapus	Dinas Lingkungan Hidup
Energi dan Sumber Daya Mineral			
73	Program Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah	Dihapus	
Perdagangan			
74	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tidak Ada Perubahan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
75	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Tidak Ada Perubahan	
76	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tidak Ada Perubahan	
77	Program Peningkatan Pasar	Tidak Ada Perubahan	
Perindustrian			
78	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Dihapus	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

79	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Tidak Ada Perubahan	
80	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Tidak Ada Perubahan	
Keuangan			
81	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Pelayanan Dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah	BPPKAD
82	Program Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	
83	Program Peningkatan Pendapatan Pendapatan PBB dan BPHTB	Program Pengelolaan Pendapatan PBB Dan BPHTB	
84	Program Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran	
85	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah	
86	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset dan Barang Daerah	Program Peningkatan Dan Pengembangan Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah	
Sosial			
87	Progam Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Tidak Ada Perubahan	Dinas Sosial
88	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Tidak Ada Perubahan	
89	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Tidak Ada Perubahan	
90	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Tidak Ada Perubahan	
91	Program Pembinaan bagi panti asuhan/Panti Jompo	Tidak Ada Perubahan	
92	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Tidak Ada Perubahan	
93	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keberintisan Dan Kesetiakawanan Sosial	Tidak Ada Perubahan	
Misi Ke-4			
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya			
Pendidikan			
1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tidak Ada Perubahan	Dinas Pendidikan
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tidak Ada Perubahan	
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	

4	Program Pendidikan Non Formal		
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tidak Ada Perubahan	
Kesehatan			
6	Program Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Tidak Ada Perubahan	Dinas Kesehatan
7	Program Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat	Tidak Ada Perubahan	
8	Program Kesehatan Lingkungan, Kerja Dan Olah Raga	Tidak Ada Perubahan	
9	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Tidak Ada Perubahan	
10	Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional	Tidak Ada Perubahan	
11	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Tidak Ada Perubahan	
12	Program Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Akademi Keperawatan)	Dihapus	
13	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Tidak Ada Perubahan	
14	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Tidak Ada Perubahan	RSUD Ibnu Sina.
15	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Dampak Tembakau	Tidak Ada Perubahan	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
16	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Tidak Ada Perubahan	Badan KBPPA
17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Tidak Ada Perubahan	
2			
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
18	Program Keluarga Berencana	Tidak Ada Perubahan	Badan KBPPA
19	Program Keluarga Sejahtera	Tidak Ada Perubahan	
20	Program Pengendalian Penduduk	Tidak Ada Perubahan	
Non Urusan			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak Ada Perubahan	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak Ada Perubahan	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tidak Ada Perubahan	
4	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Tidak Ada Perubahan	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tidak Ada Perubahan	
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Tidak Ada Perubahan	

	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
7	Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis PD	Tidak Ada Perubahan	

Perumusan prioritas pembangunan berdasarkan penelahaan isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebagaimana berikut:

1. Atribusi Layanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan;
2. Kesejahteraan Sosial;
 - a. Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. Ketenagakerjaan;
 - c. Kondusifitas Daerah;
 - d. Penegakan Hak Asasi Manusia.
3. Pembangunan Berkelanjutan berwawasan lingkungan;
 - a. Ketersedian Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, dan Pelayanan Sanitasi Dasar
 - b. Konektivitas Daerah
 - c. Permukiman Inklusif
 - d. Pengendalian Banjir
 - e. Lingkungan Hidup
 - f. Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik
4. Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Pangan;
5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Data Pembangunan;
6. Akselerasi pembangunan melalui Sistem Inovasi Daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis *Smart City*.
7. Pengarustamaan Gender;
8. Kemandirian Desa. dan
9. Pengarustamaan pembangunan berkelanjutan;

Adapun estimasi kebutuhan dalam penelahaan kembali perencanaan jangka menengah disajikan sebagaimana matriks berikut :

Tabel 8.1
Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Estimasi Kerangka Pendanaan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Target Kinerja/Anggaran									
			Baseline 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1	Atribusi Pelayanan Pendidikan				115.263.950.135		124.825.773.350		144.773.788.897		156.819.153.789	
	Urusan Pendidikan				115.263.950.135		124.825.773.350		144.773.788.897		156.819.153.789	
	Dinas Pendidikan											
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;	93,93	94	44.216.312.435	94,5	47.884.315.850	95	55.536.558.263	95,5	60.157.271.130	96
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	105,00	105,50		106		107		107,5		108
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	92,75	92,75		93		93,25		93,5		94
2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4	93,67	94	627.504.784	95	679.560.000	96	788.158.353	97	853.734.139	98
		Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi Kompetensi	N/a	54		55		56		57		58
		Prosentase Jumlah Guru SMP memenuhi Kompetensi	N/a	50		51		52		53		54
3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);	42,50	46,00	70.420.132.916	50,00	76.261.897.500	55,00	88.449.072.281	60,00	95.808.148.521	65,00
		Persentase Sarana dan prasarana SD sesuai SPM	50,00	51,00		52,00		53,00		54,00		55,00
		Persentase Sarana dan prasarana SMP sesuai SPM	54,00	54,00		55,00		56,00		57,00		58,00
2	Atribusi Pelayanan Kesehatan				264.774.322.259		286.738.911.000		332.561.757.524		360.231.322.224	
	Urusan Kesehatan				264.774.322.259		286.738.911.000		332.561.757.524		360.231.322.224	
	Dinas Kesehatan											
1	Program Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan nifas	91,75	92	20.470.753.950	92	22.168.923.500	93	25.711.669.671	94	27.850.913.560	95
		Cakupan pelayanan KN lengkap	94,46	95		96		96		97		98
		Persentase balita gizi kurang	6,91	8		8		8		7		7
		Cakupan pelayanan kesehatan remaja	82,24	83		83		85		88		90
		Cakupan pelayanan kesehatan lansia	68,84	70		70		70		75		75

Tabel 8.1
Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Estimasi Kerangka Pendanaan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Target Kinerja/Anggaran										
			Baseline 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
2	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	78.4	80	7.089.389.875	81	7.677.496.500	83	8.904.413.149	84	9.645.271.742	85	
3	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	103.8	92	950.903.460	92	1.029.786.500	93	1.194.353.452	93	1.293.725.191	93	
		Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	100	82		84		86		88		90	
		Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	3.89	5		5		5		6		7	
		Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR)	137.79	141		147		154		163		174	
		Insiden / Angka kesakitan DBD	65.24	56		55		54		53		52	
		Persentase kasus pemasangan yang ditangani	2.8	3		3		2.5		2.5		2.5	
		4	Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional	Persentase puskesmas terakreditasi		34		65		65.085.219.860		93	70.484.422.000
Persentase Pustu sesuai standar	37.8			47	54	60	67	74					
Persentase Ponkesdes sesuai standar	54.2			58	60	62	64	66					
Persentase klinik yang memiliki ijin operasional	100			100	100	100	100	100					
Persentase RS yang memiliki ijin operasional	100			100	100	100	100	100					
Persentase penyehat tradisional terdaftar	58.9			62	66	70	74	80					
5	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100	100	9.875.755.448	100	10.695.007.500	100	12.404.143.123	100	13.436.183.738	100	
		Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	52.35	55		60		65		70		75	
		Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	87.2	88		89		90		91		92	
		Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	25.9	28		35		41		49		56	
		Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskemas, Pustu, dan Ponkesdes	19.853.070.895	71.9		21.500.000.000		81.3		24.935.847.604		90.6	27.010.542.102
Puskesmas :	62.5	71.6			82.4		94.6		100				
Pustu :	60.8												
		Ponkesdes :	14.4										
	RSUD Ibnu Sina												

Tabel 8.1
Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Estimasi Kerangka Pendanaan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Target Kinerja/Anggaran									
			Baseline 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Persentase Patient Safety	-	100%		100%		100%		100,00%		100,00%
		Persentase Indikator SPM yang mencapai target	68,48%	70%		80%		85%		90%		100%
		Persentase keluhan pasien (number of complain)	0,01%	<1%		<1%		<1%		<1%		0,50%
		Persentase pasien dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi	0,40%	2%		2%		2%		1,50%		1%
		Persentase pasien pulang paksa	2,47%	3%		3%		2,75%		2,50%		2,25%
		Persentase perolehan pasien baru (customer acquisition)	35%	35%		37,50%		40%		42,50%		45%
		Persentase perolehan pasien lama (customer loyalty)	65%	70%		72,50%		73%		75%		80%
		Persentase HAIS (Healthcare Associated Infection)	-	<1,5%	141.449.228.771	<1,5%	153.183.275.000	<1%	177.663.013.993	<1%	192.444.804.590	<0,5%
		Persentase pemenuhan laporan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%
		Sales Growth Rate (SGR)	18,57%	15%		15%		15%		15%		15%
		Curent Rasio	128,21%	127%		125%		122,5%		120%		100%
		Cash Rasio	91,21%	100%		100%		100%		100%		100%
		Solvabilitas	13,28%	10%		10%		10%		10%		10%
		Quick Rasio	107,17%	100%		100%		100%		110%		115%
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	100%		100%		100%		100%		100%
		Persentase kecukupan SDM berdasarkan katagori SDM	0,8	83%		85%		90%		90%		95%
		Persentase elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit pendidikan	-	80,00%		80%		85%		90%		100%
		Persentase Pasien yang terlayani	80%	82,50%		100%		90%		90%		95%
		Persentase Pencapaian mutu untuk prioritas Rumah Sakit	55%	60,00%		60%		65%		70%		75%
3	Infrastruktur Berkelanjutan				375.046.336.501		404.688.425.100		469.360.413.736		508.411.802.061	
	Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				366.462.760.660		396.863.004.000		460.284.436.620		498.580.692.011	
1	Program Peningkatan kualitas Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	71,7	72,2	190.368.732.916	72,7	206.160.940.000	73,2	239.106.873.567	73,7	259.000.872.076	74,2
		Persentase Jumlah jembatan dalam kondisi baik	64,71	65,51%		66,31%		67,11%		67,91%		68,71%
2	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara	15,23	24,23%	18.893.931.181	33,23%	20.461.294.000	42,23%	23.731.149.254	51,23%	25.705.611.304	60,23%

Tabel 8.1
Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Estimasi Kerangka Pendanaan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Target Kinerja/Anggaran									
			Baseline 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target
3	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase kapasitas daya tampung air waduk kabupaten	63,86	66,36%	4.794.810.262	68,86%	5.192.568.000	71,36%	6.022.376.015	73,86%	6.523.445.422	76,36%
4	Program pengendalian banjir	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik	24,5	37%	44.742.208.417	40%	48.453.838.000	43%	56.197.093.962	46%	60.872.764.246	49%
5	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Persentase Panjang Saluran Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik	49,61	$(71.964 / 139.94) \times 100\% = 50,71\%$	21.599.085.690	$(72.363 / 139.94) \times 100\% = 51,71\%$	23.390.857.000	$(73.763 / 139.94) \times 100\% = 52,71\%$	27.128.876.534	$(75.861 / 139.94) \times 100\% = 54,21\%$	29.386.033.851	$(77.261 / 139.94) \times 100\% = 55,21\%$
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum	Persentase Pemenuhan Rumah Tangga yang Mengakses Air Bersih/minum non PDM dibanding Kebutuhan air bersih/minum non PDAM	65,95	$(247.889 / 366.554) \times 100\% = 67,63\%$	9.937.145.298	$(248.889 / 366.554) \times 100\% = 67,89\%$	10.761.490.000	$(249.889 / 366.554) \times 100\% = 68,17\%$	12.481.249.983	$(250.889 / 366.554) \times 100\% = 68,44\%$	13.519.705.987	$(251.889 / 366.554) \times 100\% = 68,72\%$
7	Program pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah strategis	Jumlah Infrastruktur yang dibangun	15 Lokasi	4 Lokasi	76.126.846.896	3 Lokasi	82.442.017.000	3 Lokasi	95.616.817.305	3 Lokasi	103.572.259.123	2 Lokasi
	Urusan Perhubungan				1.174.349.311		1.271.768.500		1.475.005.837		1.597.728.215	
	Dinas Perhubungan											
8	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Tersedia sesuai Kebutuhan;	11	16	1.174.349.311	22	1.271.768.500	26	1.475.005.837	33	1.597.728.215	38
			28,95%	42,11%		57,89%		68,42%		86,84%		100,00%
			56	93		98		104		110		114
		Persentase Lokasi Parkir yang ditetapkan;	49,12%	81,58%		85,96%		91,23%		96,49%		100,00%
	Urusan Lingkungan Hidup				7.409.226.529		6.553.652.600		7.600.971.278		8.233.381.836	
	Dinas Lingkungan Hidup											

Tabel 8.1
Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Estimasi Kerangka Pendanaan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Target Kinerja/Anggaran									
			Baseline 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target
9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pengelolaan sampah	47%	50%	7.409.226.529	55%	6.553.652.600	60%	7.600.971.278	65%	8.233.381.836	70%
4	Pelayanan Publik				16.923.303.952		18.322.416.400		21.250.464.329		24.386.332.042	
	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil				3.851.349.857		4.170.842.000		4.837.371.186		5.239.846.672	
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil											
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan kependudukan yang memiliki SOP	100.00 %	100.00 %	2.927.951.210	100.00 %	3.170.842.000	100.00 %	3.677.564.320	100.00 %	3.983.542.388	100.00 %
2	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan inovasi Pelayanan	Jumlah SKPD yang memanfaatkan data adminstrasi kependudukan	3	3	923.398.646	6	1.000.000.000	8	1.159.806.865	9	1.256.304.284	9
		Persentase Arsip Akta Kependudukan yang dialihmediakan	16,23	27		37		47		57		67
	Urusan Komunikasi dan Informatika				971.594.515		1.052.194.000		1.220.341.825		1.321.875.830	
	Dinas Komunikasi dan Informatika											
3	Program Pengembangan E-Government	Persentase OPD yang dapat mengakses Wan dan Fiber Optik	100%	100%	971.594.515	100%	1.052.194.000	100%	1.220.341.825	100%	1.321.875.830	100%
		Kecepatan Akses internet untuk perkantoran Pemerintahan	150 Mbps	150Mbps		250 Mbps		250 Mbps		300 Mbps		350 Mbps
		Persentase sistem informasi yang aktif	78,31	92,77		95,24		96,39		98,8		100
		Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi informasi	76.29	76.40		79.44		82.48		85.52		88.56
		Persentase Ketersediaan Pedoman Penyelenggaraan e-gov	N/a	33.33		66.67		83.33		100		100
	Urusan Perencanaan				8.894.112.269		9.627.156.000		11.165.641.622		13.462.439.153	

Tabel 8.1
Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Estimasi Kerangka Pendanaan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Target Kinerja/Anggaran									
			Baseline 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
	Bappeda											
4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi	100%	100%	1.466.414.301	100%	1.588.062.000	100%	1.841.845.210	100%	2.313.918.028	100%
5	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	100%	100%	1.111.194.384	100%	1.203.374.500	100%	1.395.682.007	100%	1.753.401.284	100%
6	Program Perencanaan Pembangunan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	100%	100%	3.713.426.880	100%	4.021.477.500	100%	4.664.137.213	100%	5.859.575.561	100%
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum SKPD sesuai Petunjuk Teknis	100%	100%	2.603.076.704	100%	2.814.242.000	100%	3.263.977.192	100%	3.535.544.280	100%
		Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD	70%	75%		80%		85%		90%		95%
	Urusan Penelitian dan Pengembangan				1.678.022.551		1.817.224.400		2.107.629.335		2.282.986.798	
8	Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	1.333.254.214	100%	1.443.855.500	100%	1.674.593.521	100%	1.813.921.850	100%
9	Program Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	100%	100%	344.768.337	100%	373.368.900	100%	433.035.814	100%	469.064.949	100%
	Urusan Penanaman Modal				1.528.224.760		1.655.000.000		1.919.480.362		2.079.183.590	
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP											
10	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Verifikasi izin realisasi investasi	75%	75%	1.528.224.760	75%	1.655.000.000	75%	1.919.480.362	75%	2.079.183.590	75%
5	Pengentasan Kemiskinan				37.949.492.578		40.908.860.300		47.446.377.027		52.755.054.514	
	Urusan Pariwisata											
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata											
1	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Pelaku Usaha ekonomi kreatif yang dikembangkan	129 pelaku usaha	41%	376.852.839	46%	408115000	51%	473.334.579	56%	512.716.623	61%
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	6 destinasi	100%	922.247.538	100%	998.753.400	100%	1.158.361.050	100%	1.254.738.175	100%
	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman											
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman											
3	Program Pengembangan Rumah Swadaya	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani	23,3	1,65	6.260.110.483	0,51	6.779.423.500	1,01	7.862.821.918	1,01	9.878.096.858	1,01

Tabel 8.1
Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Estimasi Kerangka Pendanaan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Target Kinerja/Anggaran									
			Baseline 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
4	Program Pengelolaan Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani	0 Ha	1.59 (3 Ha)	8.310.147.356	7.73 (14,56 ha)	8.999.523.000	14.76 (27,81 ha)	10.437.708.560	14.77 (27,83 ha)	11.306.139.297	14.77 (27,83 ha)
	Urusan Tenaga Kerja											
	Dinas Tenaga Kerja											
5	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja berbasis Demand Driven	-45	318,18	2.428.538.440	4,35	2.630.000.000	4,17	3.050.292.056	8	3.304.080.266	11,11
		Persentase Peningkatan Kompetensi Santri dan Pencari Kerja berbasis Entrepreneurship	-50	300		5		7,14		11,11		12
6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja	65	67,02	458.290.135	68	496.308.000	69,01	575.621.426	71,01	623.513.866	72,01
	Urusan Pertanian											
	Dinas Pertanian											
7	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan	Persentase Infrastruktur Pendukung pertanian dalam kondisi baik	17,65	19,45	4.763.813.616	21,47	5.159.000.000	23,72	5.983.443.618	26,19	6.481.273.800	28,89
8	Program Pemberdayaan Kelompok Tani	Persentase kelompok tani dengan klasifikasi utama sesuai permentan no 82 tahun 2013	0	0,18	631.241.905	0,36	558.349.800	0,45	647.577.931	0,54	701.457.246	0,63
9	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan	Persentase penyuluh bersertifikat	15,62	15,62	320.056.210	22,22	283.098.000	33,33	328.339.004	50	355.657.230	68,18
10	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase Stabilitas Harga Pangan Utama	94,27	86	514.635.921	86,5	557.328.000	87	646.392.841	88	700.173.554	89
		Persentase Keamanan Pangan Segar	68,75	73		75		77		79		80
		Pola Pangan Harapan	90,7	90,75		90,8		90,85		90		91
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat											
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat											
11	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	12.1 (40 LKDes)	24.02	681.321.381	36.03	737.841.000	36,03	855.753.057	48,04	926.952.809	60,05

Tabel 8.1
Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Estimasi Kerangka Pendanaan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Target Kinerja/Anggaran									
			Baseline 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
12	Program Pengembangan Ekonomi desa	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) yang memiliki Kontribusi terhadap PADes	32,12	72,12	277.427.736	80	300.442.000	85	348.454.694	90	377.446.572	100
		Persentase Pasar desa dalam kondisi baik	51,9	52		55		60		61		62
		Pertumbuhan TTG yang dihasilkan oleh POKMAS dan/atau warga masyarakat	13,6	19		20		22		25		27
	Urusan koperasi dan UMKM											
	Dinas Koperindag											
13	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase pertumbuhan volume usaha koperasi	3,16	3,68	800.401.947	3,85	866.800.000	3,99	1.005.320.591	4,11	1.088.964.553	4,21
14	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	0,12	0,13	1.292.638.063	0,14	1.399.870.000	0,15	1.623.578.837	0,18	1.758.662.678	0,21
	Urusan Perdagangan											
15	Program Peningkatan Pasar	Persentase stand Pasar kab yang dipelihara	5,18%	5,18%	1.247.345.359	5,18%	1.350.820.000	5,18%	1.566.690.310	5,18%	1.697.040.953	5,18%
	Urusan Kelautan dan Perikanan											
	Dinas Perikanan											
16	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produktivitas perikanan budidaya (ton)	89.233,41	113.515	1.277.041.860	126.259	1.382.980.000	140.516	1.603.989.699	142.622	1.737.443.698	144.760
		a. Air Payau										
		b. Air Tawar										
		Persentase yang saluran tambak yang direhabilitasi	19	23		27		31		35		38
17	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton)	18.786	20.045	617.199.655	20.365	668.400.000	20.690	775.214.909	21.021	839.713.783	21.388
		Persentase tempat pendaratan ikan yang direhabilitasi	25	50		75		100		125		150
	Urusan Keluarga Berencana											
	Dinas KBPP											

Tabel 8.1
Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Estimasi Kerangka Pendanaan

No	Urusan/Program	Indikator Program	Target Kinerja/Anggaran									
			Baseline 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
18	Program Keluarga Berencana	Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB	9,38	10,25	1.303.019.834	10,12	1.411.113.000	9,90	1.636.618.545	9,80	1.772.787.307	9,70
19	Program Keluarga Sejahtera	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun;	0,56	1,0	4.054.429.227	0,9	4.390.768.000	0,8	5.092.442.870	0,7	5.516.140.648	0,6
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
20	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah	≥30	≥30	511.703.207	≥30	554.152.000	≥30	642.709.294	≥30	696.183.531	≥30
	Urusan Sosial											
	Dinas Sosial											
21	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS	4,44	4,73	901.029.868	5,03	975.775.600	5,33	1.131.711.240	5,77	1.225.871.066	6,07
Total Anggaran Program Prioritas 1					809.957.405.425		875.484.386.150		1.015.392.801.514		1.102.603.664.631	

Capaian Kinerja Program Prior

No	Urusan/Program	Indikator Program	Baseline 2016	Tahun 2017		Tahun 2021
				Target	Anggaran	Anggaran
1	Atribusi Pelayanan Pendidikan				115.263.950.135	172.992.194.165
	Urusan Pendidikan				115.263.950.135	172.992.194.165
	Dinas Pendidikan					
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;	93,93	94	44.216.312.435	66.361.398.313
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	105,00	105,50		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	92,75	92,75		
2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4	93,67	94	627.504.784	941.781.271
		Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi Kompetensi	N/a	54		
		Prosentase Jumlah Guru SMP memenuhi Kompetensi	N/a	50		
3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);	42,50	46,00	70.420.132.916	105.689.014.581
		Persentase Sarana dan prasarana SD sesuai SPM	50,00	51,00		
		Persentase Sarana dan prasarana SMP sesuai SPM	54,00	54,00		
2	Atribusi Pelayanan Kesehatan				264.774.322.259	397.382.624.078
	Urusan Kesehatan				264.774.322.259	397.382.624.078
	Dinas Kesehatan					
1	Program Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan nifas	91.75	92	20.470.753.950	30.723.228.189
		Cakupan pelayanan KN lengkap	94.46	95		
		Persentase balita gizi kurang	6.91	8		
		Cakupan pelayanan kesehatan remaja	82.24	83		
		Cakupan pelayanan kesehatan lansia	68.84	70		

Capaian Kinerja Program Prior

No	Urusan/Program	Indikator Program	Baseline 2016	Tahun 2017		Tahun 2021
				Target	Anggaran	Anggaran
2	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	78.4	80	7.089.389.875	10.640.005.903
3	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	103.8	92	950.903.460	1.427.149.389
		Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	100	82		
		Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	3.89	5		
		Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR)	137.79	141		
		Insiden / Angka kesakitan DBD	65.24	56		
		Persentase kasus pemasangan yang ditangani	2.8	3		
4	Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional	Persentase puskesmas terakreditasi	34	65	65.085.219.860	97.682.189.255
		Persentase Pustu sesuai standar	37.8	47		
		Persentase Ponkesdes sesuai standar	54.2	58		
		Persentase klinik yang memiliki ijin operasional	100	100		
		Persentase RS yang memiliki ijin operasional	100	100		
		Persentase penyehat tradisional terdaftar	58.9	62		
5	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100	100	9.875.755.448	14.821.881.446
		Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	52.35	55		
		Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	87.2	88		
		Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	25.9	28		
6	Program Pengadaan, Peningkatan &Perbaikan Sarana &Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskemas, Pustu, dan Ponkesdes			19.853.070.895	29.796.187.716
		Puskesmas :	59.4	62.5		
		Pustu :	60.8	60.8		
		Ponkesdes :	14.4			
	RSUD Ibnu Sina					

Capaian Kinerja Program Prior

No	Urusan/Program	Indikator Program	Baseline 2016	Tahun 2017		Tahun 2021
				Target	Anggaran	Anggaran
7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Persentase Patient Safety	-	100%	141.449.228.771	212.291.982.180
		Persentase Indikator SPM yang mencapai target	68,48%	70%		
		Persentase keluhan pasien (number of complain)	0,01%	<1%		
		Persentase pasien dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi	0,40%	2%		
		Persentase pasien pulang paksa	2,47%	3%		
		Persentase perolehan pasien baru (customer acquisition)	35%	35%		
		Persentase perolehan pasien lama (customer loyalty)	65%	70%		
		Persentase HAIS (Healthcare Associated Infection)	-	<1,5%		
		Persentase pemenuhan laporan keuangan	100%	100%		
		Sales Growth Rate (SGR)	18,57%	15%		
		Curent Rasio	128,21%	127%		
		Cash Rasio	91,21%	100%		
		Solvabilitas	13,28%	10%		
		Quick Rasio	107,17%	100%		
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	100%		
		Persentase kecukupan SDM berdasarkan katagori SDM	0,8	83%		
		Persentase elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit pendidikan	-	80,00%		
		Persentase Pasien yang terlayani	80%	82,50%		
		Persentase Pencapaian mutu untuk prioritas Rumah Sakit	55%	60,00%		
3	Infrastruktur Berkelanjutan				375.046.336.501	560.845.222.364
	Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				366.462.760.660	550.000.212.315
1	Program Peningkatan kualitas Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	71,7	72,2	190.368.732.916	285.712.096.185
		Persentase Jumlah jembatan dalam kondisi baik	64,71	65,51%		
2	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara	15,23	24,23%	18.893.931.181	28.356.677.067

Capaian Kinerja Program Prior

No	Urusan/Program	Indikator Program	Baseline 2016	Tahun 2017		Tahun 2021
				Target	Anggaran	Anggaran
3	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase kapasitas daya tampung air waduk kabupaten	63.86	66,36%	4.794.810.262	7.196.220.040
4	Program pengendalian banjir	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik	24,5	37%	44.742.208.417	67.150.681.517
5	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Persentase Panjang Saluran Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik	49.61	$(71.964 / 139.94) \times 100\% = 50,71\%$	21.599.085.690	32.416.668.187
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum	Persentase Pemenuhan Rumah Tangga yang Mengakses Air Bersih/minum non PDM dibanding Kebutuhan air bersih/minum non PDAM	65.95	$(247.889 / 366.554) \times 100\% = 67,63\%$	9.937.145.298	14.914.017.495
7	Program pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah strategis	Jumlah Infrastruktur yang dibangun	15 Lokasi	4 Lokasi	76.126.846.896	114.253.851.825
	Urusan Perhubungan				1.174.349.311	1.762.504.789
	Dinas Perhubungan					
8	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Tersedia sesuai Kebutuhan;	11	16	1.174.349.311	1.762.504.789
			28,95%	42,11%		
		Persentase Lokasi Parkir yang ditetapkan;	56	93		
			49,12%	81,58%		
	Urusan Lingkungan Hidup				7.409.226.529	9.082.505.260
	Dinas Lingkungan Hidup					

Capaian Kinerja Program Prior

No	Urusan/Program	Indikator Program	Baseline 2016	Tahun 2017		Tahun 2021
				Target	Anggaran	Anggaran
9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pengelolaan sampah	47%	50%	7.409.226.529	9.082.505.260
4	Pelayanan Publik				16.923.303.952	29.708.042.655
	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil				3.851.349.857	5.780.241.450
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan kependudukan yang memiliki SOP	100.00 %	100.00 %	2.927.951.210	4.394.372.253
2	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan inovasi Pelayanan	Jumlah SKPD yang memanfaatkan data administrasi kependudukan	3	3	923.398.646	1.385.869.196
		Persentase Arsip Akta Kependudukan yang dialihmediakan	16,23	27		
	Urusan Komunikasi dan Informatika				971.594.515	1.458.203.253
	Dinas Komunikasi dan Informatika					
3	Program Pengembangan E-Government	Persentase OPD yang dapat mengakses Wan dan Fiber Optik	100%	100%	971.594.515	1.458.203.253
		Kecepatan Akses internet untuk perkantoran Pemerintahan	150 Mbps	150Mbps		
		Persentase sistem informasi yang aktif	78,31	92,77		
		Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi informasi	76.29	76.40		
		Persentase Ketersediaan Pedoman Penyelenggaraan e-gov	N/a	33.33		
	Urusan Perencanaan				8.894.112.269	17.657.549.115

Capaian Kinerja Program Prior

No	Urusan/Program	Indikator Program	Baseline 2016	Tahun 2017		Tahun 2021
				Target	Anggaran	Anggaran
	Bappeda					
4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi	100%	100%	1.466.414.301	3.206.787.717
5	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	100%	100%	1.111.194.384	2.429.984.828
6	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	100%	100%	3.713.426.880	8.120.605.272
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum SKPD sesuai Petunjuk Teknis	100%	100%	2.603.076.704	3.900.171.298
		Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD	70%	75%		
	Urusan Penelitian dan Pengembangan				1.678.022.551	2.518.435.318
8	Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	1.333.254.214	2.000.994.861
9	Program Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	100%	100%	344.768.337	517.440.457
	Urusan Penanaman Modal				1.528.224.760	2.293.613.520
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP					
10	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Verifikasi izin realisasi investasi	75%	75%	1.528.224.760	2.293.613.520
5	Pengentasan Kemiskinan				37.949.492.578	60.988.685.294
	Urusan Pariwisata					
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
1	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Pelaku Usaha ekonomi kreatif yang dikembangkan	129 pelaku usaha	41%	376.852.839	565.594.007
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	6 destinasi	100%	922.247.538	1.384.141.572
	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					
3	Program Pengembangan Rumah Swadaya	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani	23,3	1,65	6.260.110.483	13.689.750.152

Capaian Kinerja Program Prior

No	Urusan/Program	Indikator Program	Baseline 2016	Tahun 2017		Tahun 2021
				Target	Anggaran	Anggaran
4	Program Pengelolaan Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani	0 Ha	1,59 (3 Ha)	8.310.147.356	12.472.161.705
	Urusan Tenaga Kerja					
	Dinas Tenaga Kerja					
5	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja berbasis Demand Driven	-45	318,18	2.428.538.440	3.644.835.986
		Persentase Peningkatan Kompetensi Santri dan Pencari Kerja berbasis Entrepreneurship	-50	300		
6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja	65	67,02	458.290.135	687.817.969
	Urusan Pertanian					
	Dinas Pertanian					
7	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan	Persentase Infrastruktur Pendukung pertanian dalam kondisi baik	17,65	19,45	4.763.813.616	7.149.699.183
8	Program Pemberdayaan Kelompok Tani	Persentase kelompok tani dengan klasifikasi utama sesuai permentan no 82 tahun 2013	0	0,18	631.241.905	773.799.788
9	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan	Persentase penyuluh bersertifikat	15,62	15,62	320.056.210	392.336.798
10	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase Stabilitas Harga Pangan Utama	94,27	86	514.635.921	772.383.707
		Persentase Keamanan Pangan Segar	68,75	73		
		Pola Pangan Harapan	90,7	90,75		
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat					
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat					
11	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	12,1 (40 LKDes)	24,02	681.321.381	1.022.551.114

Capaian Kinerja Program Prior

No	Urusan/Program	Indikator Program	Baseline 2016	Tahun 2017		Tahun 2021	
				Target	Anggaran	Anggaran	
12	Program Pengembangan Ekonomi desa	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) yang memiliki Kontribusi terhadap PADes	32,12	72,12	277.427.736	416.373.313	
		Persentase Pasar desa dalam kondisi baik	51,9	52			
		Pertumbuhan TTG yang dihasilkan oleh POKMAS dan/atau warga masyarakat	13,6	19			
	Urusan koperasi dan UMKM						
	Dinas Koperindag						
13	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase pertumbuhan volume usaha koperasi	3,16	3,68	800.401.947	1.201.271.419	
14	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	0,12	0,13	1.292.638.063	1.940.036.712	
	Urusan Perdagangan						
15	Program Peningkatan Pasar	Persentase stand Pasar kab yang dipelihara	5,18%	5,18%	1.247.345.359	1.872.059.827	
	Urusan Kelautan dan Perikanan						
	Dinas Perikanan						
16	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produktivitas perikanan budidaya (ton)	89.233,41	113.515	1.277.041.860	1.916.629.381	
		a. Air Payau					
		b. Air Tawar					
		Persentase yang saluran tambak yang direhabilitasi	19	23			
17	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton)	18.786	20.045	617.199.655	926.314.971	
		Persentase tempat pendaratan ikan yang direhabilitasi	25	50			
	Urusan Keluarga Berencana						
	Dinas KBPP						

Capaian Kinerja Program Prior

No	Urusan/Program	Indikator Program	Baseline 2016	Tahun 2017		Tahun 2021
				Target	Anggaran	Anggaran
18	Program Keluarga Berencana	Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB	9.38	10.25	1.303.019.834	1.955.618.039
19	Program Keluarga Sejahtera	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun;	0.56	1.0	4.054.429.227	6.085.030.118
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
20	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah	≥30	≥30	511.703.207	767.982.187
	Urusan Sosial					
	Dinas Sosial					
21	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS	4,44	4,73	901.029.868	1.352.297.346
Total Anggaran Program Prioritas 1					809.957.405.425	1.221.916.768.555

Capaian Kinerja Program Prior

No	Urusan/Program	Indikator Program	Baseline 2016	Tahun 2017	
				Target	Anggaran
1	Atribusi Pelayanan Pendidikan				115.263.950.135
	Urusan Pendidikan				115.263.950.135
	Dinas Pendidikan				
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;	93,93	94	44.216.312.435
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	105,00	105,50	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	92,75	92,75	
2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4	93,67	94	627.504.784
		Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi Kompetensi	N/a	54	
		Prosentase Jumlah Guru SMP memenuhi Kompetensi	N/a	50	
3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);	42,50	46,00	70.420.132.916
		Persentase Sarana dan prasarana SD sesuai SPM	50,00	51,00	
		Persentase Sarana dan prasarana SMP sesuai SPM	54,00	54,00	
2	Atribusi Pelayanan Kesehatan				264.774.322.259
	Urusan Kesehatan				264.774.322.259
	Dinas Kesehatan				
1	Program Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan nifas	91.75	92	20.470.753.950
		Cakupan pelayanan KN lengkap	94.46	95	
		Persentase balita gizi kurang	6.91	8	
		Cakupan pelayanan kesehatan remaja	82.24	83	
		Cakupan pelayanan kesehatan lansia	68.84	70	

Capaian Kinerja Program Prior

No	Urusan/Program	Indikator Program	Baseline 2016	Tahun 2017	
				Target	Anggaran
2	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	78.4	80	7.089.389.875
3	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	103.8	92	950.903.460
		Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	100	82	
		Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	3.89	5	
		Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR)	137.79	141	
		Insiden / Angka kesakitan DBD	65.24	56	
		Persentase kasus pemasangan yang ditangani	2.8	3	
4	Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional	Persentase puskesmas terakreditasi	34	65	65.085.219.860
		Persentase Pustu sesuai standar	37.8	47	
		Persentase Ponkesdes sesuai standar	54.2	58	
		Persentase klinik yang memiliki ijin operasional	100	100	
		Persentase RS yang memiliki ijin operasional	100	100	
		Persentase penyehat tradisional terdaftar	58.9	62	
5	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan minimal D3 Kesehatan yang Berijin	100	100	9.875.755.448
		Persentase Sarana Pengelolaan Makmin Memenuhi Syarat	52.35	55	
		Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan	87.2	88	
		Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya Sesuai Standar	25.9	28	
6	Program Pengadaan, Peningkatan &Perbaikan Sarana &Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskemas, Pustu, dan Ponkesdes			19.853.070.895
		Puskesmas :	59.4	62.5	
		Pustu :	60.8	60.8	
		Ponkesdes :	14.4		
	RSUD Ibnu Sina				

Capaian Kinerja Program Prior

No	Urusan/Program	Indikator Program	Baseline 2016	Tahun 2017	
				Target	Anggaran
7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Persentase Patient Safety	-	100%	141.449.228.771
		Persentase Indikator SPM yang mencapai target	68,48%	70%	
		Persentase keluhan pasien (number of complain)	0,01%	<1%	
		Persentase pasien dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi	0,40%	2%	
		Persentase pasien pulang paksa	2,47%	3%	
		Persentase perolehan pasien baru (customer acquisition)	35%	35%	
		Persentase perolehan pasien lama (customer loyalty)	65%	70%	
		Persentase HAIS (Healthcare Associated Infection)	-	<1,5%	
		Persentase pemenuhan laporan keuangan	100%	100%	
		Sales Growth Rate (SGR)	18,57%	15%	
		Curent Rasio	128,21%	127%	
		Cash Rasio	91,21%	100%	
		Solvabilitas	13,28%	10%	
		Quick Rasio	107,17%	100%	
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	100%	
		Persentase kecukupan SDM berdasarkan katagori SDM	0,8	83%	
		Persentase elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit pendidikan	-	80,00%	
		Persentase Pasien yang terlayani	80%	82,50%	
		Persentase Pencapaian mutu untuk prioritas Rumah Sakit	55%	60,00%	
3	Infrastruktur Berkelanjutan				375.046.336.501
	Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				366.462.760.660
1	Program Peningkatan kualitas Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	71,7	72,2	190.368.732.916
		Persentase Jumlah jembatan dalam kondisi baik	64,71	65,51%	
2	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara	15,23	24,23%	18.893.931.181

Capaian Kinerja Program Prior

No	Urusan/Program	Indikator Program	Baseline 2016	Tahun 2017	
				Target	Anggaran
3	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase kapasitas daya tampung air waduk kabupaten	63.86	66,36%	4.794.810.262
4	Program pengendalian banjir	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik	24,5	37%	44.742.208.417
5	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Persentase Panjang Saluran Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik	49.61	$(71.964 / 139.94) \times 100\% = 50,71\%$	21.599.085.690
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum	Persentase Pemenuhan Rumah Tangga yang Mengakses Air Bersih/minum non PDM dibanding Kebutuhan air bersih/minum non PDAM	65.95	$(247.889 / 366.554) \times 100\% = 67,63\%$	9.937.145.298
7	Program pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah strategis	Jumlah Infrastruktur yang dibangun	15 Lokasi	4 Lokasi	76.126.846.896
	Urusan Perhubungan				1.174.349.311
	Dinas Perhubungan				
8	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Tersedia sesuai Kebutuhan;	11	16	1.174.349.311
			28,95%	42,11%	
		Persentase Lokasi Parkir yang ditetapkan;	56	93	
			49,12%	81,58%	
	Urusan Lingkungan Hidup				7.409.226.529
	Dinas Lingkungan Hidup				

Capaian Kinerja Program Prior

No	Urusan/Program	Indikator Program	Baseline 2016	Tahun 2017	
				Target	Anggaran
9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pengelolaan sampah	47%	50%	7.409.226.529
4	Pelayanan Publik				16.923.303.952
	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil				3.851.349.857
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan kependudukan yang memiliki SOP	100.00 %	100.00 %	2.927.951.210
2	Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan inovasi Pelayanan	Jumlah SKPD yang memanfaatkan data adminstrasi kependudukan	3	3	923.398.646
		Persentase Arsip Akta Kependudukan yang dialihmediakan	16,23	27	
	Urusan Komunikasi dan Informatika				971.594.515
	Dinas Komunikasi dan Informatika				
3	Program Pengembangan E-Government	Persentase OPD yang dapat mengakses Wan dan Fiber Optik	100%	100%	971.594.515
		Kecepatan Akses internet untuk perkantoran Pemerintahan	150 Mbps	150Mbps	
		Persentase sistem informasi yang aktif	78,31	92,77	
		Persentase ASN yang memanfaatkan Teknologi informasi	76.29	76.40	
		Persentase Ketersediaan Pedoman Penyelenggaraan e-gov	N/a	33.33	
	Urusan Perencanaan				8.894.112.269

Capaian Kinerja Program Prior

No	Urusan/Program	Indikator Program	Baseline 2016	Tahun 2017	
				Target	Anggaran
	Bappeda				
4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi	100%	100%	1.466.414.301
5	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	100%	100%	1.111.194.384
6	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	100%	100%	3.713.426.880
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum SKPD sesuai Petunjuk Teknis	100%	100%	2.603.076.704
		Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD	70%	75%	
	Urusan Penelitian dan Pengembangan				1.678.022.551
8	Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	1.333.254.214
9	Program Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	100%	100%	344.768.337
	Urusan Penanaman Modal				1.528.224.760
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP				
10	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Verifikasi izin realisasi investasi	75%	75%	1.528.224.760
5	Pengentasan Kemiskinan				37.949.492.578
	Urusan Pariwisata				
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
1	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Pelaku Usaha ekonomi kreatif yang dikembangkan	129 pelaku usaha	41%	376.852.839
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	6 destinasi	100%	922.247.538
	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				
3	Program Pengembangan Rumah Swadaya	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani	23,3	1,65	6.260.110.483

Capaian Kinerja Program Prior

No	Urusan/Program	Indikator Program	Baseline 2016	Tahun 2017	
				Target	Anggaran
4	Program Pengelolaan Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang ditangani	0 Ha	1,59 (3 Ha)	8.310.147.356
	Urusan Tenaga Kerja				
	Dinas Tenaga Kerja				
5	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja berbasis Demand Driven	-45	318,18	2.428.538.440
		Persentase Peningkatan Kompetensi Santri dan Pencari Kerja berbasis Entrepreneurship	-50	300	
6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja	65	67,02	458.290.135
	Urusan Pertanian				
	Dinas Pertanian				
7	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan	Persentase Infrastruktur Pendukung pertanian dalam kondisi baik	17,65	19,45	4.763.813.616
8	Program Pemberdayaan Kelompok Tani	Persentase kelompok tani dengan klasifikasi utama sesuai permentan no 82 tahun 2013	0	0,18	631.241.905
9	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan	Persentase penyuluh bersertifikat	15,62	15,62	320.056.210
10	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase Stabilitas Harga Pangan Utama	94,27	86	514.635.921
		Persentase Keamanan Pangan Segar	68,75	73	
		Pola Pangan Harapan	90,7	90,75	
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat				
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat				
11	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	12,1 (40 LKDes)	24,02	681.321.381

Capaian Kinerja Program Prior

No	Urusan/Program	Indikator Program	Baseline 2016	Tahun 2017	
				Target	Anggaran
12	Program Pengembangan Ekonomi desa	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) yang memiliki Kontribusi terhadap PADes	32,12	72,12	277.427.736
		Persentase Pasar desa dalam kondisi baik	51,9	52	
		Pertumbuhan TTG yang dihasilkan oleh POKMAS dan/atau warga masyarakat	13,6	19	
	Urusan koperasi dan UMKM				
	Dinas Koperindag				
13	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase pertumbuhan volume usaha koperasi	3,16	3,68	800.401.947
14	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	0,12	0,13	1.292.638.063
	Urusan Perdagangan				
15	Program Peningkatan Pasar	Persentase stand Pasar kab yang dipelihara	5,18%	5,18%	1.247.345.359
	Urusan Kelautan dan Perikanan				
	Dinas Perikanan				
16	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produktivitas perikanan budidaya (ton)	89.233,41	113.515	1.277.041.860
		a. Air Payau			
		b. Air Tawar			
		Persentase yang saluran tambak yang direhabilitasi	19	23	
17	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton)	18.786	20.045	617.199.655
		Persentase tempat pendaratan ikan yang direhabilitasi	25	50	
	Urusan Keluarga Berencana				
	Dinas KBPP				

Capaian Kinerja Program Prior

No	Urusan/Program	Indikator Program	Baseline 2016	Tahun 2017	
				Target	Anggaran
18	Program Keluarga Berencana	Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB	9,38	10,25	1.303.019.834
19	Program Keluarga Sejahtera	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun;	0,56	1,0	4.054.429.227
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
20	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah	≥30	≥30	511.703.207
	Urusan Sosial				
	Dinas Sosial				
21	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS	4,44	4,73	901.029.868
Total Anggaran Program Prioritas 1					809.957.405.425

Bab IX

Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Secara general, penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara substansial, Indikator Kinerja ditelaah berdasarkan 3 (tiga) analisis yaitu;

- a. **Indikator Kinerja Daerah** sebagai pengukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah khususnya dalam memenuhi aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
- b. **Indikator Kinerja Utama** (Permenpan No 9 Tahun 2007) sebagai pengukuran keberhasilan pencapaian dari tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan serta mengacu pada tugas fungsi utama yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya.
- c. **Indikator Kinerja Kunci** sebagai pengukuran keberhasilan penyelenggaraan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Indikator ini berlandaskan pada standar pelayanan minimal pada urusan wajib pelayanan dasar dan standar ukuran tertentu pada urusan wajib non pelayanan dasar, pilihan, dan urusan penunjang.

Berdasarkan telaah di atas, RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebagai perencanaan strategis merumuskan indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode 5 (lima) tahun ke depan. Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Kualitas indikator kinerja ditentukan oleh validitas indikator kinerja serta keterkaitan indikator kinerja tersebut dengan tujuan pembangunan. Tingkat validitas indikator kinerja dibagi menjadi :

- a. *Exact* : ukuran yang ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran

strategis yang diharapkan

- b. *Proxy* : indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut
- c. *Activity* : indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya, dan waktu dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran strategis yang bersangkutan

Dalam konteks pencapaian program maka indikator kinerja masing-masing program dapat dipisahkan antara *lagging indicators* dan *leading indicators*. **Lagging indicators** adalah tolak ukur kinerja sebagai akibat atau hasil dari serangkaian tindakan lain. Adapun **leading indicators** adalah kinerja yang memicu tercapainya hasil. Suatu indikator di perspektif paling atas adalah hasil (*outcome measures*) bagi indikator kinerja dari perspektif-perspektif yang ada dibawahnya (*performance drivers*).

Adapun ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode 2016 2021 ditetapkan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Daerah sebagaimana berikut:

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	B a s e l i n e	Target						Penelaah Kembali Tujuan RPJMD		b a s e l i n e 2 0 1 6	Target Penelaahan Kembali				
	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama Penelaahan Kembali		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah.	Nilai Peduli HAM	75,29	77	78	79	80	81	82	Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik.	Nilai Peduli HAM	90*regulasi baru	>75	>75	>75	>75	>75
2	Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha;	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	N / A	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	62,7	>60	>70	>70	>80	>80
												1B	70B	80	80	90A	90A

3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif	Indeks Reformasi Birokrasi	N / A	B	B	B	B	B	B					B B	B B		
		Nilai Opini BPK	W D P	W T P	W T P	W T P	W T P	W T P	W T P								
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah.	Pertumbuhan Ekonomi	6.15	6.15	6.30	6.45	6.60	6.75	6.90	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	5.92	> 5.92	> 6.05	> 6.15	> 6.25	> 6.35
				6.65	6.85	6.95	7.1	7.25	7.45		Laju Inflasi	3.01	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%	

5	Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,47	57.5-64.8	59.5-66	61.5-68.2	66.5-70.4	68.5-72.6	70.5-74.8	Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58.30	59.5-66	61.5-68.2	66.5-70.4	68.5-72.6	70.5-74.8
6	Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.67%	5.67-5.35%	5.50-5.20%	5.35-4.90%	5.05-4.75%	4.90-4.60%	4.90-4.60%	Mewujudkan penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Tingkat Kemiskinan	13.19%	13.25-12.25%	12.75-11.75%	12.25-11.25%	11.75-10.75%	11.25-10.25%

7	Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2014 sebelum sarl 3,42 %	13,25 - 12,25 %	12,75 - 11,75 %	12,25 - 11,25 %	11,75 - 10,75 %	11,25 - 10,25 %	10,75 - 9,50 %								
8	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	76,75	76,75 - 73,5	77,05 - 77,5	77,35 - 78,5	77,65 - 79,15	77,95 - 79,5	78,25 - 80,5	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	74,46 * metode baru	75 - 76	76 - 77	77 - 78	79 - 80	80 - 81

9	Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Tahun 2014	89.02	89.38	89.02	89.05	90.29	90.11	Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	89.31	89.38	89.02	89.05	90.29	90.11

Tabel 9.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017	2018	2019	2020	2021

1	Nilai Peduli HAM	90* regulasi baru	>75	>75	>75	>75	>75
2	Indeks Reformasi Birokrasi	62.71 B	>60-70 B	>70-80 BB	>70-80 BB	>80-90 A	>80-90 A
3	Pertumbuhan Ekonomi	5.92	>5.9-6.25	>6.0-6.35	>6.1-6.45	>6.2-6.55	>6.3-6.65
4	Laju Inflasi	3.01	3-4%	3-4%	3-4%	3-4%	3-4%
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58.30	59.5-66	61.5-68.2	66.5-70.4	68.5-72.6	70.5-74.8
6	Tingkat Kemiskinan	13.19%	13,25-12,25%	12.75 - 11.75%	12.25 - 11.25%	11.75 - 10.75%	11.25 - 10.25%
7	Indeks Pembangunan Manusia	74.46* metode baru	75-76	76-77	77-78	79-80	80-81
8	Indeks Pembangunan Gender	89.31	89.3-89.9	89.6-90.2	89.9-90.5	90.2-90.8	90.5-91.1

II. Aspek Pelayanan Umum							
No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar						

	Urusan Pendidikan						
	APM SD dan Sederajat	98.62%	98.96%	99.02%	99.10%	99.15%	99.20%
	APM SMP sederajat;	86.04%	86.80%	86.83%	86.99%	87.10%	87.23%
	Angka Harapan Rata rata lama sekolah	9.2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7
	Urusan Kesehatan						
	Angka Usia Harapan Hidup	72 Tahun	72,2	72,4	72,6	72,8	73
	Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang						
	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	Dari 512,16 km jalan kabupaten, 426,68 km dalam kondisi mantap (83,31%)	419 km Jalan (81,81%)	83,31 % Jalan	84,81% Jalan	86,11% Jalan	87,21 % Jalan
	Persentase Akses Air Bersih/Minum	61,95%	75.95%	85.95%	100%	100%	100%
	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	12,15 ha Dari 181.92 ha menjadi 169.42 ha 93%	88% (10 ha)	79% (15 ha)	63% (30 ha)	41% (40 ha)	19% (40 ha)
	Persentase Rumah Layak Huni	85,94	85,75%	85,86%	85,97%	86,08%	86,19%
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, & Pelindungan Masyarakat						
	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	Menurun 20,5%	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%

	Persentase Penanganan Bencana	Tahun 2016 sebanyak 99 Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
	Urusan Sosial						
	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	5.44%	4,5-5%	4,7-5,2%	4,9-5,4%	5,1-5,6%	5,3-5,8%
2	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
	Urusan Tenaga Kerja						
	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,67%	5.50-5.20%	5.35-5.05%	5.20-4.90%	5.05-4.75%	4.90-4.60%
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,79	62.75-63.25	63.00-63.50	63.25-63.75	63.50-64.00	63.75-64..25
	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap P2TP2A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai Kabupaten Layak Anak	624	650-700	700-775	775-850	850-925	925-1000
	Urusan Pangan						
	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	202.21 Kg/Kpt/Thn	194 Kg/Kpt/Thn	194 Kg/Kpt/Thn	194 Kg/Kpt/Thn	194 Kg/Kpt/Thn	194 Kg/Kpt/Thn
	Urusan Keluarga Berencana						
	Angka laju pertumbuhan penduduk	1.18	0.6-1..4	0.6-1..4	0.6-1..4	0.6-1..4	0.6-1..4
	Urusan Lingkungan Hidup						
	Indeks Kualitas Air Sungai	49.01	51.5-55.75	55.75-60	60-64.3	64.3-68	68-72.5

	Indeks Kualitas Udara	68	75-79	79-83	83-87,5	87,5-90	90--93.5
	Indeks Tutupan Lahan	Rasio Kawasan lindung 21.670 ha dibanding luas wilayah 119.125 ha (18,19%)	18,19%	18,19%	18,19%	18,19%	18,19%
	Urusan Kependudukan Urusan Kearsipan Urusan Kecamatan						
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	76.90 Baik	78-82	80-84	82-86	84-88	86-90
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Indeks Desa Membangun	0,6208	0,6225	0,6250	0,675	0,700	0,725
	Urusan Perhubungan						
	Angka Kecelakaan Angkutan Umum	787 kecelakaan 526.093 angkutan 0.15%	0,14%	0,13%	0,12%	0,11%	0,10%
	Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan Statistik						
	Indeks e-Government	Tahun 2015 2.87	2.90-3.00	2.95-3.05	3.00-3.10	3.05-3.15	3.10-3.20
	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro						
	Pertumbuhan Kumulatif Usaha Mikro	1,89% (192.091)	0,66% (189.780)	0,99% (190.407)	1,33% (191.035)	1,66% (191.665)	2.00% (192.298)
	Pertumbuhan Koperasi sehat	298	3,62% (315)	5,26% (320)	6,91% (325)	8,55% (330)	10,20% (335)
	Penanaman Modal Pertanahan						
	Pertumbuhan Realisasi Investasi	36% (31.95 T)	24,12% (Rp.31,45 T)	51,17% (Rp35,45T)	68.23% (Rp39,45T)	85,29% (Rp.43,45 T)	104,69% (Rp.48T)

	Urusan Kepemudaan dan Olahraga						
	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	90,5 % Dari 768 pemuda yang dibina,695 pemuda meraih prestasi	92%	94%	96%	98%	100%
	Urusan Kebudayaan						
	Persentase Cagar Budaya yang dilaestarkan	100%18 Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Fokus Layanan Urusan Pilihan						
	Urusan Kelautan dan Perikanan						
	Nilai Tukar Nelayan	111,56	111,75	112,00	112,25	112,50	112,75
	Urusan Pariwisata						
	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Peningkatan wisatawan meliputi 4.974 Wisatawan Mancanegaradan 3.258.126 Wisatawan Dalam Negeri 5,01%	5,5-6,5%	6,0-7,0%	6,5-7,5%	7,0-8,0%	7,5-8,5%
	Urusan Pertanian						
	Nilai Tukar Petani	108,72	108,92	109,12	109,32	109,42	109,62
	Urusan Perdagangan						
	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	12,97% 170.910.371 (US \$)	5% (1.383.756,74)	13,4% (1.494.457.28)	24,74% (1.643.903)	40.96% (1.857.610,40)	53,41% (2.021.750,42)
	Urusan Perindustrian						

	Pertumbuhan Komulatif IKM	7086 IKM (0.71%)	1,42% (7136)	2,13% (7186)	2,84% (7236)	3,55% (7286)	4,26% (7336)
II. Aspek Pelayanan Umum							
No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Fokus Layanan Urusan Penunjang						
	Urusan Perencanaan Urusan Penelitian dan Pengembangan						
	Nilai Pangripta	B	B	B	A	A	A
	Urusan Pengawasan						
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Urusan Sekretariat Daerah						
	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	CC	B	BB	A	A	AA
	Urusan Kepegawaian						
	Indeks Profesionalitas ASN	75,8	76	77	80	81	82
	Urusan Keuangan						
	Rasio Kemandirian Fiskal	Pendapatan Asli Daerah 715,5 M disbanding Dana Perimbangan 1,33 Trilyun 53,5%	55%	57%	59%	61%	62%

III. Aspek Daya Saing Daerah							
No	Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Base Line 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai Peduli HAM	90* regulasi baru	>75	>75	>75	>75	>75
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	62.71 B	>60-70 B	>70-80 BB	>70-80 BB	>80-90 A	>80-90 A
3.	Pertumbuhan Ekonomi	5.92	>5.9-6.25	>6.0-6.35	>6.1-6.45	>6.2-6.55	>6.3-6.65
4.	Laju Inflasi	3.01	3-4%	3-4%	3-4%	3-4%	3-4%
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58.30	59.5-66	61.5-68.2	66.5-70.4	68.5-72.6	70.5-74.8
6.	Tingkat Kemiskinan	13.19%	13,25-12,25%	12.75 - 11.75%	12.25 - 11.25%	11.75 - 10.75%	11.25 - 10.25%
7.	Indeks Pembangunan Manusia	74.46* metode baru	75-76	76-77	77-78	79-80	80-81
8.	Indeks Pembangunan Gender	89.31	89.3-89.9	89.6-90.2	89.9-90.5	90.2-90.8	90.5-91.1
9.	Pertumbuhan Realisasi Investasi	36% (31.95 T)	24,12% (Rp.31,45 T)	51,17% (Rp35,45T)	68.23% (Rp39,45T)	85,29% (Rp.43,45 T)	104,69% (Rp.48T)

10.	Rasio Kemandirian Fiskal	Pendapatan Asli Daerah 715,5 M disbanding Dana Perimbangan 1,33 Trilyun 53,5%	55%	57%	59%	61%	62%
11.	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	12,97% 170.910.371 (US \$)	5% (1.383.756,74)	13,4% (1.494.457.28)	24,74% (1.643.903)	40.96% (1.857.610,40)	53,41% (2.021.750,42)
12.	Indeks e-Government	Tahun 2015 2.87	2.90-3.00	2.95-3.05	3.00-3.10	3.05-3.15	3.10-3.20
13.	Indeks Desa Membangun	0,6208	0,6225	0,6250	0,675	0,700	0,725
14.	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	Dari 512,16 km jalan kabupaten, 426,68 km dalam kondisi mantap (83,31%)	419 km Jalan (81,81%)	83,31 % Jalan	84,81% Jalan	86,11% Jalan	87,21 % Jalan
15.	Persentase Akses Air Bersih/Minum	61,95%	55,95%	65.95%	75.95%	85.95%	100%
16.	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17.	Pertumbuhan Komulatif IKM	7086 IKM (0.71%)	1,42% (7136)	2,13% (7186)	2,84% (7236)	3,55% (7286)	4,26% (7336)
18.	Pertumbuhan Komulatif Usaha Mikro	1,89% (192.091)	0,66% (189.780)	0,99% (190.407)	1,33% (191.035)	1,66% (191.665)	2.00% (192.298)
19.	Pertumbuhan Koperasi sehat	298	3,62% (315)	5,26% (320)	6,91% (325)	8,55% (330)	10,20% (335)
20.	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Peningkatan wisatawan meliputi 4.974 Wisatawan Mancanegaradan 3.258.126	5,5-6,5%	6,0-7,0%	6,5-7,5%	7,0-8,0%	7,5-8,5%

		Wisatawan Dalam Negeri 5,01%					

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Gresik lima tahun ke depan, Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

10.1. Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk Tahun 2017 hingga Tahun 2021. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, perlu disusun RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2022 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 serta memperhatikan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik 2016-2021 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bupati Gresik berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 kepada masyarakat;
- b. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 pasca penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 ini;
- c. Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;
- d. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya, dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2016-2021;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, yang dimulai Tahun 2016.